INVENTARIS ARSIP

SEKRETARIAT NEGARA

KABINET PERDANA MENTERI

TAHUN 1950-1959

JILID II

DIREKTORAT PENGOLAHAN
DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 2012

KATA PENGANTAR

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Pengelolaan arsip statis oleh ANRI ditujukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip statis yang dikelola oleh ANRI merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta sumber informasi publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pengelolaan arsip statis, maka khazanah arsip statis yang tersimpan di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan sehingga arsip statis dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pengolahan khazanah arsip statis setelah tahun 1945, Direktorat Pengolahan ANRI pada tahun anggaran 2012 melaksanakan Penyusunan Inventaris Arsip Sekretariat Negara pada masa Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959 jilid II yang merupakan kelanjutan kegiatan pengolahan arsip setneg dari tahun sebelumnya.

Kami menyadari inventaris arsip ini masih belum sempurna. Namun, setidaknya inventaris arsip ini sudah dapat digunakan sebagai *finding aid* untuk mengakses, menelusuri, dan menemukan arsip statis pada masa Kabinet

Perdana Menteri tahun 1950 - 1959 yang tersimpan di ANRI dalam rangka pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip (*user*).

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan ANRI, anggota tim dan semua pihak yang telah membantu penyusunan inventaris arsip ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sdr berikan. Amin.

Jakarta, Desember 2012

Direktur Pengolahan

Azmi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
PENDAHULUAN vii
A. Sejarah Organisasi Sekretariat Negara vii
1. Sekretariat Negara Periode Awal Kemerdekaan (1945 – 1949) ……..…vii
2. Sekretariat Negara Periode Republik Indonesia Serikat (1949-1950)…….....ix
3. Sekretariat Negara Periode Demokrasi Liberal (1950-1959)……ix
4. Sekretariat Negara Periode Demokrasi Terpimpin (1960-1966)……...x
5. Sekretariat Negara Periode Demokrasi Pancasila hingga Reformasi (1966-sekarang)…….……..……....xi
B. Organisasi Sekretariat Negara Pada Masa Kabinet Perdana Menteri.....xiii
C. Sejarah Arsip Sekretariat Negara Pada Masa Kabinet Perdana Menteri... xvi
D. Teknis Penyusunan Inventaris dan Pengaturan Arsip Sekretariat Negara Pada Masa Kabinet Perdana Menteri xvii
DAFTAR PUSTAKA xxvi
URAIAN DESKRIPSI ARSIP 1
A. UMUM 1
1. ADMINISTRASI 1
a. Agenda.....1
b. Ekspedisi.....1
2. KEPEGAWAIAN 1
a. Pengadaan Pegawai 1
b. Pengembangan Pegawai 2
c. Pengangkatan Pegawai 3

d. Mutasi dan Kenaikan Pangkat 5
e. Cuti dan Izin Pegawai 7
f. Perjalanan Dinas 8
g. Personal File 9
h. Pemberhentian Pegawai 13
i. Serikat Sekerja Pegawai 14
3. KEUANGAN 17
a. Perbendaharaan 17
1) Biaya/Ongkos 17
2) Otorisasi 21
3) Anggaran 25
4) Ganti Rugi dan Hutang 27
5) Gaji Pegawai 31
b. Pembukuan/Pemeriksaan 39
1) Pembukuan 39
2) Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) 45
4. PERALATAN DAN KENDARAAN 47
a. Peralatan dan Gedung 47
b. Kendaraan 51
5. KESEJAHTERAAN PEGAWAI 52
a. Tunjangan 52
b. Koperasi 55
c. Dana Kesejahteraan 56
d. Perkumpulan Pegawai 57
e. Perumahan 57
f. Tanda Jasa/Penghargaan 59
6. KEHUMASAN/KEPROTOKOLAN 60

B. KHUSUS 63
1. KEAMANAN 63
a. Gangguan Keamanan 63
b. Hukum 75
c. Peralatan Keamanan 83
d. Pertahanan 84
e. Anggota Kemiliteran 98

2. POLITIK 105
a. Pemerintah Pusat 105
b. Pemerintahan Daerah 124
c. Organisasi Sosial dan Politik 140
d. Pemilihan Umum 155
e. Irian Barat 159
f. Hubungan Luar Negeri 163
g. Pengaturan Bangsa Asing 174
h. Penerbitan 180
i. Hari Besar 187
3. EKONOMI DAN KEUANGAN 189
a. Bea Cukai dan Perpajakan 189
b. Perdagangan dan Industri 191
c. Agraria (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan) 204
d. Perbankan 212
e. Hubungan Ekonomi Luar Negeri 216
f. Bantuan Luar Negeri 221
g. Kebijaksanaan Keuangan 223
h. Perhubungan dan Telekomunikasi 226

4. SOSIAL 237
a. Perburuhan/Tenaga Kerja 237
b. Agama 251
c. Pendidikan, Teknologi dan Kebudayaan 255
d. Kesehatan 262
e. Bantuan Sosial 266
f. Transmigrasi dan Pembangunan Masyarakat Desa 268
5. PARLEMEN 274
a. Penyelesaian Perundang-undangan 274
b. Mosi dan Interpelasi 311
c. Risalah DPR dan Konstituante 336
LAMPIRAN-LAMPIRAN
a. Daftar Indeks Nama 346
b. Daftar Indeks Wilayah 372
c. Daftar Singkatan 385

PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan, pembentukan lembaga-lembaga negara untuk menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting, salah satunya adalah Sekretariat Negara (Setneg). Lembaga ini menjadi bagian dalam struktur kabinet yang mempunyai fungsi membantu tugas sehari-hari presiden dan wakil presiden dalam hal administrasi pemerintahan. Di dalam perjalanan sejarah Indonesia, Setneg mengalami banyak perubahan baik dari segi struktur kelembagaan maupun tugas dan fungsinya.

Perubahan yang terjadi dalam Setneg salah satunya dipengaruhi oleh konstelasi politik yang terjadi di tanah air, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Inventaris arsip ini berisi tentang daftar arsip yang tercipta dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan negara pada masa Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959.

A. Sejarah Organisasi Sekretariat Negara

1. Sekretariat Negara Periode Awal Kemerdekaan (1945-1949)

Pada pembentukan kabinet pertama, Presiden Soekarno mengangkat Mr. Raden Mas Abdoel Gafar Pringgodigdo sebagai sekretaris negara pada tanggal 2 September 1945. Struktur organisasi Setneg pada masa itu masih sangat sederhana. Tugas pokok Setneg adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Di dalam menjalankan tugasnya sekretaris negara dibantu oleh 2 orang pembantu, yaitu wakil sekretaris negara I dan II. Tugas wakil sekretaris negara I adalah mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan keprotokolan (rumah tangga istana-istana), menyiapkan rapat-rapat dan sidang-sidang kabinet. Wakil sekretaris negara II bertugas mengelola tata administrasi pemerintahan antara lain,

menyiapkan rencana undang-undang serta menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.[1]

Pada 14 November 1945 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlemanter. Presiden bertindak sebagai kepala negara, sementara itu perdana menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Setneg mendapat tambahan tugas baru, yaitu menjadi penghubung antara presiden dengan perdana menteri. Selain itu, Setneg juga memiliki dua fungsi penting. Pertama, sebagai penghubung/perantara bagi instansi, lembaga ataupun perseorangan dalam menyampaikan aspirasi/saran ataupun hal penting lainnya yang ditujukan pada pemerintah. Kedua, mendokumentasikan serta mengumpulkan surat-surat penting serta menyebarluaskan informasi tentang penetapan, peraturan atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh presiden ataupun pejabat pemerintah lainnya.[2]

Struktur Sekretariat Negara RI pada awal kemerdekaan

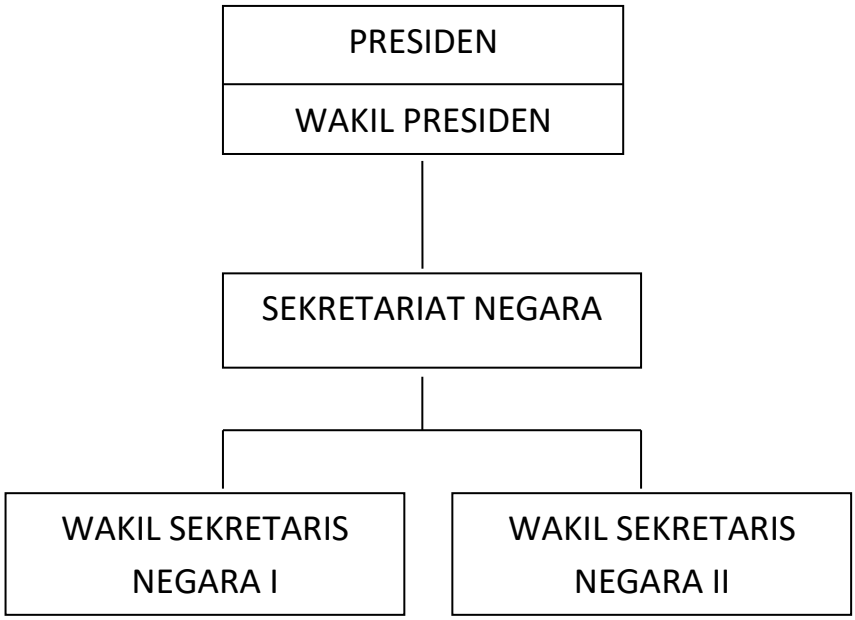

[1]Wahid Salim, *et.al., Sekretariat Negara Republik Indonesia dari Masa Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009), hlm. 47.

[2]*Ibid*., hlm. 15

2. Sekretariat Negara Periode Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Pada 28 Desember 1949, presiden dan pejabat-pejabat lainnya pindah kembali ke Jakarta dari Yogyakarta. Mr. A.G. Pringgodigdo digantikan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo menjadi sekretaris negara (1950-1957). Pada periode ini nama Setneg diganti menjadi Kabinet Presiden yang dipimpin oleh Direktur Kabinet Presiden. Tugas-tugas yang dijalankan Kabinet Presiden sama dengan Setneg sebelumnya.[3]

Pada masa RIS, terjadi sedikit perubahan dalam struktur organisasi Sekretariat Negara dengan membentuk suatu unit yaitu Sekretariat Wakil Presiden yang berfungsi menunjang dan melancarkan tugas wakil presiden. Secara teknis operasional unit ini bertanggung jawab kepada wakil presiden, tetapi secara administratif berada di bawah koordinasi Kabinet Presiden. Adapun organisasi Sekretariat Wakil Presiden hanya terdiri atas bagian administrasi dan keuangan.[4]

3. Sekretariat Negara Periode Demokrasi Liberal (1950-1959)

Pada masa ini Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan dari sebelumnya negara serikat dan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Di dalam UUDS 1950, Indonesia menganut sistem Demokrasi Parlementer dan juga dikenal sebagai masa Demokrasi Liberal (1950-1959). Pada periode ini pemerintahan diwarnai dengan ketidakstabilan dalam bidang politik dan keamanan. Sistem politik liberal dengan multipartai yang menghadirkan sistem koalisi

[3]Inventaris Arsip Kabinet Presiden tahun 1950-1959, No. 2352, ANRI.
[4]*Ibid*.

dan oposisi, membuat kabinet sulit untuk mempertahankan pemerintahannya. Berikut ini kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959)[5] :

- Kabinet Natsir (21 September 1950 – 27 April 1951)
- Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 03 April 1952)
- Kabinet Wilopo (03 April 1952 – 01 Agustus 1953)
- Kabinet Ali Sastroamidjojo I (01 Agustus 1953 – 12 Agustus 1955)
- Kabinet Burhanuddin harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 – 09 April 1957)
- Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) (09 April 1957-10 Juli 1959).

Setneg pada periode ini tetap dengan nama Kabinet Presiden yang dipimpin oleh Direktur Kabinet Presiden. Adapun tugas-tugas dari Kabinet Presiden berhubungan dengan kegiatan presiden sebagai kepala negara, antara lain: menangani surat-surat presiden untuk urusan sipil, mengorganisir upacara-upacara kenegaraan, mengatur perjalanan dan keuangan presiden, mengatur hubungan presiden dengan pers, radio dan televisi, serta mengurus kebutuhan pribadi presiden dan keluarganya. Pada periode ini dibentuk organisasi baru yaitu Kabinet Perdana Menteri yang bertugas memberikan dukungan staf serta administrasi kepada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.[6]

4. Sekretariat Negara Periode Demokrasi Terpimpin (1960-1966)

Kegagalan Badan Konstituante dalam merumuskan UUD yang baru untuk menggantikan UUDS 1950 serta meningkatnya gerakan separatisme di daerah, 'memaksa' Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. [7] Keputusan

---

[5]Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 251

[6]Salim, *op.cit*., hlm. 49

[7]Mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945" lihat *Lembaran-Negara Republik Indonesia*, No. 75, 1959

penting dari Dekrit itu adalah pembubaran Badan Konstituante dan diberlakukannya kembali UUD 1945. Dekrit tersebut juga menandakan babak baru dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin yang menggantikan Demokrasi Parlementer.

Perubahan ketatanegaraan tersebut berpengaruh pula terhadap perubahan Setneg. Di dalam perkembangan peralihan sistem pemerintahan ke UUD 1945 terjadi perubahan-perubahan status atas organisasi Kabinet Presiden dan Kabinet Perdana Menteri. Melalui Keputusan Presiden No. 221 tahun 1960 ditetapkan penghapusan Kabinet Presiden dan pengembalian nama Sekretariat Negara.[8] Sementara itu Kabinet Perdana Menteri diubah menjadi Kabinet Menteri Pertama.[9] Perubahan lainnya yaitu kedudukan Sekretariat Negara yang menjadi sejajar dengan kementerian dan berada langsung di bawah Presiden.[10]

5. Sekretariat Negara Periode Demokrasi Pancasila hingga Reformasi (1966-sekarang)

Pada 20 Februari 1967, Presiden Soekarno mengumumkan penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto yang selanjutnya dilantik sebagai Pejabat Presiden RI berdasarkan Ketetapan MPRS No: XXXIII/MPRS/1967. Pada 15 April 1967 Pejabat Presiden Soeharto menetapkan susunan organisasi Setneg berdasarkan Keputusan Presiden No. 53 tahun 1967 tentang Susunan Organisasi dan Pembagian Kerja Sekretariat Negara, dinyatakan bahwa:[11]

---

[8]*Lembaran-Negara Republik Indonesia*, 1960.

[9]Mengenai pengangkatan menteri pertama dan susunan kabinet lihat Keputusan Presiden RI No. 153 tahun 1959 lihat juga Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.140/M.P./1962 tentang Pembagian Kabinet Presiden, Sekretariat Militer Presiden dan Biro-Biro dalam Sekretariat Negara.

[10]Salim, *op.cit*., hlm. 52

[11]*Lembaran-Negara Republik Indonesia*, 1967.

1) Sekretariat Negara bertugas membantu Presiden RI/Pimpinan Tertinggi ABRI dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dengan penyelenggaraan administrasi kenegaraan dan pemerintahan dalam arti luas;
2) Sekretaris Negara berada di bawah Presiden dan dalam menjalankan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Presiden;
3) Sekretaris Negara terdiri dari tiga Sekretariat yaitu: (a) Sekretariat Presidium Kabinet atau Sekretariat Kabinet, (b) Sekretariat Kepresidenan dan (c) Sekretariat Urusan Militer.

Selanjutnya terjadi beberapa kali perubahan struktur organisasi pada Setneg. Perubahan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan peranan Setneg untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perubahan yang terakhir didasarkan pada Keputusan Presiden No. 31 tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. [12]

Setneg dan Sekretariat Kabinet (Sekab) adalah lembaga pemerintah yang masing-masing dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setneg mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden. Sedangkan Sekab mempunyai tugas memberikan dukungan dan administrasi, serta analisis kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.

[12] *Online* www.depdagri.go.id/media/.../2005/04/19/Perpres-No.31-2005.doc ditelusuri pada 7 Agustus 2011.

B. Organisasi Sekretariat Negara Pada Masa Kabinet Perdana Menteri [13]

Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri dipimpin oleh seorang sekretaris dengan tugas menyelenggarakan segala hal-hal administratif yang diperlukan oleh perdana menteri/wakil perdana menteri dalam melaksanakan tugasnya. Tugas-tugas perdana menteri antara lain:

1) Perdana menteri/wakil perdana menteri sebagai pemimpin pemerintahan;
2) Perdana menteri/wakil perdana menteri sebagai menteri yang bertanggung jawab atas badan-badan, dewan-dewan dan panitia .
3) Perdana menteri sebagai ketua Dewan Menteri

Adapun badan-badan yang dimaksud dalam poin 2 di atas yaitu:

1) Kepolisian Negara
2) Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional
3) Biro Perancang Negara
4) Jawatan Sandi
5) Dewan dan Kantor Urusan Kerugian Perang
6) Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar negeri
7) Panitia-panitia negara:
    a. Peninjauan tarif Listrik
    b. Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas
    c. Urusan Irian
    d. Perbaikan Makanan
    e. Urusan Pertambangan
    f. Untuk Menyelidiki Organisasi Pemerintah
8) Dewan Ekonomi-Keuangan
9) Dewan Pertahanan

[13]Inventaris Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959, No 41, ANRI.

Untuk menunjang tugas-tugas Perdana Menteri tersebut, Kabinet Perdana Menteri mempunyai bagian-bagian sebagai berikut:

1) Bagian Sekretariat, dengan seksi-seksi sebagai berikut:
    a. Seksi Arsip dan Agenda
    b. Seksi Tik dan Stensil
    c. Seksi Ekspedisi
2) Bagian Urusan Keamanan

    Menyelenggarakan penyelesaian soal keamanan pada umumnya termasuk dalam urusan Staf "K" Pusat, Kepolisian Negara, Biro Rekonstruksi Nasional dan Dewan Pertahanan.
3) Bagian Politik/dan Dokumentasi

    Bertugas menyelami keadaan politik yang menentukan pada kebijakan-kebijakan politik-polisionil Perdana Menteri pada khususnya.
4) Bagian Hubungan Luar Negeri dan Sosial

    Bertugas menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan urusan sosial, perburuhan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, kesehatan serta agama.
5) Bagian Urusan Ekonomi Keuangan

    Menyelenggarakan penyelesaian soal-soal yang berhubungan dengan ekonomi-keuangan serta Dewan dan Biro Perancang Negara.
6) Bagian Umum

    Bertugas mengurus soal kepegawaian, keuangan, rumah tangga (peralatan, tata-tertib dan kendaraan)
7) Bagian Urusan Parlemen

    Bertugas mengurus segala soal yang berkenaan dengan hubungan antara DPR dengan pemerintah pada umumnya dan dengan Perdana Menteri pada khususnya.

8) Bagian Urusan Persiapan & Perlengkapan

Bertugas menyelenggarakan bahan-bahan sidang, yang dibutuhkan untuk kemudian menyelenggarakan secara administratif segala putusan sidang Dewan Menteri.

9) Bagian Risalah

Bertugas menerbitkan hasil sidang dan keputusan rapat.

Struktur Kabinet Perdana Menteri

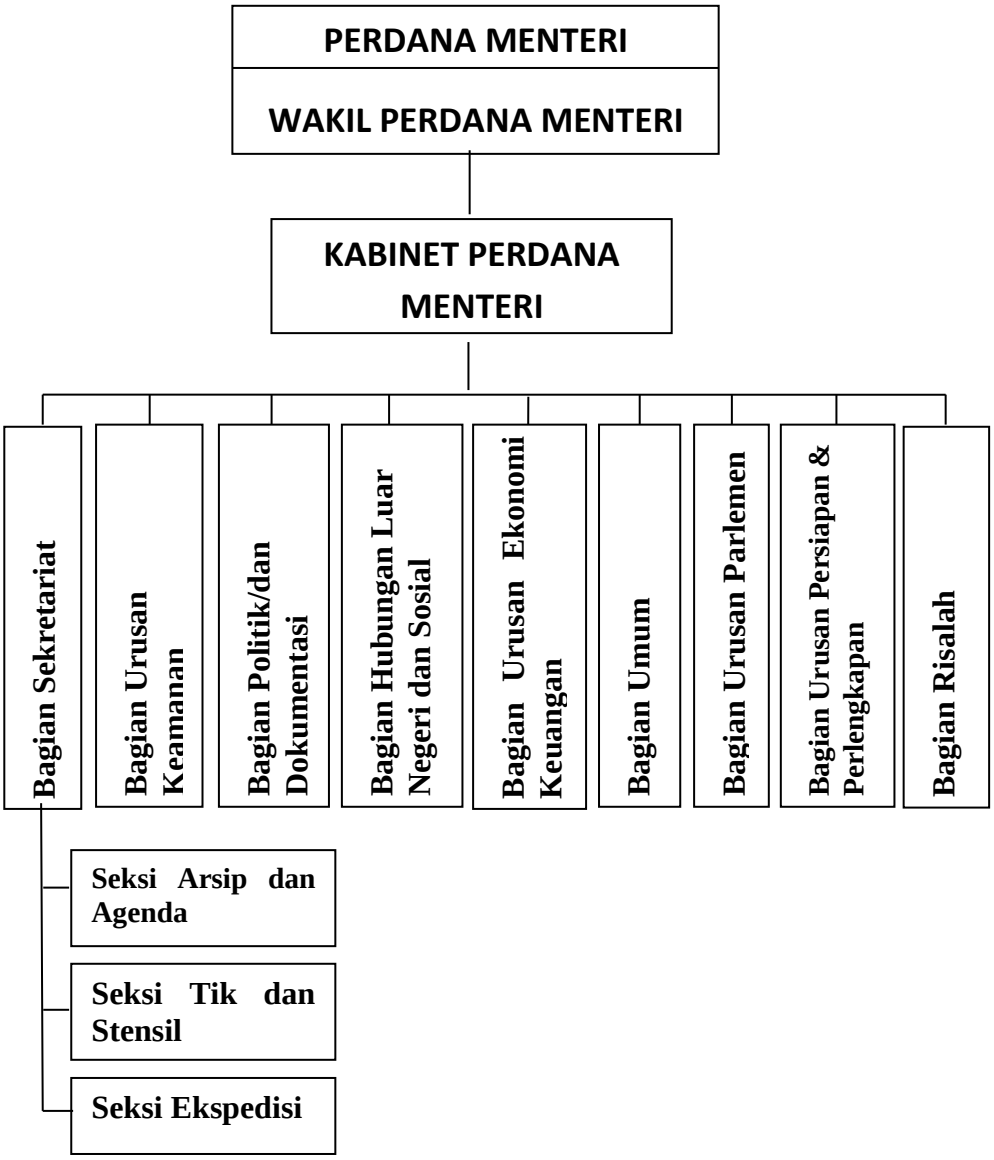

C. Sejarah Arsip Sekretariat Negara Pada Masa Kabinet Perdana Menteri

Berdasarkan data yang ada di Subdit Penyimpanan Arsip Konvensional, penyerahan arsip Setneg Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959 diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kurang lebih pada tahun 1973 dengan perkiraan jumlah 330 boks (66 Meter Linier/ML). Pada saat diserahkan ke ANRI, arsip-arsip tersebut tidak disertai dengan jalan masuk, dan tidak dapat ditemukan sistem penataan pada saat arsip masih berstatus dinamis. Kondisi arsip dalam keadaan tidak teratur, bahkan banyak yang merupakan lembaran-lembaran lepas serta rusak. Selain itu, arsip ini banyak yang tercampur dengan arsip Setneg pada masa Kabinet Presiden.

Pada tanggal 13 Juli 1988 telah diterbitkan Inventaris dengan judul Kabinet Perdana Menteri 1950 – 1959 yang merupakan hasil dari praktek kerja mahasiswa Diploma III Ilmu Kearsipan pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada tahun 2011 Inventaris Arsip Kabinet Perdana Menteri telah dilakukan penyempurnaan karena antara data/ informasi di inventaris tidak cocok lagi dengan fisik arsip sehingga tidak bisa diakses kembali. Penyempurnaan Inventaris Kabinet Perdana Menteri 1950 – 1959 tersebut menghasilkan Inventaris dengan judul Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950 – 1959. Pada tahun 2012 pengolahan arsip Setneg dilanjutkan kembali karena dari fisik arsip yang ada masih terdapat kurang lebih 44 Meter Linier (ML) yang belum diolah.

Informasi yang terkandung di dalam arsip Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 -1959 mencakup arsip yang merupakan kegiatan umum (penunjang) dan kegiatan khusus (pokok). Kegiatan umum meliputi antara lain administrasi, kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, peralatan dan kendaraan, dan kehumasan/keprotokolan. Sedangkan kegiatan khusus meliputi

keamanan dan pertahanan, politik (antara lain masalah pemilu, perjuangan merebut Irian Barat), Ekonomi dan keuangan, sosial, dan parlemen.

D. Teknis Penyusunan Inventaris dan Pengaturan Arsip Sekretariat Negara Pada Masa Kabinet Perdana Menteri

Pengolahan arsip Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950 – 1959 dilakukan untuk menghasilkan *finding aid* dalam bentuk inventaris arsip yang akan digunakan sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 – 1959 yang tersimpan di ANRI dalam rangka aksesibilitas dan layanan arsip statis kepada publik. Pengolahan arsip Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950 – 1959 dilakukan oleh tim kerja pengolah arsip statis di lingkungan Direktorat Pengolahan Arsip berdasarkan Surat Perintah KN.03.01/54.B/2012 tanggal 31 Januari 2012 dengan susunan tim kerja sebagai berikut:

1. Azmi (Pengarah)
2. Retno Wulandari (Penanggungjawab)
3. Eva Julianty (Ketua sampai dengan 28 Maret 2012)
4. Arshanti Kurnianingrum (Ketua Pengganti)
5. Heri Purwondo (Anggota)
6. Bakat Kuntoro (Anggota)
7. Ida Ruspeni (Anggota)
8. Widhi Setyo Putro (Anggota)
9. Sri Rustiningsih (Anggota sampai dengan 1 Juni 2012)
10. Dedi Febri Martono (Anggota)
11. Tri Yekti Mufidati (Anggota)
12. Surti Widayati (Anggota)
13. Tri Artasari (Anggota)

14. Titik Kurniawati (Anggota)
15. Arum Esthu Domas KB (Anggota)
16. Suharti (Anggota)
17. Risma Anggiyani (Anggota)
18. Diah Minarti Rahayu (Anggota)

Pengolahan arsip Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950 – 1959 dilaksanakan selama lima belas bulan , mulai Januari 2012 s.d.Maret 2013, Jumlah arsip yang diolah sebanyak 44 Ml . Pengolahan arsip dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah pengolahan arsip statis melalui tahapan kerja sebagai berikut:

1. Identifikasi Arsip;

   Kegiatan identifikasi dilakukan untuk mengetahui konteks dan sistem penataan arsip yang digunakan Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950 -1959 sebagai pencipta arsip (*creating agenc*y). Konteks arsip dapat diketahui melalui pemahaman fungsi dan tugas Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950 -1959 . Hal ini berkaitan dengan asal usul pencipta arsip yang dikenal dengan prinsip asal-usul (*principle of provenance*). Sedangkan sistem penataan arsip dapat diketahui dengan memahami sistem penataan awal yang digunakan ketika arsip masih dinamis (*records*) ditata atau diberkaskan di lingkungan Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950 -1959. Hal ini berkaitan dengan prinsip aturan asli (*principle of original order*). Identifikasi aturan asli penataan arsip konvensional dapat dilakukan dengan meneliti unit informasi series arsip yang masih utuh susunannya, sehingga dapat dijadikan acuan atau contoh penyusunan unit informasi arsip yang lainnya.
2. Penyusunan Rencana Teknis

   Berdasarkan hasil identifikasi tersebut di atas, tahapan berikutnya membuat rancangan kerja atau rencana teknis dengan menguraikan perkiraan rincian

waktu, biaya dan pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengolahan arsip statis.

3. Penelusuran Sumber dan Referensi

   Tahapan selanjutnya dari pengolahan arsip adalah kegiatan penelusuran sumber dan referensi. Sumber primer berasal dari arsip Setneg Kebinet Perdana Menteri sendiri dan sumber sekunder berupa buku dari perpustakaan atau lembaga terkait.

4. Pembuatan Skema Sementara

   Skema pengaturan arsip merupakan struktur pengelompokan arsip Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri 1950 – 1959 secara sistematis dan logis. Setelah memperoleh data yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi dari lembaga/organisasi pencipta arsip dan juga melihat inventaris Sekretariat Negara-Kabinet Perdana Menteri terdahulu maka disusun skema sementara pengaturan arsip Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri 1950 – 1959 sebagai berikut:

   a. Urusan Umum
      1) Administrasi
      2) Kepegawaian
      3) Keuangan
      4) Peralatan Kendaraan
      5) Kesejahteraan Pegawai
      6) Kehumasan/Keprotokolan
   b. Urusan Khusus
      1) Keamanan dan Pertahanan
      2) Politik
      3) Ekonomi dan Keuangan
      4) Sosial
      5) Parlemen

5. Rekonstruksi Arsip

   Dalam tahap rekonstruksi arsip ini, arsip-arsip yang akan diolah dikelompokkan berdasarkan skema pengaturan arsip tersebut di atas.

6. Deskripsi Arsip

   Deskripsi arsip adalah kegiatan membuat rincian informasi yang terkandung dalam arsip dari suatu unit arsip yang dideskripsi secara lengkap beserta komponennya pada suatu kartu *fisches* (kartu deskripsi). Deskripsi arsip Setneg Pada Mada Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 menggunakan 5 (lima) elemen data sebagai berikut:

   a. Bentuk redaksi;
   b. Isi informasi;
   c. Kurun waktu;
   d. Tingkat Perkembangan;
   e. Bentuk Luar

   Dalam setiap deskripsi arsip dicantumkan nomor urut arsip sementara pada kartu deskripsi. Hasil deskripsi kemudian diketik ke dalam komputer dengan format excel.

7. Penyusunan Skema Definitif Pengaturan Arsip

   Dari hasil deskripsi arsip, maka dapat diperoleh gambaran kegiatan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 -195. Apabila terdapat tambahan data/ informasi yang berkaitan dengan pengelompokan unit informasi pada skema sementara pengaturan arsip,data/informasi tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan skema pengaturan arsip sementara menjadi skema pengaturan arsip definitive (tetap).

8. Manuver data/Penyatuan Informasi dan Fisik Arsip

   Kegiatan manuver data dan fisik arsip dilakukan dengan mengelompokkan hasil deskripsi dan fisik arsip sesuai dengan skema definitif dan diurutkan secara kronologis.

9. Penomoran definitif

   Setelah manuver data /informasi dan fisik arsip selesai maka dilakukan penomoran definitif pada kartu deskripsi dan arsipnya.

10. Pemberian Label Arsip

    Setelah manuver dan penomoran arsip selesai, selanjutnya dilakukan pemberian label pada bungkus arsip dan boks arsip. Label arsip terdiri atas nama pencipta dan nomor arsip sesuai dengan nomor definitifnya dan untuk label boks terdiri atas nama lembaga pencipta arsip, kurun waktu arsip, nomor urut arsip, dan nomor urut boks.

11. Penataan Boks

    Kegiatan selanjutnya adalah penataan arsip dalam boks arsip, arsip yang sudah diberi label dimasukkan ke dalam boks disesuaikan dengan kapasitas boks besar.

12. Penulisan Inventaris

    Setelah semua data dan informasi terkumpul maka perlu dilakukan kegiatan perumusan draft inventaris arsip yang terdiri atas komponen: judul; kata pengantar; daftar isi; pendahuluan yang berisi: sejarah organisasi, sejarah arsip, dan pertanggungjawaban pengolahan arsip statis; uraian deskripsi arsip; daftar pustaka; dan lampiran – lampiran yang berisi: daftar indeks, daftar singkatan, dan struktur organisasi.

13 Penilaian dan Uji Petik

   Draft inventaris arsip yang telah disusun, disampaikan kepada Direktur Pengolahan untuk mendapatkan arahan dan masukan bagi penyempurnaan draft inventaris. Untuk fisik arsip, dilakukan verifikasi dengan melakukan uji petik baik secara internal oleh Tim Pengolahan maupun eksternal dalam hal ini adalah unit kerja penyimpanan arsip. Uji petik dilakukan untuk mengetahui ketepatan antara data/informasi yang tertuang dalam draft inventaris dengan fisik arsip yang sudah dimasukan dalam boks.

14 Pengesahan

Draft inventaris yang telah disempurnakan berdasarkan masukan dari Direktur Pengolahan serta adanya jaminan ketepatan antara data/informasi arsip yang tertuang dalam inventaris dengan fisik arsip hasil verifikasi baik internal maupun eksternal, diajukan kembali kepada Direktur Pengolahan untuk mendapatkan tanda tangan sebagai tanda pengesahannya. Setelah mendapatkan pengesahan inventaris ini kemudian didistribusikan kepada unit kerja terkait seperti Direktorat Preservasi dan Direktorat Pemanfaatan untuk digunakan sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip dalam rangka akses dan layanan arsip statis kepada pengguna arsip statis (*user*).

Pengaturan arsip Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 – 1959 menggunakan skema berdasarkan fungsi dari setiap unit organisasi. Skema tersebut terdiri dari :

A. UMUM

1. Administrasi

a. Agenda
b. Ekspedisi

2. Kepegawaian

a. Pengadaan Pegawai
b. Pengembangan Pegawai
c. Pengangkatan Pegawai
d. Mutasi dan Kenaikan Pangkat
e. Cuti dan Izin Pegawai
f. Perjalanan Dinas
g. Personal File

h. Pemberhentian Pegawai
i. Serikat Sekerja Pegawai

3. Keuangan

a. Perbendaharaan:
   1) Biaya/Ongkos
   2) Otorisasi
   3) Anggaran
   4) Ganti Rugi dan Hutang
   5) Gaji Pegawai
b. Pembukuan/Pemeriksaan :
   1) Pembukuan
   2) Uang untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)

4. Peralatan dan Kendaraan

a. Peralatan & Gedung
b. Kendaraan

5. Kesejahteraan Pegawai

a. Tunjangan
b. Koperasi
c. Dana Kesejahteraan
d. Perkumpulan Pegawai
e. Perumahan
f. Tanda Jasa/Penghargaan

6. Kehumasan/keprotokolan

B. KHUSUS

1. Keamanan dan Pertahanan

a. Gangguan Keamanan

b. Hukum
c. Peralatan Keamanan
d. Pertahanan
e. Anggota Kemiliteran

2. Politik

a. Pemerintahan Pusat
b. Pemerintahan Daerah
c. Organisasi Sosial dan Politik
d. Pemilihan Umum
e. Perjuangan Merebut Irian Barat
f. Hubungan Luar Negeri
g. Pengaturan Bangsa Asing
h. Penerbitan
i. Hari Besar

3. Ekonomi dan Keuangan

a. Bea Cukai dan Perpajakan
b. Perdagangan dan Industri
c. Agraria (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan)
d. Perbankan
e. Hubungan Ekonomi Luar Negeri
f. Bantuan Luar Negeri
g. Kebijaksanaan Keuangan
h. Perhubungan & Telekomunikasi

4. Sosial

a. Perburuhan/Ketenagakerjaan
b. Urusan Agama
c. Pendidikan, Teknologi dan Kebudayaan
d. Kesehatan
e. Bantuan Sosial
f. Transmigrasi & Pembangunan Masyarakat Desa

5. Parlemen

a. Penyelesaian Perundang-undangan
b. Mosi & Interpelasi
c. Risalah DPR & Konstituante

Setelah dilakukan pengolahan, arsip Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 – 1959 menjadi 2.483 nomor berkas dan tersimpan dalam 141 boks (± 28,2 ml).

Tim Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Inventaris Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959, No 41, ANRI.

Inventaris Kabinet Presiden tahun 1950-1959, No. 2352, ANRI

Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1959,1960 dan 1967

Buku dan Internet

Gonggong, Anhar, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia* (Jogjakarta: Ombak & Media Presindo, 2002).

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

Tim Penyusun, *30 Tahun Indonesia Merdeka* (Jakarta: Departemen Penerangan, 1981).

Wahid Salim, *et.al*, *Sekretariat Negara Republik Indonesia dari Masa Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009)

www.depdagri.go.id/media/.../2005/04/19/Perpres-No.31-2005.doc

URAIAN DESKRIPSI ARSIP

B. UMUM

1. ADMINISTRASI

a. Agenda

1 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kementerian Luar Negeri mengenai pemberitahuan pejabat - pejabat yang berhak mengesahkan tanda tangan pada dokumen - dokumen.

13 Juni 1958
tembusan
2 lembar

b. Ekspedisi

2 Kumpulan buku ekspedisi KPM.

1955 - 1961
asli
15 jilid

2. KEPEGAWAIAN

a. Pengadaan Pegawai

3 Surat dari Kepala Jawatan Sandi kepada Sekretaris Jenderal mengenai jabatan - jabatan yang harus dimasukkan dalam peraturan gaji baru.

08 Juli 1950
tembusan
3 lembar

4 Berkas mengenai pendaftaran pegawai di Kabinet Perdana Menteri, DPR, Biro Perancang Negara dan di beberapa kementerian.

1 September 1950 - 31 Desember 1960
asli, fotokopi
1 sampul

5 Surat -surat mengenai kedudukan pegawai Negara Bagian yang diperbantukan sehubungan dengan pembentukan Negara Kesatuan.

18 November 1950

fotokopi, tembusan
5 lembar

6 Penetapan Menteri Kehakiman dan Menteri Agama tentang formasi dan kedudukan pegawai di Kejaksaan Agung pada MA Indonesia, Pengadilan Agama di Jawa / Madura.

08 Juli 1952 - 07 Februari 1955
tembusan
1 sampul

7 Daftar jumlah dan formasi pegawai negeri warga negara / bukan warga negara.

10 Januari 1953 - 01 Juli 1954
asli, fotokopi
1 sampul

8 Penyampaian rancangan Keputusan Presiden RI tentang penambahan jumlah anggota Dewan Urusan Pegawai yang telah disetujui oleh Dewan Menteri dalam rapatnya ke 79.

18 Februari 1953
asli
4 lembar

9 Berkas mengenai permintaan mendatangkan tenaga ahli dari K.L.M.untuk operator A6.

27 Januari & 25 Maret 1955
turunan
8 lembar

10 Surat Keputusan Perdana Menteri RI tentang penugasan untuk mempelajari Community Development Programme.

Nopember 1955
konsep
6 lembar

b. Pengembangan Pegawai

11 Berkas mengenai pengiriman pegawai - pegawai untuk belajar ke luar negeri.

22 Februari 1951 - 30 Desember 1959
asli, fotokopi, tembusan
1 sampul

12 Seri Surat Keputusan tentang tugas belajar ke luar negeri.

7 Juni 1951 - 29 Desember 1959
salinan
1 sampul

c. Pengangkatan Pegawai

13 Berkas mengenai pengangkatan pegawai-pegawai dalam jabatan di lingkungan Kementerian-Kementerian, BRN, Biro Perancang Negara, Mahkamah Agung, dan Universitas.

2 Februari 1950 - 26 Oktober 1959
asli, tembusan
1 sampul

14 Berkas mengenai pengangkatan pegawai-pegawai di Kementerian-Kementerian, Kantor Urusan Pegawai, Kejaksaan Agung dan Pengadilan.

20 Februari 1950 - 18 Agustus 1959
asli, fotokopi
1 sampul

15 Surat-surat mengenai pengangkatan pegawai-pegawai tinggi yang diperbantukan pada Kementerian-Kementerian dan Kantor Dana Pensiun.

29 April 1950 - 23 Februari 1957
asli, salinan
1 sampul

16 Berkas mengenai pengangkatan pegawai bangsa asing.

13 Mei 1950 - 20 November 1956
asli, salinan
1 sampul

17 Surat Edaran Perdana Menteri No.2/RI/50 tentang peninjauan pengangkatan pegawai sebelum tanggal 6 Juli 1950.

09 Oktober - 22 Nopember 1950
asli, fotokopi
8 lembar

18 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai mengenai keputusan Kabinet tentang urusan pegawai dan pengangkatannya.

01 Nopember 1950
pertinggal
4 lembar

19 Berkas mengenai pengangkatan kembali pegawai-pegawai yang telah diberikan pensiun.

12 Desember 1950 - Desember 1959
asli, tembusan, salinan
1 sampul

20 Surat dari Menteri Keuangan kepada Kepala Jawatan di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai peninjauan kembali kedudukan pegawai - pegawai dalam lingkungan Kementerian Keuangan.

05 Januari 1951
fotokopi
3 lembar

21 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Menteri - Menteri RI dalam bentuk lama.

11 - 19 Januari 1951
asli
3 lembar

22 Surat Edaran Nomor 2621/M/51 Menteri Urusan Pegawai mengenai petunjuk-petunjuk pelaksanaan PP Nomor 59 Tahun 1951 tentang pengangkatan pegawai negeri tetap.

05 Desember 1951 - 13 Januari 1958
fotokopi
1 sampul

23 Berkas mengenai para pegawai asal dari Irian Barat yang akan diterima oleh pemerintah RI sebagai pegawai negeri. Lampiran daftar nama 4 lembar.

07 Januari - 21 Februari 1952
asli, konsep
1 sampul

24 Berkas mengenai penggantian anggota Panitya Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri.

10 Januari - 01 Nopember 1952
tembusan
7 lembar

25 Surat Edaran dari Wakil Perdana Menteri I kepada para Menteri tentang pemeriksaan kesehatan pada pengangkatan pegawai baru.

07 Mei 1954
salinan
3 lembar

26 Surat Edaran dari Menteri Keuangan kepada semua Menteri tentang penunjukan bendaharawan - bendaharawan khusus yaitu yang disebut juru penerima uang pendapatan - pendapatan tertentu.

16 September 1955
tembusan
3 lembar

27 Berkas mengenai sumpah PNS di lembaga kementerian dan kepolisian.

6 Januari - 29 September 1959
asli
1 sampul

d. Mutasi dan Kenaikan Pangkat

28 Berkas mengenai pemindahan pegawai dan kenaikan pangkat yang bertentangan dengan instruksi - instruksi yang berlaku dan hukuman terkait mutasi.

08 Desember 1949 - 22 Februari 1956
tembusan
1 sampul

29 Surat Edaran dari Kementerian Penerangan No.1856/A-I tentang Djapen - Djapen daerah dan masalah pegawai di daerah.

22 April 1950
fotokopi
3 lembar

30 Berkas penggantian anggota Panitia Penyelidik Kedudukan Pegawai Bangsa Belanda tuan P.C.Schoe.

27 September - 10 Oktober 1950
salinan, konsep
1 sampul

31 Berkas kedudukan pegawai Dewan Pengawas Keuangan.

29 September - 18 Desember 1950
pertinggal, asli
1 sampul

32 Surat dari pegawai Kantor Gubernur Sumatra Tengah cabang Padang kepada Perdana Menteri mengenai pedoman penyesuaian kedudukan dan gaji seluruh pegawai negeri.

07 Oktober 1950
asli, tembusan
1 sampul

33 Berkas mengenai mutasi Kepala Daerah dan pegawai di Kementerian, Kepolisian dan Lembaga Negara.

31 Oktober 1950 - 3 Juni 1959
asli, tembusan
1 sampul

34 Berkas mengenai kenaikan pangkat pegawai di lingkungan Kementerian , Kantor Perbendaharaan Negara dan Perusahaan Negara Pembangkit Tenaga Listrik.

28 Nopember 1950 - 03 Nopember 1954
asli, tembusan
1 sampul

35 Surat-surat mengenai protes hakim-hakim di Aceh terhadap penurunan pangkat.

28 Juni - 17 Oktober 1951
asli
1 sampul

36 Berkas mengenai penempatan pegawai di luar negeri.

22 Oktober 1951 - 30 Juni 1955
asli, tembusan
1 sampul

37 Berkas mengenai kenaikan pangkat secara posthuum.

09 Januari 1953 - 18 Nopember 1959
asli, fotokopi, salinan
1 sampul

38 Berkas mengenai syarat - syarat masa kerja minimum untuk kenaikan pangkat pegawai negeri.

24 April 1953 - 13 Nopember 1956
asli, tembusan
1 sampul

39 Berkas mengenai penyesuaian dan penilaian kembali pangkat - pangkat sosial dalam rangka amandement P.G.P.N 1948 - 1955 Lembaga Kementerian dan Kepolisian.

06 Oktober 1953 - 05 Januari 1959
fotokopi, asli, salinan
1 sampul

40 Surat-surat mengenai kedudukan antara Mantri Polisi dengan Mantri Polisi Pamong Praja.

20 November - 16 Desember 1953
pertinggal, asli
1 sampul

41 Surat dari Kepala Biro Keamanan kepada Kepala Bagian Keuangan KPM mengenai kedudukan Deputy III Kasad Letnan Kolonel Badarussamsi di Jakarta.

03 October 1959
asli
2 lembar

e. Cuti dan Izin Pegawai

42 Berkas mengenai pemberian izin istirahat besar bagi pegawai negeri.

2 Desember 1950 - 3 Juni 1959
salinan
1 sampul

43 Berkas mengenai pemberian izin istirahat karena sakit dan alasan penting bagi pegawai negeri dan tenaga pejuang.

29 Desember 1950 - 15 April 1959
asli, salinan
1 sampul

44 Surat dari Sekretaris KPM kepada Menteri Urusan Pegawai mengenai Rencana PP tentang Peraturan istirahat.

18 Juni 1951
konsep, asli
1 sampul

45 Seri Penetapan Perdana Menteri RI tentang pemberian ijin cuti istirahat pegawai KPM beserta persetujuan ijin cuti para pegawai KPM.

21 Mei 1953 - 12 Mei 1961

salinan
1 sampul

f. Perjalanan Dinas

46 Surat dari Direktur Lembaga Alat - Alat Pembayaran Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian daftar izin devisen perjalanan Komisaris Agung R.I.S.di 's-Gravenhage, beserta lampiran.

18 Oktober 1950
asli
5 lembar

47 Berkas mengenai perjalanan dinas Presiden dan Wakil Presiden ke Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Sunda Kecil.

16 November 1950 - 24 November 1955
asli, fotokopi
1 sampul

48 Berkas mengenai perjalanan dinas pegawai ke luar negeri.

19 Oktober 1950 - 28 Oktober 1959
asli, salinan
1 sampul

49 Berkas mengenai perjalanan dinas para pegawai ke luar negeri dalam rangka menghadiri Konferensi.

6 Januari 1951 - 1 April 1957
asli, salinan
1 sampul

50 Berkas mengenai perpanjangan waktu masa tinggal pegawai di luar negeri.

13 Juli 1951 - 6 April 1957
asli, salinan
1 sampul

51 Berkas mengenai perjalanan dinas para Menteri, Ketua Mahkamah Agung dan Direktur BRN.

09 April 1952 - 12 November 1956
salinan
1 sampul

52 salinan kawat - kawat Perdana Menteri kepada Gubernur Jatim, Gubernur Sunda kecil dan Kepala Daerah Bali.

04 Agustus - 06 Desember 1952
asli, salinan
1 sampul

53 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Gubernur Jawa Timur mengenai perjalanan istirahat ke Jawa Timur sambil mengadakan peninjauan tentang keadaan keamanan.

15 Oktober 1952
arsip, konsep
3 lembar

54 Surat Edaran mengenai petunjuk - petunjuk untuk memberi dan melakukan tugas dengan mempergunakan surat perintah perjalanan dinas.

01 Nopember 1952 & 02 Januari 1953
fotokopi
2 lembar

55 Berkas mengenai perjalanan dinas Direktur BRN ke Bandung dan Kalimantan Barat.

16 November 1952 - 26 Mei 1953
fotokopi
7 lembar

56 Berkas mengenai perjalanan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri I ke Jawa Tengah dan Jogjakarta.

08 - 14 Desember 1953
asli
6 lembar

57 Berkas mengenai perjalanan dinas Presiden ke luar negeri.

9 April - 5 Mei 1956
asli
1 sampul

58 Berkas mengenai pengeluaran tanpa otorisasi (biaya perjalanan dinas Kepolisian Negara th.1958).

04 April 1957 - 24 Juni 1958

asli, salinan
1 sampul

g. Personal File

59 Personal file M. Jusuf bin M.Arif, Jurutulis Kepala Kantor Pengadilan Bengkulu, yang dulunya Inspektur Polisi I.
16 Juni 1949 - 12 Desember 1950
asli, tembusan
1 sampul

60 Berkas p*ersonal file* para pegawai Biro Perancang Negara.
26 September 1949 - 04 Juli 1958
asli, fotokopi, tembusan
1 sampul

61 Berkas *personal file* R.Sadikin Soeriatmadja pada Jawatan Pegadaian Negeri.
05 Januari 1950 - 13 Nopember 1951
asli, salinan, turunan
1 sampul

62 *Personal file* H.A.Verkuyl, pegawai tinggi diperbantukan kepada RI.
08 Maret 1950 - 22 Agustus 1951
asli, salinan
1 sampul

63 Surat lamaran Tn.Eitel Friedrich Kentrat.
27 Maret - 14 April 1950
asli
3 lembar

64 Surat dari Kepala Bagian Pegawai Menteri Dalam Negeri kepada Residen Surakarta mengenai riwayat pekerjaan Mr.Wironagoro (Soelistio), Sekretaris Kementerian Dalam Negeri.
10 Januari 1951
turunan
2 lembar

65 Berkas *personal file* para Jaksa Kedjaksaan.
10 Maret - 02 Agustus 1951
fotokopi, asli
1 sampul

66 Berkas bekas pegawai - pegawai Swapradja di Surakarta yang terlantar karena tidak diterima pendaftarannya.

02 Mei - 13 September 1951
asli, tembusan, konsep
1 sampul

67 Berkas *personal file* Dr.Soemitro Djojohadikoesoemo, Penasehat Umum pada Kementerian Perekonomian.

02 Mei - 07 Agustus 1951
asli, tembusan
7 lembar

68 Berkas *personal file* riwayat jabatan R. Moedajat pensiunan Djaksa kelas I Pengadilan Negeri Lamongan.

24 Desember 1951 - 26 Februari 1953
fotokopi
1 sampul

69 Berkas mengenai perhitungan waktu selama dalam pengasingan untuk jabatan negeri a.n. Arif Fadillah.

13 Maret - 16 Juni 1952
asli, konsep, fotokopi, tembusan
1 sampul

70 Berkas Imam Slirodiwismo.

30 Juni 1952 - 21 Februari 1953
asli, tembusan, salinan
8 lembar

71 Seri Surat Keputusan tentang Mr. Moechtar Oesman, Administratur sementara pada Thesauri Negara Kementerian Keuangan yang diperbantukan pada Kementerian Luar Negeri.

16 Oktober 1952 & 03 Februari 1955
salinan, turunan
5 lembar

72 Berkas *personal file* B.W.Warouw.

23 Maret - 04 Agustus 1954
asli, konsep, salinan
1 sampul

73 Riwayat hidup Sjamsudin Abuhasan Bengkulu, dan menamakan dirinya pemuka urusan umum, pembela rakyat dan pemuka urusan politik dengan mengadakan mosi - mosi dan mengirimkan kawat - kawat di Bengkulu.

31 Maret - 26 Juli 1954
asli, salinan
1 sampul

74 Berkas mengenai pegawai - pegawai dari Jawatan Tenaga Listrik dan Gas Pemerintah RI yang belum dipekerjakan kembali (non-actief).

13 Mei - 21 September 1954
asli, tembusan
1 sampul

75 Berkas *personal file* Koesni, jurutulis kantor inspeksi 8 Jawatan Kereta Api di Madiun.

26 Maret 1955
pertinggal, asli, turunan
1 sampul

76 Berkas mengenai pemeriksaan hukuman jabatan M.Bisserail menurut PP No. 11 tahun 1952.

03 Mei - 24 Oktober 1955
asli, tembusan
6 lembar

77 Berkas *personal file* R.Sofian Sukandi, p.s.Klerk pada Biro Perancang Negara, dengan kepindahannya ke kantor Karesidenan Banten.

31 Mei - 16 Agustus 1955
asli, konsep, salinan
1 sampul

78 Berkas *personal file* keterangan mengenai penyelesaian permohonan Goesti Sjoefdin Majoesoef.

01 Juli 1955 - 14 Agustus 1956
asli, tembusan, salinan
1 sampul

79 Berkas mengenai kedudukan dan gaji Mr.Ahmad Subardjo Djojoadisurjo sesuai dengan SK Presiden R.I.S.

24 Oktober 1956 - 26 Agustus 1957
salinan
1 sampul

80 Berkas mengenai Ruslan Abdulgani dalam Kabinet Pemerintahan.

19 Januari - 04 April 1957

asli, konsep, tembusan
1 sampul

81 Surat-surat mengenai kedudukan Prof. Dr. D. G. F. R. Kostermans (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).

15 Agustus - 6 September 1957
asli
6 lembar

82 Berkas *personal file* Ir.Kusumaningrat.

03 Mei 1958 - 26 Agustus 1959
konsep, tembusan, fotokopi
1 sampul

83 Berkas mengenai *personal file* atas nama Marta pegawai bulanan pada Biro Ekonomi dan Keuangan.

30 September 1958 - 09 Januari 1960
asli, tembusan
1 sampul

h. Pemberhentian Pegawai

84 Berkas mengenai pemberhentian pegawai dengan hormat.

09 Agustus 1949 - 6 April 1959
salinan
1 sampul

85 Daftar pertanyaan untuk mendapatkan hak pensiun sendiri / janda untuk keperluan Kantor Dana Pensiun Jogjakarta, kepada seluruh Pegawai Negeri dan atau Pegawai - Pegawai Instansi Pemerintahan.

12 Desember 1949 - 01 Maret 1954
asli, salinan, turunan
1 sampul

86 Berkas mengenai kedudukan, pemberhentian dan pemberian hak pensiun bangsa asing (orang Eropa).

1 Juli 1950 - 28 Desember 1957
asli, salinan, tembusan
1 sampul

87 Berkas mengenai bekas anggota tentara angkatan perang K.N.I.L beserta pensiunannya.

27 Nopember 1950 - 07 Januari 1955
asli, fotokopi, tembusan

1 sampul

88 Surat Edaran tentang pemberian keterangan yang tidak benar mengenai penghasilan - penghasilan yang lain oleh orang - orang yang menerima uang tunggu menurut KMB pensiun berimbangan atau tunjangan sebagai pensiun.

29 Juni - 22 Oktober 1951
fotokopi
1 sampul

89 Penyampaian surat Edaran No.14/E/d Pers/51 tentang permintaan berhenti anggota - anggota Angkatan Darat dari Dinas Ketentaraan.

16 Agustus 1951 - 17 Juni 1954
tembusan
4 lembar

90 Berkas mengenai pemberhentian pegawai dengan tidak hormat.

23 Agustus 1951 - 4 Desember 1959
asli, fotokopi
1 sampul

91 Berkas mengenai langkah-langkah dalam pemberian hukuman jabatan.

19 Februari 1953- 26 April 1955
fotokopi
1 sampul

92 Berkas mengenai nasib para pensiunan yang tidak dibayar pensiunnya pada bagian bulan April 1954.

08 Mei - 12 Agustus 1954
asli, salinan
1 sampul

93 Berkas pengesahan daftar riwayat pekerjaan untuk penetapan pensiun pasti (definitief pensiun).

18 Juli 1955 - 02 Januari 1956
asli, salinan
1 sampul

i. Serikat Sekerja Pegawai

94 Berkas mengenai permohonan Serikat Buruh Postel Bandung kepada Dewan Menteri untuk melakukan perubahan cara perhitungan gaji pegawai negeri.

7 September 1950 - 23 November 1951
turunan
1 sampul

95 Surat dari Ka.Pembantu Bagian Gerakan Buruh kepada KPM mengenai status KPM di perairan Indonesia.

12 - 25 Nopember 1950
asli
2 lembar

96 Berkas mengenai laporan Panitya Bersama tentang pegawai - pegawai Indonesia dari Irian.

05 Desember 1950 - 08 Juni 1951
asli, salinan
1 sampul

97 Berkas Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri.

29 Desember 1950 - 29 Juli 1959
fotokopi, pertinggal
1 sampul

98 Surat dari Pemimpin BRN Pusat kepada Gubernur Jawa Barat mengenai daftar pegawai dan pekerja jawatan pendidikan kerja (kantor - kantor pembangunan masyarakat) di Jawa Barat, beserta lampiran.

12 Februari 1951
tindasan
3 lembar

99 Resolusi dari SARBUPRI (Sarikat Buruh Perkebunan RI) daerah Banten tentang usul pengangkatannya TB.Much.Chasan Sutawinangun menjadi Bupati Lebak.

12 - 16 Oktober 1951
tembusan
3 lembar

100 Berkas Sarekat Sekerja Kantor Dana Pensiun Jogjakarta.

21 Mei - 20 Juni 1957
asli, fotokopi
1 sampul

101 Resolusi tentang kepegawaian Sarekat Buruh Pekerjaan Umum (SBPU) Cabang Pekalongan II di Kedungwuni.

25 September 1954
tembusan
4 lembar

102 Surat pernyataan pegawai di Aceh mengenai kondisi keamanan tinggal dan

10 Oktober 1954 & 01 April 1955
pertinggal, asli
5 lembar

103 Berkas pimpinan Dewan Pusat Partai PERMAI (Persatuan Rakyat Marhaeni Indonesia) mengenai politik kepegawaian.

9 - 11 November 1954
asli, fotokopi
1 sampul

104 Surat dari Perdana Menteri kepada Para Menteri mengenai membebaskan pegawai negeri dari kewajibannya agar berkesempatan membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerja.

26 Februari 1955
pertinggal
1 lembar

105 Daftar nama - nama pegawai yang diberi pakaian dinas dari Instansi / Biro / kantor dalam lingkungan bagian I - Pemerintah Agung dan Badan - Badan Pemerintah Tertinggi tahun 1954.

28 Februari 1955
asli
2 lembar

106 Berkas Resolusi Serikat Sekerja Pegawai daerah - daerah di Indonesia tahun 1956 dalam PGPN 1955.

30 Desember 1955 - 13 Juni 1956
tembusan
1 sampul

107 Surat dari Pengurus Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri cabang Kota Besar Bandung Tjiateul Tengah 14 Bandung kepada Perdana Menteri mengenai penyesuaian pangkat pegawai Pamongpraja.

07 Maret - 17 Maret 1956
asli
4 lembar

108 Mosi Sarekat Sekerja Kementerian Dalam Negeri cabang Tuban dalam sidangnya tanggal 08 Maret 1956.

08 Maret 1956

tindasan
7 lembar

109 Keputusan sidang pleno ke IV Pengurus Besar Serikat Sekerja Sosial diperluas dengan Pengurus Daerah seluruh Indonesia tgl 22 s/d 25 September 1956 di Malang.

25 September - 01 Oktober 1956
fotokopi
1 sampul

3. KEUANGAN

a. Perbendaharaan

1) Biaya/Ongkos

110 Surat-surat mengenai penggantian ongkos pembangunan dan perbaikan gedung untuk keperluan pemerintah.

25 Oktober 1950 - 26 September 1959
asli
1 sampul

111 Berkas mengenai pemberian ongkos perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

23 Desember 1950 - 21 Oktober 1959
asli, salinan
1 sampul

112 Surat-surat mengenai penggantian biaya pengobatan untuk pegawai, partikelir dan anggota CTN.

19 Februari 1951 - 1959
salinan
1 sampul

113 Surat-surat mengenai biaya untuk keperluan ongkos kantor.

19 Maret 1951 - 10 Juni 1960
asli
1 sampul

114 Surat-surat mengenai biaya untuk keperluan pemulihan dan pemeliharaan keamanan.

31 Maret 1951 - 16 Januari 1956
asli, salinan
1 sampul

115 Surat-surat mengenai penambahan uang harian untuk keperluan dinas.

28 Juni - 15 November 1951
asli
1 sampul

116 Berkas mengenai peraturan gaji dan tunjangan-tunjangan,biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi pejabat negara.

9 September 1951 - 30 Januari 1958
asli
1 sampul

117 Surat Keputusan Kepala Jawatan Perjalanan tentang penggantian daftar uang harian untuk menginap di tempat - tempat dalam Rayon II s/d XII.

28 September 1951
fotokopi
4 lembar

118 Surat dari Menteri Keuangan RI kepada Perdana Menteri mengenai pemberian uang muka untuk biaya perlengkapan kepada pegawai negeri dari Negeri Belanda.

13 November 1951
fotokopi
2 lembar

119 Surat - surat mengenai pembayaran uang sewa rumah, biaya air, listrik, dan gas untuk Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengawas Keuangan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

1 Maret 1952 - September 1956
asli
1 sampul

120 Surat-surat mengenai kebijakan pemberian uang muka tidak berbunga kepada Kementerian.

18 April 1952 - 24 Oktober 1957
asli, salinan
6 lembar

121 Surat - surat mengenai uang cadangan ekstra untuk pembayaran kepentingan polisi rahasia 1953.

18 Februari - 11 April 1953
asli
5 lembar

122 Surat - surat mengenai penghematan uang perongkosan penyelidikan untuk Jawatan Kepolisian tahun 1953.

20 & 21 April 1953
asli
5 lembar

123 Surat Keputusan Kepala Polisi Propinsi Kalimantan tentang penunjukkan bendaharawan dan biaya untuk tunjangan uang makan dan uang lembur Kepolisian Propinsi Kalimantan.

9 Mei 1953
salinan
3 lembar

124 Surat - surat Perintah Membayar Kementerian Keuangan RI Bagian Perbendaharaan mengenai pembiayaan pengeluaran BRN Pusat.

3 Juni - 10 Oktober 1953
tembusan
5 lembar

125 Surat - surat mengenai bantuan biaya Kongres ke I yang akan diadakan oleh Biro Angkatan Muda Indonesia.

22 Desember 1953 - 16 Februari 1955
asli
1 sampul

126 Surat - surat mengenai penggunaan sebagian sisa pinjaman Eximbank untuk membiayai otomatisir telepon Jakarta - Raya dan pembelian 8 pesawat terbang convair 340.

25 Januari - 19 Juli 1954
fotokopi
1 sampul

127 Surat - surat mengenai biaya pemondokan dan penginapan pegawai.

24 Februari 1954 -27 Januari 1959
asli, salinan
1 sampul

128 Seri Surat Keputusan Perdana Menteri RI tentang peraturan pembiayaan panitia - panitia negara.

21 April 1952 - 8 Mei 1954
salinan
6 lembar

129 Surat-surat mengenai petunjuk dan penggunaan ongkos untuk pelabuhan.

25 November 1954 - 14 Oktober 1958
asli
1 sampul

130 Daftar mengenai pembayaran gaji pegawai bulanan dan pembayaran uang lembur Biro Perancang Negara bulan Januari sampai Juli 1956.

Januari - Juli 1956
asli, tembusan
1 sampul

131 Seri Surat Keputusan Perdana Menteri tentang pengeluaran yang digunakan untuk pemondokan, pengembalian keamanan setempat (operasi-lokal) di daerah Jawa Tengah, dan pengobatan pegawai polisi di daerah Jawa Barat.

29 Agustus & 5 September 1956
salinan
1 sampul

132 Surat - surat Biro Perancang Negara kepada Kementerian - kementerian di Jakarta mengenai perongkosan lokal dari para expert dalam rangka bantuan Luar Negeri untuk diregularisasikan.

8 Oktober - 2 Desember 1957
tembusan
1 sampul

133 Daftar mengenai jumlah biaya yang diperlukan oleh pegawai - pegawai di Kementerian - kementerian yang belajar di luar negeri.

1958
asli
1 sampul

134 Surat-surat mengenai pembatalan valuta asing dari Bank Negara Indonesia.

April 1958 - Desember 1959
tembusan
1 sampul

135 Surat - surat Keputusan Ketua Biro Pembangunan Masyarakat Desa tentang pemberian uang honorarium kepada guru tidak tetap pada Pusat Latihan/Seminar Pembangunan Masyarakat Desa di Pedjaten, Jakarta.

13 Juni & 25 Agustus 1958
asli
5 lembar

136 Surat - surat Perintah Membayar Kementerian Keuangan RI mengenai pembayaran pembelian barang - barang di luar negeri untuk kepentingan Kedutaan Besar RI di Jerman Barat, Washington dan N.V. Dasaad Musin Concern.

30 Juli - 8 Desember 1958
tembusan
6 lembar

137 Surat-surat Keputusan tentang penggantian uang bagi beberapa pegawai Kepolisian Jawa Timur tahun 1958.

15 November-30 Desember 1958
salinan
1 sampul

138 Surat keputusan Wakil Perdana Menteri I/Menteri Keuangan RI Nomor 112/P.M./1959 tentang pemberian persekot kepada PNS atas rapel kenaikan penghasilan.

20 Maret 1959
salinan
1 lembar

139 Surat - surat keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang penggantian ongkos perjalanan sekali setahun anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke suatu tempat dalam wilayah Republik Indonesia untuk tahun 1959.

5 Agustus - 23 Desember 1959
salinan
1 sampul

140 Surat dari Menteri Keuangan kepada Para Menteri, dll mengenai pembatasan - pembatasan pengeluaran dalam rangka usaha memperbaiki keadaan keuangan.

09 September 1959
fotokopi
2 lembar

2) Otorisasi

141 Surat - surat mengenai otorisasi keuangan ARTP Madura.

4 & 11 Januari 1951
asli
2 lembar

142 Surat-surat mengenai otorisasi anggaran tahun 1951.
8 November 1951- 8 Desember 1952
tembusan
1 sampul

143 Surat - surat mengenai pemberian kredit untuk beberapa perusahaan.
24 November 1951 - 10 April 1958
asli
1 sampul

144 Surat - surat Keputusan Perdana Menteri tentang penetapan anggaran belanja tahun 1951 dan 1952 untuk memberikan kuasa kepada Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan.
23 Januari & 17 Maret 1952
salinan
4 lembar

145 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Pertahanan mengenai perwakilan menteri dalam rapat - rapat Dewan Ekonomi dan Keuangan.
8 Maret 1952
tembusan
1 lembar

146 Surat-surat mengenai biaya dalam rangka peringatan hari lebaran.
6 Juni 1952 - 14 November 1957
fotokopi
5 lembar

147 Surat-surat Keputusan Perdana Menteri tentang pemberian kuasa penggunaan uang tahun 1953.
26 Maret-22 Desember 1953
tembusan
1 sampul

148 Surat-surat Keputusan Perdana Menteri tentang pemberian kuasa pembayaran dan penggunaan uang tahun 1954.
Desember 1953-Desember 1954
tembusan
1 sampul

149 Surat-surat Keputusan Perdana Menteri tentang pemberian kuasa perhitungan, persediaan dan penggunaan uang serta pemberian kredit tahun 1955.

September-Desember 1955
tembusan
1 sampul

150 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Menteri Keuangan mengenai kesulitan2 dalam pemberian kredit.

16 November 1955
tindasan
1 sampul

151 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan mengenai permohonan tambahan kredit untuk keperluan Panitia-Panitia Negara dan Panitia Interdeparmental.

01 Desember 1955
pertinggal
1 sampul

152 Berkas mengenai keputusan pemberian kuasa penggunaan/penyetoran/ pembayaran uang dan pemberian kredit tahun anggaran 1956.

24 Desember 1955-13 Desember 1956
salinan
2 sampul

153 Surat-surat keputusan Menteri Keuangan RI tentang penetapan kedudukan Kantor Pengawas Kas Negara di beberapa daerah.

9 April & 6 Desember 1956
tembusan
3 lembar

154 Surat-surat mengenai otorisasi pengeluaran uang persediaan Kepolisian Provinsi Sulawesi.

20 Agustus - 8 November 1956
tembusan
1 sampul

155 Berkas mengenai keputusan pemberian kuasa penggunaan/penyetoran/ pembayaran uang dan pemberian kredit tahun anggaran 1957.

3 Januari - 30 November 1957
salinan

3 sampul

156 Instruksi dari Thesaurir - Jenderal kepada Para Inspektur Thesaurie Negara mengenai otorisasi tentang pembayaran - pembayaran atau pengiriman - pengiriman uang ke luar negeri.

12 Juli 1957
fotokopi
2 lembar

157 Surat dari Kementerian Keuangan kepada Semua Kementerian (terkecuali Kementerian Pertahanan) mengenai pengeluaran otorisasi - otorisasi oleh Kementerian - kementerian.

18 Desember 1957
salinan
4 lembar

158a, b,c,d Berkas mengenai keputusan pemberian kuasa penggunaan/penyetoran/ pembayaran uang dan pemberian kredit tahun anggaran 1958.

2 Januari - 30 Desember 1958
salinan
6 sampul

159 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan kepada semua Jawatan dan Bagian dalam lingkungan Kementerian Keuangan mengenai susunan organisasi dari Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan pada Kementerian Keuangan.

18 Februari 1958
asli
2 lembar

160 Instruksi Kepala Bagian Inspeksi Thes. Negara mengenai persetujuan kredit untuk pembelian/pembuatan pakaian dinas untuk pegawai/pesuruh dari Kementerian/Jawatan dan perusahaan Pemerintah.

7 Maret 1958
salinan
1 lembar

161 Surat dari Ketua/Bendaharawan Biro Pembangunan Masyarakat Desa kepada Thesaurier Jenderal pada Kementerian Keuangan mengenai permohonan persetujuan kredit untuk membiayai Seminar/Kepala/Wakil Kepala Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa tahun 1958.

9 Agustus 1958
tembusan
2 lembar

162 Berkas mengenai keputusan pemberian kuasa penggunaan/penyetoran/ pembayaran uang dan pemberian kredit tahun anggaran 1959.

2 Januari - 29 November 1959
salinan
2 sampul

163 Surat - surat mengenai pengajuan kredit untuk perbaikan rumah di Jalan Jawa nomor 16 Jakarta dan Jalan Diponegoro nomor 8 dan 10.

7 Januari - 5 Agustus 1959
salinan
1 sampul

164 Surat - surat mengenai SPD Panitia Penampungan korban kekacauan Daerah Provinsi Sulawesi.

12 Maret - 31 Juli 1959
asli
1 sampul

165 Surat dari Ketua Bendaharawan Biro Pembangunan Masyarakat Desa kepada Direktur KPM mengenai perbaharuan otorisasi m.a.1.2c.1.2.24 dikarenakan sulitnya perhubungan antara Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa Sipirok ke Tapanuli Selatan.

2 Mei 1959
asli, tembusan
6 lembar

3) Anggaran

166 Surat-surat mengenai Anggaran RI untuk tahun dinas 1950/1951.

2 Januari - 13 Oktober 1951
salinan
1 sampul

167 Surat-surat mengenai penyusunan Anggaran Belanja Tahun 1952.

23 Januari - 10 Desember 1952
tembusan
1 sampul

168 Surat-surat mengenai penyusunan Anggaran Belanja Tahun 1953.

6 Oktober 1952 - 29 Juni 1955
asli
1 sampul

169 Surat-surat mengenai Anggaran Belanja Kepolisian Negara.
12 Agustus 1953 - 16 Desember 1959
salinan
1 sampul

170 Surat-surat mengenai penyusunan Anggaran Belanja Tahun 1954.
28 November 1953 - 30 Desember 1955
asli
1 sampul

171 Surat-surat mengenai penyusunan Anggaran Belanja tahun 1955.
12 Oktober 1954 - 18 Januari 1957
tembusan
1 sampul

172 Surat-surat mengenai penyusunan Anggaran Belanja tahun 1956.
25 Agustus 1956 - 14 November 1957
asli
1 sampul

173 Surat-surat mengenai penyusunan Anggaran Belanja tahun 1957.
14 Agustus 1956 - 17 April 1958
asli
3 sampul

174 Kumpulan Hasil Anggaran Sementara dari Negara Republik Indonesia untuk triwulan I - III tahun dinas 1957, 1958 dan 1959 Bagian Pemerintah Agung dan Badan - badan Pemerintahan Tertinggi Bab I Pengeluaran dan Bab II Penerimaan.
1957 - 1959
asli
1 sampul

175 Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kepada Perdana Menteri mengenai pengesahan usul UU penetapan Bagian - bagian dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954, nb. beserta lampiran.
29 Januari 1957
asli
1 sampul

176 Surat - surat mengenai soal - soal yang belum diselesaikan oleh kabinet - kabinet yang lampau salah satunya tentang anggaran belanja negara.
7 Juni 1957 - 14 Januari 1958

asli
1 sampul

177 Surat-surat mengenai penyusunan Anggaran Belanja tahun 1958.
Oktober 1957 - 1959
tembusan
1 sampul

178 Surat - surat mengenai daftar perubahan pembebanan mata anggaran.
18 Maret - 7 Juli 1958
asli
4 lembar

179 Surat-surat mengenai penyusunan Anggaran Belanja tahun 1959.
25 November 1958 - 28 Agustus 1959
asli
2 sampul

180 Peraturan Dewan Asian Games Indonesia tentang Pengurusan Keuangan Asian Games Indonesia.
1959
fotokopi
1 sampul

181 Surat - surat mengenai rencana anggaran biaya rapat ke - 2 dari Advisory Committee of the two Regional Housing Centres di Bandung.
3 Juli - 3 Agustus 1959
asli, salinan
1 sampul

182 Surat-surat mengenai penyusunan Anggaran Belanja tahun 1960.
1 September 1959 - 29 Oktober 1959
fotokopi
1 sampul

4) Ganti Rugi dan Hutang

183 Surat - surat mengenai permohonan ganti rugi bagi kapal Ms. "Ontoseno".
17 September 1949 - 28 September 1955
asli
1 sampul

184 Berkas mengenai permohonan pengembalian uang yang dibekukan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

23 Agustus 1950 - 7 April 1952
asli
1 sampul

185 Berkas mengenai utang Siti Soebaidah kepada negara.

12 Desember 1950 - 30 Mei 1951
asli
7 lembar

186 Surat-surat mengenai ganti rugi atas kesalahan pemberian uang penghasilan pegawai.

3 Februari 1951 - 26 Agustus 1954
asli
1 sampul

187 Berkas mengenai penyelesaian ganti rugi Pegawai Negeri Sipil.

2 Juli 1951 - 20 Juni 1958
asli
1 sampul

188 Berkas mengenai permohonan ganti rugi rakyat Karanganom atas rumah gadai negeri.

8 November 1951 - 28 September 1953
pertinggal
1 sampul

189 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai penyampaian surat Dewan Pengawas Keuangan tentang pembebasan hutang Ny. A.J.P. Martens kepada negara, nb. beserta lampiran.

26 November 1951
asli
1 sampul

190 Berkas mengenai tuntutan ganti rugi kepada H.J. Ellen.

18 Desember 1951 - 16 Desember 1952
salinan
1 sampul

191 Berkas mengenai permohonan pembayaran hutang pemerintah dari G. Siregar.

8 September - 10 Oktober 1952
asli

1 sampul

192 Surat dari Penata Usaha Sekretaris Dewan Menteri kepada Sekretaris Perdana Menteri dan lain-lain mengenai penyampaian salinan surat-surat tentang kuasa untuk melakukan tuntutan ganti rugi dan penghapusan penagihan atas rumah-rumah dan barang-barang milik negara, nb beserta lampiran .

17 November 1952
pertinggal
10 lembar

193 Berkas mengenai pembebasan tuntutan ganti rugi terhadap E. Karundeng atas kebakaran di Kantor Urusan Risalah DPR.

13 Desember 1952 - 31 Juli 1956
asli
1 sampul

194 Berkas mengenai hutang Kapten Sudiopranoto kepada pemilik Hotel Solo di Jatinegara.

8 Januari - 6 Agustus 1953
tembusan
1 sampul

195 Surat - surat mengenai usulan untuk mengubah staatsblad 1904 Nomor 241 tentang tuntutan ganti rugi, Staatsblad 1915 Nomor 2 dan 3 tentang penghapusan uang dari perhitungan bendaharawan.

26 Maret 1953 - 14 Mei 1956
asli, salinan
1 sampul

196 Surat keputusan Perdana Menteri RI tentang tuntutan ganti rugi sebanyak Rp. 1.500 terhadap F. Mowoka.

30 Juni 1953
salinan
1 lembar

197 Surat - surat mengenai pemberitahuan tentang kerugian yang diderita oleh negara karena penggelapan atau pencurian uang/barang kepunyaan Negara oleh pegawai negeri.

31 Oktober 1953 - 3 Februari 1954
salinan
5 lembar

198 Berkas mengenai permohonan uang ganti kerugian NV. Overzeese Gas En Electriciteitmaatschappij (OGEM).

6 Januari - 27 April 1954
asli
1 sampul

199 Surat-surat mengenai penagihan pinjaman tentara/militer.

7 April - 13 Desember 1954
asli
1 sampul

200 Surat-surat mengenai tuntutan pembayaran ganti rugi atas perusahaan rumah di Sibolga oleh tentara Belanda.

8 Juli - 27 Oktober 1954
asli
1 sampul

201 Surat - surat mengenai uang penggantian kerugian untuk keperluan representasi bagi Kepala Jawatan Pelabuhan.

24 Desember 1954 - 2 Januari 1956
salinan, asli
8 lembar

202 Daftar mengenai ikhtisar setengah tahun dari jalannya penagihan hutang - hutang kepada Negeri bulan Juli 1954 s/d Desember 1954 Kementerian Pemerintah Agung dan Badan - badan Tertinggi.

1 Maret 1955
asli
1 sampul

203 Surat-surat mengenai tuntutan penggantian kerugian dari Dr. RM. Abdulkadir dan Sarpin Lubis.

9 Maret 1955 - 9 Oktober 1957
asli
4 lembar

204 Surat dari Komisi Penyelesaian Hutang Negara mengenai perpanjangan waktu mengajukan penagihan piutang terhadap Negara di waktu revolusi.

20181
tembusan
2 lembar

205 Berkas mengenai ganti rugi atas tanah untuk pendirian Asrama Polisi Rayoan Maluku Utara.

1955
tembusan

1 sampul

206 Berkas mengenai penagihan hutang kepada pemerintah atas nama LE. Latuasan untuk mengikuti pendidikan di Belanda.

22 Oktober 1956 - 4 Februari 1957
asli
1 sampul

207 Berkas mengenai permohonan sanggahan terhadap keputusan tagihan kepada Aman Djonggala Siagian.

27 Februari - 19 Agustus 1957
asli
1 sampul

208 Surat - surat mengenai penyelesaian hutang - piutang N. V. Honet.

28 Juni 1957 - 15 Juni 1959
asli
1 sampul

209 Berkas mengenai pembebasan hutang kerugian negara yang dibebankan pada Letnan Satu Soewarso.

1 Juli - 11 November 1957
asli
1 sampul

210 Berkas mengenai piutang-piutang Jawatan Kereta Api kepada instansi pemerintah tahun 1948 - 1957.

31 Juli 1957 - 28 Juni 1958
asli
1 sampul

211 Surat - surat mengenai uang ganti kerugian biaya pengangkutan bagi penghubung DPR.

2 November 1957 - 11 Agustus 1958
asli
1 sampul

212 Berkas mengenai permohonan penyelesaian hutang negara dari Panitia Korban Bumi Hangus Pangkalan Brandan.

12 Februari - 9 Desember 1958
asli
1 sampul

5) Gaji Pegawai

213 Surat - surat mengenai kedudukan jawatan Sandi berhubungan dengan Peraturan gaji Pegawai Negeri Baru.

14 Februari 1950 - 25 September 1954
tembusan
6 lembar

214 Berkas mengenai perbaikan gaji pada Ketua dan Hakim Pengadilan - pengadilan Negeri dan para Jaksa Kejaksaan - kejaksaan Negeri sesuai dengan kedudukan mereka sekarang.

2 Maret 1950 - 4 Juni 1951
asli
1 sampul

215 Surat dari Menteri Keuangan kepada PT. Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai mengenai peraturan tentang pembayaran gaji dan tunjangan lain - lainnya dari Perdana Menteri dan Menteri - menteri yang baru di angkat.

3 Oktober 1950
salinan
2 lembar

216 Surat - surat mengenai peraturan tentang pemberian pembayaran gaji Perdana Menteri dan Menteri - menteri serta pemberian tunjangan jabatan kepada Menteri yang merangkap menjadi Kepala suatu Kementerian lain (Menteri ad interim).

3 Oktober 1950 - 22 Maret 1956
salinan
3 lembar

217 Surat - surat mengenai gaji Ketua, Wakil Ketua dan Anggota - anggota Dewan Pengawas Keuangan.

10 Oktober 1950 - 31 Mei 1951
asli
1 sampul

218 Berkas mengenai peraturan gaji pegawai Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

4 Desember 1950 - 26 April 1951
asli
1 sampul

219 Surat dari Menteri Keuangan RI kepada KPM mengenai pembayaran gaji rapel istirahat dan non aktif bagi pegawai ikatan singkat.

23 Desember 1950
fotokopi
1 lembar

220 Surat Edaran Kementerian Keuangan RI tentang pemberian persekot gaji secara tidak resmi dan tidak berdasarkan peraturan yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk pengeluaran guna keperluan rumah tangga dari jawatan atau kantor tersebut.

30 Desember 1950
fotokopi
1 lembar

221 Surat - surat mengenai permohonan I Gusti Alit Raka Medan Angkasa untuk dibebaskan dari pembayaran kembali gaji kelebihan.

7 Februari 1951 - 18 Maret 1952
asli
1 sampul

222 Surat - surat mengenai pembagian gaji tentara di Bukittinggi.

27 Februari - 20 April 1951
asli
1 sampul

223 Surat-surat mengenai kenaikan gaji pegawai.

28 Februari 1951 - 20 Maret 1959
asli
1 sampul

224 Surat-surat mengenai kegelisahan di kantor C.K.C. (ex. federal) Semarang berhubung dengan dikenakannya inpassing gaji baru.

03 April 1951
asli
2 lembar

225 Surat-surat mengenai penetapan batas gaji untuk perhitungan uang lembur bagi pegawai negeri sipil.

18 April 1951
fotokopi
1 lembar

226 Surat-surat mengenai penetapan gaji pegawai yang belum disesuaikan dengan PGP (phase I dan II).

10 Mei & 7 Juli 1951
fotokopi

5 lembar

227 Surat - surat mengenai sistem pembayaran bekas pejuang dan upah pekerjaan bagi ARTP.

4 Juni 1951 - 10 Maret 1952
asli
6 lembar

228 Surat - surat mengenai gaji dan anggaran belanja pegawai sipil Djawatan Sandi.

20 Agustus - 19 September 1951
asli
5 lembar

229 Surat - surat mengenai keterangan tentang pemberhentian pembayaran gaji Sdr. Kartowihardjo.

5 September 1951 - 13 Agustus 1952
asli
6 lembar

230 Surat dari Sekretaris KPM kepada Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas - kas Negeri mengenai keterangan tentang jumlah gaji H. A. Knibbeler yang telah dipotong.

27 Oktober & 16 November 1951
asli
2 lembar

231 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Panitia Gaji d/a Menteri Urusan Pegawai mengenai perancangan gaji dari Ketua Mahkamah Agung.

20 November 1951
tembusan
1 lembar

232 Surat Edaran Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri mengenai pembayaran gaji pegawai bujang yang hilang.

20 November 1951 & 8 Mei 1953
fotokopi
3 lembar

233 Surat - surat mengenai pembayaran gaji pegawai RI dulu mengenai masa sebelum 1 Januari 1950.

10 Januari 1952 - 8 September 1954
fotokopi
1 sampul

234 Surat dari Menteri Urusan Pegawai kepada Dewan Menteri mengenai pembayaran uang pemulihan dan gaji selama Juli 1949 s/d Desember 1949 untuk pegawai di daerah - daerah RI dulu.

10 Januari 1952
salinan
2 lembar

235 Surat-surat mengenai penyesuaian pangkat/jabatan serta gaji Dr. F. Lumbantobing Gubernur Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur menurut P.G.P. 1948.

10 Januari 1952
asli
9 lembar

236 Surat dari Sekretaris Kementerian Urusan Pegawai kepada Menteri Luar Negeri mengenai gaji Mr. Mohammad Razif sebagai Pejabat Perwakilan Luar Negeri kelas III.

22 Januari 1952
salinan
1 lembar

237 Surat-surat mengenai kesukaran panitia gaji karena Jawatan/Bagian baru dari Kementerian - kementerian.

27 Februari & 23 April 1952
asli
2 lembar

238 Surat-surat mengenai pembayaran gaji dan tunjangan kemahalan.

3 Mei 1952 - 6 November 1956
tembusan, fotokopi
1 sampul

239 Surat-surat mengenai pembayaran gaji dari anggota - anggota pemerintah Swapradja Muna (Daerah Sulawesi Tenggara).

1 Agustus 1952
asli
7 lembar

240 Surat dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri mengenai penetapan uang untuk delegasi.

7 Maret 1953
fotokopi
8 lembar

241 Berkas mengenai contoh-contoh gaji, tunjangan dan lain-lain dari Kepala Negara, Para Menteri dan anggota parlemen di negara India, Nederland, Australia, Inggris, Jerman, dan Saudi Arabia.

27 April - 11 Juni 1953
asli, fotokopi, tembusan
1 sampul

242 Surat dari Menteri Keuangan kepada Semua Menteri mengenai penghentian pemberian persekot - persekot atas gaji secara tidak resmi dari uang untuk dipertanggungjawabkan yang berada dalam pengurusan bendaharawan.

09 Mei 1953
tembusan, fotokopi
2 lembar

243 Surat - surat mengenai pembayaran uang rapel kepada demobilisan tentara tahun 1953 di Sumatra Utara.

15 Juni 1953
asli
3 lembar

244 Surat dari Inspektur Keuangan Jawatan Perbendaharaan dan Kas - kas Negeri kepada semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan mengenai pelaksanaan P.P. No.8 Tahun 1952 tentang pembayaran gaji yang terkena pemberhentian.

31 Agustus 1953
fotokopi
1 lembar

245 Surat dari Sekretaris Kantor Urusan Pegawai kepada Menteri Dalam Negeri mengenai instruksi tentang upah pekerja harian setempat.

18 Januari 1954
fotokopi
2 lembar

246 Surat - surat mengenai kehilangan uang gaji pegawai Polisi bulan September 1953 dari Wilayah Geser dan Tepa.

1 Februari - 31 Agustus 1955
asli
8 lembar

247 Surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada KPM, dll mengenai surat Edaran tentang pembayaran iuran pensiun tiap bulan 2% dari gaji atau uang tunggu.

7 Mei 1954
fotokopi

2 lembar

248 Surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai pembayaran gaji pegawai RI.

26 Agustus 1954
salinan
1 lembar

249 Surat dari Biro Perancang Negara kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian daftar usul - usul perubahan tambahan pada rencana peraturan gaji pegawai negeri dari Biro Perancang Negara.

27 September 1954
asli
1 sampul

250 Surat - surat mengenai pemotongan gaji Saudara S. Pandin, guru I SMP Negeri di Palopo (Sulawesi Selatan).

27 & 29 Desember 1955
asli
3 lembar

251 Daftar susulan gaji Pegawai Kabinet Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri II RI bulan Agustus 1956 - Februari 1958.

1956-1958
asli
1 sampul

252 Surat - surat mengenai permohonan penjelasan atau pengurusan gaji Sdr. Palas Sembiring Agen Polisi kelas I mulai Agustus 1953 - Februari 1955.

2 Januari & 28 Februari 1956
asli
7 lembar

253 Seri surat - surat keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tentang penunjukkan sebagai pegawai KPM dan pemberian gaji.

27 Januari - 12 Desember 1956
salinan
1 sampul

254 Surat dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri mengenai pembuatan daftar kepala pembukuan anggaran tahun 1957.

1 Oktober 1956
fotokopi

2 lembar

255 Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi Nomor Kpts/Usek/006/1958 tentang pemberian honorarium kepada Wakil Direktur C.I.A.D. dan Kementerian Pertahanan.

21 Oktober 1958
salinan
1 lembar

256 Kumpulan potongan gaji pegawai KPM bulan April dan Mei tahun 1957 karena pengambilan barang - barang dari koperasi.

1957
asli
1 sampul

257 Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1957 Pemerintah Agung dan Badan - badan Pemerintah Tertinggi mengenai gaji dan upah pegawai Kabinet Presiden, Istana Presiden Tetap, Istana Wakil Presiden Tetap.

25 Maret 1957
asli
4 lembar

258 Surat keputusan Direktur Jenderal Biro Perancang Negara tentang pengangkatan Sdr. Sutojo dan Sdr. Doel Moeis.

7 Mei & 14 November 1957
salinan
1 sampul

259 Surat Edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai pelaksanaan PP Nomor 19 tahun 1957 tentang pemberian gaji menurut parallelschaal.

4 Juni 1957
fotokopi
1 sampul

260 Surat-surat permohonan Prof. Ir. A. H. Verkuyl, guru besar pada Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor terkait pemberian gaji pokok.

8 Juni - 2 September 1957
asli
5 lembar

261 Surat dari Wakil Perdana Menteri I kepada Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat RI mengenai laporan panitia negara peninjauan kedudukan keuangan pejabat - pejabat tertinggi.

8 Januari 1958
asli
6 lembar

262 Catatan pembicaraan di Kantor KPM mengenai pemberian honorarium kepada petugas Pembangunan Masyarakat Desa.

8 Mei 1958
asli
5 lembar

263 Surat-surat mengenai pembayaran gaji, kekurangan gaji, pensiun dan lain sebagainya selama tahun 1948 s/d 1949 di beberapa daerah Maluku sebelum dan sesudah peristiwa RMS.

15 Agustus 1959
pertinggal
1 sampul

264 Surat dari Menteri Pertama/Keuangan kepada Para Menteri mengenai gaji para Menteri Negara dan para Menteri ex officie dan Ketua Bapekan.

7 Oktober 1959
fotokopi
8 lembar

b. Pembukuan/Pemeriksaan

1) Pembukuan

265 *Beknopt Overzicht Van Het "Financieel - Administratief Stelsel" Van De Verenigde Staten Van Indonesie,* n.b. arsip dalam Bahasa Belanda.

12 April 1950
fotokopi
1 sampul

266 Daftar piutang pegawai Kabinet Perdana Menteri RI.

Juli - Agustus 1950

asli
3 lembar

267 Surat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI tentang gaji dan penghasilan lain - lain atas F. Wachendorff yang diperintah untuk pergi ke Amerika untuk meninjau pengajaran sekolah menengah.

6 Desember 1950
salinan
3 lembar

268 Surat - surat mengenai keuangan P.K.T.I. di Adonara (Flores).

30 November 1951 - 11 Oktober 1954
asli
1 sampul

269 Surat dari Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian daftar perhitungan Sekretariat Uni Indonesia-Belanda tahun 1951, n.b. beserta lampiran.

09 September 1952
tembusan
1 sampul

270 Surat dari Direktur BRN Pusat kepada Semua Ketua B.P.U.R. mengenai penutupan tahun 1952 dan lain - lain penerangan tentang uang persediaan.

19 November 1952
tembusan
1 lembar

271 Surat - surat mengenai kesulitan dalam administrasi Kempen.

7 Januari - 2 September 1953
asli
4 lembar

272 Berkas mengenai pertanggungjawaban perbendaharaan dan pengurusan keuangan.

16 Februari 1953
tembusan
1 sampul

273 Surat dari Menteri Penerangan kepada Menteri Keuangan mengenai administrasi kekayaan dan keuangan Perusahaan Film Negara.

7 Mei 1953
tembusan
2 lembar

274 Surat - surat mengenai pernyataan "lunas/telah dibayar" pada tiap - tiap bukti (kwitansi).

15 & 21 Juli 1953
tembusan
4 lembar

275 Surat - surat mengenai laporan pemeriksaan setempat pada Sekretariat Uni Indonesia-Nederland untuk tahun anggaran 1952.

29 Juli - 12 September 1953
asli
1 sampul

276 *Consolidated Monthly Activity Report November 1953 The J.G. White Engineering Corporation,* nb. arsip dalam bahasa Inggris.

17 Desember 1953
fotokopi
1 sampul

277 Surat - surat mengenai surat - surat pengesahan dan daftar - gabungan perhitungan tahunan tahun 1952 dari Sekretariat Uni Indonesia - Nederland.

28 Desember 1953 & 14 Januari 1954
asli
4 lembar

278 Surat - surat mengenai pembagian uang sajian tengah tahun pertama tahun 1954.

11 & 28 Januari 1954
asli, salinan
6 lembar

279 Surat dari Kepala Kantor Sosial RI Daerah Karesidenan Cirebon tentang penyampaian laporan tahunan tahun 1953, nb. beserta lampiran.

17 April 1954
tembusan
1 sampul

280 Ikhtisar dan daftar sisa uang rakyat asing Jerman dari buku Ned. HDL. Mij (Factory) 1940 - 1941.

1956 - 1957
asli
1 sampul

281 Daftar Memori Penjelasan Pengeluaran Presiden dan Wakil Presiden tahun 1955 - 1956.

02 Februari 1956
konsep
1 sampul

282 Berkas mengenai rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran tahun 1956 dan 1957 dari beberapa instansi.

1956 - 1957
tembusan
1 sampul

283 Daftar mengenai belanja pegawai dari Kepolisian Negara dalam tahun 1957.

1957
asli
1 sampul

284 Kartu pengawasan kredit untuk anggaran RI dari tahun 1957-1960.

1957 - 1960
asli
1 sampul

285 Daftar berbagai macam penerimaan penyetoran tunai, pembayaran atas surat penagihan, potongan dan potongan atas surat penagihan dari beberapa kantor kas pembantu di berbagai Provinsi.

Januari 1957 - Desember 1958
asli
1 sampul

286 Berkas mengenai tanda penerimaan uang, kwitansi, nota debet transaksi keuangan.

Januari - 30 November 1957
salinan
1 sampul

287 Daftar Pertelaan SPMU dari beberapa provinsi di Indonesia tahun 1957.

1957
asli
1 sampul

288 Daftar penilikan SPMU-SPMU yang telah diterima dari KPPN tahun 1957.

11 Januari 1957

konsep
1 lembar

289 Surat - surat mengenai biaya penyelidikan dan ongkos kantor tahun 1956 yang diotoriseer.

24 Januari 1957 - 15 Agustus 1958
asli
8 lembar

290 Kumpulan daftar kas Makassar, Tomohon, Pekanbaru, Pontianak, Jambi, Bukittinggi, Padang, Padang (Kantor Pos), Telukbetung, Serang, Bengkulu, Ambon, Palembang, Bandung, Semarang, Purwokerto, Surakarta, Sibolga, Magelang, Pati, Kantor pos - pos, Tasikmalaya, Garut, Jakarta, Yogyakarta, Magelang, Bondowoso, Bojonegoro, Surabaya (Kantor Pos), Madiun, Malang, Kediri, Surabaya, Tanjung Pinang, Negara Bandung, Banjarmasin (Kantor Pos) dan Samarinda (Kantor Pos).

31 Januari 1957 - 16 Januari 1960
asli
1 sampul

291 Berkas mengenai daftar penerimaan dan pengeluaran uang biaya perongkosan Provinsi Jawa Timur.

April 1957 - Februari 1958
asli
1 sampul

292 Daftar Pengeluaran Perdana Menteri bulan April - Desember 1957.

1 Mei 1957 - April 1959
asli
7 lembar

293 Berkas mengenai kerja lembur unit-unit kerja Kementrian Kehakiman.

6 Mei - 1 Juli 1957
tembusan
1 sampul

294 Surat dari Kantor Pengawas Kas Negara di Surabaya kepada Panitia Teknis Interdepartemental Urusan barang - barang peninggalan peperangan mengenai pembukuan penyetoran uang sebesar Rp. 378 pada tanggal 8 Mei 1957 di Ktrp. Ngawi.

5 Agustus 1957
tembusan

1 lembar

295 Surat - surat Kementerian Keuangan mengenai pemberitahuan pembukuan pengeluaran Kepolisian Negara dan Dewan Nasional.

12 September 1957 - 23 Juni 1958
tembusan
4 lembar

296 Berkas mengenai daftar pengeluaran ongkos perkantoran Kabinet Perdana Menteri tahun 1957.

1957
asli
1 sampul

297 Daftar Perbendaharaan dari Kantor Pengawas dan Tata Usaha Kas Negeri Surabaya, Jakarta, Jawa Barat, dan Palembang.

1957 - 1959
asli
1 sampul

298 Surat dari NV. Perusahaan Pembangunan Pertambangan kepada Direksi Bank Industri Negara mengenai penyampaian laporan bulanan November 1957, nb. beserta lampiran.

04 Januari 1958
tembusan
1 sampul

299 Kumpulan Surat Perintah Membayar Uang - uang beban pengembalian yang belum diuangkan dan ditunaikan sampai dengan 31 Desember 1957 Bagian I tahun dinas 1956/1957.

5 Januari - 9 Agustus 1958
asli
1 sampul

300 Surat-surat mengenai pemberitahuan sisa rekening giro NV. Nomura dalam likuidasi Bank Indonesia.

13 Januari - 30 April 1958
tembusan
1 sampul

301 Daftar Penerimaan Pertanggungjawaban dari Kepolisian Jawa Tengah dan Yogyakarta dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun 1958.

Januari 1958 - Januari 1959

asli

1 sampul

302 Surat-surat mengenai perintah pemindahbukuan tahun 1958 dan 1959.

8 Maret 1958 dan 30 April 1959

tembusan

1 sampul

303 Kumpulan daftar pengantar dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara kepada Kabinet Perdana Menteri.

31 Mei 1958 - 29 Januari 1959

asli

1 sampul

304 Daftar perhitungan uang untuk keperluan ongkos kantor, biaya perawatan kendaraan dinas, hadiah Tahun Baru/Lebaran/Gabungan 1958 bagi para pekerja harian.

Juni - Desember 1958

asli

4 lembar

305 Penyimpulan SPMU - SPMU yang belum diuangkan sampai dengan akhir bulan Desember 1958 Bagian I beban Tetap Tahun Dinas 1958.

22 September 1959

asli

4 lembar

306 Surat dari Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara kepada Departemen Kepolisian mengenai pengiriman surat/ tanda bukti Spd Kepala Bagian Keuangan Kantor Polisi Komisariat Kalimantan Barat di Pontianak Tahun 1959.

25 Nopember 1959

tembusan

1 lembar

307 Surat dari Bendaharawan Biro Pusat Statistik kepada Kepala Bagian Keuangan KPM mengenai ikhtisar pengeluaran dan penerimaan selama tahun dinas 1959 dari BPS.

19 Februari 1960

asli

1 sampul

2) Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)

308 Surat keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian kredit kepada BRN Pusat di Jakarta dan BPUR Sumatra Utara di Medan yang akan dibayarkan sebagai uang pertanggunganjawab.

8 Oktober 1953

salinan

3 lembar

309 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan kepada Semua Kepala Jawatan dan Bagian dalam Lingkungan Kementerian Keuangan mengenai pengawasan (inspeksi) terhadap pengurusan kas, inventaris dan penerimaan negara pada Jawatan - jawatan dan kantor - kantor.

22 Januari 1954

fotokopi

1 lembar

310 Berkas mengenai pertanggungjawaban atas UUDP dari Biro Perancang Negara tahun 1956.

Maret - Desember 1956

asli

1 sampul

311 Berkas mengenai perhitungan penerimaan dan pengeluaran UUDP Kabinet Presiden (Rumah Tangga Presiden dan Rumah Tangga Wakil Presiden) tahun 1956.

April - Desember 1956

asli

1 sampul

312 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI tentang penunjukkan M. Soenarjo Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Tanjung Pinang sebagai pegawai pembuat pertanggungan jawab "ex-officie" dalam perayaan Peringatan Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1954.

24 Mei 1956
salinan
2 lembar

313 Daftar perhitungan uang - uang yang telah diterima untuk diperhitungkan dan digunakan untuk keperluan ongkos - ongkos kantor Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Menteri - menteri Negara.

Agustus 1956 - Juli 1957
asli
1 sampul

314 Kumpulan daftar pertanggunganjawab dari uang yang diterima untuk diperhitungkan dari KPPN Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Banjarmasin, Tomohon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok dan Surakarta.

1957 - September 1958
asli
1 sampul

315 Berkas mengenai perhitungan penerimaan dan pengeluaran UUDP Kabinet Presiden tahun 1957.

Januari-Desember 1957
asli
1 sampul

316 Berkas mengenai perintah/bukti membayar uang tahun 1957.

Januari - Desember 1957
tembusan
1 sampul

317 Surat dari Kepala Seksi U.U.D.P. Bagian Keuangan KPM kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai pemeriksaan pertanggunganjawab dari seluruh bendaharawan - bendaharawan Kepolisian Negara.

22 Juli 1957
asli
3 lembar

318 Daftar perhitungan penerimaan dan pengeluaran uang sajian dari Kepolisian Komisariat Sumatra Selatan Palembang yang digunakan untuk pertanggunganjawab dan ongkos.

31 Januari 1959 - 29 Februari 1960

asli
1 sampul

319 Kumpulan daftar pertanggunganjawab dari uang yang diterima untuk diperhitungkan dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Ambon dan Kantor Polisi Komisariat Riau Tanjung Pinang.

3 Februari - 31 Juli 1959
asli
1 sampul

320 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Dewan Pengawas Keuangan mengenai laporan tentang kerugian yang diderita oleh Negara pada Bendaharawan Perjalanan Dinas KPM RI.

29 Juli 1959
asli
1 sampul

321 Surat - surat mengenai Instruksi Menteri Pertama/Menteri Keuangan Nomor 4 tentang pembuatan perincian uang kertas Bank lembaran - lembaran Rp. 1.000 dan Rp. 500 dari kas - kas Departemen/Jawatan yang terkena tindakan sanering.

28 September - 27 November 1959
tembusan, asli
1 sampul

4. PERALATAN DAN KENDARAAN

a. Peralatan Dan Gedung

322 Surat-surat mengenai pemakaian gedung dan ruangan untuk keperluan pemerintah.

14 September 1950 - 21 September 1957
asli - tembusan
1 sampul

323 Berkas mengenai perbaikan dan renovasi gedung milik pemerintah.

14 Oktober 1950 - 11 Februari 1959
asli
1 sampul

324 Berkas mengenai pengelolaan benda tak bergerak milik pemerintah.

31 Oktober 1950 - 9 Desember 1959
asli

1 sampul

325 Berkas mengenai pembelian dan pendirian gedung untuk keperluan pemerintah.

31 Januari 1951 - 14 Februari 1958
asli
1 sampul

326 Surat dari BRN Pusat kepada Ketua Dewan Rekonstruksi Nasional mengenai penyerahan pertanggungan jawab barang - barang inventaris latihan kerja pertanian BRN Daerah Basuki kepada Jawatan Pertanian Karesidenan Basuki.

21 Desember 1951 - 14 Februari 1952
asli
1 sampul

327 Berkas mengenai pengelolaan tanah persil.

21 Januari 1952 - 28 Desember 1957
salinan
1 sampul

328 Surat dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai kekuatan pembangunan (Bouweapaciteit) Jawatan Gedung-gedung Negeri tahun 1952.

19 Februari 1952
asli
1 lembar

329 Berkas mengenai prosedur pembelian barang - barang pemerintah melalui KAPP.

27 September 1952 - 16 November 1953
asli
1 sampul

330 Berkas mengenai bantahan Yayasan Gedung Nasional Cirebon.

27 Maret 1953
asli
2 lembar

331 Surat dari Panitera Mahkamah Agung mengenai penunjukan rumah Jalan Banyumas 4 kepada Hakim Agung Mr. R. Soekardono, protes keras mengenai kekeliruan dari penunjukan itu.

28 Maret - 2 April 1953
asli
3 lembar

332 Surat pengantar dari Kementerian Sosial mengenai kebutuhan alat-alat besar guna mekanisasi pertanian.

30 April 1953
asli
1 sampul

333 Surat dari Ketua DPR kepada Sekretaris Jenderal DPR RI mengenai Yayasan Pendirian Gedung baru DPR.

24 Februari - 13 Mei 1954
tembusan
8 lembar

334 Surat dari Walikota / Kepala Daerah Kota Sibolga kepada Perdana Menteri RI mengenai permohonan mendapat izin lisensi istimewa untuk pembayar hutang Gedung Nasional Sibolga.

08 April - 02 Agustus 1954
asli
5 lembar

335 Berkas mengenai pernyataan atas uang yang telah menjadi haknya pemborong Man A Tong dan Tjong Njiem Khui atas pembuatan Asrama Polisi di Ngabang Nangapinoh, Sukadana, Putusibau dan Simitau.

10 Juni 1954 - 14 Mei 1955
pertinggal
9 lembar

336 Surat - surat mengenai permintaan pengiriman tembusan konosemen pemerintah.

31 Juli - 08 September 1954
fotokopi
8 lembar

337 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai rencana 5 tahun pembangunan gedung (disampaikan daftar).

31 Juli 1954
tembusan
1 lembar

338 Berkas mengenai gedung - gedung Biro Perancang Negara.

9 Mei - 8 Juli 1955
pertinggal
1 sampul

339 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai gedung - gedung negeri yang belum dapat dipergunakan untuk maksud semula.

28 Januari - 02 Februari 1956
fotokopi
6 lembar

340 Berkas mengenai izin pemakaian Gedung Konstitiuante.

01 - 02 Oktober 1956
pertinggal
5 lembar

341 Surat dari Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengenai usul untuk melancarkan urusan bangunan.

24 - 29 Januari 1957
tembusan
5 lembar

342 Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan tenaga mengenai pekerjaan-pekerjaan yang tertunda(Overloopwerken) yang harus diselesaikan dalam tahun 1957,1958 yaitu untuk jawatan gedung-gedung Negeri Daerah Surakarta dan Jogjakarta,Jakarta.

04 Februari 1957
asli
3 lembar

343 Berkas mengenai usul penghapusan barang inventaris Jawatan Sandi dan Biro Pusat Statistik.

25 Februari 1957 - 2 Mei 1959
pertinggal
1 sampul

344 Surat - surat mengenai penyerahan barang penting pemerintah RI tahun 1946.

01 Agustus 1957 - 3 Januari 1958
pertinggal
3 lembar

345 Berkas mengenai penaksiran harga rumah.

8 Maret 1958 - 12 September 1964
asli
1 sampul

346 Surat kepada Presiden Direktur Bank Industri Negara mengenai Hotel Indonesia.

11 Agustus1958 - 3 Maret 1959

pertinggal
1 sampul

b. Kendaraan

347 Berkas mengenai pengelolaan kendaraan dinas untuk keperluan pemerintah.
16 Januari 1951 - 12 November 1959
tembusan
1 sampul

348 Surat-surat mengenai penyediaan mobil dan pesawat untuk keperluan perjalanan dinas.
16 Februari 1951 - 17 Februari 1956
asli
1 sampul

349 Berkas mengenai pengelolaan kendaraan dinas untuk BRN.
19 Juli 1951 - 8 Oktober 1952
tembusan
1 sampul

350 Surat Keputusan Perdana Menteri RI tentang usul merubah Keputusan Perdana Menteri tertanggal 21 April 1952 No 94/ PM / 1952 mengenai Panitia Negara.
29 September 1952
salinan
1 lembar

351 Berkas mengenai permohonan Achmad Siregar untuk dikembalikan autonya yang dipakai oleh Polisi Negara di Tapanuli Dalam tahun 1945.
08 Oktober 1952 - 14 Januari 1954
pertinggal
1 sampul

352 Berkas mengenai usul untuk merehabilitir perlengkapan pegawai Pamong Praja di daerah yaitu kantor, perumahan dan alat perlengkapan.
11 Agustus - 17 Desember 1953
pertinggal
1 sampul

353 Berkas mengenai inventarisasi kendaraan bermotor milik pemerintah.
19 April 1954 - 4 Desember 1957
tembusan
1 sampul

354 Surat dari PON kepada sekretariat Kabinet Perdana Menteri mengenai kendaraan yang dibutuhkan saat PON.

14 Agustus 1954
asli
1 sampul

355 Surat dari Menteri Keuangan mengenai angsuran sewa - beli kendaraan bermotor.

19 Juli - 21 September 1955
fotokopi
1 sampul

5. KESEJAHTERAAN PEGAWAI

a. Tunjangan

356 Surat-surat mengenai pengelolaan tunjangan kehidupan wakil RI di luar negeri.

3 Januari 1950 - 17 Januari 1953
pertinggal
1 sampul

357 Surat-surat mengenai pemberian tunjangan kemahalan bagi pegawai.

20 Juli 1950 - 9 Desember 1958
tembusan
1 sampul

358 Berkas mengenai pengelolaan tunjangan pensiun.

16 September 1950 - 2 Desember 1954
asli
1 sampul

359 Surat Keputusan Menteri Agama tentang tunjangan para pembawa pemimpin dan anggota pembawa amanah pembentukan Kantor Agama Propinsi di bekas Negara Indonesia Timur.

14 November 1950
salinan
2 lembar

360 Berkas mengenai permohonan uang Kurnia AF Lasut Almarhum dari Jawatan Pertambangan.

24 November 1950 - 08 Desember 1951
tembusan
1 sampul

361 Surat-surat mengenai pemberian tunjangan belajar bagi pegawai negeri yang belajar di luar negeri.

30 Desember 1950 - 22 Oktober 1959
asli
1 sampul

362 Berkas mengenai pemberian tunjangan hotel atau penginapan.

15 Januari 1951 - 30 Juli 1959
asli
1 sampul

363 Berkas mengenai tunjangan untuk pindahan pegawai ke luar Jawa.

25 Januari - 24 Desember 1951
fotokopi
6 lembar

364 Surat-surat mengenai pemberian tunjangan bagi pegawai bangsa asing.

27 Januari 1951 - 09 Juli 1954
salinan
1 sampul

365 Surat - surat Keputusan tentang pemberian tunjangan kepada Syarif Kasim Abdul Djalil eks swapraja Siak Sri Indrapura.

10 Mei 1951 - 04 Agustus 1953
salinan
5 lembar

366 Berkas mengenai perbaikan kedudukan R. Koesoemoharsono, bekas pegawai Negeri.

17 Juli 1951 - 18 Desember 1953
pertinggal
1 sampul

367 Surat-surat mengenai pemberian tunjangan untuk makan , beras dan pakaian kepada pegawai.

28 Juli 1951 - 24 Februari 1956
salinan
1 sampul

368 Surat - surat mengenai tunjangan Keraton Kesunanan Surakarta tahun 1951.

19 Agustus - 12 Oktober 1951

asli
1 sampul

369 Berkas mengenai pemberian tunjangan keluarga bagi pegawai.

24 September 1951 - 30 September 1958
tembusan
1 sampul

370 Berkas mengenai pemberian uang pemulihan kepada pegawai.

30 Oktober 1951 - 1 Oktober 1952
asli
1 sampul

371 Berkas mengenai pemberian tunjangan keahlian.

2 November 1951 - 14 Maret 1957
asli
1 sampul

372 Surat-surat mengenai pemberian tunjangan bagi menteri dan pegawai Dewan Pengawas Keuangan.

22 November 1951 - 22 Maret 1956
tembusan
1 sampul

373 Berkas mengenai nasib pegawai - pegawai rendah di Aceh.

01 - 21 Agustus 1952
pertinggal
4 lembar

374 Berkas mengenai pemberian tunjangan kepada mantan Menteri dan pejabat serta pahlawan.

17 Agustus 1952 - 20 Februari 1957
asli
1 sampul

375 Berkas mengenai kekurangan honorarium dari anggota dewan pemerintahan Kabupaten Langkat Sdr. M. Ali Hadi Broto.

01 September 1952 - 28 Mei 1954
asli
1 sampul

376 Surat keputusan menteri keuangan RI tentang pemberian tunjangan kepada pegawai negeri yang menyewa (beli) mobil pemerintah.

12 Maret 1954
salinan
3 lembar

377 Surat - surat mengenai perbaikan nasib bekas pegawai swapraja Kabupaten Karo khusus dan bagi bekas pegawai swapraja se Indonesia pada umumnya.

22 Maret - 03 Mei 1955
asli
5 lembar

378 Surat dari Menteri Perekonomian mengenai tunjangan untuk para anggota sekretariat panitia industrialisasi.

17 Mei - 25 Juli 1955
asli
2 lembar

379 Berkas mengenai pemberian tunjangan perwakilan.

26 Januari - Maret 1957
pertinggal
1 sampul

380 Berkas mengenai pemberian tunjangan bagi anggota Biro Pembangunan Masyarakat Desa.

16 April 1957 - 25 Februari 1958
asli
1 sampul

381 Surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai mengenai peninjauan kembali batas lima tahun untuk mengajukan permintaan tunjangan (onderstand).

16 Mei 1957
fotokopi
2 lembar

382 Berkas mengenai pemberian uang lembur bagi para pegawai.

1 Agustus 1957 - 21 Juni 1958
asli
1 sampul

b. Koperasi

383 Surat dari M. Hasjim Ahmad kepada Kepala Jawatan Perkembangan Organisasi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian RI mengenai piagam Pendirian Koperasi Indonesia " GERAK" dan notulen rapat peresmiannya serta laporannya.

14 - 20 Januari 1951
tembusan
1 sampul

384 Berkas mengenai peristiwa Tuanku Sulih cs dengan gerakan " Koperasi Pasar Panjang" .

17 Oktober 1953 - 6 Januari 1954
asli
1 sampul

385 Surat dari Kemeterian Keuangan mengenai pengiriman uang simpanan 1952 Pegawai Negeri.

02 Mei 1953
asli
6 lembar

c. Dana Kesejahteraan

386 Surat kepada PT. Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai mengenai tambahan fictievediensttijd dari Tn Mr H.C Campen.

28 September - 03 Oktober 1950
pertinggal
2 lembar

387 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Asuransi bagi partikelir yang atas permintaan dan atas beban pemerintah RI mengadakan perjalanan dengan pesawat terbang.

12 Desember 1950
salinan
3 lembar

388 Berkas mengenai pemberian hadiah lebaran bagi para pegawai.

22 Juni - 9 Juli 1951
asli
1 sampul

389 Surat-surat mengenai tuntutan dari organisasi-organisasi buruh tentang kenaikan gaji , pembagian beras dan tunjangan hari raya.

27 Juni 1951 - 12 Maret 1959
asli, fotokopi, salinan
1 sampul

390 Berkas mengenai permintaan jaminan untuk anggota BBM (Barisan Berani Mati).

22 Maret - 24 Juli 1952
pertinggal
1 sampul

391 Surat - surat mengenai permintaan devisien untuk Anak Agung Pandji Tisna bekas anggota parlemen.

01 September - 11 November 1953
pertinggal
8 lembar

d. Perkumpulan Pegawai

392 Surat dari SSPD Pusat (Serikat Sekerja Pegawai Pemerintah Daerah) mengenai usul - usul untuk mengenai nilai pegawai PP dan permohonan pemberian pemberian " Matrieele Steun" kepada PP dan pegawai pemerintah daerah yang lainnya.

17 Oktober 1952
asli
3 lembar

393 Surat - surat mengenai Herschikking pegawai - pegawai Polisi Negara.

21 Juli 1954
tembusan
5 lembar

394 Surat Keputusan Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri tentang permintaan sepeda untuk pegawai dan kenaikan pangkat agar merata.

15 September 1954
asli
1 lembar

e. Perumahan

395 Berkas mengenai perumahan dan mess untuk pegawai negeri dan orang asing.

20 Agustus 1950 - 28 Oktober 1958
tembusan
1 sampul

396 Berkas mengenai perumahan untuk rakyat sipil.

09 Februari 1951 - 19 April 1955
asli
1 sampul

397 Surat kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Jakarta Raya dan Jawatan Gedung - Gedung Pusat Urusan Perumahan mengenai hak kuasa urusan perumahan.

22 Desember 1951
pertinggal
5 lembar

398 Surat dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur kepada Dewan Rekonstruksi Nasional mengenai turunan buku kas fonds perumahan

27 Desember 1951
tembusan
2 lembar

399 Surat dari Gubernur Sulawesi mengenai peraturan perumahan bagi Jawatan Perdagangan.

25 Februari 1952
tembusan
2 lembar

400 Mosi DPRD Sementara kota Semarang tentang keberesan perumahan di dalam kota Semarang supaya kantor urusan perumahan Semarang dari Kementerian Sosial diserahkan kepada daerah kota besar Semarang.

18 Maret 1952
asli
2 lembar

401 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai ralat Surat Keputusan tanggal 23 April 1952 tentang pejabat yang diwajibkan bayar sewa rumah yang ditempatinya sama dengan sewa rumah itu akan tetapi sebanyak - banyaknya 15 %.

10 - 19 Mei 1952
asli
4 lembar

402 Berkas mengenai tanggung jawab UPD (Urusan Perumahan Daerah).

11 Februari - 11 Agustus 1955
asli
1 sampul

403 Surat - surat mengenai penunjukan Pimpinan Direktorat Perumahan

7 - 17 Mei 1955
tembusan
3 lembar

404 Surat dari Kepala Jawatan Gedung - Gedung Pusat mengenai denah / gambar rumah yang didiami para menteri untuk menetapkan tunjangan menteri masing - masing. (ada gambar denah rumah)

03 Desember 1955
asli
5 lembar

405 Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swantantra I Jakarta Raya tentang urusan perumahan dan pembangunannya di lingkungan perang daerah Swatantra I Jakarta Raya.

01 Desember 1958
tembusan
3 lembar

f. Tanda Jasa / Penghargaan

406 Berkas mengenai pemberian penghargaan kepada para pegawai.

6 Desember 1951 - 1 November 1959
asli
1 sampul

407 Surat - surat mengenai penghormatan terhadap saudara Oto Iskandar Dinata sebagai akibat dari perjuangannya dan kedudukannya sebagai Menteri RI.

12 November - 27 Desember 1952
asli
2 lembar

408 Berkas mengenai pemberian hadiah kepada orang - orang yang berjasa menangkap pengacau. NB. Rahasia

09 Mei - 9 oktober 1953
1 sampul

409 Berkas mengenai usul supaya Pattimura diakui sebagai pahlawan nasional dan sejarah perjuangannya ditulis di dalam buku - buku sejarah Bangsa Indonesia.

15 Mei - 30 Juni 1955
asli
2 lembar

410 Berkas mengenai pemberian bintang dan tanda kehormatan kepada anggota Kepolisian Negara.

12 Juli 1955 - 10 Juni 1959
asli
1 sampul

411 Berkas mengenai pemberian tanda jasa pada hari ulang tahun ke X proklamasi kemerdekaan NB. Rahasia

29 Juli - 11 Oktober 1955
pertinggal
1 sampul

412 Surat - surat mengenai penghargaan pemerintah kepada para pegawai yang menjadi non kooperator di masa penjajahan dulu.

22 Mei 1958 - 1959
pertinggal
1 sampul

413 Berkas mengenai pemberian bintang dari pemerintah asing.

15 November 1958 - 20 Agustus 1959
tembusan
1 sampul

6. KEHUMASAN / KEPROTOKOLAN

414 Daftar sementara rumah / kantor dan nomor telepon para menteri RIS Direktur

Kabinet Presiden dan Para Sekretaris Perdana Menteri dan Dewan Menteri.

13 Januari 1950
fotokopi
1 lembar

415 Surat - surat mengenai rencana Surat Edaran Perdana Menteri tentang sebutan sebutan.

28 Oktober 1950 - 13 Januari 1951
asli
1 sampul

416 Surat-surat mengenai singkatan nama kantor di lingkungan Kementerian Agama dan Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri.

28 Oktober 1950 & 9 Desember 1953
tembusan
3 lembar

417 Surat mengenai ucapan terima kasih atas sambutan dan bantuan ketika kunjungan ke daerah Sulawesi.

02 Januari 1952

pertinggal
1 lembar

418 Surat kepada Sukiman Wirjosandjojo mengenai resepsi di Gedung Merdeka No 06 Jakarta .

28 April 1952
pertinggal
1 lembar

419 Berkas mengenai Panitia Negara Urusan Protokol.

2 Mei 1953 - 10 Januari 1958
salinan
1 sampul

420 Berkas mengenai sumbangan pidato perayaan 17 Agustus 1953.

18 Agustus 1953
asli
5 lembar

421 Surat dari wanita jelata kepada Presiden Sukarno mengenai kegembiraan rakyat Maluku atas kedatangan Sukarno di Maluku.

13 Mei 1954
asli
1 lembar

422 Berkas mengenai penyelenggaraan pekan kerja bakti Kabinet Perdana Menteri.

24 Agustus 1954 & 19 Agustus 1957
pertinggal
1 sampul

423 Pengumuman - pengumuman dari Sekretaris Dewan Menteri Kabinet Perdana Menteri.

13 Januari 1953 - 22 Desember 1955
pertinggal
1 sampul

424 Surat - surat mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam surat menyurat.

18 Februari 1955 - 13 Mei 1959
asli
3 lembar

425 Surat dari Direktur Kabinet Presiden mengenai usul kedudukan istri pertama dan istri yang lain dari Presiden / wakil Presiden RI.

01 November 1955

asli
2 lembar

426 Surat kepada ketua DPR RI mengenai giliran hadir menteri di gedung DPR.
18 Juni 1956
pertinggal
5 lembar

427 Kumpulan pengumuman - pengumuman yang dikeluarkan oleh kementerian PP dan K Tahun 1957.
01 Januari - 31 Desember 1956
fotokopi
1 jilid

428 Surat - surat mengenai pembelian karangan bunga atas beban negara.
09 Maret - 22 Oktober 1957
asli
2 lembar

429 Berkas mengenai penyelenggaraan penyambutan kunjungan Kepala Negara Asing.
13 April 1957 - 03 April 1959
pertinggal
1 sampul

430 Surat dari Kementerian Dalam Negeri mengenai ejaan nama Menteri Dalam Negeri.
23 Mei 1957
asli
1 lembar

431 Surat - surat mengenai pembelian satu theestel perak seharga Rp. 7.125; untuk tanda mata diserahkan kepada kebijakan Menteri Luar Negeri.
22 Oktober 1957 - 20 Desember 1958
asli
1 sampul

432 Berkas mengenai protokol yang perlu mendapat tinjauan dan kepastian.
26 Februari 1958
asli
7 lembar

433 Surat dari Ikatan Demobilian Nasional Koordinator Cirebon kepada Menteri Djuanda mengenai ucapan berduka cita .

01 April 1958
asli
1 lembar

434 Surat - surat mengenai tata tertib pada penggunaan bendera kebangsaan.
11 Juli 1958 - 31 Agustus 1959
pertinggal
1 sampul

435 Surat - surat mengenai usul perubahan kata - kata lagu kebangsaan Indonesia Raya.
19 Juli - 21 Oktober 1958
asli
5 lembar

436 Berkas mengenai permohonan izin untuk menggunakan Lambang Negara diatas buku.
31 Desember 1958 - 16 Juni 1959
asli
1 sampul

437 Berkas mengenai acara kunjungan Presiden beserta rombongan di Argentina 21 - 26 Mei 1959.
13 Mei 1959
asli
1 sampul

438 Kliping koran mengenai kunjungan - kunjungan Presiden Sukarno (Harian The Mainichi).
09 Juni 1959
asli
1 sampul

439 Surat dari Kepala Jawatan Peradilan Agama kepada segenap Instansi Sipil / Militer mengenai doa pada detik proklamasi di Istana Merdeka .
08 Agustus 1959
asli
6 lembar

B. KHUSUS

1. KEAMANAN

a. Gangguan Keamanan

440 Surat-surat mengenai situasi keamanan Sumatra Timur.

14 Juni dan 1 Agustus 1950
asli
6 lembar

441 Berkas mengenai laporan gangguan keamanan terhadap kerja Jawatan Kereta Api di Aceh dll.

23 Juni 1950 - 29 Oktober 1954
asli, turunan
1 sampul

442 Surat-surat mengenai Gerakan IIH dan AUI.

10 Oktober 1950 - 6 November 1951
asli
1 sampul

443 Kumpulan surat kawat mengenai gangguan keamanan .

12 Oktober 1950 - 26 Oktober 1955
asli, turunan
1 sampul

444 Surat-surat dari Djaksa Agung kepada Wakil Perdana Menteri mengenai keadaan gerombolan liar dalam Karesidenan Bogor, nb. beserta lampiran.

14 dan 19 Oktober 1950
asli
1 sampul

445 Surat - surat mengenai gangguan keamanan terhadap perkebunan yang ada di berbagai wilayah di Jawa, Sumatra dan Kalimantan.

28 Oktober 1950 - 28 Juli 1956
asli, salinan
1 sampul

446 Surat dari Kepala Jawatan Resersi Pusat kepada Wakil Perdana Menteri mengenai aliran bekas Hisbulloh di Kawedanan Tjitjurug, beserta lampiran.

30 Oktober - 28 Desember 1950
asli, salinan
2 lembar

447 Surat-surat mengenai gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh A.P.C. Dado di Jawa Barat.

2 November - 20 November 1950

salinan
9 lembar

448 Surat - surat mengenai gangguan keamanan terhadap kerja Jawatan Kehutanan di Nganjuk, Indramayu, Madura dan Sumatra.

26 November 1950 - 7 Desember 1955
asli, salinan
1 sampul

449 Berkas mengenai gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Jakarta Raya, Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Sunda Kecil.

6 Desember 1950 - 19 Desember 1956
tembusan
1 sampul

450 Berkas mengenai gangguan keamanan terhadap kapal-kapal yang mendarat di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia.

13 Desember 1950 - 10 Maret 1954
asli, pertinggal
1 sampul

451 Kumpulan laporan tengah bulan mengenai keamanan dari Jawatan Kepolisian Negara Djakarta dan berbagai karesidenan di Pulau Jawa.

8 Januari 1951 - 3 Agustus 1956
tembusan
1 sampul

452 Surat dari Kepala Staf I Corps Polisi Militer kepada Wakil Perdana Menteri mengenai pamflet - pamflet gerombolan liar di Kalimantan, beserta lampiran.

16 Januari 1951
asli
7 lembar

453 Surat-surat mengenai aktivitas Kapten Westerling. NB: ada arsip foto.

17 Januari 1951 - 3 Maret 1951
asli, turunan
1 sampul

454 Kumpulan laporan bulanan mengenai keamanan di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi periode tahun 1950 - 1956.

14 Februari 1951 - 28 Juni 1956
asli, salinan

1 sampul

455 Berkas mengenai aktivitas gerakan DI/TII di berbagai wilayah di Indonesia, Skema Organisasi DI/TII tahun 1953 dan petunjuk gerakan TII/NII di bawah tanah.

15 Februari 1951 - 13 Juli 1956
asli, tembusan
1 sampul

456 Surat-surat mengenai aktivitas gerombolan Brigade Tjitarum, Jawa Barat.

21 Februari 1951 - 19 Juni 1951
asli, turunan
5 lembar

457 Surat dari Jawatan Resersi Pusat kepada Koordinator Keamanan mengenai suasana politik di Jawa Barat di masa akan terjadi persetujuan KMB.

1 Maret 1951 & 5 April 1951
asli, turunan
2 lembar

458 Surat-surat mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di Perusahaan P dan T.

7 Maret - 22 Desember 1951
asli, salinan
8 lembar

459 Surat-surat mengenai sengketa tanah, perkebunan dan hutan di berbagai wilayah di Sumatra, Jawa dan Sulawesi.

8 Maret 1951 - 21 April 1959
asli
1 sampul

460 Surat dari Kepala Biro Menteri/Sekdjen Kementerian Penerangan kepada Wakil Perdana Menteri mengenai kegiatan gerombolan bersenjata di daerah Kecamatan Kadungora Jawa Barat, beserta lampiran.

17 Maret - 14 April 1951
asli
3 lembar

461 Surat dari Djaksa Agung kepada Kepala Staf "K" mengenai rencana pembunuhan terhadap Presiden dll, beserta lampiran.

7 Mei - 22 Mei 1951
asli, salinan
5 lembar

462 Surat dari Kepala Jawatan Resersi Pusat kepada Kepala Polisi Propinsi Jawa Barat mengenai rencana pengacauan Barisan Sakit Hati atau Hantu Malam.

15 September 1951
tembusan
2 lembar

463 Surat-surat mengenai uang kertas Rp.10 dengan cap Republik Maluku Selatan.

10 Oktober 1951 - 27 Februari 1952
asli, pertinggal
7 lembar

464 Surat-surat mengenai aktivitas Kahar Muzakkar.

20 Oktober 1951 - 7 Desember 1954
salinan, pertinggal
1 sampul

465 Surat-surat mengenai peristiwa pemberontakan Persatuan Kaum Tani Indonesia di Adonara, Flores.

12 November 1951 - 19 Agustus 1952
asli, salinan
1 sampul

466 Surat-surat dari Jawatan Kepolisian Negara Bagian Dinas Reserse Kriminil mengenai peredaran uang palsu, nb. ada arsip foto.

15 Desember 1951 - 18 Mei 1956
asli
1 sampul

467 Surat-surat mengenai tuntutan oleh Barisan Tani Indonesia.

22 Desember 1951 - 1 April 1954
asli, tembusan
3 lembar

468 Surat-surat mengenai pengaduan Potjut Mawardi akan adanya perbuatan kejam selama pergolakan di Aceh.

31 Desember 1951 - 24 Mei 1952
asli
1 sampul

469 Surat-surat mengenai aktivitas gerombolan Kapten Smith.

9 Januari - 12 Mei 1952

tembusan
4 lembar

470 Surat dari Kepala Bagian Dinas Reserse Kriminil Jawatan Kepolisian Negara kepada Staf "K" Pusat mengenai pengawasan anggota PRI Muchsin Dendawidjaja, beserta lampiran.

4 Februari 1952 - 10 Januari 1953
asli
1 sampul

471 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Menteri Pertanian mengenai pertikaian di Kebun Boloredjo dan Kalidermo.

22 Februari 1952
tembusan
3 lembar

472 Berkas mengenai aktivitas gerombolan MMC.

26 Februari 1952 - 14 September 1954
asli
1 sampul

473 Kumpulan laporan bulanan dari Jawatan Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai keamanan perkebunan dari tahun 1952 - 1954.

Maret 1952 - 6 Maret 1954
tembusan
1 sampul

474 Surat-surat mengenai kasus penjualan anak di daerah Bandung dan Karawang.

4 Maret - 28 Mei 1952
asli, pertinggal
1 sampul

475 Surat dari Kepala Bagian Keamanan Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai kasus penangkapan Kardja bin Wangsaganda (Gerakan 51 di Slawi).

13 Maret 1952 - 2 Februari 1953
asli, pertinggal
1 sampul

476 Surat-surat mengenai peredaran uang tidak resmi di Aceh.

29 April & 24 Mei 1952
tembusan
1 lembar

477 Kumpulan laporan khusus mengenai gangguan keamanan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Staf "K".

6 Mei 1952 - 12 Oktober 1954
asli
1 sampul

478 Berkas mengenai laporan dari Komandan Sie II di Talun/ Muntilan (Kedu) mengenai keadaan organisasi PPDI dan BTI di daerah Selo. NB : Rahasia.

07 Juni - 26 Agustus 1952
asli
3 lembar

479 Laporan 10 Harian dari Kepala Bagian Dinas Reserse Kriminil Jawatan Kepolisian Negara kepada Bagian Keamanan/Politik Kabinet Perdana Menteri mengenai pemberontakan Batalyon 426, beserta lampiran.

13 Juni 1952
asli
4 lembar

480 Surat dari Kepala Bagian Dinas Security Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai dasar psikologis Gerakan Darul lslam, beserta lampiran.

19 Juni 1952
tembusan
10 lembar

481 Kumpulan laporan mingguan khusus mengenai gangguan keamanan dalam wilayah Jawa Tengah tahun 1952 - 1954.

26 Juli 1952 - 27 Januari 1954
asli, turunan
8 bundel

482 Surat-surat dari Kepala Bagian Dinas Reserse Kriminil kepada Perdana Menteri mengenai Ichtisar singkat tentang kriminaliteit dalam Triwulan I dan II tahun 1952 dan Triwulan II tahun 1953.

22 Agustus 1952 dan 21 Januari 1954
fotokopi
1 sampul

483 Surat-surat mengenai kejadian di Maryland Sumatra Utara.

26 Desember 1952 - 18 Mei 1953
asli, pertinggal
1 sampul

484 Berkas mengenai penemuan benda-benda mencurigakan di wilayah perairan Indonesia. NB: ada arsip foto 7 lembar.

13 Januari 1953 - 16 Maret 1954
salinan
1 sampul

485 Berkas mengenai penahanan Nitipuro cs anggota BTI ranting Balongan, Jawa Timur.

10 Juni 1953 - 27 Desember 1953
asli, turunan
1 sampul

486 Surat-surat mengenai adanya prangko dari RRT yang berisi slogan komunis.

5 Agustus 1953 - 10 Februari 1954
asli
1 sampul

487 Surat - surat mengenai keamanan pribadi pejabat wedono dan camat di daerah kacau.

19 September - 21 Oktober 1953
tindasan
10 lembar

488 Surat-surat mengenai isu pembunuhan besar-besaran di daerah Banjar/ Cilacap.

26 September 1953 - 2 November 1954
asli, tembusan
1 sampul

489 Laporan mengenai peristiwa Daud Beureueh beserta Pernyataan Bersama dari Perbepsi cs di Pangkalan Brandan.

27 September - 16 Nopember 1953
asli, pertinggal
6 lembar

490 Surat-surat mengenai gangguan keamanan seputar PON ke III di Medan.

13 Oktober 1953 - 16 Januari 1954
asli, salinan
9 lembar

491 Surat-surat mengenai pelarangan kepada Panitia Kesatuan Aksi Anti DI-TII-NII Pakan Baru untuk mengadakan rapat umum dan demonstrasi.

21 Oktober - 29 Desember 1953

asli, pertinggal
6 lembar

492 Surat-surat mengenai kecurangan-kecurangan di Jawatan Perkebunan.
21 Oktober - 21 Desember 1953
asli, pertinggal
1 sampul

493 Surat-surat mengenai S. Abu Bakar pendukung gerakan Tengku Daud Beureuh di Aceh.
14 November 1953 - 26 Januari 1954
asli
1 sampul

494 Laporan Harian Staf Umum Angkatan Darat kepada Wakil Perdana Menteri mengenai situasi keamanan no 29/sitrap/53, No 8/54, dan no 9/54.
16 November 1953 - 13 Februari 1954
Kopi
1 sampul

495 Surat-surat mengenai peristiwa ketegangan antara suku Aceh dan suku Batak. (Panitia Persadaan).
17 November 1953 - 16 Juni 1954
asli
10 lembar

496 Berkas laporan dari Jawatan Kepolisian Negara Bagian Dinas Reserse Kriminil kepada Perdana Menteri mengenai peristiwa kerusuhan Abubu - Titawaai di Pulau Saparua, Maluku.
28 November 1953 - 19 Juli 1954
asli, salinan
1 sampul

497 Surat dari Ketua Staf "K" Propinsi Sumatra Tengah kepada Perdana Menteri mengenai laporan rapat Staf "K" yang bersangkutan dengan keamanan.
9 Desember 1953
asli
5 lembar

498 Surat-surat mengenai gerakan Gerilya Nederland.
10 Desember 1953 - 17 Februari 1954
turunan

1 sampul

499 Surat-surat mengenai peristiwa Hotel Simpang Jawa Timur.
22 Januari - 6 Februari 1954
asli, salinan
8 lembar

500 Surat-surat mengenai gerakan No Korompis di Minahasa.
25 - 28 Januari 1954
asli, turunan
8 lembar

501 Kumpulan Surat Pernyataan dari berbagai organisasi massa untuk membasmi DI/TII dan komplotan Belanda yang hendak menghancurkan RI.
25 Januari - 19 April 1954
asli
1 sampul

502 Surat-surat mengenai laporan tahunan dan gambar statistik kejahatan di wilayah Jawa Tengah tahun 1953.
30 Januari - 17 Maret 1954
asli, tindasan
1 sampul

503 Surat -surat mengenai gerakan rakyat di Simpang III Takengon Aceh Tengah terhadap gerombolan pengacau.
15 Maret - 6 April 1954
asli, pertinggal
4 lembar

504 Berkas mengenai gerakan ilegal gerombolan Hadi Nusantara di Karesidenan Besuki.
29 - 17 Maret 1954
asli
1 sampul

505 Surat-surat mengenai rapat umum PKI di berbagai daerah.
6 April - 12 Agustus 1954
asli, turunan
1 sampul

506 Surat-surat mengenai berdirinya Negara Bagian Aceh selaku negara bagian NII.

30 April 1954 - 17 Februari 1956

asli, salinan
1 sampul

507 Surat-surat mengenai perselisihan antara kaum tani di Jember dengan LMOD.
12 Mei - 2 Desember 1954
asli
1 sampul

508 Surat-surat mengenai berita kematian Kahar Muzakkar dan penyerahan Corry (istrinya). NB: ada arsip foto.
5 Juni - 14 September 1954
asli, turunan
1 sampul

509 Surat - surat mengenai perlawanan bersenjata gerombolan Hadji Kamlon di Sulu.
17 Juni - 3 Juli 1954
asli, tembusan
4 lembar

510 Surat - surat mengenai adanya pengiriman mata-mata Komunis Tionghoa ke Indonesia.
17 Juni 1954 - 14 Juni 1955
pertinggal, turunan
6 lembar

511 Laporan - laporan Biro Keamanan Kabinet Perdana Menteri mengenai masalah gangguan keamanan, hubungan antara Kedutaan Rusia dan Kedutaan RRT, aktifitas PRRI, PKI dan SEATO.
23 Juni - 11 Oktober 1954
asli, tembusan
1 sampul

512 Berkas mengenai pemindahan markas besar Partai Komunis Malaya ke Indonesia.
13 Februari & 21 Juli 1954
asli, pertinggal
7 lembar

513 Surat mengenai jawaban dari Jawatan Penerangan NII Aceh dan sekitarnya atas Keterangan Pemerintah RI tentang laporan Panitia Peninjau Aceh.
12 Agustus 1954
asli
2 lembar

514 Surat-surat mengenai peristiwa penyerbuan rakyat di Bawean Surabaya.

12 Agustus - 26 Oktober 1954
asli
1 sampul

515 Surat dari T.R. Mohd Ali kepada Wakil Perdana Menteri I mengenai keadaan gerombolan Beureuh cs di sekitar Kabupaten Aceh Timur.

8 & 23 September 1954
asli
8 lembar

516 Laporan Bagian DPKN Jawatan Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai keamanan dan tinjauan sepekan disekitar persoalan Kabinet Ali - Wongso.

2 - 14 Oktober 1954
asli
1 sampul

517 Surat dari Kepala Polisi Jawa Timur kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai adanya usaha partai politik untuk mempengaruhi PKD, beserta pengantar.

14 Oktober & 18 November 1954
salinan
3 lembar

518 Surat dari a.n. Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pertahanan mengenai penangkapan ikan dengan bahan peledak di perairan Serasan, Pulau Tujuh.

14 Oktober 1954
tembusan
4 lembar

519 Surat dari Panitia Sementara Usaha Penampungan Bekas Pedjuang Bersenjata Makassar kepada Panglima TT VII dan Gubernur Sulawesi mengenai tuntutan Komandan Kompi TII di Malino.

17 November 1954
tindasan
2 lembar

520 Surat-surat mengenai gerakan Amma Towa di Sulawesi Selatan.

20 November 1954 - 23 November 1955
asli
1 sampul

521 Laporan dari Kepala Bagian Dinas Sekuriti Propinsi Sumatra Selatan mengenai Kongres BTI Daerah Sumatra Selatan ke I.

25 November 1954
salinan
3 lembar

522 Surat dari Gubernur Sumatra Utara kepada Perdana Menteri mengenai korespondensi diantara pemimpin pemberontakan di Aceh, beserta lampiran.

31 Desember 1954
asli
1 sampul

523 Surat-surat mengenai persoalan pentraktoran tanah di Perkebunan P&T Lands di Subang.

7 Maret - 14 Juni 1955
pertinggal, asli
1 sampul

524 Surat-surat dari Kepala Polisi Sulawesi Utara kepada Kepolisian Negara mengenai tuduhan terhadap Drs. M.M.Dunda sebagai penjual negara.

8 Maret 1955 & 14 Juni 1955
salinan
1 sampul

525 Surat-surat mengenai organisasi ilegal Bala Nampira di Karesidenan Pati Jawa Tengah.

31 Mei - 11 Juli 1955
asli
5 lembar

526 Surat-surat mengenai propaganda Belanda sekitar RMS di Makassar.

8 Juli 1955 - 3 April 1956
asli
1 sampul

527 Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Kalimantan tentang Panitia Negara Penampungan Korban Kekacauan Karesidenan Kalimantan Barat.

27 September 1955
Petikan
2 lembar

528 Surat-surat mengenai provokasi yang dilemparkan oleh pihak gerombolan di daerah Banten.

1 November 1955 - 17 Februari 1956
asli, salinan
1 sampul

529 Surat dari Kepala Kepolisian Negara Bagian DPKN kepada Perdana Menteri mengenai peringatan Komandan TII Res.VII Tharmihim T&T V Tengku Tjhik Ditiro D.S Timur DSKT.

3 Mei - 12 Juni 1956
asli, turunan
3 lembar

530 Surat dari Jaksa Agung Muda kepada Perdana Menteri mengenai adanya uang yang dibuat oleh PRRI/PERMESTA.

22 September 1959
asli
5 lembar

b. Hukum

531 Kumpulan Peraturan, Penetapan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI tahun 1950, beserta pengantar.

26 September 1950
fotokopi
1 sampul

532 Surat-surat mengenai kasus penggelapan uang .

7 Oktober 1950 - 8 Februari 1953
asli, tembusan
1 sampul

533 Surat-surat mengenai kasus korupsi .

8 November 1950 - 10 Juli 1957
pertinggal, salinan
1 sampul

534 Laporan Let.Kol A. Gani mengenai peninjauan terhadap rumah tahanan di Jawa Barat dan Jawa Tengah dan pembicaraan dengan Amir Patah di Tasikmalaya.

28 Desember 1950
salinan
5 lembar

535 Surat-surat mengenai kasus penyelundupan di berbagai daerah. NB: Arsip berbahasa Indonesia dan Belanda.

9 Januari 1951 - 22 Februari 1955

asli
1 sampul

536 Surat-surat mengenai perkara Kiai As'at dari Partai Masyumi.
20 Maret 1951 - 24 Desember 1952
tembusan
1 sampul

537 Berkas mengenai perkara SOB.
12 April 1951 - 14 November 1956
tembusan
1 sampul

538 Berkas mengenai kasus surat keluar yang dikirimkan oleh para tawanan di Karesidenan Surakarta.
23 Mei - 15 Agustus 1951
asli, turunan
1 sampul

539 Surat-surat mengenai status anak-anak yang umurnya lebih 2 tahun namun masih ikut ibunya di dalam penjara.
28 Mei - 2 Agustus 1951
asli, salinan
3 lembar

540 Surat-surat mengenai tindakan terhadap penyiaran berita mutasi di Angkatan Darat.
18 September 1951 - 5 November 1954
asli, salinan
1 sampul

541 Surat -surat mengenai permintaan Visum et Repertum.
26 September 1951 - 20 Oktober 1952
tembusan, pertinggal
1 sampul

542 Surat dari Bagian Politik/Keamanan Kabinet Perdana Menteri kepada Jawatan Kepolisian Negara mengenai protes Union of Czechoslovak Women terhadap penangkapan Trimurti.
17 Oktober 1951 - 8 Januari 1952
turunan
3 lembar

543 Berkas mengenai Panitia Penyelesaian Tangkapan Militer dan Politik.

5 November 1951 - 12 Februari 1952
asli
1 sampul

544 Surat dari Panitia Pembentukan Pusat Pengusutan Penyelundupan kepada Perdana Menteri mengenai usul mendirikan Pusat Pengusutan Penyelundupan, beserta lampiran.

21 Desember 1951
asli
1 sampul

545 Berkas mengenai tahanan Razzia Agustus 1951.

14 Januari 1952 - 26 Mei 1952
tembusan
1 sampul

546 Surat-surat mengenai penyelesaian perkara para tahanan (Amiruddin, Versteegh, Teukoe Soelaimansjah, dll).

8 Februari 1952 - 20 November 1956
tembusan
1 sampul

547 Surat dari Ketua Staf "K" Karesidenan Pekalongan kepada Ketua Staf "K" Pusat mengenai permohonan Kepala Polisi Kabupaten Pemalang untuk memeriksa dan memasukkan Dw Durachman cs ke dalam Doorgangskamp di Tegal berdasarkan SOB.

26 Februari - 7 Juni 1952
asli
1 sampul

548 Surat-surat mengenai rehabilitasi Djurumudi SSPV yang berjasa menggagalkan penyelundupan candu di Semarang.

20 Juni 1952 - 13 Februari 1953
asli, pertinggal
1 sampul

549 Surat-surat mengenai perhubungan pekerjaan dinas antara Kepolisian dan Kejaksaan.

1 Agustus 1952 - 14 September 1953
asli
1 sampul

550 Kumpulan resolusi dari SBG tentang tindakan Pengadilan Negeri Cirebon, tuntutan jaksa daerah, pelarangan Aidit dan Nyoto ke Nederland dan pelarangan rapat umum

1 November 1952 - 3 April 1953
asli, pertinggal
4 lembar

551 Surat-surat mengenai penahanan kapal Chie Sen dan pengambilan harta benda Atjeh Trading Shipping Coy Ltd.

10 Februari - 22 Oktober 1953
asli, pertinggal
1 sampul

552 Surat-surat mengenai pengawal Amir Fatah di Nusakambangan.

19 Maret 1953 - 7 Januari 1954
tembusan
8 lembar

553 Surat-surat mengenai deklarasi honorarium Mr. Iwa Kusuma Sumantri dalam perkara Pemerintah RI lawan H.N.Blogg.

8 April - 29 Juni 1953
asli, pertinggal
9 lembar

554 Berkas mengenai penahanan lama.

23 Juni 1953 - 12 Juli 1954
asli, salinan
1 sampul

555 Surat-surat mengenai permohonan grasi/amnesti/abolisi bagi bekas pejuang.

31 Juli 1953 - 4 September 1954
asli, tembusan
1 sampul

556 Surat-surat mengenai tahanan yang melarikan diri dari rumah penjara Kraksaan , Probolinggo.

2 - 7 Desember 1953
asli, turunan
5 lembar

557 Surat-surat mengenai usul Jaksa Agung untuk mengadakan pengadilan cepat dengan adanya Hakim Pembantu.

15 Desember 1953 - 25 Januari 1954
asli, pertinggal

9 lembar

558 Surat-surat mengenai sengketa rumah di Kebayoran, Padang Sidempuan, Bondowoso dan Mampang.

2 Januari 1954 - 20 Juni 1955
asli
1 sampul

559 Kumpulan laporan Perwakilan Republik Indonesia di Singapore mengenai penyelundupan illegaal ke Singapore.

8 Januari 1954 - 9 Juni 1955
asli, fotokopi
1 sampul

560 Surat dari Kepala Bagian Dinas Reserse Kriminil Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai keadaan para tawanan di Aceh, beserta lampiran.

5 Februari 1954
asli
7 lembar

561 Berkas penyelidikan Soemarsono alias Sudardjo Marsono Setjodiwirjo bekas Gubernur Militer. NB: ada arsip Foto.

15 Februari - 13 September 1954
asli
1 sampul

562 Protes dari SBG (Serikat Buruh Gula) terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

21 Februari 1954
asli
5 lembar

563 Surat-surat mengenai permintaan pembebasan Sidik Kertopati, anggota Parlemen dari Dewan Organisasi Sarikat Tani Indonesia "Sakti".

30 April 1954 - 25 Juni 1954
asli, salinan
1 sampul

564 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Perdana Menteri mengenai tindakan Kepolisian di daerah Banten yang harus dikoreksi, beserta lampiran.

11 Mei 1954
asli
10 lembar

565 Surat Edaran dari International Criminal Police Commission mengenai Substitution thefts, beserta pengantar. Arsip berbahasa Perancis dan Inggris.

28 Mei 1954 - 22 Juni 1954
asli
1 sampul

566 Surat-surat mengenai perkara komplotan gelap "Sam Tiam Hwee" Bintang Tiga di Sumatra Utara.

28 Juli 1954 - 3 Mei 1955
asli
8 lembar

567 Berkas mengenai perkara H.C.J.G. Schmidt.

6 September 1954 - 6 Mei 1959
tembusan, salinan
1 sampul

568 Berkas mengenai protes keputusan hakim atas dakwaan kaum tani di Jember.

07 - 08 September 1954
tembusan
4 lembar

569 Berkas mengenai tuntutan hukuman terhadap Jaksa Andi Amir Hamzah.

30 September - 15 Desember 1954
asli
1 sampul

570 Surat mengenai perbuatan pegawai Belanda yang merugikan keuangan GIA.

28 Oktober 1954
pertinggal
1 sampul

571 Surat-surat mengenai permintaan fonds untuk bekas tahanan yang hendak kembali ke tempat asalnya.

11 November 1954 - 3 Februari 1955
salinan
3 lembar

572 Surat-surat mengenai peristiwa pemberontakan orang2 hukuman di Nusakambangan.

24 Maret 1955 - 13 Juni 1955
asli

1 sampul

573 Rapport Sumatra Tengah dari Thesauri Djenderal Kementerian Keuangan mengenai sikap yang diambil dalam menghadapi perbuatan yang koruptif, beserta pengantar. Berbahasa Belanda

13 April 1955
asli, fotokopi
1 sampul

574 Surat-surat mengenai kasus penyerahan tersangka orang Indonesia kepada pembesar di Inggris tanpa konfirmasi atasannya.

2 Mei - 23 Agustus 1955
asli, pertinggal
1 sampul

575 Rancangan Keputusan Presiden untuk memberikan pengurangan hukuman kepada orang-orang hukuman yang telah dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaannya, beserta pengantar.

22 Juli - 26 Juli 1955
asli, fotokopi
1 sampul

576 Surat-surat mengenai masalah pelarian politik.

31 Agustus 1955 - 20 Agustus 1956
salinan
1 sampul

577 Surat-surat mengenai tahanan-tahanan Polisi di Gianyar.

11 Oktober 1955 - 24 Agustus 1956
tembusan
1 sampul

578 Surat-surat mengenai Hakim contra Jaksa.

24 Desember 1955 - 23 Maret 1956
asli, salinan
8 lembar

579 Surat dari Kepala Bagian Keamanan Gubernur Jawa Tengah kepada Perdana Menteri mengenai penangkapan pemimpin PKI Alex Iskandar cs, beserta lampiran.

9 Januari - 21 Juni 1956
asli
4 lembar

580 Surat-surat mengenai penahanan dan pemeriksaan Ibnu Parna dari Dewan Nasional Kongres Rakyat Seluruh Indonesia.

15 Februari - 21 Maret 1956
tembusan
7 lembar

581 Surat -surat mengenai penangkapan penduduk yang terlibat dalam Peristiwa Pakis.

14 Juni - 5 Juli 1956
fotokopi
7 lembar

582 Surat-surat mengenai permohonan penyelesaian perkara tahanan tentara ex Batalyon 426.

7 Juli - 22 Oktober 1956
asli, salinan
1 sampul

583 Berkas peninjauan perkara Mudjitaba, terdakwa pembunuh Oto Iskandar Dinata.

30 November 1956 - 4 Desember 1958
asli, pertinggal
1 sampul

584 Risalah mengenai Angkatan Perang, hukum disiplin tentara, hukum pidana tentara dan hukum acara pidana tentara, beserta pengantar.

17 Desember 1956
fotokopi
10 lembar

585 Surat dari Perdana Menteri kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung merangkap Jaksa Tentara Agung mengenai Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan.

28 Desember 1957 - 15 Januari 1958
pertinggal
1 sampul

586 Berkas mengenai perkara penerbang A.L. Pope.

3 Juni 1958 - 23 Februari 1959
asli
1 sampul

587 Surat-surat mengenai pandangan atas pribadi Rangkajo Rasuna Said.

25 Juni & 21 Desember 1959
tembusan, salinan
2 lembar

c. Peralatan Keamanan

588 Surat-surat mengenai pembangunan asrama dan perumahan untuk tentara dan kepolisian. NB: Ada arsip foto dan kearsitekturan.

22 Februari 1951 - 20 September 1956
asli
1 sampul

589 Berkas mengenai pengadaan peralatan dan kendaraan bermotor untuk urusan keamanan.

10 Mei 1951 - 9 Januari 1958
asli
1 sampul

590 Surat-surat mengenai rencana biaya Operasi Merdeka di Sumatra Tengah.

15 Mei - 20 September 1951
salinan
6 lembar

591 Surat-surat mengenai pembelian pabrik mesiu di Italia untuk keperluan militer.

21 Desember 1951 - 8 April 1952
asli
3 lembar

592 Surat-surat mengenai pengelolaan gedung untuk keperluan Jawatan Kepolisian Negara. NB: Ada arsip kearsitekturan kantor DRK DKN.

11 Januari 1952 - 30 Juli 1958
tembusan
1 sampul

593 Surat-surat mengenai perbaikan dan pembuatan jalan di Tjikupa, Subang/Kuningan Selatan, dll untuk kepentingan keamanan.

10 Juni 1952 - 23 Agustus 1955
asli
1 sampul

594 Surat-surat mengenai biaya rekonstruksi CTN tahun 1951/1952.

7 Oktober 1953 - 2 Februari 1954
tembusan
9 lembar

595 Surat-surat mengenai prosedur pembelian peralatan dalam lingkungan Kementerian Pertahanan.

25 Maret - 7 Desember 1954
salinan
1 sampul

596 Surat-surat mengenai biaya pemulihan keamanan daerah Minahasa.

27 April 1954 - 12 Januari 1955
tembusan
1 sampul

597 Surat-surat mengenai permintaan uang persediaan Biro Keamanan untuk Bagian X (urusan rahasia).

12 Agustus - 29 Desember 1954
asli
1 sampul

598 Memo KSAU mengenai hasil pembicaraan dengan Ketua Missie Goodwill Indian Air Force.

22 Desember 1954
asli
6 lembar

599 Surat-surat mengenai biaya Angkatan Perang, Kepolisian dan urusan keamanan di Sumatra Utara dan Sulawesi.

31 Desember 1954 - 22 Juni 1956
pertinggal
1 sampul

600 Surat dari Dewan Keamanan kepada Wakil Perdana Menteri mengenai rapat pembahasan anggaran belanja keamanan tahun 1957 dan situasi Sumatra, beserta lampiran.

5 Januari 1957
salinan
1 sampul

d. Pertahanan

601 Surat-surat mengenai peristiwa di Maluku Selatan.

29 September 1950 - 29 November 1950
asli
7 lembar

602 Surat dari Jawatan Resersi Pusat kepada Wakil Perdana Menteri mengenai aksi militer Belanda di Surabaya dan Jakarta, RMS dan Barisan Sakit Hati.

9 Oktober - 1 November 1950
asli
1 sampul

603 Surat dari Kepala Jawatan Resersi Pusat kepada Wakil Perdana Menteri mengenai keadaan gerakan bawah tanah di sekitar kota Bandung.

12 Oktober 1950
asli
4 lembar

604 Laporan Komisi Parlementer untuk masalah gerilya di Sulawesi Selatan.

7 - 14 November 1950
fotokopi
7 lembar

605 Surat-surat mengenai permintaan agar Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1950 dapat dikecualikan untuk Sumatra Timur, Aceh dan Tapanuli.

25 November - 30 November 1950
asli
1 sampul

606 Surat dari Ketua Staff "K" Jawa Barat kepada Ketua Staff "K" Pusat mengenai laporan peninjauan di Jawa Barat berkenaan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1950, beserta lampiran.

6 Desember 1950
asli
1 sampul

607 Korespondensi Wakil Perdana Menteri dengan Gubernur Jawa Barat mengenai anggota gerombolan yang menyerahkan senjata tapi tidak mau masuk APRI atau Polisi.

21 November - 7 Desember 1950
pertinggal
2 lembar

608 Surat-surat mengenai laporan rahasia dari The Board of Underwriters of New York kepada anggotanya seputar situasi keamanan Indonesia.

11 Januari - 2 Februari 1951
salinan
1 sampul

609 Surat Pemberitahuan dari Panglima Tentera dan Territorium I Sumatra Utara tentang statement Pemerintah Pusat tanggal 27 Desember 1950

31 Januari 1951
asli
8 lembar

610 Surat -surat mengenai pertanyaan dari Kecamatan Ngoro Jawa Timur tentang hukuman terhadap pengacau keamanan.

5 Februari - 28 Maret 1951
asli
1 sampul

611 Surat dari TNI AD Brigade II Divisi I kepada Perdana Menteri mengenai buku perkembangan di Besuki, beserta lampiran.

7 Februari 1951
asli
1 sampul

612 Seri Surat Keputusan Menteri Pertahanan Tahun 1951 - 1959.

24 Februari 1951 - 27 Oktober 1959
salinan
1 sampul

613 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Presiden mengenai Nota Panglima Divisi Diponegoro tentang Operasi Merdeka Jawa Tengah.

6 April & 12 April 1951
salinan
5 lembar

614 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Menteri Agama mengenai seruan agar Staf "K" Provinsi di seluruh Indonesia berhubungan dengan Jawatan Agama bila menjumpai soal yang berhubungan dengan agama.

18 April - 24 April 1951
pertinggal
4 lembar

615 Memorandum dari Gabungan Kepala Staf Angkatan Perang mengenai keamanan.

30 April - 19 Mei 1951
pertinggal
1 sampul

616 Surat-surat mengenai pengaruh internasional di kalangan pegawai pemerintah.

14 Juni - 6 September 1951
tembusan
1 sampul

617 Surat-surat mengenai pengangkatan Kolonel R. Hidayat sebagai KSAD menggantikan Kolonel A.H. Nasution.

15 Agustus - 6 September 1951
tembusan
4 lembar

618 Salinan Surat Keputusan Menteri Pertahanan mengenai pemberian jaminan penghidupan atas biaya pemerintah RI kepada janda almarhum Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman dan janda almarhum Letjen. R. Urip Sumohardjo .

13 September 1951
salinan
6 lembar

619 Surat dari Kepala Bagian Politik/Keamanan Kabinet Perdana Menteri kepada Overste Sutoko di Mabes AD mengenai hubungan antara Batalyon Munawar di Kudus dengan DI di Brebes, beserta lampiran.

6 Oktober - 22 Oktober 1951
asli
3 lembar

620 Surat-surat mengenai susunan dan pengurusan administratif Angkatan Darat.

6 Oktober - 20 Oktober 1951
asli
1 sampul

621 Surat dari Kepala Staf Angkatan Perang kepada Menteri Pertahanan mengenai laporan perjalanan ke Birma.

13 Desember & 18 Desember 1951
turunan
1 sampul

622 Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang pengangkatan, pemberhentian, penghasilan, pensiun, dan perawatan anggota-anggota CTN.

29 Januari 1952
salinan
8 lembar

623 Surat-surat mengenai berbagai gerakan operasi pembersihan gerombolan di Propinsi Jawa Tengah.

9 Februari 1952 - 26 Juli 1954
asli
1 sampul

624 Surat-surat mengenai penerangan bersama berhubung dengan peristiwa pemberontakan Bataljon 426.

16 Februari - 17 Mei 1952
asli
1 sampul

625 Perintah Siasat Komandan Gerakan Banteng mengenai Operasi Tegal Selatan.

10 Maret - 4 Mei 1952
turunan
6 lembar

626 Surat-surat mengenai tuntutan Frank C.Starr kepada Kementerian Pertahanan dalam perkara kapal Tasikmalaya.

14 Maret 1952 - 29 Desember 1955
asli
1 sampul

627 Surat-surat dari Staf Angkatan Perang Kementerian Pertahanan kepada Wakil Perdana Menteri mengenai persoalan yang dihadapi oleh Angkatan Perang.

8 - 17 April 1952
asli
1 sampul

628 Kumpulan kawat pemerintah mengenai rapat keamanan Jawa Tengah dan Jogja dengan Menteri Pertahanan di Gedung Kepatihan Jogja.

8 April - 9 April 1952
pertinggal
7 lembar

629 Kumpulan Surat Perintah Direktur CTN tentang pemberangkatan anggotanya ke daerah.

11 April - 6 Juni 1952
tembusan
4 lembar

630 Seri Surat Keputusan Perdana Menteri tentang koordinasi keamanan, Panitia Interdepartemental.

7 Mei 1952 - 22 Mei 1958
salinan
1 sampul

631 Instruksi Panitia Penampungan ex tawanan SOB tentang penampungan tawanan SOB yang akan dibebaskan dari tahanan.

10 Mei 1952
fotokopi
4 lembar

632 Surat -surat mengenai Panitia Menentang Bangsa Asing di Surabaya.

29 Mei - 18 Juni 1952
asli
6 lembar

633 Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri mengenai pemberantasan kekacauan dan pemulihan keamanan di Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Juni 1952
tindasan
2 lembar

634 Buku Pembangunan Strategi Pulau Ceram dari Tentara dan Territorium VII-Komando Pasukan"D".

5 Juni 1952
asli
1 Buku

635 Instruksi bersama Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan tentang penghapusan keadaan SOB di Sumatra Selatan.

9 Juni - 12 Agustus 1952
tindasan
1 sampul

636 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Pertahanan mengenai cara menggunakan kekuasaan SOB.

1 Juli 1952
salinan
2 lembar

637 Surat-surat mengenai waktu penampungan rombongan Banteng Kebenaran dari Yogyakarta di ARTP Palembang.

2 Juli - 13 Agustus 1952
salinan
9 lembar

638 Surat dari Staf "K" Propinsi Jawa Barat mengenai status Staf "K", beserta pengantar.

12 Juli 1952
asli
5 lembar

639 Surat-surat mengenai schorsing Kolonel Bambang Supeno.

18 - 26 Juli 1952
asli
1 sampul

640 Surat-surat mengenai laporan perjalanan inspeksi KSAP di Jawa Barat serta konsepsi pemulihan keamanan di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.

19 Juli 1952 - 1 Maret 1955
asli
1 sampul

641 Surat-surat mengenai pelanggaran territoir oleh kapal dan pesawat terbang negara asing di wilayah Indonesia.

4 Agustus 1952 - 30 Januari 1956
asli
1 sampul

642 Surat-surat mengenai penemuan papan tulisan Tionghoa/Jepang di pantai Timor.

2 September - 20 Desember 1952
asli
1 sampul

643 Nota Bersama Panglima Tentara Brawijaya Kolonel Bambang Soegeng, Gubernur, Kepala Polisi dan Pengawas Kejaksaan Propinsi Jawa Timur, tentang aksi Panitya Korban Razia Agustus Jawa Timur.

4 - 28 September 1952
asli
1 sampul

644 Laporan pemandangan dari Staf Angkatan Perang kepada Wakil Perdana Menteri tentang persoalan keamanan di Jawa Barat, beserta pengantar.

11 September & 12 September 1952
asli
5 lembar

645 Surat-surat mengenai operasi pengumpulan senjata api gelap di Kabupaten Samudra dan Sumenep.

31 Oktober - 5 Desember 1952
salinan

1 sampul

646 Surat dari Perdana Menteri kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia mengenai instruksi tentang perizinan demonstrasi pro atau anti pembubaran Parlemen.

4 November 1952
pertinggal
5 lembar

647 Surat-surat mengenai pembatalan penempatan Kolonel Sadikin sebagai Panglima TT VII Indonesia Timur.

5 Januari - 2 November 1953
asli
4 lembar

648 Surat-surat mengenai penjagaan keamanan secara preventif paska pemberontakan di Aceh tanggal 20 September 1953.

16 September - 12 November 1953
asli
1 sampul

649 Surat-surat mengenai instruksi keamanan pemberitaan.

12 Oktober 1953 - 13 Mei 1954
asli
1 sampul

650 Berkas mengenai penyelesaian peristiwa AURI .

12 Oktober 1953 - 25 Februari 1954
tembusan
1 sampul

651 Surat-surat mengenai permohonan KLM untuk membuat peta udara.

2 November 1953 - 17 Mei 1955
asli
1 sampul

652 Surat-surat mengenai tekanan Komando TT-VII terhadap pers.

1 Desember 1953 - 18 Agustus 1954
salinan
1 sampul

653 Laporan dari Gubernur Jawa Tengah mengenai keadaan Divisi Diponegoro tahun 1953.

16 Desember 1953 - 15 Januari 1954

turunan
4 lembar

654 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR RI I. KASIMO tentang sekitar pemberhentian KSAD.

12 Januari - 27 Februari 1954
asli
1 sampul

655 Surat-surat mengenai kapal terbang dari AURI di Kalimantan.

16 Maret - 30 April 1954
salinan
6 lembar

656 Laporan dari Wakil Komandan Sector B II/439 Terr.IV/Div. Diponegoro mengenai situasi di Salem.

20 April 1954
asli
3 lembar

657 Surat dari Kementerian Pertahanan kepada Perdana Menteri mengenai Berita Acara Timbang Terima penyerahan kekuasaan militer atas daerah kepulauan Anambas dan Natuna, dan kepulauan Riau.

21 April 1954
asli
9 lembar

658 Laporan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Wakil Perdana Menteri mengenai pertemuan pada tanggal 5 Juni 1954 di Watugede 8 Semarang.

8 Juni 1954
asli
8 lembar

659 Berkas kegiatan Panitia Kerja Pemulihan Keamanan di Sulawesi.

2 Juli - 20 Oktober 1954
tembusan
1 sampul

660 Surat dari Kepala Jawatan Topografi Angkatan Darat kepada Perdana Menteri mengenai keadaan perpetaan dan Jawatan Topografi AD, beserta lampiran. NB: Ada arsip peta Indonesia.

17 Juni 1954
asli
1 sampul

661 Surat dari Ketua Panitia Negara Urusan SOB mengenai penyusunan RPP tentang cara hubungan dan kerjasama antara Kuasa Sipil dan Kuasa Militer.

11 Agustus 1954
salinan
1 sampul

662 Berkas mengenai pengembalian Sjamlawi cs dari penampungan Pagongan ke dalam masyarakat.

4 -20 September 1954
turunan
1 sampul

663 Surat-surat mengenai pemohonan R.S. Prawirosaputro untuk membantu menangkap Kartosuwirjo.

19 Oktober 1954 - 16 Agustus 1955
asli
1 sampul

664 Surat-surat mengenai polisi udara.

23 Oktober 1954 - 3 Maret 1955
asli
3 lembar

665 Surat-surat mengenai ijin pelabuhan pendaratan Manado.

11 November 1954 - 11 Oktober 1955
asli
6 lembar

666 Surat-surat mengenai Pedoman Operasi Matahari dan Konferensi Dewan Keamanan Nasional di Jakarta tanggal 13-15 Januari 1955.

3 Desember 1954 - 31 Januari 1955
asli
1 sampul

667 Surat dari Ketua KKD Propinsi Jawa Tengah kepada Wakil Perdana Menteri mengenai laporan bulan September/Oktober 1954 dan Januari 1955 untuk usaha pemulihan keamanan di daerah Operasi Gerakan Banteng.

14 Februari 1955
turunan
1 sampul

668 Surat-surat mengenai kerja sama dalam hal pemberantasan pembajakan di laut.

3 Maret - 17 Desember 1955
asli

1 sampul

669 Surat-surat mengenai Ekspedisi Halmahera.

26 April 1955 - 15 Februari 1956
asli
1 sampul

670 Surat Keputusan Pelaksana Kekuasaan Militer cq KKK Cirebon tentang Penegasan Tata Tertib dalam tindakan hukum di lingkungan alat kekuasaan negara.

26 April 1955
salinan
6 lembar

671 Surat-surat mengenai pembentukan dan pinjaman senjata api kepada Pagar Desa di Kecamatan Seunagan Benteng dan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat.

14 Juni -20 September 1955
asli
10 lembar

672 Surat-surat mengenai ijin penerbangan PAC.

15 Oktober - 19 November 1955
asli
5 lembar

673 Surat-surat mengenai Nota Kolonel A.H. Nasution seputar pencalonannya sebagai KSAD.

21 - 31 Oktober 1955
salinan
6 lembar

674 Surat-surat mengenai permintaan KAPU Masjumi untuk mempercepat pemeriksaan anggota Masjumi yang terkait razzia 21 November 1955.

19 Desember 1955 - 19 Januari 1956
asli
5 lembar

675 Surat-surat mengenai Mr.L.G.Gelpke, Wakil Komisaris Belanda di Makassar.

24 April - 23 Juli 1956
asli
10 lembar

676 Surat dari Sekretaris Kepala BK kepada Soedijono mengenai usul peninjauan susunan dan cara bekerja Biro Keamanan Kabinet Perdana Menteri, beserta lampiran.

8 Oktober 1956
asli
1 sampul

677 Berkas kerja Panitia 7.

22 Desember 1956 - 1 Desember 1957
asli
1 sampul

678 Surat-surat mengenai acara SOB penting yang sedang dihadapi.

27 Maret - 15 April 1957
pertinggal
1 sampul

679 Surat-surat mengenai pembubaran Panitia Negara Penampungan Korban Kekacauan .

11 Juli - 10 September 1957
pertinggal
1 sampul

680 Himpunan Peraturan/Keputusan/Perintah/Instruksi/Maklumat Pengumuman,dll yang penting yang berkenaan dengan SOB. dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Kuartal I dan II Th 1957.

September 1957
fotokopi
1 Buku

681 Nota Kementerian Pertahanan kepada Dewan Menteri mengenai jangka waktu peralihan akibat pencabutan peraturan SOB dengan digantinya UU Keadaan Bahaya.

16 Oktober 1957
pertinggal
8 lembar

682 Instruksi KSAL selaku Penguasa Militer di wilayah Angkatan Laut di seluruh Indonesia perihal kewajiban melaporkan gerak-gerik kapal kepada Penguasa Militer Laut.

09 Desember 1957
fotokopi
3 lembar

683 Surat-surat mengenai Pengumuman Pemerintah tentang mentidaksahkannya peraturan-peraturan daerah.

5 Februari - 15 Februari 1958
salinan
1 sampul

684 Surat-surat mengenai penjagaan keselamatan Kepala Negara.

27 Maret - 23 April 1958
asli
7 lembar

685 Surat dari Mabes AD kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai naskah Peraturan Peperpu tentang larangan adanya organisasi Dewan Banteng, Dewan Garuda, Permesta, Dewan Gajah, Dewan Lambung Mangkurat, Dewan Singamangaraja, Front Pemuda Sunda.

10 April 1958
asli
7 lembar

686 Laporan dari Komandan Operasi 17 Agustus kepada Wakil Perdana Menteri mengenai situasi militer setelah Operasi 17 Agustus selama 17 hari di Sumatra Tengah.NB: Ada arsip peta.

10 Mei - 12 Mei 1958
asli
10 lembar

687 Surat-surat mengenai militerisasi Dinas Pelayaran Negara.

2 Juni 1958 - 6 Januari 1959
pertinggal
1 sampul

688 Berkas mengenai pembentukan Panitia Interdepartemental untuk menyusun peraturan pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Keadaan Bahaya.

11 Juni 1958 - 15 April 1959
asli
1 sampul

689 Surat-surat mengenai proyek pembebasan tanah di Ancol dan di antara Tanjung Priok dan Kali Gunung Sari untuk kepentingan ALRI. Nb : Ada arsip peta dan kearsitekturan.

13 Juni 1958 - 8 Juni 1959
tembusan
1 sampul

690 Pedoman dan petunjuk hubungan dengan instruksi Penguasa Perang Pusat - KSAD No : INSTR/Peperpu/026/1958.

21 Juni 1958
salinan
5 lembar

691 Surat-surat mengenai penjagaan keamanan di perusahaan perkebunan di Sumatra Timur.

25 Juni -16 Agustus 1958
salinan
1 sampul

692 Surat-surat mengenai kerugian peristiwa pengeboman di Muara Bungo, Jambi.

30 Juli - 4 Oktober 1958
asli
1 sampul

693 Laporan Team Peninjau Penguasa Perang Pusat ke Sulawesi Tengah/Utara tanggal 23 - 29 Juli 1958.

30 Juli 1958
salinan
1 sampul

694 Surat-surat mengenai Keputusan Ketua Penguasa Perang Daerah KDM Maluku dan Irian Barat tentang pengasingan orang-orang yang dianggap berbahaya keluar wilayah kekuasaan KDM-MIB.

2 September - 8 Desember 1958
salinan
1 sampul

695 Surat-surat mengenai pengangkatan KSAL dan KSAU.

24 November 1958 - 16 Januari 1959
salinan
1 sampul

696 Surat dari Lts. Soejono kepada Presiden dan Perdana Menteri mengenai peristiwa pemberontakan PETA di Blitar.

14 Februari 1959
salinan
1 sampul

697 Laporan amat rahasia dari Panitia Tetap GKS kepada GKS mengenai strategi untuk pemulihan keamanan di Indonesia. NB : ada arsip peta.

1 Maret 1959
asli
1 sampul

698 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden ,dll mengenai peraturan Peperpu tentang larangan adanya kegiatan-kegiatan politik.

3 Juni 1959
asli
1 sampul

699 Surat-surat mengenai memorandum Ketua Penguasa Perang Daerah Jawa Timur tentang perpanjangan keadaan perang di Jawa Timur.

20 Oktober & 30 Oktober 1959
pertinggal
1 sampul

e. Anggota Kemiliteran

700 Surat dari Kepala bagian politik / keamanan kepada Kepala Staf Angkatan Perang mengenai anoniem tentang penempatan pegawai di pangkalan udara Andir (Bandung), beserta lampiran.

10 - 31 Januari 1950
asli, salinan
1 sampul

701 Surat-surat mengenai aduan dari masyarakat terhadap tindakan yang dianggap sewenang-wenang dari anggota Tentara dan Kepolisian di Aceh, Timor, Sumatra Tengah, Kediri dll. NB: Ada arsip foto.

9 Juni 1950 - 27 Januari 1958
asli
1 sampul

702 Surat-surat mengenai demobilisasi anggota Tentara Pelajar dan TNI.

16 Juni 1950 - 30 April 1952
tembusan
1 sampul

703 Surat-surat mengenai jaminan pekerjaan untuk bekas pegawai Dinas Persenjataan Kementerian Pertahanan.

25 September 1950 - 9 Juni 1951
tembusan

1 sampul

704 Surat-surat mengenai kasus penggabungan Pengawal Perkebunan dengan gerombolan liar bersenjata.

28 September - 14 November 1950
asli
10 lembar

705 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia Pusat mengenai permohonan penempatan kembali anggota - anggota polisi yang telah meninggalkan kedudukannya dari Karesidenan Banten.

07 Oktober & 02 Nopember 1950
asli
5 lembar

706 Surat-surat mengenai kejelasan nasib para anggota kepolisian yang dischors.

4 November 1950 - 1 Agustus 1956
pertinggal
1 sampul

707 Surat-surat mengenai perundingan dengan Pa Umar (Pa Budong) Kepala Pasukan BR di Tjiguha

13 Desember 1950 - 19 Januari 1951
tembusan
5 lembar

708 Nota Kepala Staf Angkatan Perang kepada Perdana Menteri mengenai konsideran Dewan Rekonstruksi Nasional.

20 Januari 1951
asli
1 lembar

709 Telegram dari WKPM kepada Gubernur Kalimantan Selatan mengenai arti badan perjuangan.

31 Januari 1951
pertinggal
3 lembar

710 Surat-surat mengenai ketegangan antara Kepolisian dan Ketentaraan.

7 Februari 1951 - 9 Oktober 1954
asli, salinan
1 sampul

711 Surat dari Directoraat CTN Mabes AD kepada Kepala Staf AD dan Direktur BRN mengenai rencana konsolidasi pertama Corps Tjadangan Territoriaal.

21 Februari 1951
tindasan
1 sampul

712 Laporan Badan Pemupuk Bekas Anggauta Angkatan Perang RI kepada Direktur BRN Pusat mengenai balans penampungan BP BAAPRI tahun 1950.

28 Februari - 1 Maret 1951
asli
9 lembar

713 Surat dari Staf Keamanan Perkapalan Copel Surabaya kepada Kementerian Pertahanan mengenai permohonan status .

7 Maret 1951
asli
1 sampul

714 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia mengenai permintaan daftar anggota Polisi yang telah gugur/diculik/hilang, beserta lampiran.

30 Maret 1951
pertinggal
5 lembar

715 Laporan Subpanitia Militer Panitia Negara Chusus mengenai status Uni dan lain-lain , beserta lampiran.

13 April 1951
fotokopi
1 sampul

716 Surat- surat mengenai seleksi tenaga bekas pejuang yang ingin masuk Angkatan Perang.

18 April - 7 Juni 1951
asli, pertinggal
7 lembar

717 Berkas mengenai perusahaan - perusahaan yang diselenggarakan untuk mempekerjakan mantan anggauta tentara dan pejuang.

24 September 1951- 23 September 1952
asli, salinan

1 sampul

718 Surat-surat mengenai penyerahan urusan tenaga eks pejuang dari Staf "K" kepada Biro Rekonstruksi Nasional, beserta lampiran.

15 Oktober 1951 - 3 April 1952
fotokopi
1 sampul

719 Surat dari Kepala Bagian Sekuriti Kepolisian Karesidenan Kedu kepada Kepala Polisi Propinsi Jawa Tengah mengenai suara-suara dari bekas anggota Batalyon Matalata.

9 November 1951 - 28 Januari 1952
salinan
2 lembar

720 Surat-surat mengenai masalah pager/kader desa di Serang.

24 November 1951 - 28 Januari 1952
asli
8 lembar

721 Surat dari Kementerian Sosial kepada Sekretariat Staf "K" Pusat mengenai penyerahan anggota asrama penampungan di Kabupaten Bekasi kepada BRN Pusat.

8 Desember 1951 - 16 Januari 1952
asli
8 lembar

722 Surat Panitia ad hoc kepolisian kepada Perdana Menteri mengenai pemeliharaan Jawatan Kepolisian Negara.

22 Januari 1952
salinan
7 lembar

723 Surat dari Kepala Jawatan Kepolisian Negara kepada Direktur CTN mengenai penerimaan anggota CTN dalam Kepolisian Negara, beserta lampiran.

24 Januari 1952
tembusan
2 lembar

724 Surat-surat mengenai kader "Situ Pamulang" masuk menjadi CTN Territorium VI.

7 Maret - 20 Maret 1952
asli

4 lembar

725 Seri Surat Keputusan KSAD tahun 1952 tentang pengangkatan bekas anggota Angkatan Perang , bekas Pejuang Kemerdekaan Nasional dan bekas anggota AURI anggota menjadi anggota CTN.

2 April - 27 November 1952
turunan
1 sampul

726 Surat-surat mengenai klarifikasi atas berita ditangkapnya Mr. Kasman Singodimedjo.

8 -12 Mei 1952
turunan
5 lembar

727 Surat-surat mengenai sabotage yang dilakukan oleh anggota TNI dari Kompi III Batalyon 610 Sintang, Kalimantan.

10 Mei - 13 Juni 1952
asli, salinan
3 lembar

728 Risalah ringkas penyelesaian soal sekitar Corps Pejuang Republik Indonesia.

6 November 1952
asli
8 lembar

729 Surat-surat mengenai permasalahan antara CPRI dengan BRN.

15 Desember 1952 - 3 Januari 1953
asli
1 sampul

730 Berkas mengenai penyusunan Keputusan Perdana Menteri RI No 370/P.M. Tahun 1952 tentang pengangkatan Komisaris Besar Polisi pada Jawatan Kepolisian Negara dan Propinsi.

16 Desember 1952
salinan, Konsep
1 sampul

731 Surat-surat mengenai permohonan pembentukan Polisi Seksi di Kabupaten Tangerang dan Kebayoran Baru. NB: ada arsip peta.

9 Februari 1953 - 22 Maret 1954
asli
9 lembar

732 Surat-surat mengenai penyelesaian persoalan eks pejuang.

16 Februari - 18 Juni 1953
salinan
1 sampul

733 Surat dari Direktur BRN Pusat kepada Ketua DRN Wakil Perdana Menteri mengenai Organisasi Veterans Administration di USA, beserta lampiran.

18 Februari 1953
asli
8 lembar

734 Laporan singkat Panitia Penyaluran Bekas Anggota Kesatuan Bersenjata mengenai penyaluran beberapa kesatuan dari Kahar Muzakkar.

14 Maret & 16 Maret 1953
tembusan
1 sampul

735 Surat-surat dari Usaha Pembangunan Bekas Anggota Angkatan Perang RI kepada Perdana Menteri mengenai ijin usaha.

8 Desember 1953 - 20 Februari 1954
asli
1 sampul

736 Surat dari Persatuan Pedjuang2 Bersendjata tahun 1945 kepada Perdana Menteri mengenai usulan pemberian tanda jasa Bintang Sudirman untuk para pejuang tahun 1945.

15 Desember 1953
asli
2 lembar

737 Berkas mengenai permasalahan antara Jawatan Bea dan Cukai dengan Kepolisian.

8 Januari - 22 Desember 1954
asli, tembusan
1 sampul

738 Surat Kepala Jawatan Topografi AD kepada KASAD mengenai persoalan urgensi kebutuhan spesial plane guna perpetaan non operatif dan helikopter, beserta pengantar. NB: ada arsip peta.

24 Februari 1954
turunan
1 sampul

739 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Menteri Luar Negeri mengenai penjagaan konferensi Kementerian Luar Negeri di Tugu.

22 Maret 1954
tembusan
2 lembar

740 Surat-surat Biro Penampungan Bekas Anggauta Tentara, Kementerian Pertahanan mengenai Transmigrasi Kungku, beserta lampiran. NB : ada arsip peta Kabupaten di Sumatera.

29 April - 25 Juni 1954
salinan
1 sampul

741 Surat-surat mengenai hubungan antara Perdana Menteri dengan Kepala Kepolisian Negara.

5 Juli 1954 - 5 September 1956
asli
1 sampul

742 Surat-surat mengenai statemen anggota CTN PICTN. 50.56 Insp: 50.5 Terr.V.Brawijaya yang diberhentikan.

16 Juli - 7 Agustus 1954
salinan
6 lembar

743 Surat-surat mengenai kejadian dalam lingkungan kemiliteran di daerah Tegal dan lain-lain.

26 Juli -29 Juli 1954
asli
6 lembar

744 Surat dari Rombongan Tentara Non-Aktif Jogjakarta kepada Menteri Pertahanan mengenai permohonan penyelesaian status Non-Aktif Tentara.

17 September 1954
asli
5 lembar

745 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai laporan tugas mengikuti konferensi kepolisian di Eropa, Turki dan Amerika.

20 Desember 1954 lihat kurun waktu
asli
1 sampul

746 Surat-surat mengenai gerakan subversif di kalangan anggota CTN Kompi VTA 514 Blitar.

24 Februari - 17 November 1955
asli
1 sampul

747 Surat dari Penguasa Pelabuhan Tanjung Priuk kepada Perdana Menteri mengenai usul penguasaan dan status Penguasa Pelabuhan, beserta pengantar.

27 April & 28 Mei 1955
asli
1 sampul

748 Surat-surat mengenai usulan untuk membentuk kesatuan bersenjata di Swapraja Barru (Kabupaten Parepare) Sulawesi.

26 November 1955 - 9 Februari 1956
tembusan
7 lembar

749 Surat-surat mengenai Konferensi Besar Ekonomi Pejuang Indonesia.

12 April - 29 Juni 1956
asli
1 sampul

750 Surat-surat mengenai Rapat Umum Panitia Penyelesaian Tanah Bebas Tugas Bekas Angkatan Perang Pejuang Bindjei di Langkat Sumatra Utara.

13 Juni 1956 & 9 Juli 1956
asli
6 lembar

751 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Panitia Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan (Veteran) mengenai ketidakhadiran dalam Pembukaan Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan (Veteran) seluruh Indonesia.

18 Desember 1956
konsep
3 lembar

752 Berkas kerja Kementerian Urusan Veteran dan Musyawarah Nasional Pembangunan.

15 November & 16 November 1957
asli
8 lembar

753 Berkas mengenai Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

4 Oktober 1958 - 31 Juli 1959
fotokopi
1 sampul

2. POLITIK

a. Pemerintahan Pusat

754 Berkas mengenai Panitia Pengembalian Hak Milik Asing.
13 Maret 1950 - 28 April 1952
asli
1 sampul

755 Berkas mengenai pengangkatan pejabat-pejabat negara a.l.: Penasehat Umum Menteri Luar Negeri, Duta Besar dan Presiden Direktur "De Javasche bank".
16 Maret 1950 - 30 Oktober 1951
asli
1 Sampul

756 Surat-surat mengenai mosi dan resolusi dari berbagai organisasi sosial politik mengenai masalah Kementerian Dalam Negeri (swapraja, otonomi daerah DPR Kabupaten, pengangkatan bupati) .
20 April 1950 - 18 Januari 1956
Asli, Tembusan
1 sampul

757 Surat-surat dari Acting Sekretaris Negara kepada Perdana Menteri RI di Jogjakarta mengenai masalah mosi dan resolusi dari berbagai daerah.
4 Mei & 9 Mei 1950
asli
1 sampul

758 Surat dari acting Sekretaris Negara kepada Perdana Menteri mengenai Kumpulan Resolusi dari berbagai organisasi sosial politik untuk menentang PP No 10 Tahun 1950 tentang pembentukan DPRDS dan Dewan Pemerintahnya di Jawa dan Madura.
8 Mei 1950
Turunan
1 sampul

759 Surat-surat penyataan dari Swapraja di Kalimantan Barat, Dewan Lombok, Dewan Raja-Raja Federasi Kepulauan Sangihe-Talaud, Rakyat Selayar, Dewan Perwakilan Kota Sementara Jakarta Raya, untuk masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.
11 - 25 Mei 1950
asli
1 sampul

760 Pidato Perdana Menteri Dr. A. Halim pada stasiun radio Yogya mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17 Mei 1950
tembusan
2 lembar

761 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Panitia Bersama RIS-RI mengenai salinan resolusi Badan Pekerja Permusyawaratan Rakyat se- Sumatra Timur agar Sumatra Timur dijadikan sebagai propinsi tersendiri.

12 Juni 1950
pertinggal
2 lembar

762 Resolusi dari DPP Kowani Kalimantan tentang desakan kepada pemerintah untuk membuat peraturan tentang agar di Kalimantan dapat diberlakukan UU No 10 mengenai Dewan Perwakilan Darurat setelah bergabung dengan RI.

13 Juni 1950
asli
2 lembar

763 Surat dari Sekretariat Perdana Menteri kepada Panitia Bersama RIS-RI pihak RI mengenai hasil perundingan RIS-RI.

26 Juli 1950
asli, pertinggal
4 lembar

764 Berkas mengenai kedudukan para sekretaris jenderal kementerian-kementerian.

6 November 1950 - 23 Februari 1956
asli, salinan, pertinggal
1 sampul

765 Surat dari Kementerian Penerangan mengenai pidato radio Perdana Menteri 14 November 1950.

15 - 16 November 1950
asli
6 lembar

766 Keputusan Menteri Perburuhan dan Peraturan Menteri Perburuhan tahun 1951 - 1954 tentang struktur dan tugas Kementerian Perburuhan.

12 Desember 1950 - 11 Oktober 1954
salinan
1 sampul

767 Penetapan Menteri Agama No 2 Tahun 1951 dan No. 31 Tahun 1952 mengenai susunan dan tugas Kantor Pusat Kementerian Agama.

12 Januari 1951 & 1 November 1952
salinan
1 sampul

768 Surat dari Perdana Menteri kepada Ketua DPR tentang keterangan pemerintah mengenai permintaan Mr. Assaat untuk mengundurkan diri sebagai Menteri Dalam Negeri.

23 Januari 1951 - 17 Mei 1951
asli
5 lembar

769 Surat-surat Keputusan tentang berdirinya Jawatan Transmigrasi, lapangan pekerjaan Menteri Negara Urusan Transmigrasi dan Susunan Sekretariat Menteri Negara Urusan Transmigrasi.

2 Februari 1951 & 8 September 1958
salinan, pertinggal, asli
1 sampul

770 Surat dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian kepada Perdana Menteri mengenai Pembentukan Dewan Perancang Negara.

07 Februari 1951
asli
4 lembar

771 Berkas mengenai tempat kedudukan, lapangan pekerjaan, susunan dan tugas Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

15 Februari 1951
salinan
1 sampul

772 Surat dari Sekretaris Staf K Pusat kepada Menteri Dalam Negeri mengenai rapat Staf K Pusat terkait kedudukan, keuangan organisasi Staf K.

2 Maret - 19 Mei 1951
tembusan
6 lembar

773 Berkas mengenai timbang terima pemerintahan dari Kabinet Natsir kepada Kabinet Sukiman.

20 Maret - 2 Mei 1951
asli, pertinggal
1 sampul

774 Berkas mengenai organisasi, masalah kepegawaian, keuangan BRN Pusat dan daerah.

28 Maret 1951 - 16 Maret 1954

asli
1 sampul

775 Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai pembagian daerah Republik Indonesia.

04 April 1951
asli
1 sampul

776 Berkas mengenai usulan pengangkatan Menteri Perhubungan sebagai (tambahan) anggota Dewan Urusan Pegawai.

10 April 1951
asli
1 sampul

777 Berkas mengenai putusan rapat Kabinet Sukiman ke-2 s/d 57 dan catatan rapat ke-75 Kabinet Sukiman (demisioner).

8 Mei 1951 - 17 Juni 1952
fotokopi
1 sampul

778 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai penjelasan tentang Badan Pengawasan Rahasia yang bukan menjadi bagian dari Jawatan Kepolisian Indonesia.

29 Mei 1951
asli
4 lembar

779 Surat-surat mengenai pengangkatan Menteri M.A. Pellaupessy.

15 Juni - 21 Juli 1951
asli
3 lembar

780 Surat dari Menteri Perekonomian mengenai surat perpisahan Menteri Perekonomian.

16 Juli 1951
asli
4 lembar

781 Berkas mengenai susunan tata usaha dan pekerjaan di lingkungan Kementerian Keuangan, Sosial, dan Agama serta Kehakiman.

27 September 1951 - 21 Februari 1951
asli, Fotokopi
1 sampul

782 Proces verbal serah terima urusan pelabuhan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga ke Kementerian Perhubungan.

29 September 1951
fotokopi
2 lembar

783 Berkas mengenai Ikhtisar suara - suara sekitar Kabinet Sukiman - Suwiryo dibuat oleh Jawatan Kepolisian Indonesia (pusat) Bagian Dinas Pengawasan Keselamatan.

10 Oktober 1951
copy
5 lembar

784 Laporan mengenai Bezetting dan Formasi Kementerian Pertanian tahun 1950-1951.

01 November 1951
fotokopi
1 sampul

785 Kawat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada DR. Gondokusumo mengenai perintah datang ke Jakarta untuk dicalonkan sebagai Menteri Agraria.

06 November 1951
pertinggal
2 lembar

786 Surat dari Kementerian Pertahanan kepada Perdana Menteri mengenai surat keputusan Menteri Pertahanan tentang pemasukan Dinas-dinas dan Bagian-bagian ke dalam Bagian Perbendaharaan dari Direktorat Dinas-dinas Administrasi.

17 November 1951
asli, salinan
2 lembar

787 Surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Perdana Menteri, dll mengenai upacara timbang terima portofolio kehakiman.

22 November 1951
fotokopi
3 lembar

788 Berkas mengenai susunan dan tugas-tugas Biro Perancang Negara (BPN).

1952 & 1957-1958
fotokopi
1 sampul

789 Berkas mengenai Dewan Ekonomi dan Keuangan.

31 Januari 1952 - 5 Oktober 1955
asli
1 sampul

790 Berkas mengenai keanggotaan dan perongkosan Panitya Negara Perbaikan Makanan.

28 Februari 1952 - 14 Juni 1952
salinan
1 sampul

791 Surat dari Menteri Urusan Pegawai kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pembentukan Panitia untuk menetapkan penghasilan pekerja setempat yang dipekerjakan pada kantor Pemerintah Pusat/Daerah Otonom.

28 April 1952
tembusan
4 lembar

792 Surat dari Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri mengenai Program Badan Memperkuat Ekonomi Nasional dan laporan rapat Panitia Pembentukan "Membatasi Usaha-usaha Asing".

17 Juni & 9 September 1952
tembusan
10 lembar

793 Berkas mengenai penetapan Ibu Kota Pemerintah RI.

8 Juli 1952 - 27 Februari 1956
asli, pertinggal
1 sampul

794 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri mengenai penyerahan tugas lembaga tersebut kepada Dewan Ekonomi dan Keuangan.

03 Oktober 1952
salinan
1 sampul

795 Resume Konferensi BRN dan BPUR seluruh Indonesia tanggal 22-25 September 1952 di Jakarta.

4 - 17 Oktober 1952
fotokopi
1 sampul

796 Surat dari Ketua Komisariat Partai PIR kepada Perdana Menteri mengenai usul pembentukan Panitia Negara untuk mempelajari soal " Krisis Gezag ".

20 Oktober 1952
asli
2 lembar

797 Berkas mengenai risalah rapot Panitia Negara untuk menyelidiki organisasi kementerian-kementerian dari September-Desember 1952 dan Januari 1953. Risalah terdiri dari : Susunan dan Tugas Kementerian-kementerian; Susunan dan Tugas Kabinet Perdana Menteri; Susunan Vertikal dari jawatan-jawatan dalam 12 Kementerian; Peraturan Pemerintah No.20 Tahub 1952 tentang susunan pimpinan kementerian-kementerian RI.

01 Desember 1952 - 01 Juli 1953
Fotokopi
1 sampul

798 Berkas mengenai putusan-putusan rapat Kabinet Wilopo ke-64 s.d 113.

23 Desember 1952 - 4 Agustus 1953
pertinggal
1 sampul

799 Surat dari anggota Perbum cabang Prabumulih kepada Perusahaan Minyak mengenai pernyataan menyokong pemboikotan pengangkutan kekayaan alam Indonesia ke Irian Barat.

16 Januari 1953
fotokopi
1 lembar

800 Berkas mengenai hukum tata usaha sekitar instansi-instansi perburuhan di Yogyakarta.

31 Januari - 13 Mei 1953
Salinan
1 sampul

801 Berkas mengenai pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian Panitya Negara Perancang UU Pertahanan Negara.

25 Februari - 25 Juni 1953
konsep, asli, pertinggal.
1 sampul

802 Revolusi Front Nasional Tandjung Pinang mengenai protes keras pembentukan Kabupaten Kepulauan Riau.

12 April 1953 - 7 Desember 1953

asli
1 sampul

803 Surat-surat mengenai peraturan militer yg berlaku di Sumatra Selatan selama dalam keadaan SOB, beserta lampiran.

16 April - 29 Juli 1953
asli
1 sampul

804 Berkas mengenai SK Menteri Penerangan terkait tugas dan kewajiban Jawatan Penerangan Daerah dan Penerangan Luar Negeri.

21 April 1953 - 16 Agustus 1954
salinan
1 sampul

805 Laporan Biro Perancang Negara sejak pembentukan bulan Maret 1952 - Maret 1953.

21 Mei 1953
asli
1 sampul

806 Surat dari Serikat Buruh Kementerian Penerangan Cabang Kabupaten Asahan Tanjung Balai kepada Perdana Menteri mengenai tuntutan dan protes terhadap ejekan-ejekan dan insiden pada rapat memperingati Hari Kebangunan Nasional di Medan.

6 Juni 1953
asli
1 lembar

807 Berkas mengenai keputusan rapat Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-1 s.d. 100.

21 Agustus 1953 - 15 Maret 1955
fotokopi
1 sampul

808 Surat dari Menteri Kesejahteraan Negara kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai rancangan untuk jawaban pemerintah babak I.

1 September 1953
asli
5 lembar

809 Berkas mengenai hasil rapat Dewan Perancang Negara tanggal 21 September dan 5 November 1953.

21 September - 24 November 1953
salinan

7 lembar

810 Berkas mengenai Yayasan Pemerintah yang dibentuk dalam lingkungan Kementerian.

5 November 1953 - 31 Maret 1954
asli
1 sampul

811 Surat dari Panitya Koordinasi Interdepartemental kepada Perdana Menteri mengenai penyerahan tugas dan kekuasaan Biro dan Panitya Koordinasi Bantuan Luar Negeri kepada BPN dan Panitya Koordinasi Interdepartemental.

27 November 1953
asli
1 sampul

812 Berkas mengenai Panitya Negara Urusan Organisasi Kementerian.

3 Desember 1953 - 22 September 1956
asli
1 sampul

813 Surat dari Menteri Urusan Kesejahteraan Negara a.i. kepada Perdana Menteri mengenai tugas, lapangan pekerjaan dan permohonan bantuan Kementerian Urusan Kesejahteraan Negara.

5 Desember 1953 - 11 September 1954
asli
1 lembar

814 Surat Keputusan Perdana Menteri No. 44/P.M./1954 tentang Pembentukan Biro Keamanan.

11 Maret 1954
salinan
2 lembar

815 Surat mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang lapang pekerjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Dalam Negeri.

2 April, 6 Mei 1954
asli, Fotokopi
1 sampul

816 Kumpulan mosi dan resolusi dari berbagai organisasi sosial dan politik mengenai tuntutan pembubaran dan dukungan terhadap Kabinet Ali Wongso Zainul.

20 Mei - 3Oktober 1954
asli
1 sampul

817 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama kepada Perdana Menteri mengenai timbang terima Kementerian Agama dari K.H. Masjkur (Menteri Agama) kepada Zainul Arifin (Wakil II Perdana Menteri).

07 Juli 1954
asli
1 sampul

818 Kumpulan surat pernyataan tentang pengekangan hak-hak demokrasi.

15 Agustus - 19 September 1954
asli, tembusan
1 sampul

819 Kumpulan Resolusi dari Pemuda Rakyat, Kesatuan Aksi Penuntutan Pembubaran PPK Madiun, Serikat Buruh Kempen Bojonegoro mengenai protes terhadap adanya penurunan plakat dan spanduk di Madiun dan pelarangan demonstrasi dan rapat-rapat umum.

15 - 29 Agustus 1954
asli
1 sampul

820 Berkas mengenai uraian Mr. Ali Budiardjo pada Konferensi Ekonomi Seluruh Sumatra (KESS).

23 November 1954
fotokopi
1 sampul

821 Berkas mengenai berita acara timbang terima antara Menteri Dalam Negeri ad interm kepada Menteri Dalam Negeri Mr. Soenarjo.

30 November 1954
konsep
1 sampul

822 Berkas mengenai anggota dan sayembara pembangunan Panitia Tugu Nasional.

16 - 24 Februari 1955
asli
8 lembar

823 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai Resolusi DPRDS Kabupaten Tapanuli Utara untuk menghapuskan tingkat Karesidenan di seluruh Indonesia..

17 Februari 1955
pertinggal
9 lembar

824 Mosi DPRD Kotapradja Jogjakarta mengani desakan untuk meninjau kembali tentang pemberhentian pegawai Djawatan Tenaga.

23 Maret, 28 Mei 1955
asli, pertinggal
4 lembar

825 Berkas mengenai rancangan Keputusan Presiden tentang penggantian anggota panitia negara pendidikan teknik.

21 Juni 1955 - 1 September 1958
asli
1 sampul

826 Daftar jabatan-jabatan baru Kementerian Agraria.

19 Juli 1955
asli
7 lembar

827 Laporan mengenai Program Kabinet Ali Sastroamidjojo yang telah dapat diselesaikan dalam waktu berdirinya kabinet tersebut.

01 Agustus 1955
fotokopi
1 sampul

828 Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI tentang pengangkatan Panitia Perancang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Murid.

3 Agustus 1955
salinan
2 lembar

829 Risalah upacara timbang terima pemerintahan dari Kabinet Ali Sastroamidjojo kepada Kabinet Burhanuddin Harahap.

12 Agustus 1955
pertinggal
1 sampul

830 Berkas mengenai upacara timbang terima Menteri Penerangan Dr. FL. Tobing - Sjamsuddin Sutan Makmur.

13 Agustus 1955
asli
1 sampul

831 Berkas keterangan pemerintah tentang Program Kabinet Burhanuddin Harahap mengenai hubungan luar negeri dan pelaksanaan pemilu.

21 September - 3 Oktober 1955
pertinggal
1 sampul

832 Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Moh. Yamin mengenai salinan putusan-putusan kabinet tentang Lambang Negara.

27 Desember 1955
tembusan
6 lembar

833 Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tentang perubahan lapangan pekerjaan, tugas dan susunan Kementerian P.P. dan K.

23 Januari 1956
salinan
1 sampul

834 Surat-surat mengenai pembentukan laboratorium kriminalistik pada Jawatan Kepolisian Negara dan pembagian daerah kepolisian propinsi dan karesidenan berat dalam organisasi Kepolisian Negara.

14 Februari & 20 Juli 1956
asli
5 lembar

835 Berkas mengenai Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Negara Penasehat Penyelesaian Pembatalan KMB.

25 April 1956 - 6 Agustus 1957
asli, pertinggal
1 sampul

836 Berkas mengenai pembentukan Panitya Interdepartemental Koordinasi Usaha-Usaha Kementerian-Kementerian di lapangan perekonomian yang diperlukan guna menghadapi kegentingan internasional.

6 November 1956 - 17 Mei 1957
asli
1 sampul

837 Berkas mengenai peninjauan oleh Dewan Pengawas Keuangan pada Kantor Panitia untuk menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak, nb. sebagian berbahasa Belanda.

11 November 1956
konsep
1 sampul

838 Berkas mengenai soal-soal yang belum diselesaikan oleh kabinet-kabinet yang lampau.

13 November 1956 - 2 September 1958
pertinggal
1 sampul

839 Surat dari Sekretaris Dewan Nasional kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai pencalonan anggota Dewan Nasional.

10 April 1957 - 29 Juli 1958
asli
1 sampul

840 Berita acara timbang terima di Kementerian Perhubungan dari Menteri Perhubungan demisioner A.B. de Rozari kepada Menteri Perhubungan Mr. R. Sukardan dan Menteri Pelayaran Kol. ALRI Moh. Nazir.

10 & 11 April 1957
asli
4 lembar

841 Berkas mengenai peraturan tata-tertib Dewan Menteri dan susunan Dewan-dewan Kecil.

12 April 1957
salinan
1 sampul

842 Risalah pertemuan Presiden dengan para menteri dan pemimpin militer mengenai masalah pertahanan dan keamanan tanggal 10 April 1957.

15 April 1957
fotokopi
6 lembar

843 Risalah timbang terima pemerintahan dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II kepada Kabinet Djuanda pada 10 April 1957.

15 April 1957
pertinggal
7 lembar

844 Berkas mengenai lapangan pekerjaan, susunan, pimpinan, serta rencana pembangunan 5 tahun Kementerian Pelayaran.

26 April 1957 - 3 September 1958
asli, pertinggal
1 sampul

845 Berkas mengenai putusan-putusan rapat kabinet Juanda.

4 Mei 1957 - 25 November 1958
pertinggal
1 sampul

846 Berkas mengenai saran-saran untuk normalisasi keadaan negara di lapangan keuangan, sosial, politik dan keamanan.

1 - 20 Juni 1957
asli
1 sampul

847 Risalah rapat: 1) Seksi Pembangunan dan Peninggian Produksi Nasional; 2) Seksi Perumusan Perekonomian menurut pasal 28 UUDS; 3) Seksi Perimbangan Keuangan Penguasa Militer Seluruh Indonesia.

18 - 19 Juni 1957
fotokopi
1 sampul

848 Laporan tahunan Jawatan Metrologi RI (tahun 1956)

Juli 1957
fotokopi
1 sampul

849 Berkas mengenai rancangan pedoman kerja Kabinet Juanda dalam menormalisasi keadaan negara.

11 Juli - 21 September 1957
konsep, pertinggal
1 sampul

850 Berkas mengenai Dewan Ekonomi dan Pembangunan .

25 Juli 1957 - 18 Juni 1959
pertinggal
1 sampul

851 Surat Keputusan Perdana Menteri No. 30 Tahun 1957 dan No. 283/PM/1957 tentang PP dan susunan-lapangan pekerjaan LAN serta rencana kerja tahun 1958.

6 Agustus 1957 - 25 April 1958
asli, salinan
1 sampul

852 Surat-surat mengenai pembentukan Panitya Pembelian untuk BPS.

25 Agustus - 19 September 1957
asli, konsep

1 sampul

853 Keputusan Panitya Ad Hoc Kabinet Urusan Pelaksanaan Putusan-Putusan Musyawarah Nasional di bidang soal-soal khusus, antara lain tentang Dwitunggal, kepartaian dan Irian Barat.

31 Agustus - 9 Oktober 1957
konsep
1 sampul

854 Berkas mengenai pembentukan, pengajuan sebagai anggota dan SK Presiden RI No.131 tahun 1958 tentang pemberhentian, pembebasan dan pengangkatan Panitia Persiapan Dewan Perancang Nasional.

8 Oktober 1957 - 21 Maret 1959
asli
1 sampul

855 Berkas mengenai pembubaran Panitya Pembagian Daerah.

10 Oktober - 14 Desember 1957
asli
1 sampul

856 Berkas mengenai persiapan Musyawarah Pembangunan Nasional dan Working-Paper dari Kementerian Perdagangan untuk Musyawarah Nasional Pembangunan.

17 Oktober - 23 November 1957
tembusan
1 sampul

857 Berkas mengenai reorganisasi Kementerian Perindustrian.

30 November - 12 Desember 1957
asli
1 sampul

858 Surat Keputusan Perdana Menteri No. 316/P.M/U.P/1957 tentang penempatan Biro Pusat Statistik di bawah Perdana Menteri.

03 Desember 1957
salinan
4 lembar

859 Berkas mengenai Keputusan Sidang Dewan Nasional ke III tahun 1958 tentang kewaspadaan nasional.

27 Desember 1957 - 16 April 1958
asli
1 sampul

860 Keputusan Perdana Menteri No. 159/P.M./1958 tentang Susunan dan Tugas Bagian-bagian Dalam Kabinet Perdana Menteri.

21 Januari 1958
salinan
1 sampul

861 Keputusan-Keputusan Perdana Menteri tentang pembentukan dan pembubaran Panitya Interderpartemental.

24 Januari - 8 Desember 1958
salinan
1 sampul

862 Berkas mengenai Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom.

5 Maret - 30 Desember 1958
asli
1 sampul

863 Berkas mengenai kunjungan misi Dewan Nasional ke daerah.

6 Maret - 28 April 1958
tembusan
1 sampul

864 Berkas mengenai rancangan Keputusan Penguasa Perang Pusat tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat-pejabat panitia penyelesaian piutang negara.

27 Maret 1958 - 11 Agustus 1958
asli, Konsep
1 sampul

865 SK Perdana Menteri No. 189/PM/1958 tentang pembentukan, lapangan pekerjaan dan susunan Biro Stabilitasasi Ekonomi.

19 Mei 1958
salinan
9 lembar

866 Keputusan Sidang Dewan Nasional ke V, VI dan XI tahun 1958 antara lain tentang Front Nasional, pampasan perang, masalah Tionghoa, dan sidang ke IV tahun 1959 tentang efisiensi kerja dalam pemerintahan.

4 Juni 1958 - 20 April 1959
asli
1 sampul

867 Berkas mengenai jawaban Presiden atas pertanyaan anggota DPR tentang Demokrasi Terpimpin pada sidang Dewan Nasional ke VI.

5 Juni 1958 - 25 Januari 1959

konsep
1 sampul

868 Berkas mengenai pembentukan Panitya Pembelian Khusus Jawatan Sandi, LAN, BPS, DPR.

11 Juli - 20 Oktober 1958
salinan
1 sampul

869 Surat dari Sekretaris Dewan Nasional kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai usul-usul dari Dewan Nasional tahun 1957-1958 (antara lain mengadakan pekan perjuangan Irian Barat)

21 Juli 1958
asli
1 sampul

870 Berkas mengenai pembubaran Kementerian Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan.

21 Juli 1958
konsep, pertinggal.
1 sampul

871 Surat dari Sekretaris I Presiden kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai lapangan pekerjaan Menteri Negara A.M.Hanafi dan Professor Muhammad Yamin.

06 Agustus & 13 September 1958
asli, konsep
1 sampul

872 Berkas mengenai usul-usul kongkrit yang harus diputuskan kabinet atas instruksi Wakil Perdana Menteri I (surat tanggal 29 Juli 1958 No. 24962/58).

19 Agustus 1958
konsep, pertinggal
1 sampul

873 Pidato Wakil Ketua Dewan Nasional di depan Konferensi Dinas Kementerian Penerangan mengenai perkembangan di sekitar Demokrasi Terpimpin.

13 September 1958
salinan
1 sampul

874 Berkas mengenai pembentukan Badan Koordinasi Penyaluran.

8 April -17 September 1958

asli
1 sampul

875 Berkas mengenai penyusunan Progress Report Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960.

25 Oktober 1958 - 4 April 1959
tembusan
1 sampul

876 Berkas mengenai status dan subsidi Dewan Normalisasi.

6 November 1958 - 11 Juni 1959
asli
1 sampul

877 Keputusan sidang Dewan Menteri dengan Presiden RI mengenai pelaksanaan ide Demokrasi Terpimpin.

25 Januari 1959
konsep
4 lembar

878 Berkas mengenai kegiatan Panitia Interdepartemental Militerisasi Jawatan/Perusahaan Vital.

6 Maret - 4 Mei 1959
asli, tembusan
1 sampul

879 Berkas mengenai penunjukan Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil-Militer sebagai Wakil Perdana Menteri II a.i.

22 Mei - 7 Agustus 1959
asli
9 lembar

880 Surat Keputusan Perdana Menteri RI No I/MISSI/1959 tentang pembentukan Daerah Istimewa Aceh.

26 Mei 1959
Salinan
4 lembar

881 Berkas mengenai rencana kebijaksanaan pemerintah tahun 1960 dalam bidang statistik, kepegawaian dan organisasi.

30 Juni 1959
asli
7 lembar

882 Surat penyerahan kembali mandat Kabinet Karya kepada Presiden .

06 Juli 1959
salinan
1 lembar

883 Rencana sumbangan Kementerian Perhubungan Udara dalam pelaksanaan Program Kabinet Kerja.

21 Juli 1959
asli
6 lembar

884 Pembahasan mengenai PANOK (Panitia Analisa Organisasi Kementrian).

26 Juli 1959
pertinggal
1 sampul

885 Berkas mengenai putusan-putusan dalam sidang ke-3, 10, 13, 17 Inti Kabinet Kerja.

5 Agustus - 22 Desember 1959
pertinggal
1 sampul

886 Surat dari Menteri Muda Perhubungan Darat dan PTT kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai usulan tentang perubahan yang mengatur pekerjaan Menteri Muda Perhubungan Darat dan PTT.

18 September 1959
asli
4 lembar

887 Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No.3/Kpts/Sd/II/59 tentang perincian manifesto politik RI 17 Agustus 1959.

25 September 1959
salinan
1 sampul

888 Laporan Komisi mengenai tugas dan organisasi Pemerintahan Pusat, surat kepada Komisi Organisasi Pemerintahan mengenai tugas pokok Departemen Penerangan.

3 Oktober - 28 Desember 1959
salinan
1 sampul

889 Berkas mengenai timbang terima Jawatan Perindustrian Perkapalan dari Departemen Perhubungan Laut kepada Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

1 - 10 Desember 1959

asli

1 sampul

890 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Ketua dan anggota Panitya ad hoc Kabinet Perancang Peraturan tentang MPRS, Kepartaian dan Front Nasional mengenai rapat tanggal 7 Desember 1959.

04 Desember 1959

pertinggal

1 sampul

b. Pemerintahan Daerah

891 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP 21/7/12 tentang kedudukan pejabat walikota menurut luas dan pentingnya kota-kota di Jawa dan Sumatra.

02 Mei 1950

salinan

6 lembar

892 Pengumuman bersama dari Pemerintah Darurat dan Komite Nasional Propinsi Maluku tentang sikap mempertahankan pemerintah darurat propinsi.

31 Agustus 1950

salinan

5 lembar

893 Surat-surat mengenai resolusi dari berbagai organisasi sosial politik mengenai DPRDS.

15 September 1950 - 31 Januari 1951

asli

1 sampul

894 Keputusan Ketua Dewan Pemerintah Bali tentang pembentukan Majelis Pemerintah Harian Sementara di daerah Bangli, Klungkung, Karangasem, Tabanan, Buleleng.

23 September - 29 November 1950

salinan

10 lembar

895 Mosi DPR Kotapraja Jogjakarta dan DPRDS Kabupaten Sukabumi agar otonomi daerah segera diserahkan sepenuhnya.

4 - 28 Desember 1950
asli
2 lembar

896 Surat-surat mengenai pengangkatan Soediro sebagai Gubernur Sulawesi, Milino sebagai Gubernur Kalimantan, Moh. Sanusi Hardjodinoto sebagai Gubernur propinsi Jawa Barat, Ipik Gandamana sebagai Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Sumatra Selatan dan kedudukan Ali Hasjmy sebagai Gubernur Aceh.

8 Juni 1951 - 12 November 1957
asli
1 sampul

897 Surat dari Ketua Badan Pertimbangan Kalimantan Barat kepada Menteri Dalam Negeri mengenai usul pembentukan propinsi Kalimantan Barat.

4 & 31 Oktober 1950
tembusan
1 sampul

898 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai ketetapan sebagai Bupati dd. Residen Madura dan laporan politik Karesidenan Madura, Agustus 1950.

16 Oktober 1950
asli, salinan
5 lembar

899 Laporan sidang tertutup Dewan Pemerintah Daerah Timor dan Kepulauannya pada 2 November 1950 di Kupang.

02 November 1950
salinan
3 lembar

900 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada para menteri mengenai penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonom, beserta lampiran.

27 Desember 1950 - 3 Februari 1958
asli, pertinggal, fotokopi
1 sampul

901 Surat-menyurat antara Acting Gubernur Sumatra Utara dengan Sekretaris Wakil Presiden mengenai desakan reshuffle kabinet.

5 & 13 Januari 1951
tembusan

3 lembar

902 Ringkasan rapat Majelis Pusat Dewan Maluku Utara mengenai otonomi daerah dan perubahan status Dewan Maluku Utara menjadi DPRD.

10 Januari 1951
Fotokopi
2 lembar

903 Surat dari a.n. Gubernur Aceh kepada Perdana Menteri mengenai Pidato Wakil Pemerintah pada malam resepsi Kongres Pusa 22 Desember 1950.

19 Januari 1951
asli
5 lembar

904 Surat dari Walikota Pekalongan kepada Kepala Daerah propinsi Jawa Tengah mengenai kedudukan daerah Kota Besar Pekalongan.

22 Januari 1951
tembusan
1 lembar

905 Surat dari Ketua DPRS Kotapraja Blitar kepada Perdana Menteri mengenai perubahan status Kotapraja Kecil Blitar dan penghapusan perkataan Kotapraja Besar dan Kecil.

24 Januari 1951
asli
2 lembar

906 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai Nota tentang daerah Surakarta dan nota tentang Pakubuwono XII dan Mangkunegoro.

24 Februari 1951 - 7 Desember 1953
asli
1 sampul

907 Resolusi dari DPRD dan DPRDS mengenai uang pengeluaran.

8 Maret 1951 - 30 Desember 1953
Fotokopi
2 lembar

908 Surat dari Jaksa Agung kepada Wakil Perdana Menteri mengenai laporan rahasia yang berhubungan dengan Bupati Cirebon.

2&12 April 1951
asli
2 lembar

909 Laporan politik Propinsi Sumatera Tengah, Karesidenan Pekalongan, Aceh dan Kalimantan Timur.

Juli 1951 - 14 Juli 1956
tembusan
1 sampul

910 Surat dari Gubernur Kalimantan kepada semua kepala daerah kabupaten, daerah istimewa, walikota, kepala kepolisian karesidenan mengenai ketegasan dalam menjalankan pemerintahan.

12 Juli 1951
salinan
2 lembar

911 Surat -surat mengenai pemindahan Wali Kota Semarang dan Walikota Surakarta.

05 & 14 Agustus 1951
asli, tembusan
2 lembar

912 Korespondensi Perdana Menteri dengan Menteri Dalam Negeri mengenai usul pengangkatan Radensule sebagai Bupati Tasikmalaya dan golongan Andi Patoppoi sebagai Bupati Karesidenan Pati.

23 Agustus 1951 - 5 Maret 1954
asli, pertinggal
6 lembar

913 Surat dari Wakil Ketua Badan Executief DPR Kabupaten Aceh Selatan kepada Perdana Menteri mengenai calon Bupati untuk Kabupaten Aceh Selatan.

15 & 20 Oktober 1951
asli
3 lembar

914 Surat-surat dari Pakubuwono XII kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pengeluaran tahun 1952 dan penambahan kantor di lingkungan keraton.

24 Januari 1952
tembusan
8 lembar

915 Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Perdana Menteri mengenai permohonan pemecahan tentang Zelfbeschikkingsrecht untuk Sumatra dari Dang-Toeankoe Sanghiang Soeleiman.

11 Februari 1952

asli
4 lembar

916 Nota dinas dari Gubernur Jawa Tengah kepada Perdana Menteri mengenai penetapan daftar desa daerah Kabupaten Sukoharjo dan Kota-Besar Surakarta.

5 & 28 Mei 1952
salinan
1 sampul

917 Berkas mengenai edaran Perdana Menteri tentang kerjasama antara kepala daerah dan kepala jawatan dan organisasi lainnya.

31 Mei - 26 Oktober 1952
asli
1 sampul

918 Kawat dari Persatuan Penghulu dan Ex-Pejuang bersenjata di Bengkalis kepada Perdana Menteri mengenai permohonan pemindahan Bupati Bengkalis.

07 November 1952
asli
6 lembar

919 Berkas mengenai rencana pembangunan daerah Lampung Barat.

10 November 1952 - 2 April 1953
asli, salinan, pertinggal
1 sampul

920 Resolusi bersama rapat gabungan dari seluruh Perserikatan Pedagang Kecil Daerah Kabupaten/Kota Malang mengenai permohonan pencabutan Peraturan Bupati yang merugikan para pedagang kecil.

16 Januari 1953
fotokopi
3 lembar

921 Mosi DPRDS Kabupaten Tjilacap untuk memperluas adanya "Zedenpolitie".

5 Mei 1953
asli
2 lembar

922 Kumpulan resolusi dan mosi DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Utara mengenai desakan untuk segera diadakan Pengadilan Agama Lampung.

5 Juni 1953 - 14 Oktober 1954
asli, copy

9 lembar

923 Berkas mengenai usul pencabutan SK Presiden tanggal 3 Maret 1953 No. 63 dan pengangkatan kembali Tengku Mohammad Daud Bereueh menjadi gubernur diperbantukan di Kementerian Dalam Negeri.

23 Juni - 7 September 1953
asli
1 sampul

924 Berkas mengenai Pembangunan Ibu Kota Nusa Tenggara.

12 September 1953 - 12 Oktober 1954
asli
1 sampul

925 Surat dari Gubernur Sunda Kecil kepada Perdana Menteri mengenai daerah otonom di Propinsi Sunda Kecil.

16 September 1953
asli
1 sampul

926 Nota pemandangan mengenai Sulawesi dari F.A.P. Pitoi (anggota parlemen).

28 September 1953
asli
4 lembar

927 Kawat dari Sariluh Alamsah, Wedana Sibolga kepada Perdana Menteri mengenai kesediaan diaktifkan kembali di Aceh.

02 Oktober 1953
asli
2 lembar

928 Surat dari Wakil Perdana Menteri I kepada Menteri Dalam Negeri mengenai permohonan K.L.& K.K.I.untuk meninjau pemberhentian lurah tahun 1950.

30 Oktober 1953
arsip
1 lembar

929 Berkas mengenai mosi Djuir Mohammad tentang pemberian otonomi kepada Aceh.

23 November 1953 - 25 Juni 1954
pertinggal

1 sampul

930 Usul reorganisasi indeeling Kepolisian Propinsi Sumatra Tengah.

25 November 1953 - 17 Februari 1954
tembusan
1 sampul

931 Laporan Bulanan / Laporan kwartal Residen Pekalongan bagian politik. Nb. Rahasia.

28 November 1953 - 19 Mei 1954
tembusan
1 sampul

932 Statement partai-partai politik dalam daerahTimor mengenai mempertahankan badan-badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur dan Dewan Pemerintah Daerah Timur sebagai lambang menjalankan demokrasi.

6 Desember 1953 - 16 Desember 1953
asli
1 sampul

933 Surat dari Kepala Bagian DPKN Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai Gerakan Swapraja Siak di Sumatra Tengah, beserta lampiran.

5 Desember 1953
asli
1 sampul

934 Berkas mengenai permasalahan jawatan-jawatan kembar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

31 Desember 1953 - 10 Mei 1954
asli, tembusan
1 sampul

935 Mosi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Lampung Utara mengenai desakan agar Kantor Douane di Krui didirikan kembali.

15 Februari 1954 - 14 Juni 1954
fotokopi
2 lembar

936 Permohonan protecties atas pembangunan di Maluku dari Yayasan Corps Demobilisasi Indonesia.

23 Februari - 16 Maret 1954
tembusan

1 sampul

937 Pernyataan bersama dari Kepala-kepala/Wakil Jawatan propinsi Sunda Kecil tentang kesulitan yang dialami para pegawai Bertournee di wilayah Sunda Kecil.

13 Maret 1954
tembusan
1 sampul

938 Berkas mengenai Pemerintah Swapraja Surakarta.

17 Maret 1954 - 30 Agustus 1955
asli
1 sampul

939 Surat dari Gubernur Sulawesi kepada Perdana Menteri mengenai kasus konsesi Gunung/Talengen.

07 April 1954
asli
1 sampul

940 Pendapat pemerintah mengenai laporan panitia DPR-RI tentang keadaan di Aceh, beserta lampiran peta Aceh tahun 1952.

14 April 1954
fotokopi
1 sampul

941 Surat dari a.n. Kepala Kepolisian kepada Perdana Menteri mengenai resolusi menuntut pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tanah Datar.

28 April 1954
asli
1 sampul

942 Surat dari Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan kepada Perdana Menteri mengenai kemungkinan yang akan dihadapai terkait pembagian Kalimantan dalam 2 provinsi.

17 Juni 1954
asli
1 sampul

943 Laporan kepada Panglima Tertinggi APRI dan resolusi dari Masyumi mengenai Tapanuli dan Sumatera Timur.

24 Juni 1954 - 10 Juli 1956

tembusan
9 lembar

944 Surat dari Bupati Wonosobo mengenai Mr. P.Jhon di Niece: ajakan untuk membangun Asia yang lebih baik.

2 Agustus - 12 Oktober 1954
asli
1 sampul

945 Berkas mengenai Kedudukan Komisariat Urusan Daerah Otonom.

14 Agustus 1954 - 3 April 1956
asli
1 sampul

946 Mosi DPRDS Kabupaten Kapuas tentang susunan daerah otonomi di Kalimantan.

31 Agustus 1954
fotokopi
3 lembar

947 Catatan ringkas sidang Panitia Harta Tersembunyi di Daerah Maluku Utara.

01 September 1954
konsep
1 sampul

948 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Th. 1954 Pemakaian pakaian dinas dan tanda-tanda pangkat serta perlengkapan untuk pegawai Polisi Pamong Praja.

10 Oktober 1954
fotokopi
1 sampul

949 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Menteri mengenai Peraturan tentang pengeluaran biaya untuk membeli perabot rumah tangga dari rumah-kediaman gubernur, residen, bupati serta walikota.

18 Oktober 1954
asli
5 lembar

950 Putusan Kongres Pemuda Riau yang menuntut supaya daerah Riau dijadikan daerah otonom setingkat provinsi.

01 November 1954
asli
8 lembar

951 Surat dari a.n. Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai penggulingan Pemerintah Daerah Tulungredjo, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang.

22 November 1954
asli
6 lembar

952 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Menteri mengenai usul pengangkatan kembali R. Soedjadi sebagai Asisten Wedana Wanaredja, Kabupaten Cilacap yang sebelumnya melakukan penggelapan.

25 November 1954
asli
1 sampul

953 Surat dari Prijo Masloer kepada Bupati Rembang mengenai kejelasan nasib eks pejuang pada saat clash ke II.

29 November 1954
asli
2 lembar

954 Surat dari a.n. Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai suasana di Kabupaten Aceh Utara.

15 Desember 1954
asli
10 lembar

955 Laporan Perekonomian Jawa Barat triwulan ke I tahun 1955.

1955
fotokopi
1 sampul

956 Kutipan Surat Keputusan Kepala Daerah Sulawesi Tenggara tentang tindakan Sultan Buton (Kepala Swapraja) mengenai pengaktifan kembali staf swapraja mendahului pengesahan Menteri Dalam Negeri.

10 Januari 1955
kutipan
1 lembar

957 Berkas mengenai peresmian kawedanan baru Kabupaten Banjar.

03 - 30 Maret 1955
tembusan
1 sampul

958 Surat dari Kepala Biro Politik Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai reaksi atas pemberhentian Sosrodanukusumo, beserta lampiran.

29 Maret - 23 Juni 1955
asli, salinan
1 sampul

959 Surat-surat mengenai resolusi untuk membuat jembatan baru bagi Kali Lekso dikota Wlingi (Blitar-Jawa Timur).

28 April - 4 Juli 1955
asli
4 lembar

960 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai pernyataan dan tuntutan perbaikan Kota Tarutung.

17 Juni 1955
asli
4 lembar

961 Kutipan beslit-beslit kepala daerah Sangihe Talaud mengenai pembentukan desa percobaan.

27 Juni - 02 Juli 1955
tembusan
1 sampul

962 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai laporan Hamka ke Sumatera Tengah terkait permasalahan agama di Pasaman.

20 Desember 1955

asli
1 sampul

963 Berkas mengenai Konferensi Pamong Praja Provinsi Kalimantan, Maluku dan Sumatera Utara.

17 Januari - 15 Oktober 1956
asli, salinan
1 sampul

964 Berkas mengenai peringatan 200 tahun kota Jogjakarta.

8 Februari - 8 Mei 1956
asli, salinan, pertinggal
1 sampul

965 Surat dari a.n. Act. Gubernur Sulawesi kepada Perdana Menteri mengenai warta politik daerah Bone bulan Oktober 1955.

11 Februari 1956
asli
1 sampul

966 Laporan mengenai Daerah Timor dari Jawatan Penerangan Daerah Timor.

22 April 1956
fotokopi
1 sampul

967 Berkas mengenai kedudukan Mangkunegaran Surakarta.

23 April - 17 Oktober 1956
asli
1 sampul

968 Surat dari Masyarakat Sumatera Tengah kepada Jaksa Agung mengenai gejala-gejala dalam kalangan kejaksaan Sumatera Tengah.

11 Juli 1956
tembusan
3 lembar

969 Resolusi-resolusi mengenai pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan hal dan kekuasaannya di Sulawesi, Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Riau.

17 Agustus 1956 - 30 Januari 1957
tembusan

1 sampul

970 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Kabinet Presiden mengenai pengiriman kembali SK Presiden RI tanggal 17-1-1957 No. 4/1957 tentang pembentukan perutusan Eni Karim dkk. ke Sumatera Tengah.

19 Januari 1957
pertinggal
1 sampul

971 Berkas mengenai pembagian Provinsi Sumatera Utara dalam daerah swatantra tingkat I.

5 Juni 1957 - 22 Januari 1958
asli
1 sampul

972 Berkas mengenai perintah memberi informasi kepada Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah.

26 Agustus - 06 November 1957
asli
1 sampul

973 Laporan deputasi DPRD Peralihan Provinsi Kalimantan Timur.

17 September - 4 Oktober 1957
asli
1 sampul

974 Berkas mengenai pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah.

28 September - 24 Oktober 1957
tembusan
1 sampul

975 Laporan Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah 1957 - 1958.

11 Oktober 1957 - 6 Februari 1958
asli
1 sampul

976 Laporan dari Komandan Daerah Militer Aceh mengenai saran dan usul untuk pembangunan daerah Aceh.

18 November 1957
asli
1 sampul

977 Berkas mengenai tinjauan pembagian Provinsi Sulawesi.

19 Nopember - 20 Januari 1958
fotokopi
1 sampul

978 Berkas mengenai pembagian Provinsi Nusa Tenggara dalam daerah swatantra tingkat I.

07 Desember 1957 - 20 Januari 1958
asli
1 sampul

979 Surat dari Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai inventarisasi pokok-pokok hasrat daerah umum dan khusus.

26 Januari 1958
asli
1 sampul

980 Berkas mengenai Daerah Swatantra I Riau.

05 Februari 1958
asli
1 sampul

981 Notulen sidang kilat tertutup DPRD peralihan TK. II Kapuas.

03 - 17 Maret 1958
asli
1 sampul

982 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai RPP tentang cara pengawasan atas jalannya pemerintah daerah.

4 Maret 1958
pertinggal
1 sampul

983 Surat dari Ketua Fraksi Penyaluran dalam Konstituante kepada Perdana Menteri Juanda mengenai tuntutan pembentukan Provinsi Sulawesi Timur.

07 - 18 Maret 1958
asli
1 sampul

984 Surat dari Panitia Perdamaian Nasional Sumatera Utara kepada Perdana Menteri mengenai pemberian kebijakan dan bantuan dana kepada Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara.

14 Maret 1958
asli
2 lembar

985 Rencana Pembangunan Lima Tahun Bidang Agama di Aceh.

08 Maret - 25 Juni 1958
tembusan
1 sampul

986 Surat dari Perdana Menteri kepada Presiden selaku Ketua Dewan Nasional mengenai otonomi dan desentralisasi.

22 April 1958
pertinggal
1 sampul

987 Laporan perjalanan misi operasi makmur ke daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

9 Juni - 2 Juli 1958
Asli
1 Sampul

988 Laporan Tahunan Karesidenan Madura Tahun 1957.

21 Juli 1958
asli
1 sampul

989 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai kunjungan Mr. JTK Poll, Sekretaris Komisaris Belanda di Medan ke kepulauan Riau, beserta lampiran.

28 Juli 1958
asli
3 lembar

990 Berkas mengenai resolusi-resolusi tentang perbaikan taraf kehidupan pegawai di daerah, antara lain Aceh, Sukabumi, Nias dan Bengkulu.

2 Agustus - 30 September 1958
asli
1 sampul

991 Surat dari a.n. Gubernur Aceh kepada Perdana Menteri mengenai Pidato Gubernur Aceh dalam Upacara 17 Agustus 1958.

12 Agustus 1958
asli
1 sampul

992 Surat dari Wakil Perdana Menteri I kepada Ketua DPR mengenai Laporan Missi Pemerintah untuk membangun kembali pemerintah sipil di Sumatera Barat.

21 Agustus 1958
pertinggal
1 sampul

993 RPP tentang penyerahan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan dalam daerah pembangunan Chusus Kota Baru Kebayoran (PCK) kepada daerah swatantra tingkat I Kotapraja Jakarta Raya.

28 Agustus - 05 September 1958
tembusan
1 sampul

994 Surat dari Gubernur Sumatera Barat kepada Ketua Misi Pemerintah Pusat ke Sumatera Barat mengenai surat Dahlan Djambek tentang pembentukan PRRI.

30 September 1958
asli
6 lembar

995 Laporan misi Pemerintah RI ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

17 Oktober - 28 November 1958
tembusan
1 sampul

996 Laporan tentang hasil peninjauan Menteri Negara Urusan Stabilitasi Ekonomi ke Sumatera Utara pada 27 Maret - 1 April 1959.

06 April 1959

asli

1 sampul

997 Laporan Misi Pemerintah Pusat untuk Aceh mengenai keadaan di Aceh.

15 April - 6 Agustus 1959

salinan

1 sampul

998 Surat Keputusan Kepala Daerah Swatantra I Nusa Tenggara Barat tentang izin sabung ayam di Lombok Tengah khusus penganut agama Hindu Bali.

18 April 1959

salinan

2 lembar

999 Surat dari Direktur LAN kepada Menteri Pertama mengenai Laporan Kesimpulan Umum Seminar Administrasi Daerah di Salatiga.

21 Juli 1959

asli

1 sampul

1000 Keputusan pertemuan bersama 9 Kotapraja Indonesia di Tretes, Jawa Timur pada 9-10 Agustus 1959 tentang wewenang kotapraja, penghasilan daerah dan hubungannya dengan pelaksanaan UU no. 32 tahun 1956 serta tentang pertemuan di Tretes.

10 Agustus 1959

salinan

8 lembar

1001 Berkas mengenai Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Kedudukan Keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian.

26 Agustus 1959

fotokopi

1 sampul

c. Organisasi Sosial dan Politik

1002 Surat-surat resolusi S.B.P.P.B.M mengenai sidang kabinet dan peraturan pemerintah.

3 Maret 1950 - 10 Maret 1950
asli
6 lembar

1003 Surat dari Acting Secretaris Negara mengenai resolusi tentang masalah-masalah pemerintahan yang terjadi pada daerah Muara Tebo dimunculkan oleh Solihin Bin Taharudin.

23 Maret - 12 April 1950
salinan
3 lembar

1004 Resolusi Rapat Maluku tentang Proklamasi Kemerdekaan Maluku dalam bentuk republik lepas dari NIT dan lepas dari RIS.

30 April - 25 September 1950
asli
2 lembar

1005 Kumpulan Resolusi SOBSI Jakarta yang dihasilkan pada rapat Konferensi SOBSI di Jakarta.

16 Juni 1950
fotokopi
3 lembar

1006 Surat - surat mengenai ucapan selamat dan dukungan atas terbentuknya Kabinet Natsir.

08 September - 08 November 1950
asli
1 sampul

1007 Resolusi Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Medan tentang tidak bijaksananya Kabinet Natsir.

22 September 1950 - 14 Januari 1951
asli
2 lembar

1008 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Penerangan mengenai akan diadakan tegen propaganda.

21 Desember 1950
tembusan
1 lembar

1009 Berkas mengenai Rapat Kongres Gerilya Indonesia.
22 Desember 1950 - 17 Januari 1951
asli
2 lembar

1010 Surat dari Kementerian Penerangan mengenai turunan kawat reshuffle kabinet menuju sistem satu partai yang hendak menduduki pemerintahan.
02 Februari 1951
asli
2 lembar

1011 Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Masjumi Karanganyar Surakarta mengenai Resolusi tentang Polisi Pamong Praja.
02 Maret 1951
asli
4 lembar

1012 Resolusi dari Rapat Umum LA PSII Partai Serikat Islam Indonesia cabang Bonthain tentang menuntut bubarnya NIT dan bergabung dengan RI.
19 Maret - 05 April 1951
asli
2 lembar

1013 Surat dari Pengurus Cabang Sarekat Buruh Rokok Tembakau Indonesia (SBRTI) kepada pemerintah pusat mengenai program dan pembentukan kabinet.
13 April 1951
asli
2 lembar

1014 Radiogram dari Kepala Kepolisian Karesidenan Surakarta Bagian Reserse mengenai kerendetan perundingan-perundingan dalam pembentukan kabinet, Partai Surakarta bersikap menunggu.
14 April 1951
tembusan
2 lembar

1015 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai atmosphere dari masyarakat Tionghoa kiri dan Pengurus Besar Serikat Buruh Minyak tentang terbentuknya Kabinet Sukiman.

16 & 19 Mei 1951
asli
4 lembar

1016 Surat dari Pusat Pimpinan Partai Wanita Rakyat mengenai permintaan biaya Kongres ke I.

09 Agustus 1951
asli
2 lembar

1017 Surat-surat mengenai: aktivitas CC PKI, aksi-aksi untuk memperkuat perjuangan tani di Jawa Timur, Perkembangan PKI di Sumatera Utara, kawat Louis Taruc (Partai Komunis Filipina) kepada PKI, Kidung Palu Arit dan tugas PKI untuk menumbangkan Kabinet Burhanuddin.

17 September 1951 - 13 Oktober 1955
salinan
1 sampul

1018 Berkas mengenai Gerakan Pemuda Indonesia (Gerpi) mengenai Statement Gerpi.

23 - 26 September 1951
asli
2 lembar

1019 Kumpulan Resolusi tentang tawanan Razia Agustus di Madiun dan perselisihan perburuhan.

Januari 1952 - Desember 1952
asli, tembusan
1 sampul

1020 Surat - surat mengenai PNI dan keputusan PNI mengenai risalah konflik sekitar masalah Mutual Security Act (MSA).

19 Februari - 24 Desember 1953
asli
1 sampul

1021 Surat dari DPP Barisan Pembangunan kepada Dewan Rekonstruksi Nasional mengenai permintaan bantuan kredit dan AD/ ART program kerja Barisan Pembangunan.

20 Mei 1952
asli

6 lembar

1022 Surat mengenai pendirian organisasi Gabungan Ekonomi Pejuang Seluruh Indonesia.

26 Mei, 26 Juni 1952
asli
1 sampul

1023 Memorandum Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia tentang masalah kewarganegaraan.

4 - 7 Juni 1952
salinan
1 sampul

1024 Kantor Karesidenan Pekalongan mengenai reaksi partai dan organisasi rakyat terhadap terbentuknya Kabinet Wilopo. n.b.: Rahasia.

31 Juli 1952
tembusan
1 lembar

1025 Berkas mengenai protes SOBSI Komisariat Sumatera Utara tentang tindakan DPKN yang merampas spanduk dalam pernyataan 17 Agustus 1952 di Medan.

17 Agustus 1952
asli
2 lembar

1026 Berkas mengenai penyelesaian soal konsesi Suban Ayam Curup yang dimunculkan oleh Serikat Tani Islam Indonesia.

25 Agustus - 26 September 1952
tembusan
1 sampul

1027 Berkas mengenai Kongres ke I dan Ulang Tahun ke VI Partai Politik Tharikat Islam se Indonesia dan Semenandjung (PPTI) di Padang Sidempuan.

30 Agustus - 13 0ktober 1952
asli
1 sampul

1028 Risalah mengenai pekerjaan Yayasan Sosial Islam.

01 September 1952
asli
1 sampul

1029 Berkas mengenai perkembangan Organisasi Bekas Pejuang Bersenjata Seluruh Indonesia.

04 - 30 Oktober 1952
asli
1 sampul

1030 Berkas mengenai penolakan dan dukungan dari berbagai organsisasi sosial dan politik terhadap peringatan Peristiwa Madiun.

5 Januari 1953 - 5 Maret 1954
tembusan
1 sampul

1031 Surat-surat mengenai sidang P.A.P tanggal 20 Februari 1953 tentang masalah pasar, para penyewa bango/bedag-bedag pasar.

18 Februari 1953
asli
3 lembar

1032 Kumpulan resolusi mengenai Undang-undang Perkawinan.

8 Maret - 17 November 1953
asli, fotokopi
9 lembar

1033 Surat dari Ketua Umum Dewan Cabang Pesindo Dairi-Sidikalang kepada Perdana Menteri mengenai hutang Pesindo kepada negara.

25 Maret 1953
asli
1 sampul

1034 Laporan mengenai demonstrasi dari Koordinasi Partai-partai Politik Sumatera Tengah di Bukittinggi 25 April 1953 menuntut pemberian tunjangan bekas pejuang dan memperbanyak sekolah tingkat lanjut.

26 April 1953
salinan
1 sampul

1035 Surat-surat mengenai Partai PERMAI (pecahnya partai & pertikaian anggota Permai).

20 Mei 1953 - 12 Desember 1953
asli

6 lembar

1036 Surat dari a.n. Perdana Menteri kepada Menteri Penerangan mengenai tindakan A. Wahab Siregar Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Sumatera Utara yang menempeleng Sekretaris Umum SOBSI KD XII.

4 Juni 1953
pertinggal
5 lembar

1037 Surat-surat mengenai protes D.P. Cabang Pemuda Rakyat Balikpapan karena N.V. Bataafsche Petroleum Mij tidak menyetujui pemungutan derma di gedung bioskop Karanganyar.

9 Juni - 5 Desember 1953
asli, salinan
6 lembar

1038 Pidato wakil dari Front Pemuda Islam Indonesia Bojonegoro, dalam menyambut hari ulang tahun 10 November 1953 didalam rapat umum di Bojonegoro.

11 November 1953
Salinan
2 lembar

1039 Konsepsi UUD Negara Islam bagi Indonesia dan pemandangan Kongres PSII ke-29.

22 Juni 1953 & 29 Januari 1954
asli, salinan
1 sampul

1040 Resolusi dan pernyataan dari beberapa ormas mengenai program pemerintah terkait ekonomi dan keamanan.

13 Juli - 21 September 1953
asli
1 sampul

1041 Berkas mengenai ucapan terima kasih dari Sekretariat Bersama Organisasi Tani Sumatera Utara atas tindakan pemerintah terkait peristiwa 'traktor maut' di Binjai.

1 - 19 September 1953
asli
5 lembar

1042 Kumpulan resolusi dari berbagai organisasi masa mengenai permasalahan perekonomian.

23 September 1953 - 7 Januari 1955
asli, tembusan, konsep
1 sampul

1043 Putusan-putusan Konferensi Parkiwa (Partai Kebangsaan Indonesia Bagian Wanita) tanggal 2-3 Juni 1953 di Bogor.

24 September 1953
pertinggal
4 lembar

1044 Surat-surat mengenai resolusi Ikatan Pegawai Negeri pada Penataran Angkatan Laut di Surabaya.

27 September - 2 November 1953
asli
3 lembar

1045 Surat-surat mengenai resolusi rapat umum PSII tentang keadaan di Muaradua.

27 September - 2 Desember 1953
asli, pertinggal
5 lembar

1046 Surat-surat mengenai tuntutan Persatuan Kaum Tani di Palembang, Padang dan Tanjunglaga.

8 Oktober 1953 - 12 Nopember 1953
asli
5 lembar

1047 Berkas mengenai Gerakan Pemuda Ansor di Cirebon. n.b. : rahasia.

23 Oktober - 30 Desember 1953
Pertinggal
5 lembar

1048 Kawat dari Gabungan Aannemers Pembangunan Nasional di Ambon mengenai Kepala Pekerjaan Umum di Ambon CH Moller yang dianggap mementingkan pengusaha asing.

11 November 1953
asli
2 lembar

1049 Surat pernyataan bersama rakyat Amanuban, wilayah Timor Tengah Selatan mengenai perkembangan politik di daerah Timor dan kepulauannya.

8 Desember 1953
asli

4 lembar

1050 Surat dari Madjlis Pimpinan Muhammadijah Kabupaten Solok kepada J.M. Perdana Menteri RI mengenai resolusi tentang masalah yang sedang terjadi pada pemerintahan.

28 November 1953
asli
2 lembar

1051 Berkas mengenai organisasi " Promotor Revolusi Indonesia"

14 Desember 1953 - 27 Januari 1954
asli
1 sampul

1052 Berkas mengenai penurunan Bendera Bintang Bulan di Belintang Kalimantan dan protes Badan Kontak Organisasi Islam.

16 Desember 1953 - 13 Maret 1954
tembusan
1 sampul

1053 Statemen Dewan Pimpinan Wilayah Masjumi Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 1953 di Palembang.

17 Desember 1953
tembusan
6 lembar

1054 Surat kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tentang Petisi Demonstrasi Wanita Indonesia di Samarinda.

22 Desember 1953 - 19 Januari 1954
pertinggal
2 lembar

1055 Berkas mengenai hasil konferensi PSI (Partai Sosialis Indonesia) Kalimantan Timur ke-1.

05 Januari - 20 Februari 1954
asli
1 sampul

1056 Surat dari Kepala Bagian DPKN Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai sidang pleno Masyumi di Sumatera Selatan terkait tuduhan dan ancaman PKI terhadap pemimpin Masyumi, beserta lampiran.

6 Januari 1954
asli

4 lembar

1057 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara mengenai Resolusi Partai Islam Perti tentang Dewan Perwakilan Rakyat Paseman.

29 Januari 1954
asli
2 lembar

1058 Surat dari Kepala Bagian DPKN Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai terbentuknya Front Kerjasama Partai/Organisasi dari PNI, PKI, Partai Murba, Partai Permai, Partai Tani Indonesia Partai Perta, Partai Front Persatuan Tani, Partai Sabbetsi dan petani di Bekasi, beserta lampiran.

4 Februari 1954
asli
4 lembar

1059 Surat dari Pimpinan Cabang Masyumi Kabupaten Labuhan Batu kepada Perdana Menteri mengenai protes terhadap ucapan Sanusi Sapulidi dalam Rapat Umum PKI bahwa peristiwa Tanjung Morawa disebabkan oleh tokoh-tokoh Masyumi.

5 Februari 1954
asli
3 lembar

1060 Surat pengumuman Partai Republik mengenai program dan anggaran dasar partai.

16 Februari 1954
asli
1 sampul

1061 Berkas mengenai gerakan masa PERPEKAI (Persatuan Pembela Kemedekaan Indonesia).

26 Februari - 25 Mei 1954
asli
1 sampul

1062 Resolusi-resolusi dari SEBDA Kabupaten Sukoharjo antara lain tentang pendemokrasian pemerintah daerah, pembasmian komplotan NICA dan sebagainya.

07 Maret 1954
asli
1 sampul

1063 Surat dari Pusat Pimpinan Wanita Demokrat Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai daftar susunan pengurus Wanita Demokrat Indonesia.

8 Maret 1954
asli
2 lembar

1064 Berkas mengenai Aceh Affair yang dijadikan bahan perpecahan nasional oleh partai - partai.

16 Maret 1954
asli
1 sampul

1065 Laporan mengenai organisasi Pengabdi Masyarakat yang dipimpin oleh Abdul Rasjid.

31 Maret 1954
asli
1 sampul

1066 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai rapat PTMII - PENEMMAI mengenai program perjuangan dan pernyataan kepada pemerintah.

07 April 1954
asli, salinan
8 lembar

1067 Notulen rapat keamanan yang diselenggarakan oleh 16 partai politik di Makassar.

12 April 1954
salinan
8 lembar

1068 Surat dari Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai Kongres Gerwis ke II di Jakarta, beserta lampiran.

8 Mei 1954
Asli
1 sampul

1069 Berkas mengenai resolusi-resolusi dari partai dan serikat buruh tentang pembatalan uni Indonesia-Belanda dan masalah Irian Barat.

28 Mei - 29 September 1954
Asli
1 sampul

1070 Kumpulan surat dan resolusi dari Barisan Tani Indonesia mengenai masalah pemerintahan, perdamaian dunia, agraria, kesehatan dan umum.

9 Juni 1954 - 4 Desember 1958
asli
1 sampul

1071 Peraturan dasar Badan Koordinasi Bekas Pejuang di Kalimantan Barat dan resolusi tentang urusan politik, sosial dan ekonomi.

10 Juni - 15 Juli 1954
asli
1 sampul

1072 Surat-surat mengenai resolusi dan mosi Serikat Perusahaan Suratkabar tentang tugas (fungsi) pers dalam pendidikan dan larangan majalah asing untuk para Menteri.

14 Juni & 2 Juli 1954
Asli
1 sampul

1073 Laporan mengenai perkembangan sekitar Anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi, Sdr. Mr. Kasman Singodimejo di Ambon.

22 Juni 1954
Asli
1 sampul

1074 Resolusi dari beberapa sarekat buruh dan ormas lainnya tentang penggantian DPRDS melalui pemilu.

28 Juni - 11 Oktober 1954
asli
1 sampul

1075 Surat - surat mengenai pernyataan bersama dari rakyat dan organisasi / Partai dalam daerah Kecamatan Haurgeulis mengenai pemindahtugasan Kepala Polisi Negara Wilayah Haurgeulis ke Karangampel.

24 Juli - 16 November 1954
Pertinggal
1 sampul

1076 Berkas mengenai activiteit Ahmadiyah Indonesia pandangan mengenai pengertian negara Islam.

30 Juli 1954
asli
1 sampul

1077 Pernyataan protes dari Pimpinan Cabang Persatuan Buruh Minyak Prabumulih terhadap monopoli modal asing Belanda BPM tentang urusan politik dalam negeri.

04 Agustus 1954
asli
1 sampul

1078 Berkas mengenai Statement Gerakan Patriot Negara tentang pengabdian kepada bangsa.

10 Agustus - 05 Oktober 1954
Asli
1 sampul

1079 Catatan ringkas mengenai pertemuan Wakil Perdana Menteri I Mr. Wongsonegoro dengan wakil - wakil jawatan, partai/ organisasi di kediaman Gubernur Sulawesi di Makassar. n.b: rahasia.

09 September 1954
Asli
1 sampul

1080 Berkas mengenai konferensi pendidikan dan ilmu pengetahuan Darul Dakwah Wal Irsjad (D.D.I) Pusat Pare-pare.

18 September - 3 Nopember 1954
Asli
1 sampul

1081 Laporan mengenai kongres SB PTT seluruh Indonesia 15 s/d 20 Juli 1954 di Semarang.

27 September 1954
asli
1 sampul

1082 Surat dari Jawatan Kepala Negara Bagian DPKN kepada Perdana Menteri mengenai Gerakan Kemerdekaan Ummat Manusia.

19 Oktober 1954
Asli
5 lembar

1083 Surat-surat mengenai Panitia 10 November 1954.

20 November 1954
Asli
5 lembar

1084 Laporan mengenai Konferensi PSII wilayah Sumatera Selatan dan Surat Pimpinan Harian Ladjnah Tanfidzijah PSII mengeni sikap politik PSII terhadap Kabinet Ali-Arifin.

25 Oktober & 11 November 1954
asli, salinan
1 sampul

1085 Berkas mengenai pernyataan bersama partai/ Organisasi Islam Makale/ Rantepao.

21 November 1954
Tembusan
4 lembar

1086 Surat dari panitia 1 Mei Wlingi mengenai Resolusi tentang desakan kepada pemerintah pusat untuk membuat jembatan.

01 Mei 1955
Asli
5 lembar

1087 Surat dari Dewan Cabang SOBSI Sidoarjo kepada Menteri Dalam Negeri mengenai tindakan Sekretaris I DPD Kabupaten Sidoarjo yang melanggar batas kekuasaan.

06 Mei 1955
Tembusan
2 lembar

1088 Berkas mengenai pernyataan dan resolusi Dewan Cabang Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Balikpapan.

07 - 10 Agustus 1955
Asli
8 lembar

1089 Berkas mengenai tuntutan dari berbagai partai politik, organisasi massa dan wanita agar Kabinet Burhanuddin Harahap segera dibubarkan.

24 Agustus 1955 - 10 Januari 1956
asli
1 sampul

1090 Surat dari a. n. Menteri Dalam Negeri kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai reaksi partai politik dan organisasi massa terhadap Pidato Presiden pada 17 Agustus 1955. n.b : rahasia.

27 September 1955
Asli
1 sampul

1091 Berkas mengenai pernyataan bersama Organisasi-Organisasi Maluku Muda dan organisasi eks pejuang Maluku Utara tentang pencalonan anggota Konstituante.

22 Desember 1955 - 10 Februari 1956
Asli
1 sampul

1092 Berkas mengenai Stephen Titus Hosmen warga Amerika yang mengajukan pertanyaan politik kepada partai-partai politik.

10 Februari - 26 Juni 1956
Asli
1 sampul

1093 Berkas mengenai Resolusi Partai-Partai dan Organisasi-Organisasi tentang penyempurnaan komposisi kabinet karena tidak duduk wakil PKI.

01 - 02 Juni 1956
Asli
1 sampul

1094 Surat dari Dewan Daerah SOBSI Jawa Tengah kepada Perdana Menteri mengenai akibat yang ditimbulkan oleh gerakan Dewan Banteng dengan PRRI.

5 Juli 1956 - 31 Desember 1958
asli
4 lembar

1095 Pidato Sambutan Perdana Menteri pada Kongres VI Gerakan Pemuda Ansor di Malang.

03 - 22 September 1956
Pertinggal
1 sampul

1096 Resolusi dari Panitia Aksi Penentang Pembangunan Pemerintah yang disalurkan pada usaha asing kepada seluruh kementerian mengenai pemberian prioritas dan fasilitas kepada Pengusaha Pemborong Nasional dalam pembangunan.

17 September 1956
tembusan
5 lembar

1097 Berkas mengenai kedudukan nelayan di dalam pampasan perang oleh pengurus besar Serikat Nelayan Islam Indonesia.

24 Januari 1958
Asli
3 lembar

1098 Berkas mengenai penyampaian salinan surat Japan Automobile Association beserta kartu anggota kehormatan yang ditujukan kepada Ir. Djuanda sebagai Ketua Kehormatan Ikatan Motor Indonesia.

07 Februari - 28 Maret 1958
Asli
5 lembar

1099 Berkas mengenai hasil putusan Konggres Kerja I Barisan Bekas Romusha "BARUS" tentang nasib korban perang, politik dan organisasi.

15 Maret 1958 - 26 Maret 1958
Asli
1 sampul

1100 Berkas mengenai statement MUV I mengenai pelanggaran ekonomi.

15 April-05 Mei 1958
Asli
3 lembar

1101 Resolusi dari berbagai orsospol mengenai dukungan terhadap ide Demokrasi Terpimpin dan Pancasila sebagai dasar negara.

11 Januari - 1 Maret 1959
asli
1 sampul

1102 Resolusi dari DPD Sarbupri tentang pengadilan dan hukuman mati untuk teroris Cikini.

26 Januari 1959
asli
1 lembar

1103 Resolusi dari organisasi-organisasi buruh mengenai desakan kepada pemerintah untuk membatalkan UU Penanaman Modal Asing dan pelaksanaan nasionalisasi.

31 Januari - 3 Maret 1959
asli
5 lembar

1104 Resolusi penolakan dari Muslimat NU dan pernyataan Gerwani mengenai RUU perkawinan.

15 Februari - 6 Maret 1959
asli
7 lembar

d. Pemilihan Umum

1105 Surat dari Dewan Wilayah Masyumi Tengah mengenai pembentukan DPRD/Pemilihan DPRD. n.b : rahasia

24 Juni - 16 Oktober 1950
Asli
6 lembar

1106 Hasil pembicaraan antara Perdana Menteri dengan Ketua Kantor Pemilihan Pusat (KPP) mengenai tugas-tugas KPP.

06 November 1950
pertinggal
3 lembar

1107 Kumpulan resolusi dan pernyataan Konggres Sarekat Buruh Kereta Api Jawa Barat tentang pemilu, gerakan perdamaian dunia, pembubaran DPRS Jawa Barat dan sebagainya.

14 Januari 1951 - 16 Juni 1954
asli
1 sampul

1108 Surat dari Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai rencana penculikan anggota Masyumi terhadap para tokoh dari partai yang menyokong pemerintah (PNI, PKI, dll), beserta lampiran.

23 Februari 1954
asli
1 sampul

1109 Seri SK mengenai pengangkatan dan pembebastugasan anggota Panitia Pendaftaran Pemilih, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara.

1 Maret - 23 Oktober 1954
salinan
1 sampul

1110 Surat-surat mengenai tanda gambar PKI dan orang yang tidak berpartai.

12 April 1954 - 24 Desember 1954
asli
1 sampul

1111 Surat-surat mengenai pernyataan protes tentang pembatasan/larangan/penurunan spanduk dan plakat pemilu dari subsecom PKI Surabaya Tengah dan Sidoarjo.

29 Mei - 10 Juli 1954
asli, tembusan
1 sampul

1112 Surat-surat mengenai daftar nama dan tanda gambar dalam Pemilu Anggota Konstituante dan DPR.

31 Mei 1954
asli, pertinggal
1 sampul

1113 Resolusi dan Mosi DPRD Kotapraja Jogjakarta tentang desakan mengenai aturan untuk dasar hukum pembaruan DPRD Kotapraja Jogja dengan pemilu dan langsung serta desakan untuk segera mengesahkan *richtformatie* Kotapraja Jogjakarta.

25 - 28 Juni 1954
turunan
4 lembar

1114 Surat-surat mengenai penggunaan uang biaya pemilu untuk pembelian padi pemerintah.

28 Juni - 26 Juli 1954
asli, pertinggal
5 lembar

1115 Pengumuman Partai Islam Indonesia dan laporan rapat PSII mengenai pemilu.

02 Juli 1954
asli, salinan
8 lembar

1116 Berkas mengenai penggunaan nama Sarbupri dalam daftar calon DPR dan Konstituante.

1 Juli & 6 September 1954
asli
1 sampul

1117 Surat Keputusan Kepala Daerah Maluku Tengah No. 8/PUT/PP tentang penunjukan bendaharawan yang bertanggung jawab atas pemakaian dana untuk penyelenggaraan pemilu.

3 Juli 1954
salinan
3 lembar

1118 Statement Partai Sosialis Indonesia Sekretariat Dewan Cabang Sawahlunto tentang tolakan atas isi dan kandungan pernyataan bersama koordinasi partai-partai organisasi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. (PKI, Perti dan sebagainya).

8 Juli 1954

asli
2 lembar

1119 Surat-surat mengenai seruan dan pernyataan Sekretariat CC PKI dalam menghadapi saat berakhirnya pendaftaran pemilih.

22 Juli & 28 Juli 1954
tembusan
2 lembar

1120 Resolusi Kesatuan Aksi Penuntutan Pembubaran PPK Madiun No. 064/Sekr/54 tentang penuntutan pembubaran Panitya Pemilihan Kabupaten Madiun.

25 Juli 1954
tembusan
2 lembar

1121 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Ketua PPI mengenai pengeluaran untuk pemilu melalui BI.

30 Juli 1954
tembusan
1 sampul

1122 Kumpulan Resolusi dan surat protes mengenai penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan PP.

1 Agustus - 26 September 1954
asli
1 sampul

1123 Surat-surat mengenai peraturan pencalonan anggota Konstituante oleh Masyumi.

19 Agustus 1954
asli
7 lembar

1124 Surat dari Waperdam I kepada Mendagri mengenai pesanan pembuatan kapal kayu untuk keperluan pelaksanaan pemilu.

3 - 8 September 1954
asli
4 lembar

1125 Pernyataan DPRS Kota Besar Cirebon tentang desakan agar segera membuat UU Pemilu Daerah dan mendahulukan pemilu DPRD Daerah daripada DPRD Pusat.

03 September 1954

asli
1 lembar

1126 Surat-surat mengenai laporan penyelenggaraan pemilu.

6-8 September 1954
tembusan
1 sampul

1127 Surat-surat mengenai penyampaian buku penyelenggaraan keamanan dalam pemilu, lampiran tidak ada.

16 September & 12 Oktober 1954
asli
4 lembar

1128 Berkas mengenai pemberlakuan PP No. 14 tahun 1952 bagi pejabat-pejabat Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bukan PNS.

23 Juli - 25 Agustus 1955
asli
1 sampul

1129 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR mengenai berita tentang jual-beli surat suara dalam pemilu.

19 September 1955 - 23 Juni 1956
asli
1 sampul

1130 Berkas mengenai keamanan dalam rangka pemungutan suara untuk Konstituante.

17 Nopember 1955 & 30 Januari 1956
asli, pertinggal
1 sampul

1131 Surat-surat mengenai jumlah suara dan pembagian kursi di DPR dan pemerintahan.

02 Januari 1956
asli, tembusan
1 sampul

1132 Berkas mengenai pencalonan anggota DPR/Konstituante keturunan Tionghoa dan Eropa.

28 Januari - 25 Juni 1956
asli
1 sampul

1133 Daftar anggota Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tewas, diculik dan cacat dalam melakukan tugas.

1 Maret - 5 Mei 1956
asli
1 sampul

1134 Berkas mengenai uang sidang, permintaan membeli mobil anggota PPI.

14 April - 27 November 1956
asli
1 sampul

1135 Surat dari Ketua Koordinasi Keamanan Daerah propinsi Sulawesi kepada Perdana Menteri mengenai pernyataan protes dari Dewan Pimpinan Cabang Masyumi Sulawesi Utara terkait pelarangan kampanye.

27 Juni 1956
asli
6 lembar

1136 Berkas mengenai rencana PPI dalam penyelenggaraan pemilihan anggota DPR ke II.

4 - 20 September 1958
asli
1 sampul

1137 Working-paper dari Kementerian Kehakiman mengenai pemilu pada sidang kabinet.

04 Oktober 1958
fotokopi
1 sampul

e. Perjuangan Merebut Irian Barat

1138 Resolusi-resolusi mengenai dukungan terhadap perjuangan merebut Irian Barat.

20 Maret & 12 April 1950, November 1950
asli, salinan
1 sampul

1139 Surat-surat dari Komisaris Belanda di Indonesia dan Menteri Keuangan tentang pembayaran antara Indonesia & Irian untuk dibicarakan dalam rapat Dewan Menteri. Nb: arsip ada yang berbahasa Belanda.

12 Mei 1950 - 29 April 1952
salinan
1 sampul

1140 Surat-surat mengenai resolusi dari berbagai organisasi sosial politik dan pemerintah derah tentang tuntutan pembatalan hasil KMB terutama masalah Irian Barat.

9 November 1950 - 25 Mei 1956
asli
1 sampul

1141 Risalah mengenai perkembangan soal Irian di Negeri Belanda dari akhir Desember hingga Januari 1951.

31 Januari 1951
fotokopi
7 lembar

1142 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai kawat dari Ketua Pusat Badan Perjuangan Irian tentang Pemerintah Belanda kemungkinan membiarkan musnahnya penduduk Irian.

25 September 1951
pertinggal
2 lembar

1143 Surat dari Kepala Bagian Politik/Keamanan kepada Kepala Kepolisian Indonesia mengenai salinan hasil sensor surat-surat mengenai Irian.

25 September 1951
pertinggal
4 lembar

1144 Surat dari Waperdam kepada Menteri Urusan Umum mengenai Kantor Panitia Irian Barat dan Badan Perjuangan Irian.

05 Desember 1951
tembusan
1 sampul

1145 Kawat Sandi dari Den Haag kepada Menteri Luar Negeri mengenai perundingan tentang Irian Barat.

17 Januari 1952
asli
2 lembar

1146 Laporan mengenai penyerbuan & penahanan penduduk Pulau Gebe/Joi oleh pemerintah Belanda di Irian Barat .

25 Maret 1952 - 16 Maret 1954
tembusan
1 sampul

1147 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Penerangan mengenai usul Kementerian PP&K terkait nota rahasia soal Australia-Irian Barat.

12 September 1952
tembusan
4 lembar

1148 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai laporan rapat tertutup *Hoge Commissariaat* Belanda tentang masalah dalam negeri, Irian Barat, dll.

28 Januari 1953
asli
3 lembar

1149 Surat-surat mengenai pendapat tentang politik bebas Indonesia menyangkut Irian Barat.

28 Januari - 8 Juli 1953
asli
1 sampul

1150 Berkas mengenai pengangkatan anggota-anggota Badan Pengurus Biro Irian.

14 Desember 1953 - 13 Maret 1954
tembusan
1 sampul

1151 Laporan dari M. Yamin mengenai hasil-hasil pekerjaan Missi-Supomo 1952 dan sengketa Irian Barat.

29 Juni & 3 Juli 1954
fotokopi
1 sampul

1152 Berkas mengenai tuduhan infiltrasi ke Irian Barat pada Oktober 1954 dan tahanan seorang Komandan Polisi Louis van Krieken yang ditangkap oleh Pejuang Kemerdekaan Irian. NB. Arsip dalam bahasa Indonesia dan Belanda.

6 November 1954 - 30 Juni 1955
asli, tembusan
1 sampul

1153 Berkas mengenai izin demonstrasi untuk menuntut Irian Barat.

25 - 30 November 1954
pertinggal
1 sampul

1154 Surat dari Ketua Pusat Badan Perjuangan Irian kepada Perdana Menteri mengenai pertemuan dengan komisaris Belanda di Makassar.

04 Desember 1954
asli
4 lembar

1155 Berkas mengenai perundingan tentang Irian Barat dalam sidang PBB.

11 Desember 1954 - 19 November 1957
salinan, pertinggal
1 sampul

1156 Surat dari Komandan Resimen Infanteri 25/W kepada Perdana Menteri mengenai "Lima Sendi" pertahanan Maluku cara untuk merebut Irian Barat.

21 Desember 1954
asli
1 sampul

1157 Surat dari Sekretaris Umum Pusat Badan Perjuangan Irian kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai kasus J. Torey dkk, anggota Biro Irian yang ditahan serta hidup dalam kesulitan.

21 Januari - 11 Februari 1955
asli
6 lembar

1158 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai berita surat kabar "Tindjauan" tentang demonstrasi orang-orang asli Irian yang diorganisir Belanda untuk menentang masuknya Irian Barat ke RI.

15 April - 12 Mei 1955
asli
5 lembar

1159 Pertanyaan anggota DPR tentang masalah Irian Barat di PBB.

9 Februari - 24 Oktober 1957
asli, salinan
1 sampul

1160 Berkas mengenai putusan-putusan rapat Kabinet Juanda tentang Irian Barat.

1 Oktober - 2 Desember 1957
fotokopi
1 sampul

1161 Surat dari Ketua Dewan Nasional kepada Perdana Menteri mengenai usul terkait perjuangan Irian Barat.

18 - 30 November 1957
salinan
8 lembar

1162 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Ketua Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat mengenai tindakan-tindakan di bidang ekonomi dalam rangkaian aksi pembebasan Irian Barat.

06 Desember 1957
pertinggal
3 lembar

1163 Surat dari Ketua GTRIB dan Ketua Front Buruh-Tani-Pemuda & Militer mengenai saran terhadap perjuangan Irian Barat.

7 Desember 1957 & 7 Januari 1958
asli
4 lembar

1164 Memo dari Kementerian Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai sikap Belanda yang seperti mewakili Irian Barat dalam konferensi-konferensi internasional.

15 Januari 1958
asli
1 sampul

1165 Berkas mengenai jawaban pemerintah tentang perjuangan Irian Barat dalam rapat pleno DPR.

10 & 11 Februari 1958
fotokopi
1 sampul

1166 Surat-surat mengenai biaya perayaan 1 Mei yang diselenggarakan oleh Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

29 April, 19 Agustus 1958
tembusan, fotokopi
1 sampul

1167 Surat dari Ketua Perwakilan Objek Ramusja kepada Perdana Menteri mengenai bantuan dari pampasan Jepang untuk perjuangan Irian Barat.

25 Januari 1959
asli
4 lembar

1168 Laporan bulanan dana perjuangan Irian Barat.

15 April - 3 September 1959

asli
1 sampul

f. Hubungan Luar Negeri

1169 Surat-surat mengenai pengangkatan duta besar, Atase, dan Kepala Kantor Imigrasi di beberapa negara.
4 September 1950 - 15 Agustus 1958
Pertinggal
1 sampul

1170 Surat dari Duta Besar, Kepala Perutusan RI ke PBB kepada Presiden RI mengenai kedatangan Doctor Manuel Perez Guerrero ke Indonesia
02 September 1950 - 06 Januari 1951
Salinan
2 lembar

1171 Berkas mengenai Uni Indonesia Belanda.
07 Oktober 1950 - 4 Agustus 1956
asli
1 sampul

1172 Berkas mengenai ancaman terhadap pegawai Komisariat Agung Belanda.
15 Januari - 23 Maret 1951
asli
5 lembar

1173 Surat dari JB. Childs kepada Sultan Jogjakarta mengenai permintaan laporan tentang KNIP.
23 Mei 1951
pertinggal
3 lembar

1174 Berkas mengenai keikutsertaan RI dalam Sidang Umum PBB di Paris dan New York.
25 Mei 1951 - 17 September 1957
Asli
1 sampul

1175 Berkas mengenai keanggotaan Indonesia pada Internasional Islamic Organization.
19 September 1951 - 8 April 1952
Pertinggal
1 sampul

1176 Berkas mengenai perundingan pengembalian ganti rugi selama perang Indonesia dan Jepang.

19 September 1951 - 29 Juni 1955
Asli
1 sampul

1177 Surat - surat mengenai insiden dalam resepsi yaitu protes kepada PBB mengenai tindakan Dr. Keenleyside terhadap Dr. Schachd.

13 Oktober - 3 November 1951
asli
1 sampul

1178 Berkas mengenai usaha anggota misi Amerika di Kalimantan Barat bersifat Militaire Hulpdiensten.

03 - 18 Januari 1952
asli
1 sampul

1179 Surat-surat mengenai Agreement Subardjo-Cochran tentang *Mutual Security Act* (MSA).

5 Januari - 20 Mei 1952
salinan, pertinggal
1 sampul

1180 Surat-surat mengenai rapat Dewan Menteri tentang masalah Tunisia dan pengakuan kerajaan Libya.

08 Januari - 10 April 1952
asli
6 lembar

1181 Surat pernyataan dari berbagai organisasi sosial mengenai Konferensi Asia Afrika.

8 Januari - 28 April 1955
asli, salinan
1 sampul

1182 Berkas mengenai Godwill Mission Indonesia ke Burma.

31 Januari - 27 Februari 1952
pertinggal
1 sampul

1183 Laporan dari Duta Indonesia untuk Mesir dan Arabia mengenai perkembangan politik dalam dan luar negeri Mesir sesudah Kabinet Nahas Pasja jatuh.

4 Februari 1952
tembusan
1 sampul

1184 Surat-surat mengenai ucapan Duta Besar Perancis di Sumatera Barat.
06 Februari - 16 Juni 1952
asli
9 lembar

1185 Surat-surat mengenai keikutsertaan RI dalam Konpensi Den Haag 1907 guna penyelesaian perselisihan - perselisihan internasional secara damai.
09 Februari - 25 April 1952
pertinggal
1 sampul

1186 Surat-surat mengenai kebebasan bergerak dari wakil-wakil diplomatik negara asing di Indonesia.
13 Februari - 13 Maret 1952
asli
4 lembar

1187 Berkas mengenai tulisan Sdr. Moechtar Lubis di Indonesia Raya yang berkenaan dengan perjanjian Frisco.
02 Maret 1952
asli
2 lembar

1188 Surat dari Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai Australia in the Pasific dan Australia Interest in the Adjacent Island. n.b: arsip berbahasa Inggris.
10 Maret 1952
asli
9 lembar

1189 Berkas mengenai undangan pemerintah Pakistan kepada Perdana Menteri untuk mengunjungi pertemuan antara Perdana Menteri negara - negara Islam di Karachi.
5 - 10 April 1952
pertinggal
1 sampul

1190 Kawat dari Kepala Jawatan Resersi Pusat kepada Perdana Menteri mengenai konferensi perdamaian untuk Asia dan daerah - daerah Pasific.
16 April 1952
tembusan

1 sampul

1191 Surat dari Gubernur Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri mengenai hubungan surat menyurat dengan luar negeri.

21 Mei 1952
asli
2 lembar

1192 Surat dari Perdana Menteri RI kepada Menteri Luar Negeri mengenai daftar konferensi-konferensi internasional/regional yang akan dilaksanakan selama tahun 1952.

01 - 09 Juni 1952
pertinggal
1 sampul

1193 Surat-surat mengenai pengiriman peninjau kemiliteran dari Washington sehubungan dengan politik bebas Indonesia.

16 - 28 Juni 1952
asli
5 lembar

1194 Surat-surat mengenai penolakan kunjungan delegasi Komite Pembela Perdamaian Dunia sehubungan dengan Perang Korea oleh Kedutaan Amerika di Tanah Abang.

27 Juni - 19 Agustus 1952
asli
1 sampul

1195 Surat-surat mengenai pengiriman Peninjau Militer Indonesia ke Koje (Korea).

02 - 16 Juli 1952
Asli
1 sampul

1196 Surat-surat dari Biro Perancang Negara mengenai iuran keanggotaan organisasi-organisasi internasional.

10 Juli 1952 - 14 April 1954
fotokopi
8 Lembar

1197 Kumpulan Surat Pernyataan dari partai / organisasi masyarakat tentang protes terhadap kedatangan Presiden Quirino ke Indonesia.

14 - 19 Juli 1952

asli
1 sampul

1198 Berkas mengenai Colombo Plan .

14 Agustus 1952 - 22 Juni 1957
pertinggal
1 sampul

1199 Berkas mengenai reorganisasi Komisariat Agung RI di Nederland.

15 - 26 Agustus 1952
asli
1 sampul

1200 Surat dari Perdana Menteri kepada Kementerian Luar Negeri mengenai Resolusi Badan Perjuangan Irian Barat Provinsi Sumatera Utara mengenai perjuangan Bangsa Tunisia.

21 Oktober 1952
pertinggal
4 lembar

1201 Surat dari Direktorat Cadangan Nasional kepada Kementerian Luar Negeri mengenai pengembalian bekas tentara sekutu Bangsa Pakistan.

25 Agustus 1952
tembusan
4 lembar

1202 Surat dari Kementerian Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai buku berjudul " Dapatkah politik bebas kita dipertahankan " karangan Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Jusuf Wibisono, dan Ir. Djuanda.

26 - 18 Agustus 1952
asli
1 sampul

1203 Laporan politik dari duta besar RI di New Delhi (pembicaraan dengan Wakil Presiden dan Perdana Menteri India).

22 September - 13 Oktober 1952
asli
7 lembar

1204 Surat dari Komisaris Besar Polisi mengenai laporan kunjungan Duta Besar Inggris Kermode ke Sumatera Timur.

18 Oktober 1952
asli
3 lembar

1205 Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai laporan Duta Besar RI di Manila, beserta lampiran.

21 Oktober 1952
asli
4 lembar

1206 Surat-surat dari Kementerian Luar Negeri mengenai pertukaran wakil diplomatik dengan Syiria, Jordan, dan Lebanon.

21 Oktober - 14 November 1952
asli
1 sampul

1207 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai penjelasan keadaan perang Jerman dengan Indonesia.

10 Februari - 27 Maret 1953
asli
1 sampul

1208 Surat-surat mengenai permintaan persetujuan terhadap pengangkatan Luang Ratanadib sebagai Duta Thailand untuk Indonesia.

17 Februari - 19 Maret 1953
asli
4 lembar

1209 Verbal nota dari komisariat Agung kerajaan Belanda di Jakarta mengenai pelanggaran peraturan devisen Indonesia tentang sangkaan membawa barang - barang.

17 Maret 1953
tembusan
4 lembar

1210 Berkas mengenai delegasi untuk anggota keluarga yang berangkat lebih dahulu keluar negeri cq. ditinggalkan di sana dari Pegawai Negeri yang bekerja Indonesia.

21 Mei 1953
asli
4 lembar

1211 Surat dari Kejaksaan Agung / Mahkamah Agung Indonesia mengenai insiden yang ditimbulkan orang berkebangsaan Indonesia di Cotabato Filipina.

04 Juni - 08 September 1953

asli
5 lembar

1212 Berkas mengenai Delegasi Indonesia ke Consultative Committee Meeting di New Delhi dalam rangka persiapan Colombo Plan.

10 Agustus - 16 September 1953
Asli
9 lembar

1213 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai laporan perundingan Indonesia-Philipina tentang *illegal immigrants* dan *illegal entries* serta tentang lalu lintas di wilayah perbatasan, beserta lampiran.

03 September 1953
asli
1 sampul

1214 Surat dari selc III kedutaan RI Thailand mengenai situasi Thailand Selatan.

04 Januari 1954
tembusan
6 lembar

1215 Berkas mengenai kegiatan hukbalahap dan tinjauan beberapa masalah di Filipina.

11 Januari - 16 Oktober 1954
Asli
1 sampul

1216 Surat dari Kedutaan RI di Bangkok mengenai matinya Lavrenti Beria, mantan Kepala Polisi Rahasia Sovjet .

18 Januari - 06 Februari 1954
asli
3 lembar

1217 Surat dari Jaksa Agung kepada kepala Polisi Negara mengenai Berita Polisi Negara mengenai Berita Pers Tionghoa tentang latar belakang dari kebakaran - kebakaran besar di Muang Thai.

21 Januari 1954
tembusan
2 lembar

1218 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepda Perdana Menteri mengenai perjanjian persahabatan antara RI dan Kerajaan Thailand, beserta lampiran.

27 Januari 1954
pertinggal

1 sampul

1219 Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai daftar nama Pegawai Diplomatik dan Kepala Bagian Kanselarai pada perwakilan RI di luar negeri, beserta lampiran.

25 Februari 1954
asli
1 sampul

1220 Surat dari Kepala Jawatan Resersi Pusat kepada Wakil Perdana Menteri I mengenai Kongres Nasional untuk Perdamaian Dunia yang pertama di Indonesia. nb. terdapat arsip foto.

26 Februari 1954
asli
1 sampul

1221 Surat-surat mengenai penjelasan sekitar perkumpulan IAI di Munchen.

26 Maret - 5 April 1954
asli
1 sampul

1222 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai Basses USA di Filipina.

29 April - 15 Mei 1954
asli
6 lembar

1223 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai hubungan organisasi - organisasi di Indonesia dengan luar negeri, nb. beserta lampiran.

24 Juli 1954
asli
1 sampul

1224 Surat dari Sekretaris Presiden kepada Menteri Keuangan mengenai perpanjangan izin untuk memangku jabatan Executive Director dari Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan di Washington kepada Mr. Sutikno Slamet.

11 Agustus 1954 - 14 Maret 1957
tembusan
1 sampul

1225 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai laporan lengkap mengenai konferensi SIMLA.

16 Juni 1955

fotokopi
1 sampul

1226 Surat - surat mengenai permintaan bahan - bahan keterangan oleh perwakilan asing dan atau luar negeri.

20 Juli - 24 Oktober 1955
salinan
1 sampul

1227 Berkas mengenai pengembalian orang Ambon dari Belanda ke Indonesia.

02 November 1955 - 28 Februari 1956
Asli
1 sampul

1228 Berkas mengenai statement senator G. Rankin tentang pernyataan penyesalan dari pemerintah Australia.

23 Februari - 7 Maret 1956
asli
1 sampul

1229 Surat-surat mengenai penyelesaian pembatalan persetujuan KMB.

03 Mei 1956 - 12 Desember 1957
Asli
1 sampul

1230 Surat - surat mengenai hubungan antara gerakan Islam sedunia dan Indonesia.

20 September - 03 November 1956
Asli
5 lembar

1231 Surat - surat mengenai penambahan bahan - bahan sandi di luar negeri.

22 November 1956
pertinggal
3 lembar

1232 Surat dari Kedutaan RI di Colombo kepada KPM RI mengenai pernyataan bersama Perdana Menteri Ceylon dan Perdana Menteri RRT, beserta lampiran.

07 Februari 1957
asli
5 lembar

1233 Surat dari Kepala Direktorat PBB dan Organisasi - Organisasi Internasional mengenai penunjukan niominees Indonesia untuk Seminar on Civic Responsibilities and Increased Participation of Asian Women in Public Life di Bangkok.

25 April 1957
asli
2 lembar

1234 Pidato Dr. Moh. Hatta pada sidang yang diperluas pada Komite Tetap Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok.

24 September 1957
fotokopi
1 sampul

1235 Surat-surat mengenai hubungan langsung perwakilan-perwakilan asing di Indonesia dengan instansi-instansi pemerintah RI tanpa melalui Kementerian Luar Negeri.

02 Oktober 1957
pertinggal
1 sampul

1236 Surat - surat mengenai undangan sebagai tamu negara Perdana Menteri Pakistan.

06 - 22 November 1957
Asli
4 lembar

1237 Surat-surat mengenai sikap pemerintah terhadap Asia Fondation.

23 Januari 1958
Salinan
1 sampul

1238 Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Luar Negeri kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai delegasi Indonesia pada ALCC.

19 - 20 Maret 1958
Asli
1 sampul

1239 Berkas mengenai kunjungan Perdana Menteri Ferhard Abbas dari Aljazair.

09 Oktober 1958 - 10 Juni 1959
Asli
1 sampul

1240 Berkas mengenai permohonan warga negara Indonesia di Suriname untuk diizinkan pulang ke Indonesia .

20 Maret - 21 Juli 1959
Asli

1 sampul

1241 Surat mengenai peraturan tentang perkawinan pejabat / pegawai perwakilan RI di luar negeri dengan bangsa asing.

25 Maret - 24 Juni 1959
Pertinggal
1 sampul

1242 Surat-surat mengenai hubungan antara Jepang dan RRT dan persoalan politik di Jepang.

05 - 28 April 1959
Asli
1 sampul

1243 Naskah terjemahan pidato yang dibuat oleh Presiden saat kedatangannya di Mexico.

21 Mei 1959
Salinan
1 sampul

1244 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai penyelesaian masalah aset Jerman.

30 Mei 1959
Salinan
1 sampul

1245 Naskah pidato Radio Menteri Pertama Ir H. Juanda melalui Radio Moskow.

17 Agustus 1959
Asli
1 sampul

1246 Berkas mengenai Laporan tentang kunjungan perutusan Departemen Agama RI ke Uni Soviet Bulan September 1959.

02 Desember 1959
asli
1 sampul

g. Pengaturan Bangsa Asing

1247 Surat-surat mengenai peraturan-peraturan tentang *Toelatingskaarten dan vestinging* untuk bangsa asing di Indonesia.

12 Januari - 13 Maret 1950
asli, pertinggal

1 sampul

1248 Berkas mengenai kedudukan pegawai bangsa asing.

21 April 1950 - 4 Februari 1952
asli, pertinggal
1 sampul

1249 Surat-surat mengenai kedatangan VD Zwaal di Pesantren Kediri dan Pabrik Gula di Madiun..

1 Juni & 10 Juni 1950
salinan
1 lembar

1250 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Perdana Menteri mengenai rencana ketetapan pemerintah untuk mempelajari pendirian daftar penduduk pada Tuan C. Dvd Harst.

22 Nopember 1950
asli
2 lembar

1251 Berkas mengenai perampokan, penganiayaan, penculikan dan pembunuhan warga asing (Belanda, Tionghoa, Inggris).

19 Desember 1950 - 27 Oktober 1956
asli, pertinggal
1 sampul

1252 Surat-surat mengenai *voorlichtingsbureau van het Algemeen Comite voor Personeelsvoorziening van Indonesie,* nb. bahasa Indonesia dan Belanda.

7 Februari - 29 Mei 1951
asli, pertinggal
9 lembar

1253 Surat-surat mengenai aturan untuk pemberian surat keterangan kelahiran kepada pemuda-pemuda Tionghoa.

14 Februari - 28 Juni 1951
asli, salinan, tembusan, konsep
4 lembar

1254 Surat-surat mengenai usul mengadakan tuntutan terhadap pegawai bangsa Belanda yang berhenti tidak mengindahkan tata tertib.

16 Maret - 18 Desember 1951
asli, pertinggal
1 sampul

1255 Surat-surat mengenai penangkapan warga Jepang di Indonesia.

11 Juni 1951 - 18 Februari 1954
asli, salinan, tembusan
1 sampul

1256 Surat-surat mengenai penghinaan terhadap sang Merah Putih oleh warga Belanda (Kapten Kapal MS. Kalabahi).

21 September 1951 - 4 Juli 1952
asli, pertinggal
1 sampul

1257 Surat dari Jaksa Agung kepada para Kepala Kejaksanaan PN Kerajaan Belanda mengenai tahanan orang-orang bangsa Belanda.

27 Desember 1951
tembusan
2 lembar

1258 Surat-surat mengenai prosedur pemanggilan tenaga ahli Bangsa Belanda.

1 Maret & 20 maret 1952
fotokopi
4 lembar

1259 Surat-surat mengenai penerimaan tenaga ahli bangsa asing dari Eropa Barat.

24 - 31 Maret 1952
tembusan
4 lembar

1260 Surat-surat mengenai pemeriksaan orang asing (crew kapal).

15 April - 4 Nopember 1952
asli, tembusan, pertinggal
1 sampul

1261 Surat-surat mengenai pendaftaran penduduk bangsa Tionghoa dan golongan minoriteit.

31 Mei 1952 - 12 Nopember 1952
asli, pertinggal, salinan
1 sampul

1262 Surat dari Kepala Polisi Karesidenan Kedu kepada Kepala Polisi Propinsi Jawa Tengah mengenai keberadaan G. Timmerman.

1 Juli 1952

salinan
1 lembar

1263 Surat-surat mengenai kontrak AURI dengan tenaga ahli bangsa Amerika.

30 Agustus & 9 September 1952
tembusan
2 lembar

1264 Surat-surat mengenai kegiatan dan tindakan masyarakat Tionghoa di Indonesia.

28 November 1950 - 8 Oktober 1953
asli, pertinggal, salinan
1 sampul

1265 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai pengawasan terhadap kedatangan orang-orang asing dari kalangan diplomatik.

29 Oktober 1952
pertinggal
2 lembar

1266 Berkas mengenai pengusiran warga asing dari Indonesia.

14 Nopember 1952 - 1 September 1955
tembusan, pertinggal, asli
1 sampul

1267 Surat-surat mengenai kasus Ir. J. P. v. d. Berg yang ditahan polisi atas pengaduan NV. Mustika Ratu Motor Coy.

26 Januari - 24 Nopember 1953
tembusan, asli, pertinggal
1 sampul

1268 Surat-surat mengenai daftar orang-orang asing yang tidak mempunyai surat-surat imigrasi.

4 Maret 1953 - 4 September 1954
asli, pertinggal
1 sampul

1269 Surat-surat mengenai permohonan exit-reentry permitt dan pengurusan ijin masuk orang asing ke Indonesia.

27 Mei 1953 - 19 Juli 1955
asli, tembusan, pertinggal
1 sampul

1270 Surat-surat mengenai pemulangan/repratiasi bebas serdadu Jepang, India dan Pakistan.

23 Juli 1953 - 25 Mei 1955
tembusan
1 sampul

1271 Surat-surat mengenai tahanan imigrasi yang melarikan diri (Atan bin Hoesin).

19 September 1953 - 14 Oktober 1954
pertinggal, asli, tembusan
1 sampul

1272 Surat-surat mengenai pembubaran rapat umum memperingati hari pemuda sedunia oleh bangsa Tionghoa golongan RRT.

10 Nopember 1953 & 31 Agustus 1954
asli
3 lembar

1273 Surat-surat mengenai permohonan surat keterangan kelakuan baik dari Mr. CHM Laurijssens dan istri (Amerika Serikat), nb. arsip berbahasa Inggris dan Indonesia.

7 Desember 1953 - 17 Nopember 1954
asli, pertinggal
1 sampul

1274 Surat-surat mengenai keterangan tentang Ny. Boersma-Visser.

16 Desember 1953 - 27 September 1954
asli, pertinggal
9 lembar

1275 Surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada Semua Kementerian mengenai pedoman untuk usul pengangkatan tenaga bangsa asing.

31 Desember 1953
asli
2 lembar

1276 Surat-surat mengenai keterangan tentang Ir. H. J. Van de Oudeweetering (warga Belanda).

25 Januari 1954
tembusan
6 lembar

1277 Surat-surat mengenai peraturan tentang transfer sosial untuk kepentingan pegawai-pegawai negeri bangsa asing.

28 Januari - 27 Juli 1954
asli, pertinggal
1 sampul

1278 Surat-surat mengenai kepulangan orang-orang ke Republik Rakyat Tiongkok dari Kalimatan Barat.

29 Januari - 29 Juli 1954
pertinggal, tembusan
1 sampul

1279 Surat-surat mengenai *positie Indische Nederlanders* dan kunjungan Kommissaris Tinggi Belanda di Bandung, nb. arsip berbahasa Belanda dan Indonesia.

4 Maret - 22 April 1954
asli
1 sampul

1280 Surat-surat mengenai imigran gelap.

5 Maret 1954 - 16 Mei 1955
asli, salinan
1 sampul

1281 Surat-surat mengenai kecurangan Go Tay Lm cs terkait pemalsuan surat tanda warga negara.

19 Maret - 4 September 1954
asli, salinan
1 sampul

1282 Surat-surat mengenai akte pembentukan Pro Patria dan Kolonel Schmidt Fonds.

5 April & 13 Mei 1954
tembusan
1 sampul

1283 Surat-surat mengenai pertimbangan pemberian visa.

8 Mei & 24 Juni 1954
pertinggal, asli
5 lembar

1284 Surat-surat mengenai keberadaan orang-orang asing di Pulau Tanimbar.

17 Mei - 21 Agustus 1954
asli
1 sampul

1285 Surat-surat mengenai permohonan Ds. Samuel Gerungan untuk ke Indo China hendak melepas tawanan.

24 Mei & 1 Juni 1954
pertinggal
3 lembar

1286 Surat pernyataan Partai Murba mengenai Peristiwa Penyelundupan Sampit oleh Oen Tjeng dkk.

17 & 20 Juli 1954
asli
4 lembar

1287 Surat mengenai keadaan dan perkembangan politik di Indonesia yang ditujukan kepada Dr. Tingfu F. Tsiang (wakil Tiongkok Nasionalis di PBB), nb. arsip berbahasa Indonesia dan Inggris.

06 September 1954
asli
5 lembar

1288 Surat-surat mengenai gerak-gerik CH Wedding dan warga asing lainnya di Indonesia.

6 Oktober 1954 - 4 Januari 1955
asli, tembusan
1 sampul

1289 Surat-surat mengenai hilangnya JKA Groere Woud (Kuasa Perkebunan Agrabinta di Australia.

16 Desember 1954 - 16 Juni 1955
asli, pertinggal, tembusan
8 lembar

1290 Surat-surat mengenai laporan dari JJE Megens dan NFK Spangenberg tentang tindakan Lukman Adiwinata dari DPKN terhadap mereka.

6 Januari - 31 Mei 1955
asli, pertinggal
1 sampul

1291 Surat mengenai pencatatan golongan Eropa atau Bangsa Eropa.

11 Mei 1955
asli
2 lembar

1292 Surat-surat dari Kementeria Luar Negeri mengenai pendaftaran orang asing yang dipekerjakan di Indonesia sebagai ahli.

4 - 22 Agustus 1956
tembusan
1 sampul

1293 Surat-surat mengenai perkelahian antara pemuda Indonesia dan pemuda Indo-Belanda di Semarang.

23 & 26 November 1956
konsep, pertinggal
8 lembar

1294 Berkas mengenai sikap/pedoman pemerintah terhadap pegawai negeri bangsa Belanda.

27 Desember 1957 - 5 Maret 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1295 Surat-surat mengenai izin mempekerjakan tenaga-tenaga ahli bangsa Belanda.

19 Maret - 4 September 1959
asli, tembusan, pertinggal
3 lembar

h. Penerbitan

1296 Surat dari Sekjen Menteri Luar Negeri kepada Sekretaris Perdana Menteri mengenai turunan kawat I Mr. LD/DE dan Mr. LD/DH dari London.

12 - 17 Oktober 1950
asli, salinan
3 lembar

1297 Surat-surat mengenai tulisan Injoo Beng Gwat berisi "operasi di dalam badan tentara" dalam surat kabar "Kong Po".

29 Oktober 1950-09 November 1950
asli, tembusan
1 sampul

1298 Surat dari Komisasris Polisi I Jawatan Kepolisian Indonesia bagian P.A.M kepada Wakil Perdana Menteri mengenai salinan surat kabar w.h "Keng Po" tentang propaganda anti Indonesia di Nederland.

02 November 1950
salinan
1 lembar

1299 Surat dari Kepala Jawatan Resensi Pusat Mahkamah Agung Indonesia kepada Wakil Perdana Menteri mengenai sebuah berita "Sumatera Bin Poh", 4 dan 9 Nopember 1950.

11 Desember 1950
asli, salinan
1 lembar

1300 Surat dari Kepala Jawatan Resensi Pusat Mahkamah Agung Indonesia kepada Wakil Perdana Menteri mengenai sebuah berita "Sin Po", 6 Nopember 1950.

11 Desember 1950
asli, salinan
2 lembar

1301 Berkas mengenai karangan di majalah "Bintang Merah", 15 Februari 1951.

08 Mei 1951
asli, salinan
1 sampul

1302 Berkas mengenai tulisan di dalam surat kabar Tionghoa "Tsing Kwang Daily Press" di Surabaya, 12 Mei 1951 yang mengandung hasutan perang.

11 Juni 1951-08 Agustus 1951
tembusan
1 sampul

1303 Surat dari Pembantu Komisaris Besar Polisi kepada Perdana Menteri mengenai berita surat kabar harian umum, 26 Mei 1951 no.214.

23 Juni 1951
salinan
3 lembar

1304 Berkas mengenai kumpulan surat kabar dari serikat perusahaan.

23 Juli 1951-10 Desember 1951
asli, salinan
1 sampul

1305 Berkas mengenai siaran "Sin Chow yit Poh" yang bersifat provokatif.

30 Juli 1951-12 Februari 1952
asli, tembusan
1 sampul

1306 Berkas mengenai tulisan D.N. Aidit dalam surat kabar *Waarheid*, 17 Agustus 1951.

30 Oktober 1951
salinan
1 sampul

1307 Surat dari Ketua Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai tadjuk rencana 16 Oktober 1951, seruan yang ditujukan kepada Jaksa Agung.

20 Desember 1951
asli, salinan
5 lembar

1308 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Kepala Pekerjaan Umum Pusat Propinsi Sumatera Selatan di Palembang mengenai berita Antara 31 Desember 1951 tentang "Rumah Sakit Tanda Mata Bung Karno" tidak dikerjakan lagi.

26 Januari 1952
asli
2 lembar

1309 Berkas mengenai keberatan percetakan "SK. Seno" terhadap penolakan badan pemerintahan harian Kotapradja Jakarta Raya, untuk mendirikan gedung percetakan di Desa Senayan Kebayoran Jakarta.

14 Maret - 28 April 1952
salinan
1 sampul

1310 Berkas mengenai Kantor Berita Antara tentang berbagai berita dari dalam dan luar negeri.

05 April 1952
salinan
1 sampul

1311 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai terjemahan dari sebuah tulisan yang termuat dalam "*New East*" majalah dari "*Scientific Association of Orientology of the U.S.S.R Moskow*" tentang anggapan Rusia tentang *sinoloog-sinoloog* , nb. arsip berbahasa Indonesia dan Inggris.

05 Juni 1952
asli
2 lembar

1312 Berkas mengenai barang cetakan dari Hongkong sebagai bahan propaganda RRT dan negeri asing.

22 April 1953 -23 April 1954
salinan
1 sampul

1313 Berkas mengenai Piagam Jajasan Kantor Berita Nasional Antara sebagai pengganti NV. Kantor Berita Antara.

20 Mei 1953-26 Mei 1953
asli, pertinggal
1 sampul

1314 Berkas mengenai pelarangan barang-barang cetakan Tionghoa dan luar negeri beredar di Indonesia.

4 Juli 1953 - 6 Mei 1955
asli, salinan, pertinggal
1 sampul

1315 Surat dari Mahkamah Agung Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai berita pers Tionghoa tentang pengangkutan buku-buku dan majalah-majalah dari Tionghoa ke Singapura melalui Indonesia.

14 November 1953
asli, salinan
2 lembar

1316 Berkas mengenai karangan Hiroshe Fujimoto dari harian "The Mainichi" yang dimuat pada 13 s/d 18 Januari 1954, tentang hidupnya kembali dari gerakan "kanan" di Jepang.

18 Februari 1954 - 28 Februari 1954
tembusan
1 sampul

1317 Surat dari pembantu komisaris besar polisi kepada Perdana Menteri mengenai surat pers yang dikirimkan oleh J.B Bouwer kepada L.W.de.Wit tentang Indonesia. NB. Arsip berbahasa Belanda.

4 Maret 1954
asli
3 lembar

1318 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia mengenai guntingan dari "*Nieuwe Courant*" 9 April 1951 yang diterbitkan di Surabaya tentang "*Morele Standaard Straajaugd*" dan "*Voor het vermiste meisye te Soerabaya Vijf mille Vitgeloofe*".

11 April 1954 - 12 April 1954
salinan
4 lembar

1319 Berkas mengenai laporan harian pers tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dan luar negeri.

16 Juni - 19 Oktober 1954

salinan
1 sampul

1320 Surat dari Kepala Jawatan Resensi Pusat kepada Perdana Menteri mengenai salinan karangan Arnold C. Brackman tentang rencana pekerjaan PKI.

22 Juni 1954
asli, salinan
3 lembar

1321 Surat dari Mahkamah Agung Indonesia kepada Menteri Pertahanan mengenai berita dalam harian Tionghoa "Sing Tao Jih Pao" Hongkong 25 Juni 1951 tentang putusan komunis Tiongkok menambah tenaga bersenjata kaum komunis Thai dan Birma.

21 Juli 1954
tembusan
2 lembar

1322 Surat dari Pembantu Komisaris Besar Polisi kepada Perdana Menteri mengenai kutipan surat kabar "Kedaulatan Rakyat" tentang Ikatan Dinas Sunan Menyolok mata.

03 Agustus 1954
salinan
2 lembar

1323 Berkas mengenai berita pers Tionghoa tentang markas depan dari pergerakan " Negara Thai Merdeka"

19 - 24 Agustus 1954
Asli
7 lembar

1324 Surat dari Mahkamah Agung Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai salinan surat kabar "*Sing Tao Jih Pao*" tentang Infiltrasi komunis Tionghoa ke Indonesia.

18 Agustus 1954
salinan
3 lembar

1325 Surat dari Gubenur Sumatera Tengah kepada Menteri Dalam Negeri mengenai kutipan dari berita Antara-APP 6 Januari 1954 tentang skema susunan organisasi perekonomian orang-orang Tionghoa di Indonesia dan Malaya.

26 Oktober 1954
salinan
4 lembar

1326 Surat-surat mengenai kesulitan-kesulitan mendirikan kantor Cabang Antara di New York.

18 & 30 Oktober 1954
pertinggal, tembusan
5 lembar

1327 Berkas mengenai majalah mingguan "*De Post*".

22 November 1954
fotokopi
1 sampul

1328 Berkas mengenai kumpulan kutipan surat kabar mengenai peristiwa yang terjadi di dalam negeri.

28-Januari 1955-28 September 1955
asli,salinan
1 sampul

1329 Surat dari Kepala Biro Politik kepada Perdana Menteri mengenai surat kabar Belanda "*De Telegraaf*".

21 April 1955-03 Juni 1955
salinan
1 sampul

1330 Surat dari Mahkamah Agung Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai Ichtisar Pers Tionghoa November 1954 s/d April 1955.

26 April 1955
salinan
5 lembar

1331 Surat dari Bagian Dinas Pengawasan Keselamatan Negara kepada Perdana Menteri mengenai berita harian rakyat tentang penangkapan petani di Nganjuk.

27 Juli 1955-28 September 1955
tembusan
5 lembar

1332 Surat-surat mengenai kutipan surat kabar tentang Simbuang, daerah yang tak pernah dimasuki TNI.

22 Agustus - 29 Desember 1955
asli, pertinggal
1 sampul

1333 Surat dari Bagian Pengawasan Keselamatan Negara kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian buku "*Het Laatste Uur*" yang dilarang beredar di Indonesia.

31 Agustus 1955
asli
1 sampul

1334 Surat dari Sekretaris Presiden kepada Biro Keamanan mengenai berita dalam surat kabar harian diterbitkan di Makassar tentang kematian pengungsi mencapai 200 orang dalam sebulan.

06 September 1955
tembusan
5 lembar

1335 Berkas mengenai salinan berita Antara dalam negeri 03 September 1955 No.246 tentang situasi di Minahasa yang tidak kondusif.

18 Oktober 1955
salinan
1 sampul

1336 Berkas mengenai berita pers tentang kesan-kesan anggota rombongan Presiden Soekarno ke luar negeri.

01 Desember 1956
salinan
1 sampul

1337 Berkas mengenai penerbitan majalah oleh Konstituante.

04 September - 13 Oktober 1958
salinan
1 sampul

1338 Berkas mengenai sumbangan untuk buku - buku peringatan "Kabinet Karya".

05 Maret 1959
salinan
1 sampul

1339 Surat dari Perdana Menteri kepada Kementerian Kehakiman mengenai SK Perdana Menteri tentang pemberian izin kepada Rdj.S.M.H. Budiman Tambunan untuk menerbitkan buku kumpulan peraturan-peraturan pemerintah No. 40-44 tahun 1958.

24 Juni 1959
salinan
1 lembar

1340 Surat dari penerbit "Ganaco" N.V kepada Ir. Djuanda mengenai daftar pengarang Sunda.

21 November - 21 November 1959
salinan
4 lembar

1341 Surat dari Sekretaris Umum II PDE.SBKA Sumatera Utara dan Sekretariat Sarekat Buruh Tekstil dan Pakaian JTM Tegal kepada Perdana Menteri mengenai protes pembredelan Harian Rakyat.

17 Desember 1959
asli
4 lembar

i. Hari Besar

1342 Surat dari Panitia Pusat Perayaan Hari Kemerdekaan kepada Perdana Menteri mengenai permintaan untuk duduk di dalam panitia nasional sebagai Wakil Ketua I.

14 Agustus 1951
salinan
1 lembar

1343 Surat-surat mengenai reaksi terhadap pasar malam *Hou Siaow Park* , Padang.

24 Maret - 26 Mei 1953
asli, salinan, pertinggal
1 sampul

1344 Surat dari Kepala Bagian Keamanan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perayaaan 4 Mei sebagai Hari Pemuda Tiongkok.

28 April 1953 - 28 April 1953
asli, konsep
4 lembar

1345 Berkas mengenai perayaan 17 Agustus tahun 1953.

13 Mei 1953 - 28 Juli 1953
asli, konsep, pertinggal
1 sampul

1346 Berkas mengenai bahan pidato Presiden Republik Indonesia dalam sidang pleno DPR RI pada tanggal 16 Agustus 1954 untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia .

20 Juli 1954-03 Agustus 1954
salinan

1 sampul

1347 Berkas mengenai penetapan hari Pahlawan 10 Nopember sebagai hari libur.

02 Agustus 1954
salinan
1 sampul

1348 Surat mengenai perayaan hari ulang tahun RRT di Semarang.

22 Oktober 1954
tembusan
3 lembar

1349 Berkas mengenai bahan untuk pidato Presiden pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1955, 1956, 1957 dan 1959.

28 Juli 1955- 28 Juli 1959
salinan
1 sampul

1350 Berkas mengenai penetapan 18 Agustus 1955 sebagai hari libur Istimewa berhubung dengan hari ulang tahun ke-10 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

16 Agustus 1955
salinan
1 sampul

1351 Berkas mengenai pidato sambutan Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo dalam peringatan kemerdekaan Indonesia pada16 Agustus 1956.

16 Agustus 1956
konsep
1 sampul

1352 Berkas mengenai bahan-bahan untuk perayaan hari ulang tahun ke-12 Proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1957 untuk dibicarakan dalam sidang kabinet pada 27 Juli 1957.

26 Juli 1957
salinan
1 sampul

1353 Berkas mengenai pidato radio, Perdana Menteri Urusan Veteran menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November 1957.

10 November 1957
salinan
1 sampul

1354 Berkas mengenai pedoman pokok sekitar peringatan setengah abad Hari Pembangunan Nasional.

28 April 1958
salinan
1 sampul

1355 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Staf AD dan AL mengenai pembentukan panitia-panitia daerah peringatan setengah abad Kebangkitan Nasional.

03 Mei 1958
salinan
2 lembar

1356 Surat Edaran tentang 1 Muharam 1378 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 1958 sebagai hari libur.

14 Juli 1958
asli
1 lembar

1357 Berkas mengenai Peringatan 30 tahun "Sumpah Pemuda".

23 Oktober 1958
salinan
1 sampul

1358 Berkas mengenai pidato sambutan Menteri Pertama Indonesia berkenan dengan ulang tahun ke-42 Revolusi Sosialis Oktober Baru.

28 November 1959
salinan
1 sampul

3. URUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN

a. Bea Cukai dan Perpajakan

1359 Surat dari Menteri Keuangan kepada semua kementrian mengenai pemakaian kertas bermaterai, kertas bermaterai luar biasa dan materai tempel.

13 September 1950
tembusan
1 lembar

1360 Berkas mengenai pemungutan pajak atas tunjangan mengajar, uang vacatic, honorarium para guru.

28 Maret 1951 & 15 Januari 1952
asli
2 lembar

1361 Surat dari Soemodiredjo kepada Perdana Menteri mengenai tekanan dalam membayar pajak.

1 Juni 1953
asli
2 lembar

1362 Surat-surat mengenai laporan kampanye pemungutan pajak di Philipina.

11 - 24 Februari 1954
asli
3 lembar

1363 Berkas mengenai penangguhan pajak peralihan dan pajak upah bagi pegawai negeri oleh negara.

15 April - 16 Juni 1954
tembusan, fotokopi
1 sampul

1364 Surat-surat mengenai pembebasan pajak untuk para exper Biro Perancang Negara. NB. Arsip berbahasa Inggris.

24 April - 25 Agustus 1954
pertinggal, asli
9 lembar

1365 Surat-surat mengenai pembebasan Pajak Rumah Tangga untuk kendaraan bermotor 1954 terhadap mobil partikulir para menteri.

7 Maret - 11 Juli 1955
asli, pertinggal
1 sampul

1366 Seri SK tentang pemberian uang restitusi.

15 Mei 1957 - 26 Mei 1959
asli, tembusan
6 lembar

1367 Surat-surat mengenai permohonan pembebasan bea masuk untuk keperluan ahli bangsa asing yang dipekerjakan pada Direktorium Penggambaran Peta.

7 - 20 Juni 1957
tembusan
1 sampul

1368 Surat-surat mengenai penggantian anggota Panitya Perubahan Sistem Pajak.
18 Februari 1958 - 8 Agustus 1959
asli
1 sampul

1369 Surat-surat mengenai PP No. 55 Tahun 1959 tentang penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok Tahun Lisensi 1959/1960.
2 Desember 1959
salinan, tembusan
1 sampul

b. Perdagangan dan Industri

1370 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Perdana Menteri mengenai aturan pengendalian harga. NB. Dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
25 April 1950
asli
5 lembar

1371 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai pengaruh kenaikan harga-harga barang atas menjalankan fasal 364 KUHP dan beberapa kejahatan.
13 Juli 1950
asli
3 lembar

1372 Surat dari Kementrian Perdagangan dan Perindustrian, Inspeksi Jawatan Distribusi RI Jawa Timur mengenai laporan distribusi Kota Surabaya.
30 Oktober 1950
fotokopi
1 sampul

1373 Surat-surat mengenai kutipan warta harian Sipatahunan tentang *familie-systeem* di beberapa jawatan dan kebutuhan rakyat akan tekstil.
2 Nopember & 13 Nopember 1950
pertinggal, asli
5 lembar

1374 Surat-surat mengenai permohonan kredit dari Firma Siasat Baru.
27 November 1950 -12 Maret 1951
asli
5 lembar

1375 Surat-surat mengenai permohonan kembali hak milik bangunan atas NV Ho Ho Biscuitfabriek Factory (Java) Limited di Jakarta.

19 Januari 1951 - 8 Mei 1952
asli, tembusan
5 lembar

1376 Memorandum *Voorzitter van de ondernemersbond voor Indonesie*. Nb: arsip berbahasa Belanda.

12 Maret - 9 April 1951
pertinggal
1 sampul

1377 Surat-surat mengenai permasalahan di Djawatan Pertambangan.

14 Maret - 19 Juni 1951
pertinggal, asli
1 sampul

1378 Surat dari Ketua DPR RI kepada Perdana Menteri mengenai persetujuan terhadap usul mosi Teuku Mohd Hassan tentang pembentukan Panitia Negara Urusan Pertambangan, beserta lampiran.

26 Juli 1951
fotokopi
4 lembar

1379 Surat-surat mengenai permohonan kredit anggota Jajasan Rukun Nelayan Amurang.

22 Agustus 1951 - 12 Maret 1952
asli, pertinggal, salinan
1 sampul

1380 Surat-surat mengenai alat-alat stabilisasi ekonomi bidang import, distribusi, dan eksport.

12 Oktober 1951
konsep, pertinggal
7 lembar

1381 Surat dari Kepala Kepolisian kepada Perdana Menteri mengenai *verslag* NV Nieuw Guinea Maatschappij.

22 Oktober 1951
salinan
4 lembar

1382 Surat-surat mengenai permohonan dan pemberian kredit untuk keperluan ex pejuang .

26 Oktober 1951 - 4 Maret 1954
asli, tembusan, salinan
1 sampul

1383 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri RI kepada Menteri Perekonomian mengenai nota Gabungan Perindustrian tentang beras. NB. Arsip berbahasa Inggris dan Belanda.

23 Nopember 1951
pertinggal
1 sampul

1384 Surat-surat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perusahaan Negeri Percetakan Negara.

27 Nopember 1951 - 13 Mei 1952
tembusan
5 lembar

1385 Berkas mengenai brosur dari Mexco Trading Company. NB. Arsip berbahasa Inggris.

1952
asli
1 sampul

1386 Surat-surat mengenai jual beli menggunakan uang kertas Yuan, disertai foto uang Yuan.

3 Januari - 12 Juli 1952
tembusan, pertinggal
9 lembar

1387 Surat-surat mengenai pembelian barang-barang keperluan pemerintah.

10 Januari - 28 Oktober 1952
asli, pertinggal
1 sampul

1388 Surat-surat mengenai persoalan NV Samodra Karangtempel 11 di Semarang.

28 Februari - 26 April 1952
pertinggal, tembusan
1 sampul

1389 Surat-surat mengenai persoalan pengangkutan besi dari Rantau Panjang Tg. Pura a.n. NV De Bataatshe Petroleum Mij.

18 Juli - 31 Oktober 1952
pertinggal, asli
6 lembar

1390 Surat-surat mengenai organisasi Pimpinan dan Pengawasan Perusahaan-perusahaan Rekonstruksi.

20 & 22 Desember 1952
tembusan
5 lembar

1391 Surat-surat mengenai proyek-proyek Tahun 1952/1953 yang direncanakan oleh UNTAMI.

19 Januari 1953
asli
1 sampul

1392 Surat-surat mengenai permohonan ijin dalam rangka penyelidikan pertambangan di Kecamatan Karangnunggal.

25 Juli 1953
asli
5 lembar

1393 Resolusi DPRDS Donggala mengenai penggaraman Talise.

6 Agustus 1953 - 10 Desember 1953
asli
2 lembar

1394 Surat dari Pengusaha Gunting Saga Kilang Padi kepada Perdana Menteri mengenai protes terhadap DPJJKD Labuhan Batu perantaraan Insp. Jawatan Perindustrian Sumatera Utara di Medan sebagai penyelenggara kredit.

9 Nopember 1953 - 17 Nopember 1953
asli
2 lembar

1395 Surat Keputusan dari DPRDS Kabupaten Ciamis tentang menyokong mosi DPRDS Kab. Lamongan dan meminta penambahan kredit dan pinjaman bagi petani.

24 Nopember 1953
fotokopi
1 lembar

1396 Surat dari Pimpinan Cabang Serikat Buruh Industri Metal Semarang II kepada Perdana Menteri mengenai tuntutan terhadap penutupan Perusahaan NV De Vries Robbs Lindeteves.

1 Desember 1953
asli
1 lembar

1397 Surat dari Pimpinan Persatuan Buruh Minyak Langkat kepada Menteri Perekonomian mengenai permohonan pengembalian tambang-tambang minyak S. Utara kepada Kapital Monopoli Asing (BPM).
11 Desember 1953
asli
3 lembar

1398 Surat dari DPRDS Kabupaten Pacitan kepada Perdana Menteri mengenai menggiatkan penanaman kapas untuk menuju ke-nasionalisasi industri tekstil.
14 Desember 1953
asli
1 lembar

1399 Surat-surat mengenai penjualan remilling FPKI kepada bekas pejuang bersenjata di Banjarmasin.
10 Desember 1953 - 5 Maret 1954
tembusan, pertinggal
1 sampul

1400 Surat pernyataan dari Serikat Buruh Garam dan Soda Jawa Tengah kepada perdana menteri mengenai penetapan penundaan batas waktu pembuatan garam rakyat.
21 Desember 1953
asli
1 lembar

1401 Surat-surat mengenai pemeriksaan oleh wakil Dewan Pemeriksa Keuangan Negara pada Persatuan Perkapalan Gadon.
2 Januari - 18 Maret 1954
tembusan
3 lembar

1402 Berkas mengenai Laporan *Consolidated Monthly Report* Bulan Desember 1953,

1954 The J.G. White Engineering Corporation. NB. Arsip berbahasa Inggris.
10 Februari - 25 Februari 1954
tembusan
1 sampul

1403 Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. 63/M.RAHASIA tentang anggota-anggota wakil pemerintah dari Raad Van Beheer NV Gemeenshappelijke Mijnbouwmaatschappij "Biliton".

27 Februari 1954
salinan
1 sampul

1404 Surat-surat mengenai permohonan saran akan nasib Perusahaan Grafika Nasional dan para Pengusaha Nasional, NV Alpino.

7 Maret - 16 September 1954
pertinggal, asli
1 sampul

1405 Surat dari NV Birokarpi kepada Direksi Bank Industri Negara mengenai permohonan kredit untuk modal kerja dan perlengkapan NV Birokarpi, beserta lampiran.

10 Maret 1954
tembusan
1 sampul

1406 Berkas mengenai nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas seluruh Indonesia.

16 Maret 1954 - 4 Juni 1955
asli, pertinggal, salinan
1 sampul

1407 Surat-surat mengenai permohonan kredit dan pembelian kapal Carya Shipbuilding Coy.

17 Mei - 6 September 1954
pertinggal, asli
1 sampul

1408 Surat dari Pimpinan Cabang Persatuan Buruh Minyak kepada Pimpinan Partai, ormas, pengusaha nasional dan instansi mengenai kenaikan harga minyak.

14 Juli 1954
salinan
3 lembar

1409 Surat-surat mengenai permohonan Dewan Exhibition Indonesia Pusat.

19 Juli 1954 - 13 Agustus 1954
asli, pertinggal
6 lembar

1410 Surat dari Firma R. Hutagalung kepada Menteri Perekonomian RI mengenai permohonan pinjaman *bedrijfskapitaal* untuk perdagangan biji-biji kopi.

6 Agustus 1954
tembusan
4 lembar

1411 Surat-surat mengenai hasil pembicaraan proyek-proyek di Indonesia.
11 - 21 Agustus 1954
tembusan
1 sampul

1412 Surat-surat mengenai *exper-exper White Engineering*. NB. Arsip dalam bahasa Inggris dan Indonesia.
27 Agustus 1954
asli
4 lembar

1413 Surat mengenai rencana perekonomian dalam melaksanakan Program Politik Perekonomian Pemerintah (ekspor impor, lapangan distribusi, industri dsb).
13 Oktober 1954
salinan
4 lembar

1414 Surat-surat mengenai manifest dan keputusan Konferensi Ekonomi Seluruh Sumatra dan Konferensi Ekonomi Indonesia Timur.
20 Oktober -2 Desember 1954
asli
1 sampul

1415 Surat mengenai angket atas pekerjaan Kementerian Perekonomian dalam lapangan perdagangan.
20 & 26 Oktober 1954
asli, salinan
6 lembar

1416 Laporan peninjauan Seksi B (keuangan) DPR RI ke Tambang Minyak di Sumatra Utara Juli 1954.
10 Nopember 1954
tembusan
1 sampul

1417 Surat-surat mengenai *Project Hilton Hotel*. NB. Arsip berbahasa Indonesia dan Inggris.
16 Nopember - 18 Desember 1954
asli, tembusan
7 lembar

1418 Surat dari Kepala Jawatan Perindustrian kepada Menteri Negara Urusan Planning mengenai proyek pabrik pemintalan, beserta lampiran. NB. Arsip berbahasa inggris.

1 Maret 1955 & 29 Maret 1956
asli
1 sampul

1419 Berkas mengenai Pertambangan Minyak Sumatra Utara.

30 Agustus 1955 - 29 Oktober 1957
pertinggal, konsep, salinan, asli
1 sampul

1420 SK Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Perekonomian tentang pembatalan SK Bersama Menteri Perhubungan dan Perekonomian tentang penyaluran barang-barang impor.

22 September 1955
salinan
1 lembar

1421 Berkas mengenai Statement Pemerintah tentang penanaman modal asing di Indonesia.

Nopember 1955 - Januari 1957
konsep, pertinggal, asli
1 sampul

1422 Surat-surat mengenai *Iron & Steel Project First Survey in Indonesia* .

10 Nopember - 26 Nopember 1955
tembusan
1 sampul

1423 Progres Report Bulan Nopember 1955 dari NV Pabrik Semen Gresik.

1 Desember 1955
salinan
8 lembar

1424 Surat-surat mengenai laporan para residen dan bupati tentang kerusakan peredaran bahan makanan.

22 Desember 1955 - 4 Mei 1956
asli, pertinggal
1 sampul

1425 Surat - surat mengenai mosi dari DPRD.S Cianjur dan Cirebon mengenai harga garam.

13 Maret - 5 Mei 1956
tembusan
1 sampul

1426 Berkas mengenai Rancangan Keputusan Presiden tentang peraturan perdagangan internasional.

04 Oktober 1956 - 24 Oktober 1957
asli
1 sampul

1427 Surat-surat mengenai persoalan penjualan *bouxiet* bintan dan pembayaran gaji buruh perusahaan Bouxiet Kijang.

27 Oktober - 11 Desember 1956
tembusan, pertinggal
1 sampul

1428 Surat-surat mengenai persetujuan baru Caltex Pacific Oil Company dengan pemerintah.

Nopember - 21 Desember 1956
asli
1 sampul

1429 Laporan interim Proyek Besi/Baja.

6 Februari 1957
asli
8 lembar

1430 Seri Surat Edaran Perdana Menteri mengenai penyederhanaan prosedur pembelian pemerintah.

19 Februari - 7 Nopember 1957
pertinggal
1 sampul

1431 Surat-surat mengenai pembentukan Dewan dan Majelis-Majelis Perniagaan dan Perusahaan.

23 Februari - 8 Maret 1957
asli
1 sampul

1432 Surat dari Perdana Menteri RI kepada Menteri Perindustrian mengenai permohonan perluasan konsesi Stanvac, beserta lampiran.

10 Juli 1957
pertinggal
1 sampul

1433 Peraturan-peraturan tentang larangan menaikkan tarif-tarif jasa.

19 Juli 1957 & 9 April 1958
salinan
6 lembar

1434 Surat-surat mengenai penutupan perusahaan batubara Kalimantan Timur di Loakulu.

26 Juli 1957 - 6 Februari 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1435 Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan mengenai pengawasan perusahaan asing di Indonesia dan retribusinya.

03 September 1957
salinan
8 lembar

1436 Surat-surat mengenai penyelesaian kredit untuk perusahaan CV Umum di Medan.

September 1957 - 6 Januari 1958
pertinggal
1 sampul

1437 Berkas mengenai persoalan kertas koran.

10 Oktober 1957 - 19 Juni 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1438 Surat-surat mengenai persoalan pendirian pabrik semen yang direncanakan oleh NV Horas.

7 - 20 Nopember 1957
pertinggal
3 lembar

1439 Surat-surat mengenai pengoperan perusahaan Belanda di bawah penguasaan pemerintah RI.

11 Desember 1957 - 4 Juni 1958
asli, salinan, pertinggal
1 sampul

1440 Berkas mengenai penyaluran perusahaan hotel dalam rangka policy penyaluran perusahaan-perusahaan sejenis (*bedrijfsgroep).*

16 Desember 1957 - 15 Februari 1959
asli

1 sampul

1441 Akte No. 91 PT Indonesia Lloyd Ltd.

24 Januari 1958
salinan
1 sampul

1442 Surat-surat mengenai ekspor karet oleh Tanggamus Trading Coy.

28 Januari - 4 Maret 1958
fotokopi
5 lembar

1443 Surat-surat mengenai permohonan sebagai pelindung Pekan Industrialisasi dan mekanisasi di Garden Hall tanggal 1 - 15 Juni 1958.

10 Februari - 29 Maret 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1444 Surat dari wakil Perdana Menteri I kepada Direktur Firma "Persepsi" mengenai persoalan PT Inaco.

10 Februari 1958
pertinggal, konsep
1 sampul

1445 Surat-surat mengenai penawaran harga minyak dari Daido Boeki Kaisha, Ltd.

22 Februari - 10 Maret 1958
asli
4 lembar

1446 Surat-surat mengenai pembentukan Badan Urusan Dagang dan Pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang Belanda.

28 Februari 1958
pertinggal, konsep
1 sampul

1447 Surat dari Menteri Perdagangan kepada Perdana Menteri mengenai pemberian paket devisen kepada orang-orang Belanda yang bekerja pada perusahaan partikelir yang bersifat vital.

19 Maret 1958
asli, salinan
4 lembar

1448 Surat dari NV Usaha Industri Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai pembelian benang tenun dan cement. NB. Arsip berbahasa Indonesia dan Inggris.

29 April - 2 Oktober 1958
asli
10 lembar

1449 Surat-surat mengenai tuntutan Dewan Veem Indonesia (Devi) atas NV KPM mengenai sewa tempat.

9 Juni 1958 - 10 Agustus 1959
asli, pertinggal
1 sampul

1450 Berkas mengenai Hotel Indonesia, Jl. Thamrin Jakarta.

5 Juli 1958 - 11 Agustus 1959
asli, pertinggal
1 sampul

1451 Surat-surat mengenai laporan rapat panitia permusyawaratan DPR membahas tentang persoalan timah, tekstil, RUU tentang pertambangan dan RUU tentang minyak, dsb.

11 - 19 Agustus 1958
tembusan, pertinggal
6 lembar

1452 Surat-surat mengenai kredit pusat untuk masyarakat daerah (untuk perindustrian).

5 September - 19 Nopember 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1453 Laporan tentang sidang-sidang dan sidang kerja pertama serta laporan Sidang ke IV Panitya Induk untuk Meter dan Kilogram.

12 September 1958
salinan
1 sampul

1454 Ikhtisar singkat kegiatan NV Usaha Industri Indonesia (USINDO) tahun 1957 dan 1958.

12 Januari 1959
salinan
1 sampul

1455 Surat-surat mengenai biaya pengawasan dan penyaluran minyak bumi.

24 & 28 Januari 1959

asli, pertinggal
3 lembar

1456 Surat-surat mengenai contoh-contoh pembelian formulir menurut PP No. 26 Tahun 1958.

3 Februari - 17 Maret 1959
pertinggal, asli
1 sampul

1457 Surat-surat mengenai penentuan harga penjualan kopra.

25 Maret - 25 Mei 1959
asli, pertinggal
1 sampul

1458 SK Perdana Menteri RI No. 128/P.M./1959 tentang pemberian kuasa kepada Penguasa Perang Daerah untuk mengatur dan menetapkan harga barang.

25 Maret 1959
salinan
3 lembar

1459 Surat-surat mengenai permohonan ijin jual beli perusahaan susu "*Friesche Terp*" di Pengalengan.

2 Juni - 31 Oktober 1959
tembusan, pertinggal
1 sampul

1460 Surat dari Menteri Urusan Veteran kepada Menteri Luar Negeri RI mengenai persetujuan pembangunan pabrik kertas.

9 Juni 1959
tembusan
2 lembar

1461 Surat dari Direktur KPM kepada Menteri Distribusi mengenai angka macam-macam bahan makanan.

1 & 29 Agustus 1959
pertinggal
2 lembar

1462 Surat-surat mengenai permohonan tambahan modal untuk JBP (Jajasan Persediaan Bahan Perindustrian).

19 Agustus - 3 Oktober 1959
tembusan
8 lembar

1463 Pengumuman Pemerintah No. 1 tentang perusahaan-perusahaan perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing dan yang berkedudukan di luar ibukota daerah tingkat I dan II serta karesidenan.

08 September 1959
pertinggal, salinan
5 lembar

1464 Surat dari Direksi Bank Indonesia Negara kepada Thesaurie Jenderal di Jakarta mengenai completion program Pabrik Semen Gresik.

22 Oktober 1959
tembusan
2 lembar

1465 Surat-surat mengenai persoalan PT Negara.

30 Oktober - 3 Nopember 1959
asli
1 sampul

1466 Laporan Menteri Muda Perindustrian tentang pelaksanaan program sandang pangan pada musyawarah ke-7 Pleno Kabinet Kerja tanggal 30 Nopember 1959 di Istana Bogor.

Desember 1959
Konsep
7 lembar

1467 SK Menteri Pertama RI No. 616/MP/1959 tentang penyerahan penyelenggaraan proyek istimewa Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 - 1960 kepada Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

22 Desember 1959
Salinan
2 lembar

c. Agraria (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan)

1468 Surat-surat mengenai permohonan Perusahaan Negla untuk menjadi *groot-erfpacht.* NB. Arsip berbahasa Indonesia dan Belanda.

12 April 1949 - 5 September 1951
tembusan
4 lembar

1469 Berkas mengenai perbaikan jalan dan perluasan sawah di Kalimantan.

1950 - 1959
salinan

1 sampul

1470 Surat-surat mengenai taksiran hasil padi sawah tahun 1950. Arsip berbahasa Belanda dan Indonesia.

14 & 17 Oktober 1950
asli
6 lembar

1471 Berkas mengenai Konferensi FAO.

26 Oktober 1950 - Nopember 1957
asli, pertinggal, tembusan, salinan
1 sampul

1472 Surat-surat mengenai persoalan karet di Sumatra Utara.

27 Desember 1950 - 31 Juli 1952
tembusan, asli
1 sampul

1473 Surat-surat mengenai masalah kehutanan seperti penjagaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

5 Februari & 16 Februari 1951
asli, pertinggal
4 lembar

1474 Surat dari Directur General FAO mengenai s*tudy tour* tentang perlindungan kebakaran hutan. NB. Arsip berbahasa Inggris.

27 April 1951
asli
4 lembar

1475 Laporan Tahun 1951 Kementerian Pertanian.

Mei 1951 & 1954
salinan, asli
1 sampul

1476 SK Menteri Pertanian No. 7/51 tentang pencabutan SK Gubernur Jenderal No. 305, 14 Maret 1939 dan penetapan Peraturan Dewan Pengawas Pusat Perkebunan Negara.

25 September 1951
tembusan
2 lembar

1477 Laporan Panitya Penasehat Pertanian-Rami.

1952

salinan
1 sampul

1478 SK Menteri Pertanian No. 8/Um/52 tentang perintah kepada Dr. JDF Hardenberg untuk menghadiri *Indonesia-Pacific Fisheries Council* di Saigon.

17 Januari 1952
salinan
1 lembar

1479 Surat dari Tjikiraj Iob, Sukabumi kepada Wakil Presiden mengenai pembuatan alat-alat pertanian yang sederhana, beserta lampiran foto.

19 & 21 Januari 1952
tembusan
2 lembar

1480 Surat dari a.n. Pers Bekas Buruh BTN kepada Menteri Pertanian mengenai permohonan pembukaan Pabrik Padi di Soekowono.

22 Januari 1952
tembusan
1 lembar

1481 Surat-surat Penetapan Menteri Kehakiman tentang pemberian izin hak *eigendom*

bagi Consul General USA dan Legasi dan atau hak *erfpacht* Saudi Arabia.

19 Februari & 26 Mei 1952
asli
2 lembar

1482 Surat dari Kepala Pusat Jawatan Pertanian Rakyat kepada Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi-propinsi mengenai risalah konferensi Jawatan Pertanian Rakyat di Lembang.

23 Februari 1952
tembusan
1 sampul

1483 Surat-surat mengenai keputusan Persatuan Tani Nasional Indonesia Cabang Kewedaan Bandar.

24 Maret & 12 April 1952
asli
1 sampul

1484 Surat dari Kepala Negeri Peusangan Tgk. Hasan Ibrahim kepada Wedana Bireuen mengenai permohonan pembangunan irigasi Pante Lhong.

24 Maret 1952
tembusan
3 lembar

1485 Surat-surat mengenai penawaran alat-alat pertanian oleh Serikat Pandai Besi Batu Klinting.

7 & 17 Juni 1952
pertinggal, asli
3 lembar

1486 Surat dari Perdana Menteri kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai resolusi RTI Wonosobo.

15 Juli 1952
pertinggal
3 lembar

1487 Surat-surat mengenai pemeriksaan karet di Pasar Ikan.

23 Juli - 23 September 1952
tembusan, asli
1 sampul

1488 Kumpulan resolusi Persatuan Tani Nasional Indonesia Cabang Sumbawa Timur.

12 Agustus - 22 September 1952
asli
3 lembar

1489 Surat-surat mengenai permasalahan pertanian (tanah partikelir dan pemindahan petani).

23 Agustus - 26 September 1952
tembusan
7 lembar

1490 Surat-surat mengenai perkebunan-perkebunan yang telah habis masa kontraknya.

4 & 5 September 1952
pertinggal, asli
2 lembar

1491 Resolusi Sekretariat Dewan Ranting Sarbupri Djollong mengenai tuntutan kepada pemerintah untuk tidak menyewakan tanah *erfpacht* kepada *Koffi Onderneming Djollong* .

21 September 1952
asli

3 lembar

1492 Surat mengenai nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Kemuning.
22 September 1952
asli
3 lembar

1493 Surat-surat mengenai ihtisar pekerjaan persiapan delegasi Indonesia ke Jepang dan RUU Darurat Perikanan di Laut Indonesia.
3 Desember - 14 Januari 1952
pertinggal, asli
1 sampul

1494 Surat dari Ketua Gerak Tani Ranting S Nagodang kepada Gubernur Sumatra Utara mengenai persoalan persawahan di Kabupaten Simalungun.
10 Desember 1952
tembusan
3 lembar

1495 Berkas mengenai rencana pembagian tanah dan minyak Sumatra Timur.
12 Desember 1952 - 18 September 1953
asli, salinan
1 sampul

1496 Surat-surat mengenai kredit pertanian pada FAO.
21 Januari - 12 Februari 1953
pertinggal, tembusan
3 lembar

1497 *Table names and title of Directorial and Professional Staff of the FAO* .
31 Januari 1953
fotokopi
1 sampul

1498 Surat-surat mengenai pertimbangan tentang tindakan-tindakan dalam negeri yang berhubungan dengan karet.
10 September - 25 September 1953
asli, tembusan
1 sampul

1499 Surat dari Sekretariat Comite Pembela Kerugian Rakyat kepada Kepala Daerah Blora mengenai pemulihan hak atas tanah Ngareng, Cepu.
16 September 1953
tembusan
2 lembar

1500 Surat-surat mengenai pernyataan Badan Penghubung Penangkapan Ikan Indonesia Daerah Bengkalis.

17 Nopember 1953 - 22 Oktober 1954
tembusan
1 sampul

1501 Surat mengenai rencana ekonomi berhubungan dengan pelaksanaan "*Landreform* " di Sunda Kecil.

30 Nopebmer 1953
asli
3 lembar

1502 Surat-surat mengenai laporan perkembangan urusan agraria di Karesidenan Kediri.

6 Februari 1954
asli
1 sampul

1503 Surat-surat mengenai permohonan perbaikan dalam bidang pertanian daerah Lintang IV Lawang, Palembang Tengah.

25 Maret - 10 September 1954
asli
1 sampul

1504 Korespondensi Wakil Perdana Menteri I dengan Menteri Agraria mengenai resolusi Panitia Gabungan Partai dan Organisasi Kuala Kurun tentang pembukaan tanah pendulangan intan di hulu sungai Danum Pari.

17 Juni 1954 & 21 September 1954
asli
3 lembar

1505 Laporan hasil usaha Tahun 1948 - 1953/1954 dan rencana 5 Tahun Kementrian Pertanian.

15 Juli 1954
salinan
2 jilid

1506 Laporan delegasi Indonesia mengikuti sidang *Internasional Rubber Study Group* di Colombo dan Jogjakarta.

Agustus 1954 - 2 November 1957
asli, salinan
1 sampul

1507 Surat-surat mengenai perkara sewa rumah yang tidak dibayar di Padangsidempuan.

2 Agustus - 31 Desember 1954
tembusan
5 lembar

1508 Surat-surat mengenai tambahan pembayaran transfer untuk *research* dan propaganda karet dan teh yang diawasi pemerintah.

30 September 1954
asli
2 lembar

1509 Surat dari a.n. Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai gangguan angin dan badai saat menangkap ikan di Selat Bali.

30 Desember 1954
asli
2 lembar

1510 Surat - surat mengenai protes keras dari DPT BTI Bojonegoro terhadap tindakan dari Kepolisian Seksi Ngambon dan sikap Ketua PPWH (Panitia Pembangunan Wilayah Hutan) dan P Bojonegoro yang mengerjakan tanah - tanah hutan.

20 Januari - 26 Mei 1955
asli, tembusan
9 lembar

1511 Surat-surat mengenai penyelesaian Waduk Kedungbendo (Ngawi).

27 Desember 1955 - 9 Januari 1956
pertinggal
1 sampul

1512 Surat dari Residen Surakarta kepada Gubernur Jawa Tengah mengenai desakan dalam penyelesaian Waduk Ketro dan Waduk Gondang.

16 Februari 1956
tembusan
1 lembar

1513 Berkas mengenai Panitia Menambah Hasil Bumi.

18 Februari 1956 - 25 Februari 1958
pertinggal, asli
1 sampul

1514 Surat-surat mengenai permohonan pembendungan Sungai Tjipunegara, beserta lampiran.

2 Maret 1956

asli
1 sampul

1515 Surat-surat mengenai pengangkatan M. Hatim Soedarma sebagai anggota Panitya Negara Urusan FAO.

5 Juni - 11 Juni 1956
pertinggal, konsep, asli
1 sampul

1516 Surat-surat mengenai tindakan pemerintah di bidang pertanian.

3 - 23 Nopember 1956
pertinggal
1 sampul

1517 Berkas mengenai Panitya Interdepartemental untuk meninjau penghasilan pelaut bangsa asing (CAO) dan pelaut bangsa Indonesia yang digaji menurut PGP/PGPN.

20 Juni - 21 Januari 1957
asli, salinan, pertinggal
1 sampul

1518 Surat-surat mengenai pemindahan Jawatan Pendaftaran Tanah dari lingkungan Kementerian Kehakiman dalam lingkungan Kementerian Agraria.

5 September 1956 - 20 September 1957
tembusan, asli, salinan
1 sampul

1519 Surat-surat mengenai persoalan tambang minyak NIAM-PERMINDO.

1 Agustus 1957 - 6 Januari 1959
pertinggal, asli
1 sampul

1520 Surat Penetapan Kepala Daerah/Datu luwu di Palopo mengenai penunjukan anggota Panitya Masalah Tanah.

5 Juli 1958
kutipan
1 lembar

1521 Resolusi DPRD Daerah Swatantra Tk II Sukoharjo tentang desakan untuk menambah perbaikan saluran pengairan.

20 Agustus 1958
salinan
1 lembar

1522 Resolusi DPRD Swatantra Tingkat II Ngawi tentang pembagian tanah-tanah persil.

28 Agustus 1958
tembusan
1 lembar

1523 Resolusi DPRD Daerah Swatantra Tk II Kebumen tentang dukungan terhadap DPRD Bogor tentang pemberian hak milik atas tanah perkebunan.

10 September 1958
salinan
1 lembar

1524 Surat dari Dewan Harian Pusat Pekan Ekonomi Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai permohonan sumbangan karangan untuk buku Pekan Raya Agraria dan Industri Internasional.

23 September 1958
asli
3 lembar

1525 Resolusi tentang Undang-undang Agraria Nasional.

26 September 1958
asli
1 lembar

1526 Surat undangan dari Panitya Penuntut Perladangan/Perumahan Medan mengenai persoalan pembersihan tanaman di ladang P4RI di Pasar 8 Medan.

11 Oktober 1958
asli
1 lembar

1527 Resolusi Pimpinan Ranting tentang permohonan penggarapan kembali tanah Pangonan Blok Mendolo.

13 Oktober 1958
tembusan
1 lembar

1528 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 168/Um/58 tentang perubahan SK Menteri Pertanian No. 105/Um/58 tentang penugasan kepada Panitya Penyusunan Atlas tentang keadaan penggunaan tanah (*Land Utilization Atlas*) di Indonesia.

29 Oktober 1958
salinan
1 sampul

1529 Laporan Tahunan Panitia Negara Urusan Industri dan Pertanian Tekstil Jakarta Tahun 1958.

Juni 1959
salinan
1 sampul

1530 SK Menteri Pertanian No. 5430A/Sk/M tentang perubahan SK tentang penghapusan Pusat Dinas Kesejahteraan (RKI) Kementerian Pertanian.

1 Juli 1959
salinan
2 lembar

1531 Surat mengenai program kerja Kementerian Agraria.

28 Juli & 31 Juli 1959
asli
5 lembar

1532 Surat kepada Menteri Agraria mengenai permohonan tanah *erfpacht* di desa Lodjedjer.

11 September 1959
tembusan
3 lembar

d. Perbankan

1533 Surat-surat mengenai daftar peredaran uang sampai April 1952.

31 Maret 1950 - 26 Mei 1952
asli
1 sampul

1534 Berkas mengenai keanggotaan dan kegiatan Bank Tabungan Pos.

12 Agustus 1950 - 13 Juli 1957
asli, pertinggal, tembusan
1 sampul

1535 Surat-surat mengenai rekening-rekening bank, nb. arsip dalam bahasa Indonesia dan Belanda.

30 Agustus & 13 September 1950
pertinggal
1 sampul

1536 Petikan SK Menteri Keuangan RI tentang peraturan mengenai simpanan-simpanan pada bank dari Jawatan-jawatan Negeri, perusahaan dan pegawai negeri.

20 September 1950
salinan
3 lembar

1537 Surat-surat mengenai permohonan dari Bank Timur NV untuk menghadap kepada Wakil Perdana Menteri.

27 September & 3 Oktober 1950
asli, pertinggal
2 lembar

1538 Surat kepada semua kementerian mengenai percepatan permohonan kredit pada *De Javasche* Bank.

14 Nopember 1950
asli
1 lembar

1539 Surat dari Kementerian Keuangan RI kepada BNI di Jakarta mengenai penyelesaian uang Republik Indonesia.

19 Februari 1951
tembusan
2 lembar

1540 Surat dari Perdana Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai keterangan tentang peraturan BRI.

10 April 1951
pertinggal
1 lembar

1541 Surat dari Sekretaris Menteri Keuangan kepada semua kementerian mengenai penyerahan surat-surat permintaan pengiriman uang atau pembukaan kredit ke luar negeri.

23 Mei 1951
fotokopi
2 lembar

1542 Surat-surat mengenai persoalan penyesuaian gaji di Kantor Besar BRI.

29 Mei - 24 Juli 1951
pertinggal, asli
1 sampul

1543 Surat-surat mengenai gaji direktur *Javasche* Bank.

7 Juli 1951 - 30 Januari 1952
asli, pertinggal
1 sampul

1544 Surat-surat mengenai permohonan kredit Badan Pengurus Bank Rakyat Tonsea.
3 Juli - 6 Desember 1952
asli, pertinggal
1 sampul

1545 Surat-surat mengenai peraturan uang-uang kertas pemerintah.
2 & 6 Januari 1954
salinan
2 lembar

1546 Surat-surat mengenai pendirian NV Bank Pembangunan Nasional Jakarta.
26 Januari - 13 Maret 1954
asli, pertinggal
1 sampul

1547 Surat-surat mengenai Keppres No. 98 Tahun 1954 tentang jaminan pemerintah terhadap pembayaran kembali pinjaman Bank Industri Negara.
23 Maret - 13 Mei 1954
asli, pertinggal
1 sampul

1548 Kumpulan pengumuman Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (BI).
12 April - 14 Agustus 1954
salinan
1 sampul

1549 Surat dari Menteri Keuangan kepada Dewan Pengawas Keuangan mengenai pertanggungjawaban pinjaman-pinjaman Eximbank.
21 Oktober 1954
tembusan
5 lembar

1550 Surat-surat mengenai BNI (Gubernur, Direktur dan Dewan Pengawas, serta pembukaan BNI di Pangkal Pinang).
28 April 1955 - 4 Juni 1958
asli, pertinggal, tembusan
1 sampul

1551 Surat-surat mengenai pemblokiran uang Panitia untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak oleh BI.

2 Nopember 1955 - 13 April 1956
tembusan, salinan
1 sampul

1552 Surat dari G. Harsono kepada Pimpinan Rakyat Indonesia mengenai kekuasaan bank-bank asing pada sektor perekonomian di Indonesia.

Desember 1955
asli
2 lembar

1553 Surat-surat mengenai pendirian Bank Daerah Sumatra Selatan.

2 September 1957 & 10 April 1958
tembusan, salinan
1 sampul

1554 Surat-surat mengenai modal pokok Bank Pembangunan Padang.

19 Desember 1957 - 11 Februari 1958
pertinggal, konsep
1 sampul

1555 Surat-surat mengenai rencana pendirian Bank Kesejahteraan Aceh.

8 Februari - 1 Agustus 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1556 Surat-surat mengenai permohonan dari Mr. Toshi Kaneko dari Fuji Bank untuk dijadikan Agen Bank Pemerintah Indonesia dalam urusan pampasan di Tokyo.

10 Februari - 26 Maret 1958
pertinggal, asli
1 sampul

1557 Berkas mengenai pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Bank Industri Negara.

27 Februari - 10 Maret 1958
asli, salinan, pertinggal
1 sampul

1558 *List of foreign exchange and banknote rates issued by Bank Indonesia*. NB. Arsip dalam bahasa Inggris.

1 Maret 1958
salinan
6 lembar

1559 Surat-surat mengenai pinjaman BNI kepada NU Borsumy.

23 Juli 1958 - 28 April 1959
asli, pertinggal
1 sampul

1560 Surat-surat mengenai pengangkatan Direktur BI.

23 April - 22 Juni 1959
asli, pertinggal, tembusan
1 sampul

e. Hubungan Ekonomi Luar Negeri

1561 Laporan tentang permusyawaratan persetujuan perdagangan dan pembayaran antara Indonesia dengan Italia. NB. Bahasa Indonesia, Bahasa Italia dan Bahasa Belanda.

18 Maret 1950
salinan
1 sampul

1562 Berkas mengenai urusan ekonomi Indonesia Belanda.

10 Juni 1950 - 31 Maret 1954
asli
1 sampul

1563 Surat-surat mengenai persoalan *jurisdictie* tentang perhubungan perekonomian dengan luar negeri.

22 Juli - 17 Juli 1950
pertinggal, salinan
1 sampul

1564 Surat dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (*Institut Devisen*) mengenai pemindahan penyimpanan uang dari *Guarantee Trust* kepada *American Security* dan *Trust Company*.

23 Oktober 1950
tembusan
2 lembar

1565 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Moh. Hatta mengenai kontrak Matthew Fox dengan RI. NB. Arsip dalam Bahasa Inggris dan Indonesia.

9 Nopember 1950
pertinggal
2 lembar

1566 *Indonesian Information* : Kedutaan Besar Indonesia di London mengenai hubungan ekonomi luar negeri.

13 Nopember 1950
salinan
5 lembar

1567 Surat-surat mengenai permintaan pengiriman uang ke Belanda untuk Tuan Stegeman. NB. Bahasa Indonesia dan Belanda.

1 Desember - 11 Desember 1950
pertinggal, asli
4 lembar

1568 Surat mengenai usul agar Panitya Interdepartemental Hubungan Ekonomi Luar Negeri dapat bergabung dengan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

13 Desember 1950
pertinggal
1 lembar

1569 Nota mengenai usul perundingan tentang karet oleh Amerika Serikat

8 Januari 1951
salinan
6 lembar

1570 Sura-surat mengenai peraturan mengenai kedudukan menurut hukum perwakilan devisen RI di luar negeri dan negara-negara asing.

22 Februari - 4 Juni 1951
asli, pertinggal
1 sampul

1571 Berkas mengenai susunan delegasi untuk sidang pertama *committee on trade* Ecafe Bangkok, Ecafe Pakistan dan Kuala Lumpur.

23 Februari 1951 - 17 Januari 1958
asli
1 sampul

1572 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Kedutaan Besar RI mengenai permintaan uang logam Indonesia untuk keperluan *collection* .

20 Desember 1951 - 1 April 1952
asli
3 lembar

1573 Surat mengenai rancangan perjanjian RI dengan Kerajaan Swedia.

28 April 1952
pertinggal
1 sampul

1574 Laporan perundingan dagang Indonesia dan Finlandia.

28 Juni & 27 Nopember 1952
pertinggal, salinan
1 sampul

1575 Surat-surat mengenai perjanjian perdagangan dan moneter antara Indonesia dan Jepang.

5 Juli 1952 - 16 Oktober 1954
pertinggal, asli
1 sampul

1576 Berkas mengenai usul Inggris dan Amerika kepada pemerintah Iran mengenai masalah kesukaran keuangan dan minyak.

06 September 1952
tembusan
7 lembar

1577 Surat mengenai laporan Konferensi Ekonomi Internasional di Moskow.

15 September 1952
tembusan
1 sampul

1578 Surat dari Mahkamah Agung RI mengenai perjalanan ke Tai Peh dalam rangka mengadakan peninjauan dan pertandingan olah raga.

24 September 1952
asli
3 lembar

1579 Surat-surat mengenai farmosan Victory Bonds dan RRT *Credit Cooperatives* .

31 Oktober - 31 Desember 1952
asli
4 lembar

1580 Surat mengenai perjanjian perdagangan antara RI dan Swiss. NB. Bahasa Prancis dan Indonesia.

16 Desember 1952
pertinggal
1 sampul

1581 Seri Surat edaran dan pengumuman Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri. NB. Arsip berbahasa Indonesia dan Belanda.

3 & 14 Desember 1953
tembusan
2 lembar

1582 Surat dari Duta Besar RI untuk Amerika Serikat mengenai soal karet.

13 April - 12 Mei 1954
pertinggal
1 sampul

1583 Surat-surat mengenai laporan Konferensi Manila.

18 September 1954
asli
3 lembar

1584 Surat mengenai perjanjian dagang RI dan Mesir.

15 & 24 Juni 1955
pertinggal
1 sampul

1585 Surat-surat mengenai usul perundingan perdagangan dengan Uni Sovyet.

29 Nopember - 3 Desember 1955
asli, pertinggal
1 sampul

1586 Surat-surat mengenai keikutsertaan wakil DEIP dalam perundingan ekonomis dengan negara lain.

27 & 31 Januari 1956
asli, pertinggal
4 lembar

1587 Surat-surat mengenai lalu lintas perdagangan luar negeri.

6 April - Juli 1956
asli, pertinggal
1 sampul

1588 Laporan Delegasi Indonesia ke Konferensi GATT ke XI di Geneva.

3 Oktober 1956 - 26 Maret 1957
asli
1 sampul

1589 Berkas mengenai persetujuan perdagangan antara RI dengan Republik Ceko Slovakia, Vietnam, Jerman Timur dan Bulgaria.

17 Januari - 5 Maret 1957
tembusan
1 sampul

1590 Berkas mengenai usul agar Indonesia turut serta dalam persetujuan Internasional mengenai gula.

08 Agustus - 10 September 1957
asli
1 sampul

1591 Laporan Tahunan Panitia Kredit Luar Negeri Tahun 1957.

22 Mei 1958
tembusan
1 sampul

1592 Surat-surat mengenai kontrak antara pemerintah RI dan Nichimen Co Ltd, Jepang tentang pembelian kapal motol Koshun Maru.

3 - 29 Juli 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1593 Surat-surat mengenai kredit tekstil dari Jepang.

7 Nopember - 11 Desember 1958
tembusan
1 sampul

1594 Berkas mengenai pidato Perdana Menteri RI dalam persetujuan kerjasama ekonomi dan tehnik RI dan Republik Uni Soviet Sosialis.

03 Januari 1959
asli
1 sampul

1595 Surat-surat mengenai persetujuan pinjaman (*Loan Agreement*) dan pemberian "*Grant*" dalam rangka *Surplus Agricultural Commodities* (SAC) *Agreement* antara Indonesia dan Amerika Serikat.

11 Maret & 15 April 1959
pertinggal
2 lembar

f. Bantuan Luar Negeri

1596 Berkas rapat pleno Panitya Koordinasi Bantuan luar Negeri.

28 Februari 1951 - 8 Juli 1959
salinan
1 sampul

1597 Surat-surat mengenai bantuan *Aid-Vietminh Volunteers HQS* dari Komunis Tiongkok kepada Vietminh.

5 Maret 1951 - 23 Februari 1953
tembusan, asli
1 sampul

1598 Surat-surat mengenai penggantian kerugian bagi barang-barang Tuan K. Westcot (tenaga asing dalam rangka bantuan luar negeri).

20 Februari 1952 - 18 Agustus 1958
salinan, tembusan
1 sampul

1599 Surat-surat mengenai kesulitan dalam mendatangkan tenaga-tenaga asing. NB. Arsip berbahasa Indonesia dan Belanda.

6 Mei 1952 - 5 Maret 1953
asli, salinan
1 sampul

1600 Surat-surat mengenai permohonan penambahan anggota Panitia Urusan Tenaga Ahli Bangsa Asing (PUTABA).

2 Juni - 11 Nopember 1952
pertinggal, asli
1 sampul

1601 Laporan perjalanan ke Eropa dalam rangka mencari tenaga ahli untuk Djawatan Tenaga.

5 Juni - 2 Agustus 1952
asli, tembusan
1 sampul

1602 Berkas mengenai tugas belajar ke luar negeri dalam rangka bantuan luar negeri.

30 Juli 1952 - 25 Juli 1958
asli, salinan, pertinggal
1 sampul

1603 Surat kepada Ketua Panitia Koordinasi Bantuan Luar Negeri mengenai bantuan materiil dan tenaga ahli untuk pekerjaan *Tuberculosis Control Project* dari WHO.

2 Desember 1952

salinan
2 lembar

1604 Surat-surat mengenai Proyek bantuan luar negeri untuk penyaluran eks pejuang dan Jawatan Kepolisian Negara.

23 Juni - 18 November 1953
asli, tembusan
1 Sampul

1605 Memo dari Biro Perancang Negara kepada Ketua dan Anggota Dewan Perancang Negara mengenai fonds rupiah untuk proyek bantuan luar negeri.

6 Januari 1954
pertinggal
5 lembar

1606 Surat-surat mengenai persoalan pengiriman observers oleh Pemerintah RI ke Indonesia-Cina dan bantuan militer USA kepada Pakistan.

25 & 27 Januari 1954
pertinggal
3 lembar

1607 Surat mengenai persetujuan usul pinjaman IMF kepada Indonesia.

3 Desember 1954
pertinggal
1 lembar

1608 Surat dari Panitia Koordinasi kepada Sekjen Kementerian mengenai rapat PAKIN ke-XXX tentang *Counterpart Funds* .

5 Desember 1956 & 15 Februari 1957
tembusan
1 sampul

1609 Berkas mengenai keterangan tentang *foreign loans,* modal asing dan perbankan.

20 Agustus 1957 - Maret 1958
pertinggal, asli
1 sampul

1610 Surat-surat mengenai pengaruh bukti ekspor terhadap barang-barang bantuan luar negeri.

22 Februari - 22 April 1958
asli
1 sampul

1611 Surat mengenai statement Perdana Menteri Djuanda mengenai bantuan luar negeri kepada kaum pemberontak.

30 April & 7 Mei 1958
salinan, tembusan
3 lembar

1612 Surat-surat mengenai ikhtisar tentang penggunaan sebagian dari pembayaran kembali pinjaman-pinjaman luar negeri kepada Indonesia.

12 September - 21 Oktober 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1613 Surat-surat mengenai bantuan luar negeri atas Peraturan Penguasa Perang Pusat No. 039/1959.

16 Mei - 11 Juni 1959
asli, tembusan
4 lembar

1614 Laporan mengenai pekerjaan PKBLN tahun 1958.

19 September 1959
salinan
1 jilid

g. Kebijaksanaan Keuangan

1615 Surat-surat mengenai kebijakan *voorfinanciering deviezen certicaat* untuk kertas koran.

2 Mei - 12 Juni 1951
asli
1 sampul

1616 Surat-surat mengenai keputusan sidang Dewan Ekonomi dan Keuangan.

15 Mei 1951 - 11 Juni 1952
asli, pertinggal
1 sampul

1617 Surat-surat mengenai laporan kebijakan pemerintah tentang keadaan keuangan negara tahun 1952.

8 Mei - 6 Juni 1952
pertinggal
1 sampul

1618 Memorandum dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri, semua menteri, Presiden de Javasche Bank mengenai usaha pemberian kredit dan pinjaman di bidang perekonomian rakyat serta organisasi pelaksanaannya.

07 Juni 1952
asli
7 lembar

1619 Surat kepada para pejabat negara dari Menteri keuangan No. 137922/Perb mengenai penagihan, pembayaran dan perhitungan hutang dan piutang terhadap negara berhubung dengan peraturan devisen yang dirubah pada tanggal 4 Februari 1952

14 Juli 1952
asli
1 sampul

1620 Mosi DPRD Sementara Kabupaten Ciamis tentang pemberian kredit melalui Jajasan Kredit dirubah kepada DPPJK.

24 Nopember 1953
tembusan
1 lembar

1621 *Bespreking Interdepartementale Commissie-Missie Supomo Gezamenlijk Secretariaat* mengenai *Verdrag van Handel, Monetair Accoord*, dll. NB. Arsip berbahasa Belanda.

9 Desember 1953
fotokopi
1 sampul

1622 Surat mengenai pokok dalam penyelenggaraan kebijaksanaan perekonomian.

2 Desember 1954
pertinggal
2 lembar

1623 Surat-surat mengenai keputusan Dewan Moneter.

28 Juli 1955 - 10 Desember 1957
pertinggal
1 sampul

1624 Surat-surat mengenai permohonan kenaikan tarif tenaga listrik.

30 Oktober 1955 - 30 Nopember 1958
tembusan
1 sampul

1625 Berkas mengenai *The Economic and Social Development Plan of Indonesia Chapter 5: Mineral and Power Resources* , disertai peta. NB. Arsip dalam bahasa Inggris.

1956
asli
1 sampul

1626 Surat-surat mengenai perubahan UU Perbendaharaan ICW dan IBW (usul untuk menghidupkan *stelsel virement)* .

28 Juni - 20 Agustus 1956
pertinggal
1 sampul

1627 Surat-surat mengenai resolusi/pernyataan Konferensi Ekonomi Nasional Indonesia di Jawa Barat tanggal 29 - 30 Oktober 1956.

1 Nopember 1956 & 10 Januari 1957
asli, salinan
1 sampul

1628 Laporan perkembangan perekonomian di Indonesia.

4 Desember 1956
asli
1 sampul

1629 Surat mengenai bahan untuk brosure sekitar activiteit pemerintah selama 8 tahun.

20 Desember 1956
tembusan
1 sampul

1630 Surat-surat mengenai keputusan Dewan Ekonomi dan Perencanaan pada sidang ke 14.

11 Maret 1957
tembusan
1 sampul

1631 Surat-surat mengenai kredit-kredit pemerintah kepada Perusahaan-perusahaan Nasional.

11 Nopember 1957 - 30 April 1958
asli
1 sampul

1632 Berkas mengenai peraturan BE.

26 Nopember 1957 - 12 April 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1633 Surat-surat mengenai laporan perekonomian secara umum.

09 April 1958
tembusan
1 sampul

1634 Berkas mengenai peninjauan kembali atas barang-barang yang pemasukannya dikenakan beban TPI.

27 Agustus - 18 Oktober 1958
pertinggal, asli
1 sampul

1635 Berkas mengenai Kongres Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia ke II tanggal 29 September - 2 Oktober 1958 di Lembang.

16 - 20 Oktober 1958
asli
1 sampul

1636 Surat-surat mengenai usul kebijaksanaan pemerintah tahun 1960 dari Kementerian Perdagangan.

26 Juni - 13 Juli 1959
tembusan
1 sampul

1637 Surat mengenai pembatasan pengeluaran di bidang anggaran belanja.

23 & 29 Oktober 1959
pertinggal
7 lembar

h. Perhubungan dan Telekomunikasi

1638 SK Menteri Pekerjaan Umum No. S 9/2/4 mengenai pendirian Perwakilan Djawatan Pelayaran di Jakarta.

11 Nopember 1949
turunan
1 lembar

1639 Berkas mengenai pembayaran hutang lalu lintas darat dan sungai.

24 Mei 1950 -29 Oktober 1952
asli
1 sampul

1640 Surat mengenai kutipan dari ikhtisar pers dan radio Kementerian Penerangan RIS.

31 Mei 1950
asli
2 lembar

1641 Surat dari Kepala Daerah Telepon Jakarta kepada Ketua DPR RIS mengenai pemasangan telepon bagi anggota DPR.

26 Juni 1950
tembusan
2 lembar

1642 Surat mengenai putusan kongres SB Postel ke-4 tanggal 23 - 27 September 1950.

10 Oktober 1950
asli
1 sampul

1643 Surat-surat mengenai perbaikan studio intel dari Kantor Telepon Jakarta.

25 Nopember 1950 - 28 Februari 1951
asli, pertinggal
4 lembar

1644 Surat dari Residen Madura, R. Soenarto Hadi Widjojo kepada Menteri Perhubungan mengenai kebutuhan kapal guna perhubungan Madura-Panarukan dan Madura-Kangean.

16 Desember 1950
tembusan
3 lembar

1645 Seri SK Menteri Perhubungan tentang pengiriman perwakilan Indonesia untuk keluar negeri berkaitan dengan perhubungan.

2 Januari - 15 Nopember 1951
salinan
1 sampul

1646 Surat-surat mengenai perizinan otobis dan truk.

16 Januari 1951- 7 Juli 1958
asli, tembusan
1 sampul

1647 Surat-surat mengenai pemakaian singkatan kata, istilah dan peribahasa untuk telegrap.

6 Februari 1951
asli
6 lembar

1648 Surat-surat mengenai usul pemasukan bagian-bagian Pelabuhan dan Penerbangan Sipil ke dalam Kementerian Pekerjaan Umum.

16 Februari - 12 Juli 1951
asli, pertinggal
1 sampul

1649 Surat-surat mengenai Panitya Pelabuhan Tanjung Priok.

18 April - 8 Nopember 1951
pertinggal, salinan
1 sampul

1650 Surat-surat mengenai politik pelayaran tentang kapal-kapal Jepang.

3 Juli - 27 Juli 1951
pertinggal, asli
1 sampul

1651 Surat-surat mengenai permohonan pendirian kantor pos dan telegrap pembantu di Una-una dan Tjibliung.

31 Juli - 13 Agustus 1951
pertinggal, tembusan
4 lembar

1652 Surat-surat mengenai permohonan berjalannya terus Perusahaan Otobis guna kepentingan rakyat dan kemajuan perekonomian rakyat di daerah Pakong, Waru, Pasijan dan Temberu.

10 Agustus 1951 - 24 Agustus 1951
asli
1 sampul

1653 Surat-surat mengenai Rancangan Keputusan Presiden tentang peralihan tugas mengenai pendaftaran kapal-kapal.

22 Agustus 1951 - 30 September 1958
pertinggal
1 sampul

1654 Surat-surat dari Panitia Perayaan Ulang Tahun ke VI Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Blangkedjeren kepada Perdana Menteri mengenai resolusi bersama menuntut pembukaan jalan Blangkedjeren - Takengon.

5 September 1951
asli
5 lembar

1655 Surat-surat mengenai resolusi dari berbagai organisasi sosial dan politik tentang ijin trayek dan pengelolaan perusahaan pengangkutan.

13 September 1951 - 6 September 1954
asli, tembusan
8 Lembar

1656 Berkas mengenai Maskapai Pelayaran Nasional Bintang Merah Putih.

9 & 22 Oktober 1951
asli
1 sampul

1657 Surat-surat mengenai permohonan dari NV Namorailangit untuk membangun kembali jembatan penghubung Sibaganding, beserta lampiran foto.

15 Oktober 1951 - 18 Agustus 1952
salinan

1 sampul

1658 Berkas mengenai rencana *begroting* pelayaran.

2 Januari - 5 Maret 1952
asli, pertinggal
1 sampul

1659 Berkas mengenai PT Pelni.

10 Maret 1952 - 12 Mei 1954
asli, pertinggal, tindasan
1 sampul

1660 Surat-surat mengenai permohonan pinjaman untuk pembelian Perusahaan Perkapalan Associatie.

21 Maret - 20 Oktober 1952
asli, tembusan
1 sampul

1661 Berkas mengenai nasionalisasi NV Bataviasche Verkeers Maatschappij.

8 April 1952 - 1 Februari 1954
asli

1 sampul

1662 Surat-surat mengenai perangko gambar Soekarno - Qoirino.
5 - 26 September 1952
tembusan
3 lembar

1663 Surat-surat mengenai kesulitan perhubungan Sulawesi Selatan.
10 September - 2 Oktober 1952
asli, pertinggal
5 lembar

1664 Surat-surat mengenai kenaikan tarif manipulasi bahan bakar kereta api.
16 Oktober - 8 Nopember 1952
asli, salinan

1665 Surat-surat mengenai pembelian pesawat radio, telegrafi dan telefoni dari Belanda.
6 Februari - 2 April 1953
asli, pertinggal
1 sampul

1666 Surat-surat mengenai perhubungan telepon radio antara Indonesia dengan Jerman Timur, Polandia, Tjekoslowakia, Rusia, Brasilia, Hongaria, Australia dan Praha.
24 Februari 1953 - 15 Desember 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1667 Surat-surat mengenai sensur (penilikan) surat-surat dan kiriman pos serta telepon.
23 Maret - 15 Juli 1953
asli, pertinggal
1 sampul

1668 SK Menteri Perhubungan No. U18/7/22 mengenai peraturan tentang jual beli kendaraan bermotor dan kereta.
20 Juli 1953
salinan
3 lembar

1669 Surat-surat mengenai saran-saran seksi D (Urusan Perhubungan Pekerjaan Umum dan Tenaga) DPR RI mengenai pelayaran.
18 Agustus 1953 - 7 Mei 1955

asli, pertinggal
1 sampul

1670 Berkas mengenai perangko (pembuatan, penjualan dsb.)

26 Agustus 1953 - 23 Januari 1955
asli, tembusan
1 sampul

1671 Surat-surat mengenai permohonan pengiriman tembusan konosemen pemerintah.

2 Februari - 31 Juli 1954
salinan
6 lembar

1672 Surat-surat mengenai alat perhubungan untuk Maluku Tenggara.

6 Februari - 22 Mei 1954
asli, tembusan
7 lembar

1673 Surat-surat mengenai kerugian di Jawatan Kereta Api.

25 Maret 1954 - 8 Maret 1955
asli
1 sampul

1674 Berkas mengenai nasionalisasi kapal-kapal asing.

3 April - 21 Juni 1954
pertinggal
1 sampul

1675 SK Menteri Perhubungan mengenai peraturan pakaian dinas dan tanda-tanda pangkat serta bendera mobil pegawai Bagian Lalu Lintas Jalan.

22 April 1954
turunan
1 jilid

1676 Berkas mengenai pembelian kapal-kapal dari Jepang.

8 Juni - 29 Juni 1954
pertinggal, asli
1 sampul

1677 Berkas mengenai otomatisasi telepon Jakarta Raya.

15 Juni - 30 Desember 1954
asli, pertinggal
1 sampul

1678 Lampiran Resolusi DPRDS Daerah Istimewa Bulongan tanggal 18 Juni 1954 (Laporan perhubungan kapal antara Tarakan dengan luar daerah).

18 & 26 Juni 1954
asli
1 sampul

1679 Surat-surat mengenai usul pembentukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan.

10 Juli 1954 - 27 Juni 1956
asli, pertinggal
4 lembar

1680 Surat-surat mengenai pengangkutan kopra dengan kapal-kapal Djakarta Lloyd.

6 September - 29 Nopember 1954
konsep, tembusan
1 sampul

1681 Surat-surat mengenai pengusahaan perhubungan dengan Pulau Bawean.

6 Oktober - 17 Desember 1954
pertinggal, tembusan
1 sampul

1682 Surat - surat mengenai peristiwa tabrakan antara mobil B 22299 dan F. 3777

27 Oktober 1954 - 11 Januari 1955
asli
3 lembar

1683 Surat-surat mengenai permintaan untuk membuka kredit pada BI bagi DPR untuk pembelian tiket plane GIA.

12 Nopember - 14 Desember 1954
asli, tembusan
8 lembar

1684 Surat-surat mengenai permohonan agar pelabuhan Cilacap dijadikan pelabuhan haji.

30 Desember - 10 Mei 1954
tembusan
5 lembar

1685 Surat-surat mengenai pembiayaan proyek 8 pesawat terbang Convair 340 dari sisa pinjaman Exim Bank.

17 Januari - 21 Februari 1955
pertinggal
1 sampul

1686 Surat-surat mengenai hasil bumi di Maluku Utara yang tertimbun karena kekurangan alat pengangkutan.

6 Mei - 31 Mei 1955
pertinggal, salinan
6 lembar

1687 Surat-surat mengenai permohonan pembiayaan pemindahan Stasiun Radio Matuangin (Makasar).

13 Mei - 28 Nopember 1955
pertinggal, tembusan, asli
1 sampul

1688 Laporan peninjauan ke bengkel kereta api PBM dan PTT di Jawa Barat (Manggarai, Bandung) dan Sumatra Selatan (Lahat)

14 Juli 1955
asli
1 sampul

1689 Berkas mengenai persoalan-persoalan perkapalan di Sulawesi Selatan.

1 Agustus - 17 Oktober 1955
tembusan, pertinggal
1 sampul

1690 Surat-surat dari Kementerian Perhubungan kepada Perdana Menteri mengenai rencana pembentuka Panitia Negara untuk menyelidiki perundang-undangan pelayaran.

24 Januari - 21 Juni 1956
asli
1 sampul

1691 Surat-surat mengenai konvensi tentang cara pengukuran dan pendaftaran kapal yang dipergunakan di perairan pedalaman.

30 Januari - 2 Februari 1956
pertinggal
1 sampul

1692 Surat-surat mengenai pemberian kuasa kepada BI atas nama RI untuk meminjam uang dari NV Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Biliton (GMB) untuk membayar sumbangan Indonesia guna pembentukan cadangan buffer timah, lampiran tidak ada.

22 September 1956
pertinggal
3 lembar

1693 Surat-surat mengenai tuntutan SBKA tentang perubahan status DKA menjadi *Public Corporation.*

13 Oktober - 26 Nopember 1956
asli
4 lembar

1694 Surat-surat mengenai status Jajasan Motor.

5 Nopember - 24 Desember 1956
asli, pertinggal
1 sampul

1695 Surat-surat mengenai PT GIA dan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang sahamnya dipegang oleh pemerintah.

7 Nopember & Desember 1956
pertinggal
2 lembar

1696 Surat-surat mengenai *convention on road traffic,* Jenewa 19 September 1949.

27 Nopember - 8 Desember 1956
asli, pertinggal
1 sampul

1697 Surat-surat mengenai penyerahan kapal-kapal yg dibeli dari luar negeri untuk keperluan pemerintah kepada PT Pelni.

28 Maret - 5 Juni 1957
pertinggal, asli
1 sampul

1698 Surat-surat mengenai pemesanan 6 Coasters secara kredit oleh PT PPSS (Perusahaan Pelayaran Sulawesi Selatan).

19 Agustus 1957 - 30 April 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1699 Daftar pesawat-pesawat terbang yang mengarungi Indonesia.

1957
asli
1 lembar

1700 Surat-surat mengenai kenaikan tarif pengangkutan GIA.

22 Agustus - 10 September 1957
pertinggal, asli
1 sampul

1701 Surat-surat mengenai keadaan pelabuhan Sibolga dan Lapangan Terbang Pinangsore.

5 Nopember & 13 Desember 1957
asli, pertinggal
1 sampul

1702 Surat mengenai pelelangan umum kapal-kapal milik PT Perusahaan Pelayaran Indonesia (Inaco).

2 Januari 1958
pertinggal, konsep
3 lembar

1703 Surat dair Direktur Carya Ltd kepada Wakil Perdana Menteri II mengenai rencana pembangunan galangan dan dok kapal, disertai peta dan denah.

10 Januari 1958
asli
1 sampul

1704 SK Menteri Perhubungan No. G4c/1/5 tentang penggantian tarif-tarif telepon dari Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

1 Februari 1958
salinan
1 sampul

1705 Surat-surat mengenai pencharteran kapal Sowjet Rusia oleh Pemerintah RI.

14 Februari - 21 Februari 1958
pertinggal
1 sampul

1706 Berkas mengenai penyerahan kembali kapal-kapal NV KPM yang dikuasai pemerintah.

14 Februari - 27 Maret 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1707 Berkas mengenai pembukaan pelabuhan-pelabuhan laut di Langsa, Meulaboh, Sibolga, Kota Baru, Poso, Ternate, Ambon, Kupang dan Buleleng.

9 Juni - 24 September 1958
tembusan, pertinggal
1 sampul

1708 Surat dari Kepala Djawatan Perjalanan mengenai pembukaan perwakilan Kantor Pusat Djawatan Perjalanan Jakarta di Jambi.

7 Juli 1958
salinan
1 lembar

1709 Surat-surat mengenai Dewan Angkutan Laut dan pernyataan vital perusahaan pelayaran.

8 Agustus - 1 September 1958
asli, pertinggal
1 sampul

1710 Surat-surat mengenai pembatalan perjanjian perwakilan komisi Pelni di Ende.

20 September 1958 - 17 Februari 1959
asli, pertinggal
1 sampul

1711 Surat dari Kementerian Pelayaran kepada Dewan Menteri mengenai penggunaan pampasan perang dengan Jepang.

22 September 1958
Stensilan
1 sampul

1712 Surat-surat mengenai pembuatan jalan kereta api Tegineneng - Labuhan Meringgai, beserta peta.

5 Januari - 10 Nopember 1959
tembusan
1 sampul

1713 Seri SK Perdana Menteri RI tentang izin pengangkatan kapal-kapal yang tenggelam.

5 Maret & 1 April 1959
salinan
2 lembar

1714 SK Menteri Muda Perhubungan Laut No. TH. 3/11/B tentang perubahan susunan Panitia Pembelian.

26 Agustus 1959
salinan
1 lembar

4. SOSIAL

a. Perburuhan/Tenaga kerja

1715 Surat-surat mengenai resolusi rapat, tuntutan dan protes dari beberapa serikat buruh di seluruh indonesia tentang upah minimum dan nasib kaum buruh.

20 Januari 1950 - 23 Maret 1957
asli
1 sampul

1716 Surat-surat dari Sdr. Sukinta seorang buruh yang menuntut mendapatkan haknya yakni uang waledan dari tempatnya bekerja di N.V. Stoomvaart Maatschappij "Nederland".

1 Maret - 3 Nopember 1950
asli, salinan
1 sampul

1717 Berkas mengenai Sarekat Buruh Listrik dan Gas seluruh Indonesia. (resolusi konggres ke I tanggal 8 April 1950 & persengketaan antara PB. SBLGI dengan Direksi OGEM Overkapping .

16 Maret 1950 - 29 September 1953
asli
1 sampul

1718 Resolusi Pusat Organisasi Buruh, Bagian Buruh Perniagaan mengenai perlu adanya Undang-undang perburuhan yang memberi jaminan akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi buruh.

24 April - 24 Oktober 1950
asli, salinan
8 lembar

1719 Surat-surat mengenai resolusi, rapat konggres, tuntutan dan aksi masalah Sarbupri.

13 Mei 1950- 6 Desember 1953
asli
1 sampul

1720 Surat dari Seluruh Anggota Perbupri kepada Kementerian Pertahanan mengenai permohonan dibebaskannya Djakaria sebagai Ketua Umum Perbupri Banjarmasin.

15 Mei 1950
asli
2 lembar

1721 Peraturan Menteri Perburuhan RI Nomor 7 tahun 1950 tentang pengubahan Peraturan Sokongan Pengangguran dan Pemberian Kerja Darurat kepada kaum penganggur.

2 Juni 1950
Copy
1 sampul

1722 Surat-surat mengenai pemogokan pegawai pabrik di pasirwaringin, pabrik di Cirebon, S.V.P.M. Sungai Gerong, Perusahaan Philips Surabaya, perusahaan tembakau, pabrik cabang pesantren kediri, Sarbupri dan Perbupri, Sarekat Buruh Fortho Pusat Surabaya, guru-guru sekolah negeri, pemogokan umum kaum buruh, pekerjaan umum, daerah otonom dan kehutanan di seluruh daerah Jawa Barat (terdapat arsip Berbahasa Inggris dan Bahasa Belanda).

8 Juni 1950 - 20 Oktober 1954
asli, tembusan, fotokopi
1 sampul

1723 Surat-surat mengenai permohonan pegawai RI non-cooperator dan pegawai cooperator untuk perbaikan nasib dan solusi mengatasi perselisihan diantara kedua belah pihak.

27 Januari - 10 November 1950
tembusan

10 lembar

1724 Pendapat pemerintah tentang penyelesaian perselisihan antara Sarbupri dan Algemene Landbouw Syndicaat/Bond Eigenaren Besuki Tabak-Ordernemingen.

15 - 23 September 1950
asli
4 lembar

1725 Surat dari Serikat Buruh Daerah Autonoom (SEBDA) kepada Perdana Menteri mengenai *inpassing* (proses penyetaraan gaji pokok) PGPN (Peraturan Gaji Pegawai Negeri)1955.

23 September 1950 - 29 Desember 1955
asli
1 sampul

1726 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai laporan Kantor Kepolisian DIY mengenai sentral SOBSI dengan Trade Departement.

23 September - 9 Desember 1950
asli
3 lembar

1727 Surat-surat dari Badan Pusat Serikat-serikat Sekerdja mengenai penyesuaian pegawai.

23 September 1950 - 21 Nopember 1950
asli
1 sampul

1728 Berkas mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi ILO di Bandung, Havana dan Jenewa.

25 September 1950 - 15 Juli 1954
asli, fotokopi
1 sampul

1729 Surat-surat dari Komisi Urusan Perburuhan mengenai usul penugasan Mr. Y.W Kranenburg ke Belanda untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang didelegasikan kepada sub komisi di Negeri Belanda.

4 - 26 Oktober 1950
salinan
5 lembar

1730 Surat-surat mengenai perselisihan SBPAL (Serikat Buruh Penataran Angkatan Laut) dengan Kementerian Pertahanan dan dengan Direksi Marine Stablissement Soerabaia.

12 Oktober 1950 - 7 September 1951
asli, tembusan
5 lembar

1731 Surat-surat Kementerian Perburuhan RI tentang perjalanan dinas pegawai Kementerian Perburuhan ke luar negeri.

13 Oktober 1950 - 21 November 1955
tembusan, salinan
6 lembar

1732 Surat-surat dari Serikat Buruh PTT (SBPTT) mengenai penjelasan tujuan SBBT dan upacara FDR.

26 Oktober - 11 Nopember 1950
asli
4 lembar

1733 Surat dari Panitya Konggres Fusi Sarekat Buruh Gelas Seluruh Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai statement Pengurus Besar Sarekat Buruh Gelas Indonesia dalam konggres Fusi Buruh Gelas Seluruh Indonesia, 5 Nopember 1950 di Semarang.

7 & 8 November 1950
asli
2 lembar

1734 Resolusi dari Pimpinan Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB) Cabang Jambi mengenai tuntutan pencabutan undang-undang W.V.O dan W. V.V dan mengusulkan aturan-aturan yang lebih demokratis.

4 Maret 1951
asli
1 lembar

1735 Berkas mengenai tuntutan-tuntutan PBKSI (Persatuan Buruh Kilang Semen Indarung) untuk mempercepat penyelesaian masalah yang sedang dihadapi PBKSI (terdapat arsip berbahasa Belanda).

15 Desember 1950
asli
8 lembar

1736 Surat dari SBKB Cabang Semarang kepada Kementerian Perhubungan Bagian Lalu Lintas mengenai protes ditutupnya Perusahaan Auto Bus Garuda Seta dan meminta jaminan kepada buruh korban masa ontslag sebelum mendapat lapang pekerjaan.

26 Februari 1951 - 12 Maret 1951
asli
2 lembar

1737 Berkas mengenai pengangkatan anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di daerah/propinsi.

17 Maret 1951 - 8 Oktober 1956
asli, fotokopi
1 sampul

1738 Surat-surat mengenai keputusan P4 pusat terkait nasib kaum buruh.

28 Maret 1951 - 7 Desember 1953
asli
1 sampul

1739 Berkas mengenai program konferensi Kementerian Perburuhan dengan kantor-kantor penyuluh/pembantu penyuluh perburuhan seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Bogor 26 s/d 30 September 1951.

13 - 26 September 1951
asli, fotokopi
6 lembar

1740 Surat-surat mengenai Wakil Direktur "Padangsche Weverij" - "Van Haouten Steffen & Co" di Padang yang dipukul oleh buruhnya.

25 September - 8 Desember 1951
pertinggal
1 sampul

1741 Berkas mengenai perkembangan gerakan buruh kapal, laut dan pelabuhan.

5 November 1951
tembusan
1 sampul

1742 Statement dan Resolusi organisasi-organisasi buruh tentang Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1951 mengenai perburuhan.

10 November 1951 - 26 November 1951
Asli, Tembusan
1 Sampul

1743 Surat dari Kementerian Perburuhan kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai pembentukan panitia interdepartemental yaitu panitia kecil guna penyelidikan prestasi kerja para buruh, beserta lampiran.

15 Oktober - 13 November 1951
asli
1 sampul

1744 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tentang pemberian kuasa kepada Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Kotabaru-Kebayoran dalam hal pengeluaran tanah dalam wilyah Jawatan Pekerjaan Umum Kotabaru Kebayoran.

18 Desember & 26 Oktober 1951
salinan
2 lembar

1745 Peraturan Menteri Perburuhan No. 29/52 tentang penghapusan kantor perwakilan jawatan pengawasan keselamatan kerja pusat di Jogjakarta.

08 Maret 1952
salinan
2 lembar

1746 Pernyataan SOBSI anggota W.F.T.U Cabang Ambarawa tentang protes tindakan Amerika yang menggunakan senjata-senjata kuman di Korea.

15 Maret 1952
asli
1 lembar

1747 Surat-surat mengenai peraturan tentang perayaan 1 Mei sebagai hari buruh.

9 April 1952 - 22 April 1954
Tembusan
1 sampul

1748 Resolusi ke III dari Sekretaris Serikat Buruh Rokok Indonesia tentang pencabutan Undang-undang SOB yang berbau kolonial.

20 Mei 1952
tembusan
1 lembar

1749 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai penyampaian salinan surat Menkeu tentang komentar atas nota panitya ad hoc hal pemogokan (Menteri Urusan Pegawai), beserta lampiran.

3 - 9 Juni 1952
asli, pertinggal
6 lembar

1750 Berkas mengenai pemogokan pegawai negeri terkait belum adanya Undang-undang/Peraturan yang melarang tindakan pemogokan tersebut.

13 Juni 1952 - 7 Maret 1956
asli, fotokopi
1 sampul

1751 Surat-surat mengenai rencana pemberian latihan/kursus bagi tenaga wanita untuk melakukan pekerjaan yang bersifat teknis.

7 Juli - 10 Nopember 1952
asli
3 lembar

1752 Surat-surat dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sosial mengenai penyelesaian pengembalian bekas romusha di Thailand yang terlantar ke Indonesia.

12 - 30 Agustus 1952
asli, tembusan
1 sampul

1753 Berkas mengenai petunjuk central biro SOBSI (Central Organisasi Buruh RI) tentang Pakta Perdamaian Asia dan Pasifik.

27 Agustus 1952
tembusan
1 sampul

1754 Berkas mengenai permintaan J.D. Sopamena agar pemerintah lebih memperhatikan pekerja-pekerja di Irian Barat.

31 Agustus 1952 - 26 Januari 1953
asli
1 sampul

1755 Berkas mengenai uang mas milik bekas buruh New Caledonia.

15 Oktober - 26 Nopember 1952
asli
1 sampul

1756 Surat dari Pengurus Besar Saptia Kupang kepada Menteri Perburuhan mengenai permohonan jawaban yang jelas dan tegas terkait soal perburuhan ke Australia.

30 Januari 1953
tembusan
6 lembar

1757 Surat-surat mengenai surat kaleng yang berisi Keputusan Dewan Buruh Besar untuk menyingkirkan A. M. Datuk cs.

17 Februari 1953 - 30 September 1953
asli
5 lembar

1758 Berkas mengenai dana jaminan sosial untuk kaum buruh.

10 - 16 Maret 1953
Fotokopi
1 sampul

1759 Surat dari Serikat Buruh Bea dan Cukai Pekan Baru kepada P4 Pusat mengenai protes atas putusan-putusan P4 pusat terkait perselisihan antara Tjb. Perbum Pekan Baru dengan CPPM di Pekan Baru.

28 Maret 1953
asli
4 lembar

1760 Berkas mengenai maklumat III KBSI (Konggres Buruh Seluruh Indonesia) yang berisi tentang akte peleburan, maklumat pembentukan vaksentral baru, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KBSI.

12 Mei 1953 - 16 Juni 1953
asli
1 sampul

1761 Surat dari atas nama para buruh mengenai permohonan kembali bekerja di tambang minyak P. Brandan.

17 Mei 1953 - 10 Nopember 1953
asli
3 lembar

1762 Surat lamaran pekerjaan dari R. Ronggohusodo dan Darwis Taufiek.

10 Desember 1953
asli

2 lembar

1763 Surat-surat mengenai protes dari Serikat Buruh Pelabuhan Pelayaran Belawan dan SOBSI cabang Langsa dengan adanya pengekangan hak-hak demokrasi.

29 Mei - 12 September 1953
asli
2 lembar

1764 Surat dari SOBSI cabang Langsa kepada Perdana Menteri mengenai protes berkenaan dengan adanya perampasan dan pengekangan hak-hak demokrasi di Kebun Pachter VICO Langsa.

29 Mei 1953
asli
2 lembar

1765 Surat dari Sekretariat Serikat Buruh Percetakan Indonesia (SBPI) kepada Direksi N.V. Indonesia Raya mengenai pemecatan/masa onslah 24 orang kaum buruh.

2 Juni 1953 - 3 Juni 1953
fotokopi
6 lembar

1766 Surat - surat keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tentang pemberian kenaikan upah.

30 Juni 1953
Copy
4 lembar

1767 Surat-surat mengenai hubungan Serikat Buruh Qantas Empire Airways dengan Direksi Qantas E. A. Ltd di Jakarta.

3 Juli 1953 - 17 November1953
asli
5 lembar

1768 Berkas mengenai tenaga Indonesia dalam pimpinan Qantas Empire Airways.

5 September 1953 - 17 Nopember 1953
asli
1 sampul

1769 Surat-surat mengenai demonstrasi PERBUM terhadap BPM.

5 Agustus 1953 - 22 Agustus 1953
asli
6 lembar

1770 Berkas dari Sarekat Buruh Kereta Api (SBKA) mengenai Resolusi Konggres yang berisi tentang nasionalisasi perusahaan kereta api partikelir dan tentang pentraktoran, penangkapan dan penembakan kaum tani di Sumatera Timur.

1 - 10 September 1953
asli
7 lembar

1771 Berkas mengenai gerak gerik K.A Achmad Zohari, Kepala Kantor Pembantu Penyuluhan Perburuhan di Pangkal Pinang.

7 September 1953 - 9 Januari 1954
asli
7 lembar

1772 Surat pernyataan dari Panitya Aksi Pedagang tentang pengosongan/pengusiran secara paksa terhadap bedag-bedag di Pasar Lawang.

19 September 1953 - 23 September 1953
fotokopi
2 lembar

1773 Resolusi S.B. Textile-SOBSI-GSS Sekretariat S.B. Textiel Cabang Pleret Pasuruan tentang Undang-undang Darurat No. 16/51 dan P4.

24 September 1953 - 28 September 1953
asli
2 lembar

1774 Surat pernyataan dari Koordinator Cabang Serikat Buruh Industri Metal Malang mengenai penutupan Pabrik Mesin Sumbermas secara mendadak.

1 Oktober 1953 - 25 Oktober 1953
fotokopi
5 lembar

1775 Surat-surat mengenai pernyataan menyokong Kabinet Ali/Wongso terkait kebijaksaaan positif bagi kaum buruh.

10 Oktober 1953 - 12 Oktober 1953
asli
1 sampul

1776 Surat dari Dewan Pimpinan Tjabang Serikat Buruh Industri Metal Surabaya mengenai Kronologis Verslaag tentang kejadian-kejadian di perusahaan de Industrie S. Baja.

23 Oktober - 9 Desember 1953
asli
3 lembar

1777 Surat dari Sekretariat SBPKB Cabang Semarang mengenai siaran kilat berisi ontslagrecht dipergunakan sewenang-wenang oleh N. V. Javahout.

10 Nopember 1953
asli
3 lembar

1778 Surat dari Serikat Buruh kereta api mengenai pernyataan protes terhadap instruksi Ir. Kosasih terkait larangan atau batasan dalam berunding.

17 Nopember 1953
asli
3 lembar

1779 Statement dari SBKA (Serikat Buruh Kereta Api) cabang Blitar mengenai pentraktoran tanah di daerah Kediri dan pernyataan tentang RUU Pendaftaran Sarekat Buruh.

27 & 28 November 1953
salinan
2 lembar

1780 Peraturan Menteri Perburuhan tentang pembentukan panitya yang berkewajiban menjalankan pekerjaan yang diperlukan agar Menteri Perburuhan dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang dimaksud pada Undang-undang Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan.

30 Nopember 1953 dan 1 Desember 1963
salinan
6 lembar

1781 Berkas mengenai tindakan yang harus dijalankan terhadap pegawai negeri di Sumatra Utara yang tidak masuk bekerja karena timbulnya pemberontakan Daud Beureuh.

7 Desember 1953 - 15 Juli 1954
asli
1 sampul

1782 Kumpulan resolusi dan statement organisasi buruh seluruh Indonesia tentang perselisihan perburuhan , kenaikan gaji serta hubungan buruh dan majikan.

9 Maret 1953 - 19 agustus 1958
Asli, Tembusan

1 Sampul

1783 Surat dari Kepala Bagian DPKN Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai kutipan " Warta Sarbupri " no 16 tentang Politik *Nivellering, beserta lampiran.*

27 Februari 1954
Asli
2 lembar

1784 Berkas mengenai laporan khusus tentang Kantor Penyuluh Perburuhan Propinsi Sunda Kecil Singaraja.

30 - 31 Maret 1954
tembusan
1 sampul

1785 Berkas mengenai urusan kebun margawindu.

16 Juni 1954
asli
1 sampul

1786 Surat dari Pengurus Besar SSKDN kepada Perdana Menteri mengenai kebijaksanaan kepegawaian yang dijalankan pemerintah dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

30 Juni - 30 April 1955
salinan
1 sampul

1787 Berkas dari Serikat Buruh Djawatan Pertanian Rakyat (SBDPK) Daerah Propinsi Jatim mengenai resolusi perbaikan nasib buruh negeri dan resolusi tentang keamanan.

17 - 28 September 1954
tembusan
6 lembar

1788 Surat-surat dari Serikat Buruh Tambang Indonesia Cabang Sungailiat/Bangka mengenai tuntutan agar 11 orang buruh Tanjung Enim yang dipecat oleh Kepala "Taba" segera dipekerjakan kembali.

18 - 20 Oktober 1954
asli
7 lembar

1789 Surat dari Pengurus Besar Serikat Sekerja Bea dan Cukai kepada Perdana Menteri mengenai Statement terkait peristiwa Kepala Daerah III Jawatan Bea dan Cukai Surabaya - R. Sarpan kontra Serikat Buruh Bea dan Cukai (S.B.B.T).

27 Januari - 10 Februari 1955
asli
5 lembar

1790 Berkas berisi surat-surat pernyataan resolusi dll dari Sidang BKS (Badan Kerja Sama) ke VIII.

26 Maret - 29 Desember 1955
asli
1 sampul

1791 Surat-surat dari Gerwani, Sobsi, SBG mengenai desakan agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap intervensi asing.

21 September - 6 Desember 1955
asli, fotokopi
1 sampul

1792 Berkas mengenai tugas dan fungsi Kementerian Perburuhan

19 Oktober 1955 - 17 Juli 1957
asli
1 sampul

1793 Surat-surat mengenai pemogokan Sarbupri di Majang Sumatra Timur.

29 Nopember 1955 - 11 Oktober 1956
asli
1 sampul

1794 Surat dari Sarekat Buruh Kementerian Pertahanan Cabang Surabaya kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai mengenai perubahan upah setempat bagi para buruh pemerintah.

27 Desember 1955
Fotokopi
1 lembar

1795 Pernyataan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Industri Metal (SBIM) Yogyakarta tentang Undang-undang Darurat 16/1951 dan Kabinet Burhanuddin Harahap.

03 Januari 1956
Fotokopi
1 lembar

1796 Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Dewan Menteri mengenai perbaikan nasib para insinyur.

18 - 25 Januari 1956
asli
1 sampul

1797 Berkas mengenai resolusi hasil rapat SOBSI tentang permintaan pencabutan kekuasaan Ondernemer Hapesong atas perkebunan Kecamatan Lumut Tapanuli Tengah.

25 Maret 1956
asli
1 sampul

1798 Berkas mengenai pandangan tentang pengoperan pegawai KPM bagian dinas luar (Pergudangan) kepada veem-veem nasional.

19 April 1956
Fotokopi
1 sampul

1799 Surat pernyataan pimpinan cabang Sarikat Buruh Kendaraan Bermotor Pasuruhan tentang pembayaran kerugian perang Jepang kepada Indonesia.

15 Juni & 11 Juli 1956
asli
2 lembar

1800 Berkas mengenai pernyataan rencana Rasionalisasi (pengurangan/pemecatan pegawai negeri) dari beberapa sarekat buruh di Indonesia.

18 Juni - 16 Juli 1956
asli, fotokopi
1 sampul

1801 Surat Edaran Menteri Perburuhan tentang beberapa tindakan perburuhan yang diluar batas.

21 - 30 Juni 1956
asli
1 sampul

1802 Kumpulan surat mengenai sidang dan resolusi Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) tahun 1956 s.d 1959.

16 Juli 1956 - 11 Maret 1959
asli

1 sampul

1803 Surat-surat mengenai pemogokan buruh kereta api seluruh Jawa pada tanggal 28-29 Juli 1956.

31 Juli - 1 Agustus 1956
salinan
1 sampul

1804 Surat dari T.S. Periatina, mahasiswa fakultas hukum U.I di Jakarta yang bekerja di perkebunan karet Sukabumi kepada Menteri Perburuhan mengenai hari libur pegawai yang belum ditentukan harinya.

05 Desember 1956
tembusan
1 lembar

1805 Surat-surat mengenai proces-perbaal timbang-terima Kementerian Perburuhan (dari Menteri Perburuhan lama Sdr. Sabilal Rasjad kepada Menteri Perburuhan baru Sdr. Mr. R Samjono).

11 Januari - 11 April 1957
asli
4 lembar

1806 Berkas mengenai ralat atas surat Menteri Perburuhan tentang penyerahan beberapa urusan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom.

18 Juli - 3 Agustus 1957
asli
1 sampul

1807 Pernyataan Konferensi Serikat Sekerja / Serikat Buruh Badan-badan Pemerintah Agung antara lain tentang masalah kepegawaian dan pemberantasan korupsi.

30 April 1958
konsep
9 lembar

1808 Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. 317/P.M/1958 tentang penyelesaian Kementerian Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan.

05 Juli 1958
salinan
8 lembar

1809 Berkas mengenai peraturan pemungutan biaya pemeriksaan dan pengawasan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan.

31 Juli - 24 Nopember 1958
asli
1 sampul

1810 Berkas mengenai berita acara timbang terima Menteri Perburuhan kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Selatan dan Jawa Timur terkait urusan kesejahteraan buruh daerah swatantra tingkat I Sumatra Selatan.

14 November 1958 - 23 Februari 1959
asli
1 sampul

b. Urusan Agama

1811 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai surat gaib No. 10 tentang penghinaan terhadap umat Islam, beserta lampiran.

23 Juni - 16 Agustus 1951
asli
4 lembar

1812 Surat pernyataan adhesie DPRD Sementara Kabupaten Banyumas di Purwokerto tentang dukungan terhadap resolusi DPRD Kabupaten Sidoarjo perihal pemberantasan pergundikan.

1 Desember 1951 - 23 Maret 1953
salinan
1 lembar

1813 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai penyampaian surat dari Tengku Mohd. Husin cs tentang keadaan dari Aceh terkait resolusi sosial dari para ulama.

15 Desember 1951 - 26 Januari 1952
asli, pertinggal
6 lembar

1814 Berkas mengenai resolusi larangan memakai nama "Gereja Pantekosta".

9 Januari - 9 Agustus 1952
asli, pertinggal
1 sampul

1815 Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Luar Negeri mengenai utusan muslimin Indonesia di Hedjaz ke Indonesia, beserta lampiran .

11 & 19 Januari 1952
tembusan
2 lembar

1816 Surat dari Kementerian Agama kepada Kementerian Sosial mengenai permohonan pemberian subsidi, sokongan dan bantuan materiil yang adil kepada pihak Kristen, Roma Katholik dan Islam.

18 Januari 1952
tembusan
1 lembar

1817 Surat dari Menteri Agama RI kepada Jawatan Pendidikan Agama, Urusan Agama dan Penerangan di Yogyakarta dan Jakarta mengenai pemeliharaan keamanan di Pondok-pondok Pesantren.

26 Januari - 7 Maret 1952
salinan
3 lembar

1818 Surat dari Menteri Agama kepada Kepala Staf K mengenai pemeliharaan keagamaan di kampung Nusa Kambangan.

21 Maret - 2 April 1952
asli
2 lembar

1823 Surat dari Kementerian Agama kepada Perdana Menteri mengenai mukimin Indonesian di luar negeri.

24 Juli - 21 Oktober 1952
asli, pertinggal
6 lembar

1828 Berkas mengenai perkawinan di daerah Madjalengka terkait gerakan gerombolan bercampur hubungan dengan NTR.

28 Januari - 28 April 1953
asli
7 lembar

1829 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan tentang protes Ansohary (Islam) tentang pidato presiden, beserta lampiran.

16 - 20 Februari 1953
asli
3 lembar

1830 Surat-surat mengenai persoalan tanah (ahliwaris) di Aceh Besar dengan Kepala Pengurus Agama.

26 Februari 1953 - 12 Januari 1954
pertinggal, tembusan
1 sampul

1831 Surat-surat mengenai anjuran agar masyarakat mentaati peraturan agama dan pemberitahuan sholat Idul Adha di lapangan Banteng, Jakarta.

26 April - 18 Agustus 1953
asli
4 lembar

1832 Berkas mengenai kebijaksanaan pemerintah terhadap agama Islam (Islam politiek).

8 Juni 1953 - 3 Maret 1954
asli, tembusan

1833 Surat dari Kepala Kantor Pusat Jawatan Penerangan Agama kepada Perdana Menteri mengenai pengiriman naskah mengisi jiwa proklamasi 17 Agustus, naskah kutbah Idul Adha 1372, dan amanah Menteri Agama RI, beserta lampiran.

10 Agustus 1953
asli
1 sampul

1834 Berkas mengenai rencana penerangan agama mencapai keamanan.

13 Oktober - 16 Nopember 1953
asli, pertinggal
1 sampul

1835 Mosi Badan Kontak Partai - partai dan Organisasi- organisasi Islam Kabupaten Lampung Selatan atau disingkat BAKOPOI mengenai diperundangkannya pendirian Pengadilan Agama Karesidenan Lampung.

8 November 1953
Copy
2 lembar

1836 Berkas mengenai siaran pentjaharian utusan Tuhan dan Kitaboellah.

20 Nopember - 1 Desember 1953
asli
1 sampul

1837 Berkas mengenai penghinaan terhadap agama dan umat Islam.

23 November 1953 - 16 Maret 1954

Asli
1 sampul

1838 Resolusi Kongres Mathla'ul Anwar ke IX mengenai bantuan subsidi kepada madrasah-madrasah dan pelajaran agama Islam serta pengangkatan guru-guru agama.

21 Desember 1953
Copy
2 lembar

1839 Berkas mengenai penyelenggaraan haji tahun 1954, 1955, 1958.

20 Januari 1954 - 12 Februari 1958
asli, konsep
1 sampul

1840 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Agama mengenai penyampaian surat dari Pusat Pimpinan "Agama Sutji" Seluruh Indonesia Daerah Besuli di Asembagus Wetan Agung G III tentang usul perkawinan supaya diurus oleh Kepala Desa.

29 April - 8 Juni 1954
asli, pertinggal
3 lembar

1841 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai penyampaian salinan pengumuman Gerakan Kemerdekaan Umat Manusia yang ber Tuhan YME.

10 Juli 1954 - 11 Februari 1955
asli, pertinggal
4 lembar

1842 Surat dari Kementerian Agama kepada Perdana Menteri mengenai resolusi GPII agar pelajaran agama di sekolah-sekolah pemerintah dijadikan sebagai mata pelajaran.

30 Agustus & 10 September 1954
Salinan
4 lembar

1843 Berkas mengenai masalah papan nama Kantor Urusan Agama Budha Jawi yang diturunkan oleh polisi.

25 Nopember 1954 - 13 Agustus 1955
asli
1 sampul

1844 Berkas mengenai laporan pertama dan kedua dari Panitia Interdepartemental Peninjau Kepercayaan-kepercayaan di dalam masyarakat (Panitia Pakem).

5 April 1955 & 3 September 1956
asli, fotokopi
1 sampul

1845 Surat dari Menteri Agama RI kepada Perdana Menteri mengenai pertimbangan mensistimatisir dan mengobyektivir penggunaan laporan/tinjauan/analisa dari instansi-instansi *intelligence, research* dan observasi politik.

20 Oktober 1955 - 12 Januari 1956
asli
6 lembar

1846 Penetapan Menteri Agama No. 25 Tahun 1956 tentang penetapan Menteri Agama No.28 tahun 1955 dan No. 12 tahun 1956 tentang formasi pegawai di lingkungan Kementerian Agama dan semua penetapan dan keputusan-keputusan Menteri Agama yang bertentangan dengan penetapan tersebut.

31 Desember 1956
asli
1 sampul

1847 Berkas mengenai rencana Peraturan Pemerintah tentang pembentukan pengadilan Agama/Mahkamah Sjar"ijah di Propinsi Aceh.

6 - 22 Juli 1957
asli
1 sampul

1848 Surat dari Menteri Muda Penghubung Kabinet/Alim Ulama kepada Menteri Muda Agama mengenai larangan memeluk Agama Budha Djawi Wisnu.

06 Oktober 1959
asli
2 lembar

c. Pendidikan, Teknologi dan Kebudayaan

1849 Surat dari Mr. Maria Ullfah Santoso kepada *The Minister of External Affairs of New Zealand*, Wellington mengenai ketidakikutsertaan Indonesia untuk mengikuti pendidikan dari Unesco. NB. Asip berbahasa Inggris.

8 Februari 1950 - 18 Januari 1951
asli, pertinggal
8 lembar

1850 Berkas mengenai *oceanografise expeditie* (komisi kebudayaan Indonesia Belanda).

25 Maret - 09 Oktober 1950
asli
1 sampul

1851 Berkas mengenai kegiatan organisasi untuk penyelidikan dalam ilmu pengetahuan alam (OPIPA).

6 Mei 1950 - 17 April 1952
asli
1 sampul

1852 Seri Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI mengenai perjalanan dinas ke luar negeri.

6 Nopember 1950 - 12 Nopember 1951
salinan
1 sampul

1853 Surat dari Menteri Perdagangan/Perindustrian kepada Perdana Menteri mengenai Yayasan Akademi Perniagaan Indonesia, beserta lampiran brosur yayasan tersebut.

03 Januari 1951
asli
1 sampul

1854 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai pengiriman terjemahan dari karangan-karangan dalam s.k Tionghoa "*Nan Yang Siang Pao* " di Singapura tentang pengajaran Tionghoa dari Malaya, beserta lampiran.

20 Maret - 21 Mei 1951
Asli
1 sampul

1855 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri tentang terjemahan kutipan dari *"Thien Sung Yit Po"* tentang sekolah-sekolah Tionghoa".

19 Mei 1951 dan 28 Mei 1951
Asli
2 lembar

1856 Surat dari Sekretaris Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Balai Perguruan Tinggi mengenai usul pemberian *studieopdracht* kepada Prof. Soekarjo.

2 & 3 Agustus 1951
asli, pertinggal
2 lembar

1857 Surat dari Jaksa Agung kepada Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tentang perubahan sistem pelajaran Hoakiao, beserta lampiran.

4 Oktober - 12 Desember 1951
tembusan
3 lembar

1858 Surat dari Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Perdana Menteri mengenai kegelisahan dalam kalangan ex Tentara Pelajar (T.P) karena adanya desas-desus pencabutan PP No. 32.

19 Nopember & 5 Desember 1951
asli
2 lembar

1859 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai rencana kerja Unesco dan daftar specificatie pengeluaran ongkos-ongkos yang dimaksudkan dalam anggota belanja 1952, beserta lampiran.

3 - 27 Februari 1952
asli
6 lembar

1860 Berkas mengenai *chronologisch verslag* dari Unesco tentang usaha-usahanya mendirikan kantor *"Unesco Science Co-Operation Office for South East Asia* di Jakarta.

6 Februari - 20 Maret 1952
asli, pertinggal
5 lembar

1861 Surat dari Dewan Mahasiswa Universitas Negeri Gajah Mada kepada Pemerintah RI mengenai putusan sidangnya tentang pengajaran dan pendidikan.

22 & 28 Februari 1952
asli
2 lembar

1862 Surat dari Sekretaris Staf K Pusat kepada Kementerian Dalam Negeri tentang permintaan Suharjo Surjopranoto, cs tentang bantuan sekolah para pelajar bekas pejuang.

31 Mei - 16 Juli 1952
asli, pertinggal
6 lembar

1863 Berkas mengenai tugas panitia sensor film pada Kementerian Pendididikan Pengajaran dan Kebudayaan.

22 Juli - 4 September 1954
tembusan
1 sampul

1864 Berkas Jawatan Pendidikan Masyarakat Kementerian PP&K yang berisi risalah panti pemuda, risalah bagian interdep, statistik hasil usaha tahun 1951 dan tahun 1952, rencana pendidikan 10 (sepuluh) tahun, panitia pendidikan masyarakat sebagai badan *interdepartemental, a guide for the committees on mass education.*

17 Agustus 1952
Fotokopi, cetakan
1 sampul

1865 *Report of the massachusetts institute of technology foreign student summer project of 1952.*

1 November 1952
Cetakan
1 jilid

1866 Berkas mengenai kursus Bahasa Indonesia untuk pegawai-pegawai negeri bahasa asing dalam mempermudah pekerjaan mereka.

20 November 1952
asli, fotokopi
1 sampul

1867 Surat-surat mengenai perbaikan makam dan rencana penjualan lukisan almarhum Raden Saleh di Bondongan Bogor.

6 Desember 1952 - 31 Desember 1953
asli
5 lembar

1868 Berkas mengenai rencana pendirian Fakultet Kedokteran di Makasar.

27 Februari - 2 Nopember 1953
asli, pertinggal
1 sampul

1869 Surat-surat mengenai pengiriman pegawai untuk mengikuti kongres internasional dalam bidang kesehatan.

22 Mei - 10 Juli 1953

asli, pertinggal
3 lembar

1870 Berkas mengenai kedatangan tamu Dr. Hugh R. Leavell dan James Stevens Simmons, M.D dari Harvard School of Public Health, Amerika.

1 Desember 1953 - 6 Januari 1954
asli, pertinggal
1 sampul

1871 Surat dari Kepala Djawatan Pengadjaran kepada Sekretaris Perdana Menteri mengenai ujian bahasa Indonesia, beserta lampiran.

2 - 6 Januari 1954
asli
1 sampul

1872 Surat-surat mengenai Konferensi Unesco.

4 Januari - 19 Oktober 1954
asli, pertinggal
1 sampul

1873 Berkas mengenai diklat keuangan tentang pendidikan calon staf Indonesia untuk *Nasionale Handelsbank N.V.*

11 Februari - 30 April 1954
asli
1 sampul

1874 Kumpulan Mosi DPRD mengenai desakan kepada pemerintah untuk segera mendirikan gedung-gedung sekolah.

19 Februari 1954 - 8 Januari 1955
asli
1 sampul

1875 Berkas mengenai pandangan tentang kebudayaan untuk pertimbangan Konferensi Kepala - Kepala Perwakilan RI.

17 Maret 1954
copy
1 sampul

1876 Surat dari Ghajan kepada Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengenai pengaduan masalah uang perguruan (uang pemerintah, uang sekolah, dll).

27 & 29 Agustus 1954

tembusan
2 lembar

1877 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tentang Perguruan Tinggi Pendidikan Guru.

01 September 1954
salinan
4 lembar

1878 Surat-surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tentang peraturan khusus pegawai administrasi.

6 September - 6 Nopember 1954
salinan
1 sampul

1879 Surat pernyataan Serikat Buruh Universitet Indonesia mengenai pengangkatan presiden dan sekretaris Universitet-Indonesia serta otonomi universitet-Indonesia.

07 Oktober - 20 November 1954
tembusan
5 lembar

1880 Resolusi Kongres Kebudayaan Nasional Pancasila (KNP) ke I terkait kebudayaan.

26 Desember 1954
tembusan
1 lembar

1881 Surat dari Perdana Menteri kepada Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia mengenai permintaan untuk menjadi penasehat diskusi besar masalah demoralisasi pelajar beserta lampiran.

7 Januari - 22 Februari 1955
asli, pertinggal
4 lembar

1882 Surat-surat mengenai kegemparan di sekitar sekolah Tionghoa (Chung Hoa School) di Tangerang.

15 Januari - 16 April 1955
asli
8 lembar

1883 Berkas mengenai resolusi Kongres Persatuan Guru Sekolah Tehnik Pertama tentang syarat menjadi kepala sekolah dan kedudukan guru-guru.

14 Mei 1955 - 21 Agustus 1956

asli, salinan, pertinggal
1 sampul

1884 Surat dari Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Perdana Menteri mengenai belum bisa menghadiri undangan The First National Spartakiade di Tsjekoslovakia.

17 Juni - 3 Juli 1955
asli
4 lembar

1885 Kumpulan mosi DPRD mengenai pakaian olahraga bagi murid wanita.

1 September - 21 September 1955
asli
3 lembar

1886 Surat dari Sekretaris Umum Lembaga Bahasa dan Budaya kepada Kepala Bagian Urusan Pegawai Kementerian PP&K mengenai pengangkatan anggota komisi istilah.

27 Oktober & 17 Nopember 1955
tembusan
2 lembar

1887 Surat pernyataan anggota DPRD Sementara Maluku tentang pencabutan penandatanganan mosi dan pengiriman utusan daerah ke Kongres Bahasa Indonesia.

02 November 1955
tembusan
2 lembar

1888 Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. 377/P.M./1958 tentang Akademi Ilmu Statistik.

1958
salinan
1 sampul

1889 Berkas mengenai kuesioner latihan jabatan/kursus Pengawasan Keuangan Negara I/58 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI.

01 November 1958
asli
1 sampul

1890 Berkas mengenai kepengurusan Yayasan Namarina (sekolah seni tari dan gerak badan).

13 Januari 1959
asli
1 sampul

1891 Surat dari Perdana Menteri kepada Gubernur Sulawesi mengenai kebutuhan biaya untuk perbaikan jalan-jalan dan sekolah-sekolah rakyat di kabupaten Makasar.

19 Januari 1959
asli, pertinggal
2 lembar

1892 Berkas mengenai Seminar Pancasila ke I 16-20 Februari 1959 di Yogyakarta.

18 - 20 Februari 1959
Fotokopi
1 sampul

1893 Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. 170/P.M./1950 tentang susunan Dewan Film Indonesia.

29 April 1959
salinan
4 lembar

1894 Berkas mengenai *International Congress of Administrative Sciences.*

20 Mei 1959
asli
1 sampul

d. Kesehatan

1895 Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan tentang pengujian kesehatan pegawai supaya mendapat pemberhentian dari dinas berhubung dengan penyakit (*ontslag wegens zi ekte*), beserta lampiran berbahasa Belanda.

16 Januari 1950
Fotokopi
2 lembar

1896 Surat-surat dari Kementerian Kesehatan mengenai uang tunjangan *malaria fellowship* bagi dokter-dokter yang dikirim ke Pakistan, India dan Thailand.

9 - 24 Januari 1951
tembusan
4 lembar

1897 Surat-surat dari Kementerian Kesehatan mengenai Inspeksi kesehatan dan urusan staf "K" tentang pemeliharaan kesehatan para bekas pejuang yang ditampung di asrama rehabilitasi dan petunjuk pengongkosannya.

14 April - 11 Mei 1951
asli, tembusan
5 lembar

1898 Surat dari Kementerian Kesehatan kepada Perdana Menteri mengenai Status Rumah Sakit "Pantirogo" di Kadipolo dan penyerahan Rumah Sakit "Pantirogo" dan "Surakarta" kepada Kota besar Surakarta.

30 Januari - 5 Mei 1952
tembusan
5 lembar

1899 Berkas mengenai pemberian persekot-kerja kepada Kementerian Kesehatan untuk pemeliharaan kesehatan para pengungsi dari daerah-daerah yang keamanannya terganggu di Jawa Barat.

2 Februari 1952 - 14 Oktober 1954
tembusan
1 sampul

1900 Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan peraturan-peraturan poliklinik kesehatan.

05 Maret 1952
salinan
3 lembar

1901 Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan tentang penyerahan pengurusan (*beheer*) Rumah Sakit Negara di Bukittinggi.

26 Maret 1952
tembusan
1 lembar

1902 Surat dari Jawatan Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian salinan laporan tentang rumah sakit gila di desa Ngemplak (Margojoso) Karesidenan Pati.

31 Maret & 16 Mei 1952
asli
2 lembar

1903 Surat dari Pemangku Jabatan Gubernur Sunda Kecil kepada Menteri Dalam Negeri mengenai meninggalnya orang-orang Bajo daerah Sagu yang terjangkit malaria, kudis dan kelaparan.

15 Juli 1952

asli
5 lembar

1904 Berkas mengenai rencana pembentukan yayasan penyantun penderita cacat karena perjuangan kemerdekaan.

22 Agustus - 4 Nopember 1952
asli
1 sampul

1905 Surat-surat dari Kementerian Kesehatan mengenai penempatan dokter bangsa asing di Sulawesi Selatan.

5 Februari - 22 Desember 1953
tembusan
4 lembar

1906 Berkas mengenai kedudukan dokter pemerintah dan usaha pemerintah untuk mempertinggi derajat kesehatan rakyat.

23 Desember 1953 - 16 Desember 1954
asli, fotokopi
1 sampul

1907 Surat-surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang tempat pendidikan pembantu perawatan.

4 Januari - 24 Desember 1955
salinan
1 sampul

1908 Surat-surat dari Kementerian Sosial mengenai daftar dokter-dokter majelis penguji kesehatan pegawai (*Keuringsraden*) dan dokter-dokter penguji tersendiri (*Allenkeurende Geneesheren*) di Indonesia tahun 1955.

31 Maret - 11 Mei 1955
asli
1 sampul

1909 Berkas dari Kementerian Kesehatan mengenai RPP untuk merubah "*Verdovende Middelen Ordonantie* ".

28 Juli 1955 - 13 Mei 1958
asli, tembusan
1 sampul

1910 Surat dari Serikat Buruh Obat kepada Menteri Keuangan mengenai tuntutan pembebasan obat-obatan dari tambahan pembayaran import.

25 Oktober 1955
tembusan
2 lembar

1911 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Kesehatan mengenai rencana pembangunan gedung-gedung kesehatan di daerah.

29 Nopember 1955 - 5 Januari 1956
asli, pertinggal
1 sampul

1912 *Plan of Operation Made Under The Basic Agreement beetwen The World Health Organization and The Government of Republic of Indonesia for Provision of technical advisory assistance*

13 - 20 Juni 1956
tembusan
1 sampul

1913 Surat dari Kepala Lembaga Radiologi Kementerian Kesehatan kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian tugas lembaga radiologi, rencana untuk radio-aktivitet dan tenaga atom, beserta lampiran.

16 - 21 Nopember 1956
asli,Fotokopi
1 sampul

1914 Berkas mengenai tindakan-tindakan pemerintah di bidang kesehatan berhubung dengan kegentingan internasional.

23 Nopember 1956 - 16 Januari 1957
asli
1 sampul

1915 Berkas mengenai kemungkinan pengiriman dokter - dokter ahli dermatology ke XI intern. *Congres of dermatology* di Stockholm atas biaya pemerintah RI.

22 Desember 1956 - 24 Januari 1957
asli
1 sampul

1916 Surat - surat mengenai permohonan persetujuan pengiriman utusan RI ke Kongres TBC di Moskow.

16 - 27 Mei 1957
asli
3 lembar

1917 Surat - surat mengenai *first Asiatic congress of obstertrics and cynaecology* di Tokyo.

10 Juli 1957
asli
3 lembar

1918 Surat dari Kementerian Kesehatan kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai pembatalan maksud merubah Undang-undang No. 10 th. 1951 tentang mengatur tenaga dokter partikelir dalam keadaan genting.

31 Agustus 1957
tembusan
2 lembar

1919 Berkas mengenai panitya negara urusan pembasmian malaria.

24 Januari 1958 - 17 September 1959
asli, tembusan
1 sampul

1920 Surat dari Panitya Pekan Olah Raga Antar Kementerian (Panitya PORAK) mengenai penyerahan panji/bendera pemerintahan agung kepada wakil-wakil rombongan PORAK 1958 dan acara gerak jalan PORAK 1959.

23 Agustus 1958 dan 20 Agustus 1959
asli, tembusan
2 lembar

1921 Surat Edaran dari Menteri Kesehatan RI Kepala Bagian Kedokteran Sosial Nomor. 67385/KS mengenai perubahan batas gaji mengenai pengujian kesehatan terhadap pegawai negeri

26 Maret 1959
asli
1 lembar

1922 Surat dari Menteri Pembangunan kepada Menteri Muda Perindustrian Rakyat mengenai Surat Keputusan Perindra hal penyerahan semua urusan pembuatan obat-obatan dan alat-alat kedokteran kepada Departemen Kesehatan.

30 September 1959
asli
1 lembar

e. Bantuan Sosial

1923 Berkas mengenai permintaan bantuan kepada rakyat yang ada di Kabupaten Karo karena rumah rusak akibat revolusi.

28 Juni 1950
asli
3 lembar

1924 Surat-surat mengenai permohonan penggantian uang pemakaman Dr. Setyabuddhi kepada negara karena dianggap sebagai seorang nasionalis yang berjasa kepada bangsa Indonesia.

27 September 1950 - 3 April 1951
asli
1 sampul

1925 Surat dari Kepala Kantor Besar Badan Pemupuk Bekas Anggota Angkatan Perang RI (BP. BAAPRI) kepada Direktur BRN pusat mengenai permohonan bantuan untuk melaksanakan rencana pekerjaan tahun 1951 bagi para bekas gerilya.

11 Desember 1950 & 15 Februari 1951
tembusan
2 lembar

1926 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan RI mengenai permintaan kredit untuk mengurus pengungsian di Jawa Barat, beserta lampiran.

26 Februari 1951
asli
1 sampul

1927 Surat Keputusan Menteri Sosial RI tentang peraturan sementara mengenai pemberian subsidi untuk menyokong usaha partikulir dalam lapang kemasyarakatan.

10 Mei 1951
salinan
1 sampul

1928 Surat dari Kementerian Sosial kepada Sekretariat Staf K Pusat mengenai permohonan bantuan uang untuk panitia penyelesaian gerilya di Minahasa, beserta lampiran.

16 Desember 1951 - 30 Januari 1952
asli
8 lembar

1929 Surat-surat mengenai pemberian ganti rugi terhadap korban gerombolan pengacau dan Belanda.

31 Desember 1951 - 4 Juni 1958
Asli
1 sampul

1930 Berkas mengenai permohonan uang mengenai objek-objek staf "K" dalam lingkungan Kementerian Sosial.

5 Mei - 6 Juni 1952
asli
1 sampul

1931 Surat dari Kepala Perbendaharaan Kantor Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri mengenai bantuan/sumbangan dalam rangka penyusunan buku pedoman tahun 1954.

19 Februari - 24 Maret 1954
asli
1 sampul

1932 Surat dari N.V. Handel-Maatschappij, Serikat Perekonomian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai permohonan bantuan bagi bekas pejuang, korban gerombolan Sumatra Utara Medan.

30 Maret - 13 Juli 1954
asli
3 lembar

1933 Surat-surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan mengenai kebutuhan uang guna membantu korban bencana banjir di Kalimantan Barat dan di Kabupaten Batang Hari.

24 Maret & 7 Mei 1955
asli
2 lembar

1934 Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai permohonan bantuan kredit bagi pengendara becak di Medan sebagai usaha menciptakan lahirnya kesejahteraan masyarakat, beserta lampiran.

28 Maret - 2 Mei 1955
asli
4 lembar

1935 Surat dari Panitia Korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan kepada Wakil Perdana Menteri mengenai permohonan bantuan sosial bagi para korban perjuangan terutama kepada para janda dan yatim piatu, beserta lampiran.

10 - 12 Desember 1955
asli, fotokopi
1 sampul

f. Transmigrasi dan Pembangunan Masyarakat Desa

1936 Berkas mengenai keadaan transmigranten di Lampung.

22 Januari 1951 - 26 Mei 1952
asli, tembusan
1 sampul

1937 Berkas mengenai pengaduan Koch dan Suermondt tentang pindahan-pindahan dari para bekas pejuang di Malang.

14 Juni 1951 - 18 Maret 1952
asli
1 sampul

1938 Surat-surat mengenai situasi daerah transmigrasi di Sumatra Selatan.

11 Januari - 25 Agustus 1952
asli
8 lembar

1939 Surat-surat mengenai permohonan transmigrir keluar Jawa karena kesukaran ekonomi.

4 Februari - 21 Maret 1952
asli
4 lembar

1940 Surat-surat mengenai peraturan tentang hak tanah untuk para transmigran.

24 Maret - 6 November 1952
salinan
1 sampul

1941 Surat-surat mengenai pertentangan antara anggota CTN dan BRN di Gadingredjo Lampung.

26 Maret - 4 September 1952
asli
1 sampul

1942 Berkas mengenai pelaksanaan transmigrasi BRN dan CTN.

07 April - 23 Agustus 1954
asli
1 sampul

1943 Berkas mengenai larangan menggunakan alat - alat angkatan perang bagi para transmigranten.

17 April - 9 Juni 1952
asli
8 lembar

1944 Berkas mengenai penempatan transmigrasi baru yaitu anggota pencak silat di Way Tenong.

19 Agustus- 22 Nopember 1952
tembusan
6 lembar

1945 Serie SK tentang pembentukan kantor Transmigrasi Tjabang Pasaman di Simpang Ampat dan Batahan di Desa Baru Sumatra Tengah, Daerah Istimewa Kutai; perubahan sifat Kantor Transmigrasi Cabang Sulawesi Utara di Manado dan Kantor transmigrasi Perwakilan Propinsi Kalimantan.

25 Agustus 1952 - 6 Juli 1953
tembusan, fotokopi
6 lembar

1946 Notulen rapat transmigrasi C.T.N tanggal 26-27 September 1952 di tempat R.D. Kartasasmita Direktur BRN Pusat di Kebayoran tentang keadaan transmigrasi C.T.N yang telah dilaksanakan maupun yang belum.

30 September - 12 Nopember 1952
asli
1 sampul

1947 Berkas mengenai laporan BRN Lampung bulan September 1952 tentang transmigrasi bekas pejuang bersenjata.

1 Oktober - 14 Nopember 1952
asli
1 sampul

1948 Surat dari BRN Pusat kepada Menteri Dalam Negeri mengenai penempatan ex pejuang CTN dan tentara dalam usaha-usaha perkreditan desa.

20 Oktober 1952
tembusan
2 lembar

1949 Berkas mengenai laporan perkembangan transmigrasi "Domuga" di Sulawesi-Utara.

10 Januari - 24 Agustus 1953
asli
1 sampul

1950 Surat Keputusan Menteri Sosial RI tentang tugas dan susunan Jawatan Transmigrasi.

17 Februari 1953

Fotokopi
6 lembar

1951 Berkas mengenai risalah rapat koordinasi-transmigrasi dan soal bantuan luar negeri mengenai transmigrasi.

4 - 27 April 1953
pertinggal
1 sampul

1952 Surat dari Ketua Panitia Transmigrasi dan Umum Marga Madang Suku 1 kepada Perdana Menteri mengenai pengiriman notulen dan keputusan-keputusan sidang Dewan Panitia Transmigrasi Umum.

8 - 24 juli 1953
asli
7 lembar

1953 Berkas mengenai rencana penempatan 18.000 keluarga (90.000 jiwa) transmigran tahun 1954.

8 - 22 Desember 1953
Fotokopi
1 sampul

1954 Laporan mengenai usaha-usaha Panitia Penampungan ex Tawanan SOB dari Mei s/d Desember 1953.

08 Februari 1954
asli
5 lembar

1955 Surat dari Panitya Kerja Pemulihan Keamanan Sulawesi kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai rencana transmigrasi ex tahanan SOB.

29 Juni - 6 Juli 1954
asli
3 lembar

1956 Berkas mengenai "Working Committe Transmigration".

14 - 29 Juli 1954
asli, fotokopi
1 sampul

1957 Berkas mengenai rencana 5 (lima) tahun transmigrasi dan uraian yang bernama "Menyusun Transmigrasi".

10 Agustus 1954 - 16 Januari 1956
asli

1 sampul

1958 Surat dari Perancang Arsitek dan Arsitektur V Jawa Timur kepada Perancang Pembangunan RI-PBB mengenai pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

01 Desember 1954
asli
1 lembar

1959 Surat-surat mengenai perbaikan jalan-jalan dan pembangunan air bersih di Padangsidempuan (Tapanuli Selatan)

11 Nopember - 5 Desember 1955
pertinggal
3 lembar

1960 Surat dari Kementerian Sosial Jawatan Transmigrasi Pusat kepada Perdana Menteri mengenai peraturan Jawatan Transmigrasi tentang perlengkapan para vak.teknis dan rombongan yang harus melakukan tugas di lapangan.

15 - 18 Februari 1956
asli
3 lembar

1961 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR Mohd Ismail Napu tentang kejadian yang dilakukan oleh para transmigranten di daerah Pagujaman-Gorontalo (Sulawesi Utara).

15 Februari - 15 Juni 1956
asli
1 sampul

1962 Rencana pembuatan jalan/Jembatan antara Ci Sereh-Jemasih

02 - 24 Maret 1956
Tembusan
1 Sampul

1963 Keanggotaan Menteri Perburuan pada Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa.

31 Desember 1956 - 16 Juli 1958
Tembusan
1 Sampul

1964 Susunan Organisasi PMD (Pembangunan Masyarakat Desa)

16 Januari 1957 - 9 Juli 1959

Asli
1 Sampul

1965 Berkas mengenai surat keputusan Perdana Menteri RI No. 314/P.M/1958 tentang pemberian tunjangan/uang honorarium bagi pejabat pembangunan masyarakat desa.

29 Juli 1957 - 23 September 1958
Fotokopi
7 lembar

1966 Surat dari Sekretaris Jenderal Menteri Sosial kepada Dirjen Biro Perancang Negara mengenai penyampaian bahan-bahan rencana pembangunan yaitu working-paper tentang persoalan penduduk dan transmigrasi.

Nopember 1957
tembusan
8 lembar

1967 Berkas mengenai Surat Keputusan Biro Pembangunan Masyarakat Desa No. 837/16.c/K-58 tentang pengangkatan guru-guru tidak tetap untuk mengajar para pejabat yang akan melaksanakan program pembangunan masyarakat desa.

1 Nopember 1957 - 4 Maret 1958
Fotokopi
1 sampul

1968 Berkas mengenai rencana kerja Kementerian Petera Tahun 1957 tentang rehabilitasi jalan.

1 - 2 Nopember 1957
Fotokopi
1 sampul

1969 Laporan keadaan pertanian, peternakan, perindustrian, kerajinan, kesenian, pendidikan, kesehatan daerah transmigrasi tahun 1958.

1958
asli
1 sampul

1970 Berkas mengenai Seminar Pembangunan Masyarakat Desa tanggal 24 Maret 1958

24 Maret 1958
Asli
1 Sampul

1971 Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. 318/P.M/1958 tentang penyelesaian Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah.

5 Juli 1958
salinan
2 lembar

1972 Berkas mengenai penyelidikan dari Kementerian Transmigrasi masalah berkurangnya hasrat rakyat tani (para transmigranten) untuk bercocok tanam.
25 Agustus - 6 Oktober 1958
pertinggal
1 sampul

1973 Kumpulan keputusan kepala daerah mengenai pembangunan masyarakat desa.
11 November - 22 Agustus 1959
Asli, tembusan
1 sampul

1974 Berkas mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai usaha transmigrasi yang akan dijalankan di Kabupaten Sambas.
TT
Fotokopi
4 lembar

1975 Pembukaan tanah untuk transmigrasi oleh yayasan pembukaan tanah transmigrasi (Japeta).
TT
Konsep
2 lembar

5. PARLEMEN

a. Penyelesaian Perundang-undangan

UNDANG-UNDANG

1976 Berkas mengenai UU tentang penetapan UU Darurat No. 14 Tahun 1952 tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan.
16 Desember 1950 - 2 Oktober 1957
asli, tembusan
1 sampul

1977 Berkas mengenai UU Pokok Bank Indonesia.
23 Juli 1951 - 13 Januari 1959
asli, tembusan
1 sampul

1978 Undang - Undang No. 05 tahun 1955 tentang mengubah Undang - Undang No. 09 Tahun 1953, tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas ketua dan bekas anggota DPR RI (lembaran Negara Tahun 1953 No 36).

14 Maret 1955
Copy
2 lembar

1979 Berkas mengenai UU penetapan UU Darurat No. 11 Tahun 1952 tentang perubahan dan penambahan dari *Ordonnantie op de vennootschapsbelasting* 1925 tentang lanjut pungutan pajak.

3 Nopember 1952 - 29 Desember 1953
tembusan
1 sampul

1980 Berkas mengenai pengesahan UU tentang pemungutan pajak *verponding* untuk 1953 dan seterusnya, 1957 dan seterusnya.

6 Juni 1953 - 2 September 1958
tembusan
1 sampul

1981 Berkas mengenai RUU tentang hak khusus hukum acara pidana untuk anggota DPR RI dan perubahan KUHP pasal 333 dan 334.

06 Juli 1953 - 7 Januari 1955
tembusan
1 sampul

1982 Berkas mengenai pengesahan usul UU tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, pengangkutan atau pembawa kawat tembaga dengan tidak mempunyai ijin.

23 November 1953 - 13 Februari 1958
asli, salinan
1 sampul

1983 Berkas mengenai pengesahan usul UU tentang perubahan UU pokok - pokok Pemerintahan Daerah Tahun 1956.

18 Januari 1954 - 12 November 1959
tembusan
1 sampul

1984 Berkas mengenai penetapan UU pembentukan daerah Swatantra tingkat I dan pembentukan daerah swatantra tingkat II Sumatra Tengah, Maluku, Sulawesi, Sumatra Utara, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Irian Barat, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sukabumi, Madiun dan Sumatra Selatan.

23 Februari 1954 - 2 Juli 1959
asli, konsep
1 sampul

1985 Berkas mengenai pengundangan UU No. 71 tahun 1957 dan No 10 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschaappij N.V (BVM).

4 Mei 1954 - 8 Februari 1958
tembusan, konsep, salinan
1 sampul

1986 Berkas mengenai Undang-undang tentang pemberian Bintang dan Tanda - tanda Kehormatan .

25 Agustus 1954 - 18 Agustus 1959
asli
1 sampul

1987 Berkas mengenai pengesahan usul UU tentang perubahan dan tambahan Ordernansi Bea keluar umum.

8 Juli 1854 - 31 Maret 1955
asli, tembusan
1 sampul

1988 Berkas mengenai penyelesaian pekerjaan perundang-undangan kabinet yang lampau.

29 Agustus 1955 - 3 Mei 1958
tembusan, asli, salinan
1 sampul

1989 Berkas mengenai Undang-Undang dan RPP tentang Wajib Militer.

25 Januari 1956 - 21 November 1959
asli
1 sampul

1990 Berkas mengenai pengundangan UU tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

05 Maret 1956 - 26 Juli 1958
asli, salinan
1 sampul

1991 Berkas mengenai pengesahan usul Undang-Undang tentang perubahan canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan perkebunan besar.

07 Maret 1956 - 08 Februari 1958
asli, salinan
1 sampul

1992 Berkas mengenai pengesahan usul undang - undang tentang persetujuan persahabatan antara RI dan kerajaan Afghanistan.

15 Agustus 1956 - 2 April 1959
tembusan
1 sampul

1993 Berkas mengenai UU tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante.

25 September 1956 - 22 September 1959
tembusan, pertinggal
1 sampul

1994 Berkas mengenai UU tentang persetujuan perjanjian persahabatan kebudayaan antara Republik Indonesia dengan Republik Uni Soviet Sosialis, Iran, Mesir dan Cekoslowakia, Afganistan, India.

20 Oktober 1956 - 04 Juli 1959
asli, salinan
1 sampul

1995 Berkas mengenai UU tentang DPRD dan DPD Peralihan.

13 Desember 1956 - 24 Maret 1959
asli
1 sampul

1996 Berkas mengenai UU tentang penerbangan.

23 Januari 1957 - 30 Desember 1958
asli, salinan
1 sampul

1997 Berkas mengenai pengesahan usul UU tentang pembebasan saudara Untung dari pengantian uang.

17 April 1957 - 08 Februari 1958
asli, salinan

1 sampul

1998 Berkas mengenai pengesahan usul UU tentang penempatan tenaga asing.

08 Mei 1957 - 22 Februari 1958
asli, salinan
1 sampul

1999 Berkas mengenai pengesahan Undang - Undang tentang persetujuan Negara RI terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional.

03 Juni - 07 Agustus 1957
tembusan
1 sampul

2000 Berkas mengenai penetapan UU Darurat tentang kenaikan tarif cukai atas bir, gula dan bea masuk atas bir, sebagai UU.

06 Juni 1957 - 08 Oktober 1958
asli, salinan
1 sampul

2001 Berkas mengenai pengesahan UU tentang pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan presiden, jika pesiden berhenti dan berhalangan.

19 Agustus 1957 - 08 Februari 1958
asli, salinan
1 sampul

2002 Berkas mengenai penyusunan Undang-Undang tentang Kenaikan Tarif Uang Rambu.

27 September 1957 - 19 Februari 1959
asli
1 sampul

2003 Berkas mengenai pengesahan UU No. 81 thn 1958 mengenai kedudukan keuangan Anggota, Ketua, dan Wakil Ketua DPR RI.

13 November 1957 - 24 November 1959
asli, tembusan
1 sampul

2004 Berkas mengenai penetapan UU Darurat No. 9 tahun 1954 tentang perubahan nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara, sebagai UU.

05 Desember 1957 - 12 Maret 1958
asli, salinan
1 sampul

2005 Berkas mengenai UU tentang keadaan perang untuk seluruh wilayah RI.

20 Desember 1957 - 27 Desember 1958
asli, salinan
1 sampul

2006 Berkas mengenai pengundangan UU tentang perubahan batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang.

11 Februari - 23 Agustus 1958
tembusan
1 sampul

2007 Berkas mengenai Penetapan UU tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan.

17 Februari 1958 - 17 Oktober 1959
asli
1 sampul

2008 Berkas mengenai penyusunan Undang-Undang tentang penyerahan tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, perbantuan Pegawai Negeri dan penyerahan keuangannya kepada Pemerintah Daerah.

28 Februari 1958 - 31 Maret 1959
asli
1 sampul

2009 Pengesahan Usul UU No. 59 Tahun 1958 tentang ikut serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konferensi Djenewa Tanggal 12 Agustus 1958.

12 Juni - 1 Agustus 1958
tembusan
9 lembar

2010 Berkas mengenai pengesahan usul UU tentang penetapan Bagian - bagian IBW Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1958.

14 Juni & 8 Oktober 1958
tembusan
1 sampul

2011 Berkas mengenai usul UU tentang penetapan untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Statsblad 1916 No. 47.

24 Juli 1958 - 04 Juli 1959
asli, copy
1 sampul

2012 Berkas mengenai perundang-undangan No. 14 tahun 1959 tentang surat perjalanan Republik Indonesia.

24 Juli 1958 - 28 Nopember 1950
asli, tembusan
1 sampul

2013 Berkas mengenai UU tentang penetapan perubahan pasal 45 *Zegelverordening* 1921.

30 Agustus 1958 - 04 Juli 1959
asli, salinan
1 sampul

2014 Berkas mengenai pengesahan usul UU tentang Dewan Perancang Nasional.

6 September - 01 November 1958
asli,salinan
1 sampul

2015 Berkas mengenai usul UU tentang kedudukan keuangan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia.

26 November 1958 - 06 Juni 1959
asli, salinan
1 sampul

2016 Berkas mengenai penetapan UU tentang badan perusahaan produksi bahan makanan dan pembukaan tanah.

10 Januari - 02 Juli 1959
asli, salinan
1 sampul

2017 Berkas mengenai UU tentang peraturan pemberian pensiun dan *onderstand* para anggota tentara angkatan darat.

14 Januari - 14 Februari 1959
asli, salinan
1 sampul

2018 Berkas mengenai UU No.5 tahun 1959 tentang perubahan *regeling Van hot bereep in belastingzeken* .

14 Maret - 11 Juni 1959
asli, salinan
1 sampul

2019 Berkas mengenai UU No. 57 Tahun 1958 tentang perubahan dan penambahan UU Bea Berat Barang.

20 Mei 1952 - 3 Oktober 1958
asli, tembusan
1 sampul

UU DARURAT

2020 UU Darurat No. 32 tahun 1950 tentang perubahan *Tariefordonnantie* (Stbl 1910 No. 628 jo Stbl 1937 No 471).

20 Oktober 1950
salinan
9 lembar

2021 Berkas mengenai UU Darurat No. 16 tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

12 Desember 1951 - 23 April 1953
asli, tembusan
1 sampul

2022 Berkas mengenai UU Darurat tentang pencabutan sifat sebagai alat pembayar yang sah dari uang kertas pemerintah yang dikeluarkan sebelum peralihan dan penyerahan kedaulatan.

23 Desember 1953 - 16 Februari 1955
pertinggal, asli, tembusan
1 sampul

2023 Berkas mengenai rancangan undang-undang darurat tentang perubahan dan tambahan-tambahan pada D.V.G. Reglement perihal derajat ijazah luar negeri.

16 Maret - 7 Desember 1955
asli
1 sampul

2024 Surat-surat mengenai UU Darurat No. 2/1955 (lembaran Negara No. 5/ 1955 mengenai BNI.

3 Januari - 2 Februari 1956
pertinggal, asli
1 sampul

2025 Surat-surat mengenai penyelesaian Undang-Undang Darurat.

25 Januari 1957 - 14 Juni 1958

asli
1 sampul

2026 Berkas mengenai UU Darurat tentang perubahan UU No. 12 tahun 1956 mengenai pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatra Tengah dan pengudangan PP No. 31 Tahun 1957 tentang perubahan peraturan-peraturan tahun 1958.

10 - 13 Agustus 1957
tembusan
1 sampul

RUU

2027 Berkas mengenai RUU tentang penetapan UU Darurat RIS No. 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jaya Raya.

7 Februari 1950 - 8 Februari 1956
asli, tembusan
1 sampul

2028 Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Ketua DPR mengenai RUU tentang pemberian persetujuan kepada perjanjian pinjaman antara pemerintah Kerajaan Nederland dan RIS.

01 April - 20 Oktober 1950
tembusan
8 lembar

2029 Surat dari Presiden RIS kepada Ketua Senat RIS mengenai RUU untuk mengubah Konstitusi Sementara RIS.

24 Juli 1950
konsep
2 lembar

2030 Surat-surat mengenai RUU tentang pembagian tenaga kerja dokter, dokter gigi dan bidan secara rasional, RUU tentang penangguhan pemberian surat izin kepada dokter yang baru lulus dan RUU tentang pengaturan tenaga dokter partikelir.

16 Oktober 1950 - 28 Maret 1951
asli, pertinggal, tembusan
1 sampul

2031 Surat - surat mengenai RUU dan RPP tentang gaji sementara Presiden , Wakil Presiden dan Para Menteri RI.

18 Oktober 1950 - 5 Agustus 1952
asli
1 sampul

2032 Surat-surat mengenai RUU tentang Penetapan berlakunya UU, UU Darurat dan ordonansi - ordonansi mengenai masalah pajak, dikeluarkan sebelum pembentukan NKRI.

11 November - 7 Desember 1950
tembusan, asli, pertinggal
1 sampul

2033 Surat-surat mengenai RUU tentang pembubaran Komisi Urusan Perburuhan.

24 Februari 1951 - 21 November 1953
asli, pertinggal
1 sampul

2034 Surat dari Menteri Perhubungan mengenai RUU tentang Lalu lintas Jalan Raya.

2 Maret 1951 - 12 Juni 1956
asli, tembusan
1 sampul

2035 Surat-surat mengenai RUU tentang Kehakiman berdasarkan Amanat Presiden No. 2259/52/pres tgl 24 Juli 1952.

23 Maret 1951 - 13 September 1952
asli, pertinggal
1 sampul

2036 Daftar RUU dan UU Darurat Tahun 1950 yang belum mendapat persetujuan DPR .

30 Maret - 28 April 1951
tembusan
4 lembar

2037 Berkas mengenai RUU tantang Penetapan UU Darurat No. 6 tahun 51 untuk mengubah Grondhuurordonnantir (Stbl. 1918 No. 88) dan vorstenlandsch grondhuurreglement (Stbl. 1918 No. 20) sebagai UU dan penetapan UU Darurat Nomor 8 tahun 1951 tentang perubahan reglement A yang dilampirkan pada Rechtenerdonnantie, Staatsblad 1931 Nomor 471 (lembaran Negara Nomor 39 tahun 1951) sebagai Undang - undang.

5 April 1951 - 31 Desember 1953
asli, tembusan

1 sampul

2038 Berkas mengenai RUU Tahun 1951 tentang Perjanjian Pinjaman Pertama RI dengan Export-Import Bank of Washington.

21 April 1951 - 2 Februari 1958
asli, tembusan
1 sampul

2039 Surat-surat mengenai RUU tentang penetapan UU Darurat No. 2 1951 tentang Perubahan *Rechtenordonnantie* (Sbld 1882 No. 240 Jo Sbld 1931 No. 471) sebagai UU.

11 Mei 1951 - 5 Februari 1952
asli, tembusan
1 sampul

2040 Berkas mengenai RUU tentang Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

20 Mei - 13 Oktober 1951
tembusan, pertinggal, konsep
1 sampul

2041 Berkas mengenai RUU Larangan merangkap keanggotaan DPR-RI.

2 Juni - 26 September 1951
tembusan
1 sampul

2042 Surat-surat mengenai RUU tentang perubahan UU No. 15 Tahun 1950 untuk penggabungan Kulonprogo dan Adikarto dalam lingkungan DIY menjadi satu Kab. Kulonprogo.

24 September - 13 Oktober 1951
tembusan
1 sampul

2043 Surat dari Ketua DPR RI kepada Menteri Kehakiman mengenai RUU tentang Peraturan untuk menghadapi kemungkinan hilangnya surat-surat putusan /pemeriksaan pengadilan.

28 November - 3 Desember 1951
tembusan
3 lembar

2044 Surat-surat mengenai RUU tentang Penetapan UU Darurat No. 7 tahun 51 tentang memperpanjang waktu berlakunya aturan hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 ordonnantie mengenai deviezen (Stbl. 1948 No. 141 untuk tahun 1951) sebagai UU.

8 Desember 1951 - 4 Mei 1954
asli
1 sampul

2045 Berkas mengenai RUU tentang penetapan UU Darurat No. 24 Tahun 1950 tentang peraturan tambahan Perjalanan ke luar Negeri sebagai UU.

17 Desember 1951 - 19 Februari 1952
asli, tembusan
1 sampul

2046 Berkas mengenai pengesahan RUU tentang penunjukkan Djawatan Regi Garam sebagai perusahaan I.B.W. dengan nama baru Perusahaan Garam dan Soda Negeri.

21 Desember 1951 - 26 September 1952
tembusan, pertinggal
1 sampul

2047 Berkas mengenai usul UU tentang pemindahan hak tanah-tanah dan barang-barang tetap yang berlaku kepada hukum Eropa, sebagai UU.

01 Maret 1952 & 19 November 1957
asli, salinan
1 sampul

2048 Berkas mengenai RUU tentang perubahan atas ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925.

07 Mei - 11 Agustus 1952
asli, tembusan
1 sampul

2049 Berkas mengenai RUU tentang penetapan UU Darurat No. 31 tahun 1950 tentang penambahan dan perubahan peraturan cukai dan bea berat barang sebagai UU.

10 Mei 1952 - 8 Oktober 1956
tembusan, asli, pertinggal
1 sampul

2050 Berkas mengenai RUU tentang pembentukan kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa.

29 Mei 1952 - 17 Maret 1954
tembusan, pertinggal
1 sampul

2051 Seri penyusunan RUU tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan Konstituante, anggota DPRDS, dan Panitia Pemilihan Umum.

24 Juli 1952 - 26 Oktober 1959
asli, tembusan
1 sampul

2052 Surat-surat mengenai RUU Penetapan UU Darurat No. 30 tahun 1950 tentang Penggantian kerugian anggota senat RIS sebagai UU.

6 Agustus 1952
asli
3 lembar

2053 Surat-surat mengenai RUU tentang persetujuan dalam bidang ekonomi dan keuangan dengan negara-negara lain.

25 September 1952 - 2 Juni 1953
tembusan
1 sampul

2054 Berkas mengenai RUU tentang pensiun dan *orderstand* anggota APRI dan anggota Tentara AD.

08 Oktober 1952 - 16 Maret 1955
asli, konsep
1 sampul

2055 Berkas mengenai RUU tentang perubahan-perubahan dalam UU no. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan tentara.

09 Oktober 1952 - 23 Januari 1953
asli, konsep
1 sampul

2056 Berkas mengenai RUU tentang peraturan putusnya hubungan kerja.

26 Desember 1952 - 25 Maret 1953
asli, konsep
1 sampul

2057 Berkas mengenai RUU serta penjelasannya tentang peraturan-peraturan mendirikan perusahaan-perusahaan.

29 Januari - 05 Februari 1953
asli, konsep
1 sampul

2058 Berkas mengenai RUU tentang penetapan berlakunya lagi *Zoutmonopolie-ordonnantie* di daerah Renville.

10 - 23 Maret 1953
asli, salinan

1 sampul

2059 Surat-surat mengenai usul perubahan *staatsblad* 1904 No. 241, *Staatsblad* 1915 No. 2 dan Staatsblad 1915 No. 3.

16 Maret & 23 Maret 1953
tembusan, asli
1 sampul

2060 Berkas mengenai RUU tentang penetapan tambahan anggaran belanja tahun 1953 dan tahun 1956

1 Agustus 1953 - 09 Juni 1958
salinan
1 sampul

2061 Berkas mengenai RUU tentang Gerombolan bersenjata sebagai perkumpulan yang terlarang.

20 Oktober 1953 - 29 September 1956
asli, tembusan, pertinggal
1 sampul

2062 Berkas mengenai RUU tentang undian.

14 Januari - 11 Februari 1954
tembusan
1 sampul

2063 Berkas mengenai RUU kewajiban Barisan Sukarela dalam tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban umum.

11 Februari 1954 - 29 September 1956
tembusan
1 sampul

2064 Berkas mengenai RUU tentang penghapusan ordonansi *staatsblad* 1946 Tahun 1946 No. 115 dan pembebasan bea materai, pajak pendapatan dan pajak perseroan untuk hal-hal tertentu tentang pembesaran modal dari perseroan dan persekutuan.

24 Februari 1954 - 31 Desember 1956
tembusan, pertinggal
1 sampul

2065 Berkas mengenai RUU tentang pengesahan perjanjian percegahan pajak ganda antara Indonesia dan Belanda

26 Februari 1954-29 November 1955
asli, konsep

1 sampul

2066 Berkas mengenai RUU tentang pajak, retribusi dan pembentukan otonomi daerah.

13 - 24 Maret 1954
tembusan
1 sampul

2067 Berkas mengenai RUU tentang Pertahanan Negara RI.

23 Maret - 4 September 1954
tembusan
1 sampul

2068 Berkas mengenai pengesahan usul UU tentang perubahan dan tambahan ordonansi bea statistik.

06 Mei 1954 - 21 Maret 1955
tembusan
1 sampul

2069 Berkas mengenai Rancangan Undang - Undang tentang Protokol pembubaran Uni Indonesia Belanda.

26 Agustus 1954
asli
1 sampul

2070 Berkas mengenai RUU Darurat tentang amnesti dan abolisi.

17 September - 13 Desember 1954
tembusan
1 sampul

2071 Berkas mengenai RUU tentang perubahan UU No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

23 Desember 1954 - 22 Maret 1956
tembusan
1 sampul

2072 Berkas mengenai RUU tentang perubahan tarif upah untuk balai harta peninggalan.

23 Desember 1954 - 05 Juli 1957
asli, konsep
1 sampul

2073 Berkas mengenai RUU tentang perubahan *Krosok Ordonnantie* 1937 (Pertanian) (Stbl. 1937 No. 604).

30 Desember 1954
pertinggal
1 sampul

2074 Berkas mengenai RUU Darurat tentang susunan, kekuasaan serta acara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

27 Januari 1955-29 September 1956
asli, konep
1 sampul

2075 Berkas mengenai RUU tentang perubahan nama universitet dan universitit, Fakulteit, fakultet dan fakultie menjadi Universitas dan Fakultas.

1 Februari 1955 - 22 Maret 1956
tembusan, pertinggal
1 sampul

2076 Berkas mengenai RUU tentang penanaman modal asing.

22 Februari 1955 - 04 Desember 1958
asli, konsep
1 sampul

2077 RUU tentang penetapan UU Darurat No. 3 Tahun 1955 tentang penunjukan Pelabuhan Palembang menjadi Perusahaan Negara.

15 Maret - 9 April 1955
pertinggal
1 sampul

2078 Berkas mengenai RUU tentang Peradilan Pidana kusus dan pemilihan harta benda.

19 April 1955 - 18 Oktober 1956
asli
1 sampul

2079 Berkas mengenai RUU tentang perubahan Reglemen Indonesia yang diperbaharui.

20 Juni - 11 Juli 1955
tembusan
1 sampul

2080 Berkas mengenai RUU tentang berlakunya *ordinnantie noodvoorzieningen overschrijving en teboekstelling* 1948 (Agraria).

19 Juli 1955 - 29 September 1956

pertinggal, tembusan
1 sampul

2081 RUU tentang penetapan UU Darurat No. 1 Tahun 1955 tentang pengakuan kredit guna pembangunan perindustrian dalam sektor partikulir sebagai UU.
03 September 1955
pertinggal
1 sampul

2082 Berkas mengenai RUU dalam lingkungan Kementerian Kehakiman.
3 - 15 Oktober 1955
tembusan
1 sampul

2083 Berkas mengenai RUU tentang pengawasan orang asing.
1 November 1955 - 29 September 1956
asli, salinan
1 sampul

2084 Berkas mengenai RUU tentang penyelesaian darurat Palitan.
01 November 1955 - 29 September 1956
tembusan
1 sampul

2085 Berkas mengenai berbagai RUU tentang Pemberantasan Korupsi.
1956 - 19 Mei 1958
salinan
1 sampul

2086 Berkas mengenai RUU tentang penetapan UU Darurat No. 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada PNS.
19 Januari 1956 - 22 Februari 1958
tembusan
1 sampul

2087 Berkas mengenai RUU tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang muka pada BI lebih dari pada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 UU Pokok Bank Indonesia 1953.
2 Februari 1956 - 6 Februari 1957
tembusan, pertinggal
1 sampul

2088 Berkas mengenai RUU tentang Likuidasi Lembaga Tanah Partikelir.
3 & 7 Maret 1956

asli
1 sampul

2089 Berkas mengenai usul UU tentang peraturan-peraturan mengenai kedudukan anggota angkatan perang dalam dinas ketentaraan sesudah akhir tahun 1955.
31 Maret 1956- 23 Juli 1958
asli, salinan
1 sampul

2090 Berkas mengenai RUU tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Bali, NTB, NTT.
2 Juni - 09 Agustus 1958
tembusan, asli
1 sampul

2091 Berkas mengenai RUU tentang anggota angkatan perang berdasarkan ikatan dinas sukarela (militer sukarela).
13 Juni 1956- 23 Juni 1958
tembusan, pertinggal
1 sampul

2092 Berkas mengenai RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Jakarta
28 Juni 1956 - 28 November 1959
asli
8 lembar

2093 Berkas mengenai RUU tentang pembentukan Daerah otonom propinsi Irian Barat.

16 Juli 1956
tembusan
1 sampul

2094 Berkas mengenai RUU tentang Perguruan tinggi.
24 Agustus 1956 - 17 Nopember 1958
asli, pertinggal
1 sampul

2095 Berkas mengenai RUU tentang Repelita (1956-1960).
03 September 1956 - 3 September 1958
asli, Konsep, pertinggal, fotokopi
1 sampul

2096 Berkas mengenai RUU tentang persetujuan konfensi hal-hak politik wanita.

2 Oktober 1956 - 13 Agustus 1958
tembusan, asli
1 sampul

2097 Berkas mengenai RUU tentang pajak pendapatan pengarang.
09 Januari 1957 - 19 Desember 1958
salinan
1 sampul

2098 Berkas mengenai RUU tentang minyak.
30 Agustus 1956 - 22 Februari 1957
konsep
1 sampul

2099 Surat-surat mengenai RUU tentang penetapan UU Darurat jumlah anggota DPRD Kotapraja Jakarta Raya.
29 April 1957
asli
1 sampul

2100 Berkas mengenai RUU Penetapan UU Darurat No. 7 Tahun 1957 tentang Dewan Nasional.
30 April 1957 - 22 Juli 1958
asli, tembusan
1 sampul

2101 RUU tentang penetapan UU Darurat No. 10 tahun 1955 tentang pemungutan sumbangan dan pabrikan - pabrikan rokok bagi Badan Urusan Tembakau (Krosok Cantrale).
8 Mei 1957 - 25 Juni 1958
pertinggal
1 sampul

2102 Berkas mengenai RUU tentang penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pajak negara.
10 Mei 1957- 04 Juli 1959
salinan
1 sampul

2103 Berkas mengenai RUU tentang Kewarganegaraan RI dan Persetujuan perjanjian dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RRT.

4 Maret 1954 - 09 Juli 1959
asli, konsep
1 sampul

2104 RUU tentang penambahan jumlah banyaknya Jaksa Agung Muda pada Mahkamah Agung.

03 - 23 Februari 1958
pertinggal
3 lembar

2105 Berkas mengenai Pengesahan Usul UU tentang berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 RI tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah RI dan mengubah Kitab Undang - Undang Hukum pidana.

18 Juli - 24 September 1958
pertinggal
1 sampul

2106 Berkas mengenai rancangan Undang-undang tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional No. 105 mengenai penghapusan kerja paksa.

20 Nopember 1958 - 26 Nopember 1959
asli
1 sampul

2107 RUU tentang pembatalan hak - hak Pertambangan.

10 Februari 1959
tembusan
1 sampul

2108 Berkas mengenai RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makasar.

1 Juli - 4 Desember 1959
tembusan
1 sampul

RUU DARURAT

2109 Surat-surat mengenai RUU Darurat tentang Surat Perjalanan Haji.

7 April - 8 Mei 1951
asli
1 sampul

2110 Berkas mengenai RUU Darurat tentang Pembentukan DPRD Sementara dan DPD.

18 Mei - 5 Desember 1951
asli, pertinggal
1 sampul

2111 Surat-surat mengenai RUU Darurat tentang Penetapan berlakunya UU No.19 Tahun 1950 untuk keanggotaan TNI AL/AU.

21 Juni - 28 Juli 1951
pertinggal, salinan
5 lembar

2112 Berkas mengenai RUU Darurat tentang Pembelanjaan Pensiun.

3 Februari 1953 - 15 Oktober 1955
tembusan
1 sampul

2113 Berkas mengenai RUU Darurat tentang tindak-pidana imigrasi.

09 Desember 1954 - 16 Maret 1955
asli, konsep
1 sampul

2114 Surat-surat mengenai RUU Darurat tentang pertubahan pasal tentang penerimaan anggota angkatan perang

6 - 18 Mei 1955
tembusan, asli
1 sampul

2115 Berkas mengenai RUU Darurat tentang BRI, Bank Exim, BNI, dan Bank Tani dan Nelayan.

07 Juni 1955- 30 Desember 1959
asli, konsep
6 lembar

2116 Berkas mengenai RUU Darurat tentang perkumpulan koperasi.

14 Desember 1955 -27 Oktober 1958
asli, konsep
1 sampul

2117 Berkas mengenai RUU Darurat tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatra Selatan.

15 September - 15 September 1956
asli, konsep
1 sampul

2118 RUU Darurat tentang Perobahan dan Penambahan Ordonasi pajak rumah tangga dan pajak radio.

29 Juli - 10 Agustus 1957
asli
1 sampul

KEPPRES

2119 Surat dari Sekretaris I Presiden kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai Keputusan Presiden RI No. 58 Tahun 1952 tentang penetapan Kabinet Sukiman-Suwirjo.

25 Februari & 3 Maret 1952
asli
3 lembar

2120 Surat-surat mengenai Keputusan Presiden No. 175 Tahun 1952 tentang Cara Hubungan dan Kerja Sama antara Pemerintah Sipil dan Angkatan Perang.

24 September - 22 Oktober 1952
asli
7 lembar

2121 Berkas mengenai rancangan Keppres tentang pernyataan daerah Karesidenan Aceh (Sumatra Utara) dalam keadaan SO.

30 Oktober 1954 - 6 Mei 1955
salinan
1 sampul

2122 Berkas mengenai penyusunan Keppres RI No 3 Tahun 1955 tentang pernyataan pulau2 Boano, Kelang, Manipa, Haruku, Saparua, dan Nusa Laut pun Kepulauan Aru, Kai, Watubela dan Goram dalam keadaan perang.

22 Desember 1954 - 12 Januari 1955
tembusan
1 sampul

2123 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai Rancangan Keputusan Presiden tentang lapangan pekerjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Dalam Negeri.

11 Juni 1955
asli

1 sampul

2124 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 1957 tentang pemecahan Kementerian Perekonomian Menjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

4 Juni 1957
salinan
2 lembar

2125 Berkas mengenai rancangan Keputusan Presiden tentang Peraturan Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional

2 Nopember 1957 - 13 Nopember 1958
asli
1 sampul

2126 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai Rancangan Keputusan Presiden tentang lapangan pekerjaan Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer.

30 Juli 1958
tembusan
3 lembar

PERATURAN PRESIDEN

2127 Berkas mengenai Peraturan Presiden No.9 Tahun 1959 (lembaran Negara No 127 Tahun 1959) tentang kenaikan gaji pokok serta beberapa jenis tunjangan bagi anggota tentara dan kenaikan pensiun untuk para pensiunan tentara dan janda dan/atau anak yatim / piatunya.

22 Juli - 18 November 1959
pertinggal
1 sampul

2128 Berkas mengenai Pengundangan Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat negeri WNI.

25 Juli - 06 Agustus 1959
tembusan
1 sampul

2129 Berkas mengenai pengundangan Peraturan Presiden RI No, 3, 4, dan 5 tahun 1959 (tentang syarat-syarat bagi kepala daerah; tentang nama jabatan, kedudukan dan penghasilan kepala DI Yogyakarta).

26 Agustus - 2 Oktober 1959
asli, tembusan
1 sampul

PENETAPAN PRESIDEN

2130 Surat-surat mengenai pengundangan Penetapan Presiden RI No 5 tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.

27 Juli 1959 - 5 Agustus 1959
tembusan
9 lembar

2131 Surat-surat mengenai penyusunan Rancangan Penetapan Presiden tentang Pemerintahan Negara.

17 September - 1 Oktober 1959
tembusan
1 sampul

2132 Berkas mengenai Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.

29 September - 23 November 1959
asli
1 sampul

PERATURAN PEMERINTAH

2133 PP No 18 Tahun 1951 tentang perubahan sementara tentang rumah dinas bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan.

05 Maret 1951
asli
2 lembar

2134 Berkas mengenai penyusunan PP tentang Pencabutan kembali PP No.15 Tahun 1952 tentang Staf Keamanan.

17 April 1952 - 31 Mei 1952
asli
1 sampul

2135 Surat dari Perdana Menteri kepada Ketua Panitia Perancang Gaji Pegawai Negeri mengenai PP Nomor 25 tahun 1952 tentang gaji pokok P.G.P. 1948 yang dinaikkan dengan 20%.

23 Mei & 12 Juni 1952
asli

5 lembar

2136 Surat-surat mengenai PP tentang pengeluaran kertas perbendaharaan tahun 1957 dan 1958.

16 Desember 1952 - 2 Mei 1959
tembusan, asli
1 sampul

2137 Seri PP tentang penentuan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

6 Juli 1953 - 7 Desember 1959
pertinggal
1 sampul

2138 Berkas mengenai PP tentang pemilihan DPRD sementara daerah Minahasa.

15 September 1953 - 12 Juni 1954
asli
1 sampul

2139 PP No. 17 Tahun 1954 tentang Dewan Keamanan Nasional.

27 Februari 1954
salinan
1 lembar

2140 Surat surat mengenai PP tentang pemberian tunjangan khusus kepada para Jaksa RI.

12 Maret - 3 April 1956
asli
7 lembar

2141 Berkas mengenai PP tentang penghapusan tanah-tanah partikulir.

21 Agustus 1956 - 29 Maret 1958
asli, tembusan
1 sampul

2142 Berkas mengenai penyusunan PP No 28 Tahun 1956 tentang perubahan dan tambahan PP No 14 tahun 1955 tentang Dewan Keamanan.

3 Oktober 1956 - 26 Januari 1957
salinan
1 sampul

2143 Berkas mengenai Pengundangan Peraturan No. 16 tahun 1959 (lembaran Negara No. 28 tahun 1959) tentang pemberian tunjangan daerah tidak aman.

08 Oktober 1956 - 20 April 1959
tembusan
1 sampul

2144 Berkas mengenai PP No. 22 Tahun 1951 (LN . No 34 / 1951) tentang pemberian tunjangan jabatan.

16 November - 07 Desember 1956
pertinggal
7 lembar

2145 Berkas mengenai PP No. 10 tahun 1957 tentang pemberian tunjangan kejuruan dan PP No. 9 tahun 1958.

13 Februari - 04 April 1957
pertinggal
1 sampul

2146 Berkas mengenai Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1958 tentang mengubah dan menambah ketentuan pangkat guru besar dan presiden Universitas dan Perguruan Tinggi Kementerian PP&K.

23 Februari 1957 - 7 Februari 1959
asli
1 sampul

2147 Berkas mengenai pengundangan PP No. 53 Tahun 1958 tentang mengubah/menambah PP No. 41/1954 tentang kenaikan pensiun dan onderstand untuk bekas Tentara APRI KNIL dan kepada janda dan atau anaknya.

7 Maret 1957 - 3 Oktober 1958
asli
1 sampul

2148 Berkas mengenai PP No. 20 tahun 1957 (lembar Negara No.52 Tahun 1957) tentang penggantian pembayaran uang penginapan dan uang makan di rumah penginapan umum bagi Ketua Konstituante RI.

20 Maret -20 Mei 1957
asli
1 sampul

2149 Berkas mengenai penyusunan PP No. 60 tahun 1957 tentang Pencabutan PP No. 55/1954 tentang penunjukkan/pengangkatan Penguasa - Penguasa Militer.

28 Maret - 21 Desember 1957
asli, pertinggal
1 sampul

2150 Surat-surat mengenai PP tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat di lapangan pertanian, perikanan , kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-daerah Swatantra tingkat I.

19 Juni 1957 - 30 Agustus 1958
tembusan, pertinggal
1 sampul

2151 Berkas mengenai penyusunan PP No. 28 tahun 1957 tentang Penyerahan Urusan Rekonstruksi Nasional kepada Menteri Urusan Veteran.

6 - 13 Agustus 1957
asli
1 sampul

2152 Berkas mengenai penyusunan PP No 44 Tahun 1957 tentang syarat kecakapan, pengetahuan dan cara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah.

20 September - 28 November 1957
tembusan
1 sampul

2153 Surat-surat mengenai PP tentang perubahan PP No. 55 Tahun 1951 tentang peraturan perbaikan pelabuhan.

4 - 14 Desember 1957
tembusan
1 sampul

2154 Berkas mengenai PP No. 7 Tahun 1958 tentang Dewan Bahan Makanan.

17 Desember 1957 - 10 Februari 1958
tembusan, asli
1 sampul

2155 Berkas mengenai penyusunan berbagai PP yang mengatur tentang Militer Sukarela.

30 Desember 1957 - 7 September 1959
tembusan
1 sampul

2156 Berkas mengenai penyusunan PP No 4 Tahun 1958 tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden.

10 - 30 Januari 1958
tembusan
1 sampul

2157 Seri PP tentang pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi.

16 Januari 1958 - 27 April 1959
salinan, tembusan
1 sampul

2158 Berkas mengenai PP tentang pakaian resmi dan pakaian lengkap dan penggunaannya.

31 Januari 1958 - 13 Desember 1958
pertinggal
1 sampul

2159 Surat-surat mengenai PP No. 35 Tahun 1959 tentang perubahan PP No. 11 Tahun 1958 tentang pembentukan Badan Urusan Dagang.

4 Februari - 2 Juni 1958
asli, pertinggal
1 sampul

2160 Berkas mengenai pengundangan PP No. 8 tahun 1958 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan.

04 - 13 Februari 1958
asli, salinan
1 sampul

2161 Surat - surat mengenai PP tentang mengubah PP Nomor 34 tahun 1954 tentang hak kekuasaan untuk memberikan gaji yang tertentu.

10 Februari - 1 April 1958
konsep, tembusan
1 sampul

2162 Surat-surat mengenai perubahan PP No. 61 Tahun 1954 (lembaran negara tahun 1954 No. 107) tentang peraturan mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut.

17 Februari - 25 Maret 1958
tembusan, asli, pertinggal
1 sampul

2163 Surat-surat mengenai PP No. 13 Tahun 1958 tentang pengusahaan tambang timah Belitung.

20 Februari - 12 Maret 1958
asli, tembusan
1 sampul

2164 Surat-surat mengenai PP No. 36 Tahun 1958 kelengkapan PP No. 14 tahun 1958 tentang tarif uang tera.

14 Maret - 2 Juni 1958
tembusan, pertinggal
1 sampul

2165 Seri PP tentang penetapan semua Bank Belanda di bawah penguasaan Pemerintah RI dan pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda.

2 April 1958 - 31 Maret 1959
tembusan, asli, pertinggal
1 sampul

2166 Berkas mengenai PP No. 47 tahun 1957 (lembara negara no. 104 tahun 1957) tentang perizinan pelayaran.

13 Agustus - 12 Mei 1958
tembusan, asli
1 sampul

2167 Berkas mengenai penyusunan PP No. 64 tahun 1958 tentang Badan Koordinasi Intelligence.

3 September - 17 Desember 1958
asli
1 sampul

2168 Berkas mengenai penyusunan PP tentang Perubahan dan Penambahan PP No. 38 tahun 1958 tentang pendaftaran, penyaringan dan pengakuan Veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

11 Desember 1958 - 20 April 1959
tembusan
1 sampul

2169 PP Nomor 7 tahun 1959 tentang kenaikan gaji - pokok menurut "P.G.P.N.-1955" serta perubahan dan penghapusan beberapa jenis tunjangan bagi PN dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, janda dan atau anak yatim piatunya yang menerima pensiun dan atau tunjangan yang bersifat pensiun.

1959
fotokopi
8 lembar

2170 Surat-surat mengenai pengundangan PP No. 11 tahun 1959 tentang lumbung desa.

26 Januari - 18 April 1959
tembusan
1 sampul

2171 Berkas mengenai penyusunan PP tentang Pangkat-pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan.

21 Maret - 4 Juli 1959
tembusan
1 sampul

2172 Surat-surat mengenai PP No. 25 tahun 1959 (lembaran Negara No. 40 tahun 1959) tentang pelaksanaan UU No. 10 tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan.

11 Mei - 1 Juli 1959
tembusan, pertinggal, asli
1 sampul

2173 Surat-surat mengenai penyusunan PP No. 23 tahun 1959 tentang peraturan ujian negara untuk memperoleh gelar universiter bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di luar negeri.

16 Mei - 11 Juni 1959
asli
1 sampul

2174 Berkas mengenai PP No. 26 tahun 1959 tentang pos dalam negeri.

12 Juni - 1 Juli 1959
tembusan, pertinggal
1 sampul

2175 Surat-surat mengenai PP No. 34 tahun 1959 tentang penetapan retribusi untuk ijin ekspor kapok buat lisensi 1956/1957 dan 1957/1958.

6 Juli - 4 Juli 1959
tembusan, pertinggal
1 sampul

2176 PP Pengganti Undang-Undang No. 21 tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

6 Oktober - 18 November 1959
pertinggal
1 sampul

RPP

2177 Seri PP tentang gaji pokok Pegawai Negeri Sipil RI

29 Desember 1950 - 29 Juli 1958
asli
1 sampul

2178 Surat - surat mengenai RPP tentang Peraturan Sementara mengenai penetapan jabatan dan gaji pegawai negeri sipil bukan warga negara.

8 Januari 1951 - 30 Januari 1952
copy
1 sampul

2179 Surat-surat mengenai RPP tentang pembagian beras kepada buruh.

16 Februari 1951
pertinggal
1 sampul

2180 Berkas mengenai RPP tentang tunjangan kepada pegawai negeri dan jandanya yang tidak / belum berhak menerima pensiun.

24 Mei - 05 November 1951
tembusan
1 sampul

2181 Berkas mengenai RPP untuk menambah PP No. 10 tahun 1951 tentang pemberian tunjangan luar biasa kepada tenaga ahli bangsa asing.

11 Juni - 03 Agustus 1951
pertinggal
1 sampul

2182 Berkas mengenai RPP tentang menambah Peraturan Pemerintah No. 4/1951 terkait waktu kerja pegawai.

4 Juli - 25 Agustus 1951
asli, fotokopi
1 sampul

2183 Berkas mengenai RPP tentang tunjangan - tunjangan kemahalan keluarga kepada penerima - penerima pensiun dan *onderstand.*

13 Agustus - 04 September 1951
pertinggal
6 lembar

2184 Berkas mengenai RPP tentang penghasilan partikeler oleh pegawai negeri.

12 Desember 1951 - 25 Februari 1952
salinan
1 sampul

2185 Surat-surat mengenai RPP tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian-kementerian.

15 Desember 1951 - 8 Juli 1953
asli
1 sampul

2186 Berkas mengenai RPP untuk merubah *Algemeene Bepalingen ter uitvoering van het international postbesluit 1948 (internationale postverordening 1948, Staatblad 1949 no. 76).*

27 Desember 1951 - 20 Desember 1952
pertinggal
1 sampul

2187 Surat dari Mentari Pertahanan kepada Dewan Menteri mengenai menarik kembali RPP tentang penetapan gaji dan pendapatan lain untuk anggota - anggota tentara Angkatan Laut.

10 Januari 1952
asli
1 sampul

2188 Surat-surat mengenai penyusunan RPP tentang hukuman jabatan.

9 Februari - 24 Juli 1952
salinan
1 sampul

2189 Surat-surat mengenai penyampaian RPP tentang perubahan Peraturan Penghapusan Barang-Barang karena Busuk, Rusak, Dicuri atau Hilang dari Perhitungan Bendaharawan, nb. beserta lampiran.

20 Februari - 9 April 1952
tembusan
1 sampul

2190 Berkas RPP tentang kedudukan pegawai negeri diluar lingkungan jabatan yang dipangkunya.

31 Juli - 05 September 1952
tembusan, konsep
1 sampul

2191 Surat - surat mengenai revisi PP tentang devisen 1940.

31 Juli - 8 November 1952
asli
1 sampul

2192 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Urusan Pegawai mengenai RPP tentang kenaikan pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan pada bekas pegawai negeri sipil/janda dan/anaknya serta RPP tentang pemberian tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga kepada penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun.

9 Oktober 1952
asli
1 sampul

2193 Berkas mengenai RPP tentang pemberian istirahat kepada buruh wanita karena haid/hamil.

25 November - 5 Desember 1952
asli, fotokopi
7 lembar

2194 Surat - surat mengenai RPP yang mengatur tentang gaji Presiden , Wakil Presiden dan Menteri - menteri, serta ganti rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan, serta ganti rugi yang lain - lain.

12 Februari 1953 - 18 Januari 1956
asli
1 sampul

2195 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengenai RPP tentang ikatan dinas mahasiswa.

13 Februari - 7 September 1953

asli, pertinggal
5 lembar

2196 Berkas mengenai RPP tahun 1955 tentang Dewan Penerbangan.
2 Maret 1953 - 20 Maret 1957
asli, pertinggal
1 sampul

2197 Berkas mengenai RPP tentang istirahat tahunan bagi buruh.
30 April 1953 - 19 Februari 1954
asli, fotokopi
1 sampul

2198 RPP tentang perubahan PP No. 42 tahun 1953 tentang status daerah Kota Manado
3 Juli 1953 - 1 Oktober 1954
tembusan
1 sampul

2199 Surat-surat mengenai RPP tentang pemungutan opsen-opsen atas karet rakyat.
31 Desember 1953 - 3 Desember 1954
asli, pertinggal
1 sampul

2200 Berkas mengenai RPP tentang pembentukan wilayah gabungan Bolaang Mongondow sebagai daerah otonom.
23 Januari 1954
pertinggal
1 sampul

2201 Surat-surat mengenai RPP tentang pendaftaran orang asing.
6 Maret - 29 Oktober 1954
tembusan, pertinggal
1 sampul

2202 Surat-surat mengenai RPP tentang perubahan dalam pasal 31 ayat 1 Sub b Peraturan lalu lintas jalan.
8 - 31 Mei 1954
pertinggal
1 sampul

2203 Surat-surat mengenai RPP tentang perubahan pasal 22 dan 39 dari Postverordening 1935 tentang biaya pengangkutan pos dengan kapal laut dan ganti rugi pos paket.

15 Juni 1954 - 31 Oktober 1955
pertinggal
1 sampul

2204 Berkas mengenai RPP pembentukan daerah propinsi Irian Barat.

17 - 20 Juli 1954
fotokopi
1 sampul

2205 Berkas mengenai RPP tentang pembentukan propinsi Administratif Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

18 Oktober - 16 Desember 1954
pertinggal
1 sampul

2206 Surat - surat mengenai RPP tentang pengawasan terhadap urusan kredit.

27 November - 30 Desember 1954
Copy
1 sampul

2207 Surat-surat mengenai RPP tentang penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sebagai pegawai pencatat balik nama untuk kapal.

27 Desember 1954 - 31 Januari 1955
pertinggal, asli
1 sampul

2208 Berkas mengenai RPP tentang pembentukan kota Ambon sebagai daerah otonom.

30 Desember 1954 - 11 Oktober 1955
tembusan
1 sampul

2209 RPP tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, tentang Panji dan Bendera Jabatan dan tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing.

1955
konsep
1 sampul

2210 Surat-surat mengenai rancangan Peraturan Pemerintah tentang perjalanan dinas luar negeri.

8 Februari - 15 April 1955
tembusan, asli
1 sampul

2211 Surat mengenai RPP tahun 1955 tentang perubahan lebih lanjut *Algemeene Bepalingen ter Uitvoering van de Post Ordonnantie* 1935 (*Postverordening* 1935, *Staatsblad* 1935 No. 721).

28 Mei 1955
asli
3 lembar

2212 RPP tentang Panji-Panji Kepolisian Negara RI.

20 -24 Juni 1955
asli, fotokopi
1 sampul

2213 Surat mengenai RPP tentang perubahan pasal 67 PP No. 9/1954 dalam rangka melancarkan pekerjaan panitia pemilihan.

10 Desember 1955
pertinggal
3 lembar

2214 Berkas mengenai RPP tentang Peraturan Gaji Hakim Republik Indonesia.

30 Desember 1955 - 5 Januari 1956
tembusan, salinan
1 sampul

2215 Berkas mengenai RPP tentang perubahan rayon kemahalan.

11 Januari 1956
pertinggal
1 sampul

2216 Surat dari Sidang Dewan Menteri kepada Menteri Keuangan mengenai RPP tentang Peraturan perjalanan dinas dalam negeri bagi para Menteri.

28 Juni 1956
asli, konsep
7 lembar

2217 Surat-surat mengenai RPP tentang Pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada para tenaga ahli kesehatan di dalam lingkungan Angkatan Perang.

1 September - 28 September 1956
asli
1 sampul

2218 Surat-surat mengenai RPP tentang tambahan PP cukai tembakau.

15 September 1956 - 25 Juni 1958
tembusan, pertinggal, asli
1 sampul

2219 Surat-surat mengenai RPP tentang penyaluran perusahaan-perusahaan dan RPP tentang perizinan mendirikan dan pendaftaran perusahaan.

17 Oktober - 7 Desember 1956
pertinggal, asli
1 sampul

2220 Berkas rancangan revisi PP No.2 tahun 1951 (LN No.5/1951) tentang pemberian pensiun kepada janda dan onderstan kepada anak yatim piatu dari para anggota Angkatan Darat.

05 Nopember - 07 Desember 1956
konsep, fotokopi
1 sampul

2221 Berkas mengenai penyusunan RPP tentang Peraturan Gaji Militer dan Pangkat dalam Angkatan Perang.

21 November 1956 - 19 Juni 1957
tembusan
1 sampul

2222 Berkas mengenai RPP tentang penetapan besarnya pemungutan termasuk dalam pasal 11 *krosok-Ordonnantie* 1937 (*Staatsblad* 1937 No. 604) untuk tahun 1957.

26 Desember 1956 - 22 Januari 1957
asli
1 sampul

2223 Surat-surat mengenai RPP tentang pembebasan bea masuk berdasarkan hubungan internasional.

31 Desember 1956 - 29 Januari 1957
tembusan
1 sampul

2224 Berkas mengenai RPP tentang penyerahan pajak negara kepada daerah, RPP tentang pemberian ganjaran, subsidi dan sumbangan kepada daerah dan RPP tentang panitia negara perimbangan keuangan.

8 - 22 Januari 1957
pertinggal
1 sampul

2225 RPP tentang peninjauan kembali pembagian wilayah negara meliputi Sumatra, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku.

02 Februari - 24 September 1957
tembusan
1 sampul

2226 Surat-surat mengenai RPP tentang penetapan bagian dan RPP tentang penetapan persentasi dari penerimaan beberapa pajak negara bagi daerah.

23 April 1957 - 12 Maret 1958
pertinggal, asli, tembusan
1 sampul

2227 Berkas mengenai RPP tentang penyerahan tugas mengenai menyewa rumah / pekarangan milik partikelir yang diperlukan oleh instansi pemerintah sipil kepada masing - masing kementerian yang bersangkutan.

19 Mei - 31 Oktober 1957
pertinggal
1 sampul

2228 RPP tentang penyerahan opsen atas karet oleh negara kepada daerah otonom yang menghasilkannya.

31 Mei - 6 November 1957
tembusan
1 sampul

2229 Berkas mengenai RPP tentang perubahan "*postbesluit dienststrukken* 1953" mengenai penghapusan kebebasan porto untuk pengurus/pejabat-pejabat gereja protestan dan *apostolische vicarissen* dan *prefecten* dari daerah-daerah missie di Indonesia.

25 Juli - 23 September 1957
tembusan
1 sampul

2230 Surat - surat mengenai RPP tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR serta Wakil Ketua dan Anggota DPD.

5 September 1957 - 5 Agustus 1958

asli
1 sampul

2231 RPP Tahun 1958 tentang penyerahan penyelenggaraan penguasaan perusahaan pemborongan Belanda kepada Menteri Pekerjaan Umum.

1958
konsep
4 lembar

2232 Berkas mengenai RPP beserta penjelasannya tentang penyerahan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan transmigrasi sedaerah (transmigrasi lokal) kepada daerah - daerah.

8 - 16 Januari 1958
fotokopi
8 lembar

2233 Berkas mengenai rancangan Peraturan - Peraturan tentang protokol.

14 Januari - 14 Juni 1958
asli
1 sampul

2234 Berkas mengenai penyusunan RPP tentang Dewan Pertahanan.

25 Januari - 23 Juni 1958
pertinggal
1 sampul

2235 Berkas mengenai RPP tentang Penyerahan Urusan Lalu-Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat I.

17 Februari - 29 Maret 1958
tembusan
1 sampul

2236 Berkas mengenai RPP tentang penyerahan kekuasaan tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur.

17 Februari - 29 Maret 1958
tembusan
1 sampul

2237 RPP tentang penambahan anggota DPD Kota Praja Jakarta.

08 - 29 Maret 1958
tembusan
1 sampul

2238 Berkas mengenai RPP tentang perubahan peraturan pemerintah No. 32 tahun 1958 tentang peraturan pemberian sokongan kepada sekolah nasional partikelir.

20 Maret 1958 - 11 Juni 1959
asli
1 sampul

2239 Surat Menteri Pertahanan kepada Perdana Menteri mengenai RPP tentang Satyalantjana Peristiwa Gerakan Operasi Militer, nb. beserta lampiran.

5 September 1958
tindasan
1 sampul

2240 Surat-surat mengenai RPP tentang pengawasan terhadap tempat tinggal dan perjalanan bagi orang asing.

22 Januari - 11 Juni 1959
pertinggal, asli
9 lembar

2241 Berkas mengenai RPP tentang pemberian hadiah ilmiah dan tentang pemberian hadiah seni.

7- 28 April 1959
asli
4 lembar

2242 RPP tentang Pembentukan dan tugas Dewan Otonomi dan Desentralisasi.

12 Juni 1959
asli
1 sampul

2243 RPP tentang pengganti kerugian untuk PNS yang berkedudukan pelaut.

24 Juni 1959
asli
1 sampul

b. Mosi dan Interpelasi

2244 Berkas mengenai peraturan-peraturan, pertanyaan anggota DPR dan jawaban pemerintah tentang Kementerian Agama.

16 Maret 1950 - 19 Desember 1953
asli, salinan
1 sampul

2245 Pertanyaan dan jawaban dalam Pemandangan Umum DPR tentang situasi keamanan di Aceh.

28 September 1950 - 10 Desember 1957
asli, salinan
1 sampul

2246 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan anggota DPR RI L.E. Manteiro tentang pemberantasan penyakit Lepra di Flores.

3 November & 29 November 1950
tembusan
7 lembar

2247 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Sekretaris Jenderal DPR mengenai penyampaian keterangan dan jawaban pemerintah atas pemandangan umum DPR, nb. arsip tidak lengkap.

9 November 1950
pertinggal
2 lembar

2248 Berkas mengenai mosi tidak percaya dari DPRS Sumbawa terhadap kinerja Sultan Sumbawa dan tentang sawah-sawah adat.

14 November 1950 - 16 Februari 1952
asli, salinan
1 sampul

2249 Surat dari Ketua DPR RI kepada Wakil Perdana Menteri RI mengenai pertanyaan anggota DPR RI Sumardi tentang larangan rapat umum memperingati pemberontakan rakyat melawan imperialisme Belanda tahun 1926.

20 Desember 1950
tembusan
2 lembar

2250 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan anggota DPR RI Hasan Basri tentang penangkapan dan penahanan beberapa pemimpin GPII (A. Buchari cs) dan penangkapan Nasari cs.

29 Desember 1950 - 5 Januari 1953
asli, tembusan
1 sampul

2251 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR Mr. Iwa Kusuma Sumantri tentang penangkapan orang-orang N.V. Perdati oleh Bn. Garuda Merah.

12 Maret 1951 - 4 Februari 1952
asli
1 sampul

2252 Surat-surat pertanyaan dari anggota DPR dan Jawaban Pemerintah dalam Pemandangan Umum DPR tentang keuangan (deviezen, nota keuangan, RAB)
17 Maret 1951 - 19 November 1958
asli, tembusan
1 sampul

2253 Surat-surat mengenai mosi, resolusi dan pengumuman tentang perburuhan.
21 Mei - 10 November 1951
asli
8 lembar

2254 Jawaban Menteri Dalam Negeri babak ke-II atas usul mosi Bebasa Daeng Lalo tentang pengangkatan pegawai-pegawai pamong pradja.
15 Agustus & 6 September 1951
asli
1 sampul

2255 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR RI Rkj. Rasuna Said tentang uang persediaan untuk membantu badan-badan sosial yang ada dikalangan Islam.
27 Agustus 1951 - 8 Januari 1952
tembusan
3 lembar

2256 Mosi DPRD Minahasa kepada Pemerintah dalam Pemandangan Umum DPR tentang perhatian pemerintah terhadap daerah dan para pejuang Minahasa.
24 September 1951
asli
1 sampul

2257 Berkas mengenai daftar pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah dalam tahun 1958, yang pada akhir tahun 1958 belum/belum selesai terjawab oleh pemerintah.

4 Desember 1951 - 27 Januari 1959
asli
1 sampul

2258 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan anggota DPR mengenai kekacauan di Indramayu oleh gerombolan Tentara Gabungan Nasional Indonesia Sectur Umum Siliwangi / G 107.
15 Desember 1951 - 28 Juni 1952

pertinggal
1 sampul

2259 Surat dari DPR kepada Menteri Pertahanan tentang *Interpelasi* Zainul Baharudin cs mengenai *interview* Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 22 Desember 1950.

11 & 12 Januari 1952
tembusan
2 lembar

2260 Surat-surat mengenai Pertanyaan dan Jawaban Pemerintah tentang urusan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (sekolah menengah, perguruan tinggi).

16 Januari 1952 - 16 Oktober 1957
pertinggal, tembusan
1 sampul

2261 Pertanyaan dan Jawaban Pemerintah dalam Pemandangan Umum DPR tentang urusan Kementerian Pertanian dan Agraria (tanah, perkebunan dll).

24 Januari 1952 - 24 Januari 1959
asli, salinan
1 sampul

2262 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR RI Suparno tentang penahanan Saleh Umar berdasarkan SOB.

31 Januari 1952 & 8 Februari 1952
asli
3 lembar

2263 Surat-surat mengenai mosi Mr. Sunarjo dkk tentang perjanjian-perjanjian dengan negara lain.

1 - 19 Februari 1952
asli
9 lembar

2264 Surat-surat mengenai pertanyaan dan jawaban pemerintah tentang pemindahan pegawai ke Kementerian-kementerian baru.

4 Februari 1952 - 26 Oktober 1957
asli
1 sampul

2265 Berkas mengenai pertanyaan DPR RI Mr. Boerhanoedin Harahap dan Mr. Hamid Algadri tentang meninggalnya Sdr. Saleh Sungkar Ketua DPR - RI Lombok.

25 Maret 1952 - 20 November 1952
asli, tembusan
1 sampul

2266 Surat dari Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Perhubungan mengenai pertanyaan anggota DPR tentang hubungan Madura dan Besuki, surat tidak lengkap.

21 April 1952
tembusan
1 lembar

2267 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan kepada Perdana Menteri RI mengenai sumbangan tentang lapangan pekerjaan Kementerian Penerangan guna persiapan keterangan pemerintah.

21 April - 23 Mei 1952
asli
7 lembar

2268 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR RI S. Oetarjo tentang protes tindakan polisi (Sdr. Sidik) sekitar penangkapan 417 anggota BTI di Wates Kediri.

27 April 1952 - 26 Mei 1953
asli, pertinggal
1 sampul

2269 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR Mr. Iwa Kusuma Sumantri tentang keputusan pemerintah memasukkan 8000 orang tenaga asing untuk tahun 1952.

28 April 1952 - 5 Agustus 1952
asli
3 lembar

2270 Surat-surat mengenai jawaban pemerintah tentang keimigrasian, impor beras dari Siam ke Indonesia, ekspor dan tertangkapnya Kepala Jawatan PTT RI (Mas Soeharto) oleh Belanda.

2 Mei 1952 - 28 Juli 1955
asli, tembusan
1 sampul

2271 Surat-surat mengenai jawaban pemerintah atas pemandangan umum babak pertama dari DPR RI.

10 - 23 Mei 1952
asli
7 lembar

2272 Rancangan jawaban pemerintah atas pemandangan umum DPR RI babak I mengenai Kementerian Agama.

27 Mei 1952 & 31 Agustus 1953
fotokopi
1 sampul

2273 Surat-surat mengenai jawaban pemerintah dalam Pemandangan Umum DPR RI babak I dan II mengenai Program dan Keterangan Kabinet Wilopo dan politik luar negeri Indonesia.

27 Mei - 17 Oktober 1952
asli
1 sampul

2274 Surat dari Kementerian Perekonomian kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai rancangan jawaban pemerintah dalam perekonomian.

29 Mei 1952
asli
1 sampul

2275 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan DPR tentang penahanan anggota DPR F. Laoh di Makassar.

24 Juli 1952 - 15 Januari 1953
pertinggal
1 sampul

2276 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang urusan Kementerian Pertambangan (PERMINA, RUU Hak Pertambangan).

29 Agustus 1952 - 11 Februari 1959
asli, tembusan
1 sampul

2277 Mosi DPRD propinsi Sumatra Selatan tentang perkembangan otonomi dan Demokrasi di Sumatra Selatan.

25 September 1952 - 14 Agustus 1954
asli, tembusan
1 sampul

2278 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang urusan perhubungan (perkeretaapian, pembelian alat-alat PTT, pengangkatan kepala Jawatan Kementerian Perhubungan, dan UU lalu lintas).

30 September 1952 - 22 Mei 1957

pertinggal, tembusan
1 sampul

2279 Surat dari DPR kepada Menteri Perburuhan mengenai pertanyaan anggota DPR Soemarto tentang tegoran majikan asing terhadap pegawainya (bangsa Indonesia).

9 Oktober 1952
asli
3 lembar

2280 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR dan jawaban pemerintah tentang proses pengadilan di Timor.

1 November 1952 - 25 September 1953
asli, tembusan
1 sampul

2281 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan DPR tentang pemeriksaan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi selama agressi ke II.

9 Januari - 10 Maret 1953
asli
1 sampul

2282 Surat-surat mengenai jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR tentang rencana dan laporan keamanan, beserta lampiran daftar surat masuk DPR RI.

13 Maret 1953 - 24 November 1954
pertinggal
1 sampul

2283 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan anggota DPR RI Sudijono Djojoprajitno tentang sikap polisi Tangerang terhadap pengurus Yayasan Koperasi Gotong Royong dari Partai Murba.

19 Maret - 4 Agustus 1953
tembusan
1 sampul

2284 Surat dari Perdana Menteri Wilopo kepada Ketua DPR RI mengenai jawaban atas pertanyaan Iwa Kusuma Sumantri mengenai NV. Perdati (Persatuan Dagang Tani Indonesia).

18 Mei 1953
pertinggal
6 lembar

2285 Surat-surat mengenai jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR tentang usaha international fair.

2 Juni 1953 - 30 Januari 1954
asli, pertinggal
1 sampul

2286 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR RI tentang suara-suara dari Sumatra Utara menuntut pembentukan DPRD dan DPD.

4 Juni 1953 - 22 Januari 1954
tembusan
7 lembar

2287 Surat-surat mengenai jawaban pemerintah tentang Program Kabinet Ali Sastroamidjojo.

10 Agustus 1953 - 17 Mei 1956
asli, tembusan
1 sampul

2288 Berkas mengenai tulisan dalam harian "Pikiran Rakyat" berjudul "Nero Tjisarua" tentang perlakuan buruk terhadap buruh di perusahaan yang dipimpin oleh Belanda.

27 Agustus 1953 - 20 Januari 1954
asli
1 sampul

2289 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan DPR tentang perlengkapan dan persenjataan untuk melaksanakan " Komando Terakhir" terhadap gerombolan bersenjata.

4 September - 10 Oktober 1953
tindasan
1 sampul

2290 Surat dari Ketua DPR RI kepada Menteri Kehakiman RI mengenai pertanyaan anggota DPR-RI Sudijono Djojoprajitno tentang instruksi Jaksa Agung.

19 Oktober 1953
tembusan
3 lembar

2291 Berkas mengenai Pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah mengenai alat - alat negara (polisi) yang bersalah supaya dituntut dan diadili (penganiayaan 2 anggota polisi terhadap anggota SBG cabang Madiun).

30 September 1953 - 7 Mei 1955
asli, pertinggal
1 sampul

2292 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang sekitar soal korupsi.

24 November 1953 - 13 April 1954
asli
1 sampul

2293 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR Siauw Giok Tjhan tentang masalah minoritas

15 Desember 1953 - 20 Januari 1954
asli
6 lembar

2294 Surat-surat mengenai pertanyaan dan jawaban tentang keanggotaan DPR, DPRD,dan kepanitiaan pemilihan anggota DPRD.

24 Desember 1953 - 7 Januari 1959
asli, tembusan
1 sampul

2295 Surat dari Dewan Menteri kepada Presiden mengenai jawaban pemerintah atas usul mosi Burhanuddin Harahap mengenai pencabutan kembali PP No.35 tahun 1953.

12 Februari 1954
pertinggal
1 sampul

2296 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR-RI dan jawaban pemerintah tentang pemberhentian pegawai yang telah lanjut usianya.

1 Maret - 14 Juli 1954
asli
1 sampul

2297 Surat-surat mengenai usul mosi dalam kebijaksanaan Kementerian Perekonomian dan pekerjaan Kementerian Perekonomian dalam lapangan perdagangan.

18 Maret - 11 Oktober 1954
asli, pertinggal
1 sampul

2298 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR RI S. Narto tentang kongsi perikanan Jepang dan pegawai yang memalsukan ijin.

29 Maret & 21 April 1954
tembusan
2 lembar

2299 Berkas mengenai jawaban atas pertanyaan seksi H DPR (Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri) mengenai tindakan - tindakan Mobbrig Kie 5270 di Garut dan Kampung Aree Aceh.

15 Juni 1954 - 13 Oktober 1955
asli, pertinggal
1 sampul

2300 Berkas mengenai tingkatan pembicaraan dalam parlemen pada tanggal 1 Mei 1954.

17 Juni 1954 - 23 Juni 1954
asli
1 sampul

2301 Surat-surat mengenai usul interpelasi Jaman Sudjanaprawira dkk.

28 Juni 1954
asli
1 sampul

2302 Surat dari Sek. Dew. Menteri kepada Para Menteri mengenai putusan interpelasi Arso Sosroatmodjo tentang soal-soal kepegawaian.

26 Juli 1954
asli
2 lembar

2303 Surat-surat mengenai pertanyaan Seksi D - DPR RI mengenai tunjangan teknisi.

28 Juli - 23 Oktober 1954
asli, salinan
1 sampul

2304 Berkas mengenai jawaban atas pertanyaan seksi H DPR (Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri) mengenai ucapan yang dikeluarkan oleh Pembantu Inspektur Polisi Heinike terhadap Kiang Tie Tahanan Polisi Wilayah Ketapang.

31 Juli 1954 - 26 Juli 1956
asli, pertinggal
1 sampul

2305 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR Sumartojo tentang penahanan beberapa orang anggota pengurus organisasi Tani di Bali.

10 September 1954 - 1 Maret 1955
asli

1 sampul

2306 Berkas mengenai jawaban atas pertanyaan seksi H DPR (Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri) tentang penahanan Lalu Sriante di Gianyar Bali.

04 November 1954 - 07 Juni 1955
asli, pertinggal
1 sampul

2307 Surat-surat mengenai pertanyaan dan jawaban tentang perusahaan Belanda di Indonesia yang diambil alih (nasionalisasi).

8 November 1954 - 7 Januari 1959
asli, tembusan
1 sampul

2308 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang tingkat harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.

21 Desember 1954 - 29 Maret 1955
asli, tembusan
1 sampul

2309 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah mengenai peraturan gaji baru.

10 Januari - 19 September1955
asli
1 sampul

2310 Berkas mengenai jawaban pemerintah atas pemandangan umum babak I DPR tentang Kabinet Boerhanoedin Harahap.

17 - 22 Oktober 1955
asli, pertinggal
1 sampul

2311 Berkas mengenai Jawaban pemerintah atas pemandangan DPR babak I dan II mengenai keterangan pemerintah tentang Program Kabinet.

22 Oktober 1955 - 31 Mei 1957
asli, pertinggal, tembusan
1 sampul

2312 Surat dari Ketua DPR RI kepada Menteri Perekonomian mengenai pertanyaan anggota DPR Sdr. Baheramsjah St. Indra tentang pegawai-pegawai bekas KPUI.

21 Desember 1955

tembusan
5 lembar

2313 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR Sdr. Baheramsjah St. Indra mengenai soal kepegawaian.

11 Januari - 21 Agustus 1956
asli
1 sampul

2314 Surat - surat mengenai pertanyaan Anggota DPR Rangkajo Rasuna Said tentang percobaan peledakan bom zat air di Pasifik.

06 Februari - 20 Maret 1956
asli, pertinggal
9 lembar

2315 Surat - surat mengenai pertanyaan Anggota DPR M. Abdullah tentang penangkapan dan penahanan di Pulau Lombok dan Sumbawa.

03 Mei 1956 - 25 Oktober 1956
asli, pertinggal
1 sampul

2316 Berkas mengenai daftar tentang pertanyaan - pertanyaan Anggota DPRS kepada Pemerintah yang hingga kini belum diselesaikan oleh para Menteri dari Kabinet yang dahulu.

18 Mei - 16 Januari 1959
asli
1 sampul

2317 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR R.S. Hadisoenarto tentang bahasa daerah dan mendirikan rumah-rumah/gubug-gubug tanpa ijin.

1 Juni 1956
tembusan
4 lembar

2318 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR RI Dr. Sjech Hadji Djalaluddin tentang penahanan Nauman Djamil Gl. Datuk Mangkute Ameh Wali Kota Bukit Tinggi.

28 Juni - 21 September 1956
asli, tembusan
6 lembar

2319 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR B.J Rambitan tentang Perusahaan -Perusahaan Pelayaran Nasional.

07 Agustus - 22 November 1956
salinan, tembusan
3 lembar

2320 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR Mr. Hamid Algadrie tentang Pemilihan perwakilan DPR dan Kostituante.

28 Agustus - 23 November 1956
asli, tembusan
5 lembar

2321 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR Dr. Sjech Hadji Djalaluddin tentang pemberian lisensi kepada pemilik perusahaan - perusahaan.

28 Agustus - 17 November 1956
asli, tembusan
1 sampul

2322 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah masalah latihan-latihan perang SEATO di lautan wilayah kepulauan Indonesia.

23 Oktober 1956 - 22 Juni 1959
asli, pertinggal
1 sampul

2323 Surat-surat mengenai jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR tentang politik apartheid dalam pengusaha nasional.

13 Nopember - 4 Desember 1956
pertinggal, tembusan
8 lembar

2324 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang penjualan anak-anak dibawah umur didaerah transmigrasi Rawa-Makmur.

22 November 1956 & 14 Maret 1957
tembusan
6 lembar

2325 Surat-surat mengenai pertanyaan seksi A DPR dan jawaban pemerintah dalam kunjungan kerja di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DIY, dan tentang peraturan Bukti Ekspor (BE), pembentukan majelis perniagaan, dan stenografi "Sistem Karundeng".

8 Desember 1956 - 29 Juli 1958
asli, tembusan

1 sampul

2326 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR Sdr. Djokosudjono mengenai pelaksanaan PP 31/1954 mengenai Peraturan Pekerja Pemerintah.

13 Desember 1956 - 7 Januari 1959
asli
1 sampul

2327 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang pengangkutan beras ke Sumatera Tengah.

29 Desember 1956 - 9 Januari 1957
asli, pertinggal, konsep
1 sampul

2328 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR Prof. Mr. Hadji Muhd. Yamin tentang air saluran Pejompongan.

15 Januari 1957
pertinggal
8 lembar

2329 Berkas mengenai pertanyaan Anggota DPR RI Dr. Sjech H. Djalaluddin dan jawaban Pemerintah sekitar sebab - sebab Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

18 - 29 Januari 1957
asli
7 lembar

2330 Berkas mengenai jawaban pemerintah atas pemandangan umum babak II DPR tentang kejadian - kejadian di Sumatera Utara dalam Bulan Desember 1956 (Disampaikan oleh Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo pada hari Rabu 13 Februari 1957).

13 Februari 1957
pertinggal
1 sampul

2331 Surat mengenai pertanyaan dan jawaban pemerintah tentang pembuatan jalan, irigasi, bendungan, jembatan, penggalian sungai dan pusat kekuatan air di Indonesia.

19 Februari 1957 - 13 Oktober 1958
tembusan
1 sampul

2332 Kumpulan pertanyaan anggota DPR H. Chamid Widjaja.

20 Februari - 31 Oktober 1957
asli, pertingggal, tembusan
1 sampul

2333 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR E.Z. Muttaqien tentang Lembaga Rumah Buta di Bandung.

17 April & 23 Mei 157
asli, tembusan
3 lembar

2334 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang hak cuti haid untuk buruh wanita.

23 April - 6 Juni 1957
asli
6 lembar

2335 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang bencana banjir.

7 Mei 1957 - 7 Januari 1959
asli, tembusan
1 sampul

2336 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR WL. Tambing tentang lapangan terbang di Masamba Kab. Luwu Sulawesi Selatan.

21 Juni - 25 September 1957
tembusan, pertinggal
6 lembar

2337 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR Dr. Sjech Hadji Djalaluddin tentang pembentukan DPRD Sumatera Tengah.

21 Juni - 26 Oktober 1957
pertinggal, tembusan
7 lembar

2338 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR Ma'rifat Mardjani tentang berita mengenai penggelapan uang oleh Kepala Djawatan PU di Inderagiri.

4 Juli 1957 - 5 Maret 1958
asli, tembusan
7 lembar

2339 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR Dr. Sjech Hadji Djalaluddin tentang cara dan sistem pada persidangan Konstituante.

04 Juli - 30 Oktober 1957
asli, pertinggal
4 lembar

2340 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR Sdr. Gatot Mangkupraja sekitar rencana pekerjaan berbagai kementerian.

4 Juli 1957 - 16 April 1958
asli
1 sampul

2341 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang kebakaran Gedung Papak di Semarang.

5 Juli - 16 Oktober 1957
asli, tembusan
7 lembar

2342 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang nasib para bekas pegawai Desa diseluruh Karesidenan Banyumas.

10 Juli - 4 November 1957
asli, tembusan
9 lembar

2343 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang bahaya kelaparan yang mengancam daerah Jawa Tengah.

26 Juli - 25 September 1957
tembusan
7 lembar

2344 Surat - surat mengenai pertanyaan Anggota DPR K.H. Misbach tentang perongkosan kedatangan Presiden Soekarno di daerah Bojonegoro

07 Agustus 1957 - 10 Septtember 1958
asli, pertinggal
1 sampul

2345 Surat - surat mengenai jawaban Pemerintah atas pertanyaan Anggota DPR A.W Sujoso Sekitar perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.

13 - 27 Agustus 1957
pertinggal

1 sampul

2346 Surat-surat mengenai jawaban pemerintah dengan lisan atas pertanyaan anggota-anggota DPR.

30 Agustus & 2 September 1957
asli
4 lembar

2347 Berkas mengenai keterangan pemerintah tentang usaha - usaha normalisasi keadaan negara dalam berbagai bidang .

30 Agustus - 03 September 1957
asli
1 sampul

2348 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang rayon kemahalan kewedanaan Bangkinang.

2 September - 17 Oktober 1957
asli
1 sampul

2349 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang pembelian kapal-kapal penumpang oleh Pemerintah.

2 September - 26 November 1957
tembusan
7 lembar

2350 Berkas mengenai jawaban atas pertanyaan anggota DPR yang terhormat Dr. Sjech Hadji Djalaluddin sekitar para tahanan.

13 September 1957 - 18 Juni 1958
pertinggal
1 sampul

2351 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah mengenai sikap abstain wakil Indonesia di PBB mengenai resolusi tentang Hongaria.

24 September - 12 Oktober 1957
asli
1 sampul

2352 Surat-surat mengenai jawaban pemerintah mengenai RAB Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tahun 1957

2 Oktober, 14 Desember 1957

tembusan
1 sampul

2353 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR K.H Muslich tentang keadaan Perusahaan Pelayaran Jakarta Lloyd dan PELNI.

03 Oktober 1957 - 30 Oktober 1958
tembusan, pertinggal
1 sampul

2354 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR Sdr. Ma'rifat Mardjani mengenai sirkulir Bupati / Kepala Daerah Inderagiri.

03 Oktober 1957 - 02 Agustus 1958
asli, tembusan, salinan
1 sampul

2355 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang ekspor minyak tanah dari Kalimantan yang dilakukan oleh BPM.

8 Oktober 1957 - 5 Maret 1958
asli, pertinggal, tembusan
1 sampul

2356 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang UU Darurat No. 25 Tahun 1957 tentang penghapusan monopoli dan pembikinan garam rakyat.

14 Oktober - 18 September 1957
pertinggal, tembusan
5 lembar

2357 Surat dari Sekretaris Jenderal Menteri Kehakiman kepada Ketua DPR mengenai jawaban pemerintah atas pertanyaan anggota DPR K.H. Muslich tentang uang dana janda dan yatim piatu sebesar Rp. 6 juta.

29 Oktober 1957
tembusan
3 lembar

2358 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang pembayaran pajak peralihan 2,5% para pensiunan yang diharapkan dapat dikembalikan kembali kepada para pensiunan.

5 November 1957 - 12 Juni 1959
asli
1 sampul

2359 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR masalah peristiwa pelemparan granat di Gedung CC PKI dan kantor Dewan daerah SOBSI di Jakarta.

5 November 1957 - 5 Maret 1959
asli
1 sampul

2360 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR Ny. Marjima Djunadie tentang peristiwa demonstrasi para pelajar ibukota.

18 November 1957 - 4 Januari 1958
tembusan
6 lembar

2361 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR Sdr. H.J.C Princen tentang percobaan pembunuhan terhadap P.J.M Presiden Soekarno.

04 Desember 1957 - 20 Februari 1958
asli, tembusan, pertinggal
1 sampul

2362 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR Sdr. Abdullah Gathmyr tentang pendaftaran warga negara Indonesia keturunan asing di Kabupaten Bogor

04 Desember 1957 - 11 Februari 1959
pertinggal, tembusan
7 lembar

2363 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan anggota DPR RI Supardi tentang kedudukan anggota CTN proyek Djajaloka.

31 Januari - 7 Mei 1958
asli
1 sampul

2364 Risalah sementara DPR Rapat 12 Sidang I.

31 Januari 1958
asli
1 sampul

2365 Surat-surat mengenai pertanyaan dan jawaban pemerintah tentang mesin-mesin penggerak listrik untuk Yogyakarta.

10 Februari 1958 - 16 Januari 1959
asli, pertinggal, tembusan
1 sampul

2366 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan anggota DPR Djumhur Hakim tentang berita hongeroedem (penyakit busung lapar) di Lombok Selatan.

10 Februari - 12 Juli 1958
asli, tembusan
1 sampul

2367 Berkas mengenai jawaban atas pertanyaan seksi H DPR (Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri) tentang penahanan barang - barang kain oleh Polisi Seksi VIII Kebayoran Jakarta.

17 Februari 1958 - 01 Juli 1959
asli, pertinggal
1 sampul

2368 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR Sdr. S. Haryowisastro tentang Sdr. Ruslan Muljohardjo bekas Gubernur Kepala Daerah Sumatera Tengah yang semasa jabatannya telah melanggar sumpah jabatan.

17 Maret - 5 Mei 1958
pertinggal, tembusan
1 sampul

2369 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang gaji minimum pegawai negeri.

18 Maret - 29 Mei 1958
asli, tembusan
1 sampul

2370 Berkas mengenai jawaban atas pertanyaan anggota DPR Dokter Hadji Ali tentang berita mengenai hukuman dirumah penjara wanita di Bukit Duri Jakarta.

02 Mei 1958 - 01 Desember 1958
asli
1 sampul

2371 Surat-surat mengenai jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR tentang Sultan Hamid, Schmidt, tindakan intervensi dan kewaspadaan nasional.

7 Mei 1958 - 27 April 1959
asli
1 sampul

2372 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan DPR tentang serangan udara yang dilakukan oleh pesawat-pesawat yang tidak dikenal di Indonesia Timur.

19 Mei 1958 - 23 Januari 1959
asli
1 sampul

2373 Berkas menganai jawaban pemerintah atas laporan Gabungan DPR RI mengenai Rancangan Undang - Undang tentang Kewarganegaraan RI.

21 Mei 1958
tembusan
5 lembar

2374 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang nasib janda-janda serta anak-anak pegawai negeri sipil sementara dan pelaksanaan PP Nomer 19/1952.

3 Juni - 25 Oktober 1958
asli, tembusan
1 sampul

2375 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan DPR tentang nasib tahanan SOB, PRRI berdasarkan UU Keadaan Bahaya.

6 Juni - 11 November 1958
asli, tembusan
1 sampul

2376 Surat-surat mengenai pertanyaan dan jawaban pemerintah mengenai ijin pendaratan di Indonesia dan perlindungan pemimpin Huk kepada kedutaan RI di Manila.

21 Juni 1958 - 29 Januari 1959
asli, tembusan
1 sampul

2377 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR dan jawaban pemerintah tentang diexpornya minyak mentah oleh Permina.

15 Juli 1958 - 3 Februari 1959
asli, pertinggal
1 sampul

2378 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR Sdr. Ismail Napu tentang tuntutan para buruh perkebunan Sumatera Utara.

18 Agustus 1958 - 14 Januari 1959
asli
1 sampul

2379 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang berita bahwa pemerintah akan mengubah/memperbaiki Peraturan Pemerintah No. 41/1954 untuk menaikkan pensiun tentara.

30 Agustus - 6 November 1958
asli
1 sampul

2380 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang pemberian penghargaan/tunjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan.

2 September 1958 - 29 Januari 1959
asli
1 sampul

2381 Surat - surat mengenai jawaban atas pertanyaan anggota DPR Dr. Sjech H. Djalaluddin tentang keputusan Pengadilan Negeri atas Kepala Rumah Gadai di Gading Surakarta tahun 1954.

02 September 1958 - 13 Desember 1958
asli, pertinggal
1 sampul

2382 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang pemberhentian beberapa pegawai Djawatan Penerangan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

13 September 1958 - 19 Februari 1959
asli
1 sampul

2383 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan anggota DPR Sdr. Siauw Giok Tjhan mengenai berita tentang pegawai negeri yang akan menduduki jabatan penting di luar negeri.

15 September 1958 - Januari 1959
tembusan
1 sampul

2384 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang jaminan bagi keluarga pegawai negeri korban PRRI di Situdjuh.

18 September 1958 - 27 Januari 1959
asli
1 sampul

2385 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan DPR tentang calon PPTI Sampit yang tidak diterima menjadi anggota PPKAB Sampit untuk pemilihan umum DPR ke II.

18 September 1958 - 19 Januari 1959
tembusan

1 sampul

2386 Berkas mengenai jawaban pemerintah atas pemandangan umum DPR tentang Rancangan Undang - Undang Dewan Perancang Nasional

19-28 September 1958
asli
1 sampul

2387 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang harian "Trompet Masyarakat" yang terbit di Surabaya terancam oleh bahaya berhenti terbit dan dicoretnya sebagian dari teks pidato Nyonya Soemardjo oleh pegawai RRI.

02 Oktober - 20 November 1958
tembusan
1 sampul

2388 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah masalah perjanjian rahasia antara Menteri Luar Negeri Australia Cassey dan Menteri Luar Negeri Belanda Luns.

2 Oktober - 26 Desember 1958
asli
1 sampul

2389 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan Dr. Sjech H. Djalaluddin mengenai pemberantasan penyakit TBC di Sumatra Barat dan kasus nenek yang meninggal terlantar di depan RSUP Jakarta.

2 Oktober 1958 - 11 Februari 1959
asli
1 sampul

2390 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang bantuan-bantuan dari Yayasan Dana Bantuan.

22 Oktober 1958 - 15 Januari 1959
asli
7 lembar

2391 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR S. Sudjojono tentang keputusan Penguasa Perang Daerah Swantantatra I Jakarta Raya tentang larangan terhadap semua kegiatan - kegiatan partai - partai / organisasi serta Badan dan Yayasan dari golongan Tionghoa Min Tang.

25 Oktober 1958 - 29 Januari 1959
tembusan

1 sampul

2392 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan DPR tentang pemulangan orang-orang bangsa India/Pakistan bekas tentara RI.

1 November 1958 - 21 Januari 1959
asli
1 sampul

2393 Ichtisar pertanyaan - pertanyaan para anggota DPR yang telah dikirim oleh Kementerian Pelayaran.

28 November 1958 - 28 Februari 1958
tembusan
1 sampul

2394 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang masalah - masalah agama Islam.

19 Desember 1958 - 28 Januari 1959
tembusan
1 sampul

2395 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR Dr. Sjech H. Djalaluddin tentang ditutupnya Percetakan "TAMPOMAS".

24 Desember 1958 - 24 Maret 1959
asli
1 sampul

2396 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang Keputusan Menteri Penerangan tanggal 20 November 1958 No. 38/Sk/Sd/1958.

14 Januari - 2 Maret 1959
tembusan
1 sampul

2397 Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR I.S Handokowidjojo tentang berita sekitar rencana perluasan saluran air minuman di Kotapraja Surabaya.

21 Januari - 8 Juni 1959
asli, tembusan
1 sampul

2398 Surat - surat mengenai pertanyaan DPR K.H Muslich tentang perbuatan BODM Djatipetamburan Tanahabang Jakarta yang sangat merugikan para transmigran spontan.

29 Januari - 22 Juni 1959
asli, pertinggal
1 sampul

2399 Surat-surat mengenai jawaban atas pertanyaan anggota DPR H. Ali Akbar tentang keadaan sekitar Pabrik Semen Gresik dalam bidang kesehatan.

14 Februari - 23 Juni 1959
asli, fotokopi
1 sampul

2400 Berkas mengenai jawaban Menteri Penerangan atas pertanyaan pertanyaan untuk Rapat Kerja Seksi G.

03 - 05 Maret 1959
tembusan
1 sampul

2401 Surat dari Wakil Perdana Menteri I kepada Perdana Menteri mengenai pernyataan Laksamana Harry Felt tentang terjalinnya Indonesia dalam pola strategi pertahanan di Timur Jauh dan Asia Tenggara, nb. beserta lampiran.

14 Mei 1959
pertinggal
4 lembar

2402 Surat dari DPR kepada Menteri Penerangan Pertanyaan Anggota DPR M. Yunan Nasution tentang pembebasan tugas tiga orang pegawai Jawatan Penerangan Kabupaten Deli Serdang dan Medan oleh Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Utara.

28 Juli 1958
tembusan
2 lembar

2403 Surat - surat mengenai usul pernyataan pendapat anggota DPR Mr. Imron Rosjadi tentang penyelesaian masalah perbatasan antara RRT dan India.

06 - 21 November 1959
pertinggal, tembusan
4 lembar

2404 Konsekuensi penundaan Pemilihan Umum dan usul Resolusi Anggota DPR Sdr. Sutomo tentang pembentukan Kabinet Parlementer.

10 November - 4 Desember 1959

asli
1 sampul

2405 Naskah usul pernyataan anggota DPR tentang pencabutan keadaan bahaya di daerah-daerah yang telah aman.

12 November 1959
pertinggal
1 sampul

2406 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dalam rapat kerja Komisi "G" yang tidak masuk bidang Departemen Sosial.

12 & 24 Desember 1959
tembusan, asli
1 sampul

2407 Surat dari Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan/Kepala Penghubung Departemen Penerangan kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah tentang anggaran 1960 Departemen Penerangan.

17 Desember 1959
asli
1 sampul

2408 Surat dari Kementerian Kesehatan kepada DPR RI mengenai jawaban atas pertanyaan tidak adanya perawat perempuan di RS Jiwa di Belitung.

6 & 29 November 1950
tembusan
1 sampul

2409 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR RI tentang masalah bekas pejuang bersenjata.

29 Juni 1954 - 22 Juni 1955
asli
1 sampul

2410 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR RI mengenai masalah ijin dan larangan berdemonstrasi.

2 Maret - 16 November 1954
asli
1 sampul

2411 Surat-surat mengenai jawaban pertanyaan Seksi H (Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri) DPR tentang pendaftaran organisasi/partai oleh DPKN.

18 Desember 1953 - 10 Februari 1955
asli, salinan
1 sampul

2412 Surat-surat mengenai pertanyaan dan jawaban pemerintah masalah tertembaknya anggota gerombolan Bambu Runcing di Cikampek dan pembakaran rumah di Kampung Pulo oleh anggota polisi.

11 September 1953 - 16 Agustus 1954
tembusan
1 sampul

2413 Surat-surat mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah masalah surat sebaran Front Pemuda Sunda.

20 September - 14 Desember 1956
pertinggal
1 sampul

2414 Jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR oleh Menteri Distribusi dalam bidang perdagangan dll.

TT
fotokopi
1 sampul

c. Risalah DPR dan Konstituante

2415 Surat dari Kepala Bagian Arsip DPR RIS kepada Perdana Menteri RI di Yogyakarta mengenai Risalah rapat DPR RIS tanggal 3 - 10 Juni 1950.

30 Juni 1950
fotokopi
1 sampul

2416 Berkas mengenai laporan peninjauan seksi sosial dan seksi kesehatan DPR.

04 November - 04 Desember 1950
salinan
1 sampul

2417 Surat-surat tentang urusan perburuhan sebagai materi Sidang DPR ke IV tanggal 15 Maret 1951.

1 Februari - 12 Maret 1951
asli, tembusan
2 lembar

2418 Surat-surat tentang urusan kehakiman dan keamanan sebagai materi Sidang DPR bulan Desember 1952.

29 Mei - 1 Desember 1952
asli, tembusan
1 sampul

2419 Surat dari Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Perdana Menteri mengenai kesimpulan rapat Seksi A Perekonomian DPR RI.

13 Agustus 1952
asli
4 lembar

2420 Surat dari DPR kepada Menteri Luar Negeri mengenai tindakan tegas dalam menghadapi Belanda.

13 September 1952
salinan
1 lembar

2421 Berkas mengenai pidato Presiden dalam pembukaan sidang DPR.

16 - 29 Desember 1952
salinan
1 sampul

2422 Berkas mengenai risalah rapat ke 6, 9 dan 96, 97 tahun 1952.

1952
fotokopi
1 sampul

2423 Rancangan pidato Presiden RI pada Sidang DPR tahun 1953.

8 Januari 1953
tembusan
1 sampul

2424 Berkas tentang lembaga dan keanggotaan Konstituante.

8 Desember 1953 - 10 Desember 1955
asli, tembusan
1 sampul

2425 Risalah tentang perburuhan untuk rapat kerja Dewan Menteri.

19 Maret 1954
asli, tembusan
1 sampul

2426 Susunan ke-III acara Sidang ke III tahun 1954.

24 Juni 1954
fotokopi
2 lembar

2427 Surat dari Perdana Menteri kepada ketua DPR tentang keanggotaan DPR Mr. Moh.Yamin.

16 Juli 1954 -16 Juli 1954
asli
1 lembar

2428 Berkas mengenai bahan - bahan pidato Presiden pada hari Kemerdekaan Indonesia di muka DPR.

20 - 22 Juli 1954
salinan
1 sampul

2429 Berkas mengenai risalah peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke IX dan ke XII.

16 Agustus 1954 - 16 Agustus 1957
salinan
1 sampul

2430 Berkas mengenai penggantian keanggotaan DPR RI dari partai, non partai dan golongan kecil.

29 Juli 1954 - 4 Juli 1956
asli
1 sampul

2431 Risalah Seksi (Perubahan, Urusan Pegawai dan Sosial) mengenai risalah singkat rapat ke-4.

2 Februari 1955
fotokopi
1 sampul

2432 Salinan Keputusan Perdana Menteri RI No. 131/PM/1955 mengenai sidang Komisi istilah dan Dewan Pertimbangan Istilah.

21 Juni 1955
fotokopi
2 lembar

2433 Berkas mengenai risalah perundingan Rancangan Anggaran RI untuk tahun dinas 1954 (Pokok 80 tahun sidang 1955).

20 September 1955 - 25 Oktober 1955
fotokopi
1 sampul

2434 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepolisian Negara RI mengenai penjagaan dan pengawalan surat-surat penting dalam rangka pemilihan anggota Konstituante, nb. beserta lampiran.

10 November 1955
pertinggal
1 sampul

2435 Surat dari DPR kepada Perdana Menteri mengenai notulen Konferensi Keamanan.

04 - 07 Februari 1955
salinan
3 lembar

2436 Berkas mengenai laporan gabungan sebagian DPR No.4 tahun sidang 1955.

01 Juni - 11 Agustus 1955
salinan
1 sampul

2437 Rancangan Acara Sidang DPR tahun 1955.

3 Juni 1955
asli, tembusan
2 lembar

2438 Berkas mengenai notulen sidang pleno ke IX DPRDS, Kab. Lampung Selatan yang berlangsung pada 17-23 Desember 1955.

18 Januari 1956
salinan
1 sampul

2439 Surat-surat mengenai jabatan Kepala Daerah / Ketua DPD yang tidak bisa dirangkap dengan keanggotaan DPR.

14 Maret - 23 Mei 1956
pertinggal, salinan
1 sampul

2440 Daftar fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat (baru) disusun menurut keadaan pada 16 April 1956.

23 April 1956
fotokopi
1 sampul

2441 Berkas mengenai pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante dari Panitia kaum indo angkatan 1945 (cabang Makassar), nb. beserta lampiran : 2 buah resolusi , 3 lembar Surat kabar.

24 April 1956
tembusan
1 sampul

2442 Surat dari Wakil Presiden RI kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI mengenai pengambilan sumpah anggota DPR yang baru dikuasakan kepada para wakil ketua.

17 Mei 1956
tembusan
1 lembar

2443 Surat dari Ketua Keputusan Panitia Pemeriksa kepada Perdana Menteri mengenai keputusan Panitia Pemeriksaan DPR tentang penerimaan D.N. Aidit sebagai anggota DPR.

23 Juni 1956
asli
2 lembar

2444 Keterangan Pemerintah pada Sidang Pleno DPR tertutup tentang penyelundupan di Sulawesi Utara dan Sumatra Timur.

14 Juli 1956
pertinggal
1 sampul

2445 Daftar Alamat Anggota DPR tahun 1956

15 Juli 1956
fotokopi
1 sampul

2446 Rapat Pleno DPR terbuka tgl. 15 Agustus 1956.

31 Juli 1956 - 15 Agustus 1956

asli, tembusan
1 sampul

2447 Berkas mengenai pengangkatan anggota-anggota DPR/Konstituante dari golongan kecil, kaum indo oleh pemerintah.

29 Oktober 1956 - 21 Januari 1957
pertinggal
1 sampul

2448 Surat dari Perdana Menteri RI kepada presiden RI mengenai pengangkatan sumpah anggota dan pelantikan Konstituante, nb. beserta lampiran.

31 Oktober 1956
pertinggal
1 sampul

2449 Berkas mengenai tambahan nama anggota Konstituante.

01 November - 10 November 1956
salinan
1 sampul

2450 Berkas mengenai rancangan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1958 - 1959.

1956
fotokopi
1 sampul

2451 Daftar Alamat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Susunan ke III.

1 Pebruari 1957
fotokopi
1 eksemplar

2452 Risalah sementara Rapat 28 sidang I, Dewan Perwakilan Rakyat.

12 Maret 1957
fotokopi
1 sampul

2453 Risalah sementara DPR tentang RUU penetapan UU Darurat No. 20 tahun 1955 tentang kedudukan anggota Angkatan Perang dalam dinas ketentaraan sesudah akhir tahun 1955 sebagai UU dan RUU tentang Militer Sukarela.

12 Maret 1957
asli

1 sampul

2454 Berkas mengenai risalah perundingan sidang ke III tentang surat-surat masuk pembukaan sidang ke III tahun 1957.

12 Agustus 1957
salinan
1 sampul

2455 Ichtisar tentang materi Sidang DPR ke II thn 1957.

12 Agustus 1957
asli, tembusan
2 lembar

2456 Berkas mengenai risalah perundingan sidang ke III tentang surat-surat jawaban pemerintah dalam babak Ke II mengenai RUU tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia.

19 Agustus - 04 September 1957
salinan
1 sampul

2457 Berkas mengenai risalah perundingan sidang ke III tentang pembicaraan pasal demi pasal dimulai dengan penjelasan oleh pengusul-pengusul amendemen baru mengenai RUU Keadaan Bahaya.

25 Agustus 1957 - 31 Desember 1957
salinan
1 sampul

2458 Berkas mengenai risalah perundingan sidang ke III tentang usul resolusi Mr. Imron Rasyadi dan kawan-kawan mengenai intervensi Inggris terhadap negara Oman.

27 Agustus 1957
salinan
1 sampul

2459 Berkas mengenai risalah perundingan sidang ke III tentang kerangka pemerintah mengenai penyelesaian soal-soal daerah dan jawaban pemerintah dalam pemandangan umum tentang RUU mengenai pejabat yang menjalankan pekerjaan pejabat Presiden sehari-hari jika Presiden berhalangan.

30 Agustus -04 September 1957
salinan
1 sampul

2460 Berkas mengenai Risalah perundingan sidang Ke III mengenai keterangan pemerintah tentang usaha-usaha normalisasi keadaan Negara.

30 Agustus 1957 - November 1957
pertinggal, tembusan
1 sampul

2461 Berkas mengenai risalah perundingan sidang ke III tentang membicarakan usul-usul perubahan acara rapat-rapat DPR sesudah tanggal 2 September 1957.

02 September 1957
salinan
1 sampul

2462 Berkas mengenai Risalah perundingan sidang Ke III mengenai usul resolusi Ahmad Dara Syahruddin dan kawan-kawannya tentang pengeluaran-pengeluaran UU Darurat oleh pemerintah.

09 September 1957 - 03 Oktober 1957
salinan
1 sampul

2463 Berkas mengenai Risalah perundingan sidang Ke III tentang RUU Persetujuan/perjanjian kebudayaan antara negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Mesir, Kerajaan Afganistan dan Negara Pemerintah India.

11 September 1957
salinan
1 sampul

2464 Berkas mengenai Risalah perundingan sidang Ke III tentang jawaban atas pemandangan umum mengenai RUU penetapan UU Darurat No.10 1954 tentang *Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V* .

13 - 16 September 1957
salinan
1 sampul

2465 Berkas mengenai Risalah perundingan sidang Ke III tentang keterangan pemerintah mengenai peraturan bukti kerja.

18 September 1957
salinan
1 sampul

2466 Berkas mengenai Risalah perundingan sidang Ke III tentang jawaban pemerintah dalam babak Ke II mengenai RUU tentang penempatan tenaga asing.

03 - 04 Oktober 1957
salinan
1 sampul

2467 Berkas mengenai acara sidang DPR tahun 1958.

31 Januari - 21 Oktober 1958
asli, pertinggal
1 sampul

2468 Berkas mengenai hasil Dewan Pimpinan Pusat pleno IPKI tentang undang undang No. 1 tahun 1957

13 Maret 1958 - 3 Juni 1958
asli, pertinggal
1 sampul

2469 Berkas mengenai perwakilan Irian Barat dalam Konstituante.

16 April 1958 - 7 Pebruari 1959
asli, pertinggal
1 sampul

2470 Berkas mengenai pembentukan panitia penasehat teknis urusan Konstituante.

14 Juli 1958
salinan
1 sampul

2471 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Wakil Perdana Menteri I dan III tentang rancangan pidato Perdana Menteri dalam pembukaan sidang Konstituante tanggal 30 Juli 1958, nb. beserta lampiran.

25 Juli 1958
pertinggal
1 sampul

2472 Berkas mengenai pensiunan anggota Konstituante.

Agustus 1958
fotokopi
1 sampul

2473 Jadwal acara dan pembagian waktu sidang Panitia Persiapan Konstituante ke III tahun 1958, menurut keputusan Panitia Musyawarah No. 14/K/MK/1958 tanggal 19 Oktober 1958.

Oktober 1958
fotokopi
1 sampul

2474 Surat dari Bagian Urusan DPR Kabinet Perdana Menteri kepada Perdana Menteri mengenai risalah rapat pleno DPR terbuka tentang RAB tahun 1959.
28 November 1958
pertinggal
1 sampul

2475 Berkas mengenai rapat kerja antara Perdana Menteri dengan Seksi A (Perekonomian) dan Seksi B (Keuangan) DPR RI.
14 Februari - 25 Februari 1959
asli, salinan
1 sampul

2476 Hasil - hasil Pleno Konstituante dan Panitia Persiapan Konstitusi.
3 Maret 1959
asli
1 sampul

2477 Kumpulan materi untuk persiapan Rapat Pleno DPR thn 1959.
14 Maret 1959 - 21 Desember 1959
asli, tembusan
1 sampul

2478 Berkas mengenai rumusan rancangan mukadimah UUD, yang akan diajukan kepada rapat pleno Konstituante untuk mendapatkan keputusan.
16 Maret 1959
salinan
1 sampul

2479 Surat dari Perdana Menteri kepada para Menteri mengenai perubahan sidang pleno konstituante pada tanggal 22 April 1953 di Bandung.
11 April 1959
pertinggal
3 lembar

2480 Surat dari ketua Dewan Perwakilan Rakyat kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian pidato ketua DPR pada pembukaan sidang ke II tahun 1959 tanggal 20 April 1959, nb. beserta lampiran.
22 April 1959
asli, pertinggal

1 sampul

2481 Penegasan Tambahan Pemerintah atas pemandangan umum konstituante mengenai amanat presiden tgl 22 April 1959 dan angsuran pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945 oleh perdana menteri H. Djuanda Kartawidjaja dalam rapat pleno konstituante.

27 Mei 1959
fotokopi
1 jilid

2482 Naskah pidato ketua DPR pada Pembukaan Sidang ke III tahun 1959 dan ikhtisar penjelasan pokok-pokok pembicaraan oleh DPR dalam sidang ke II tahun 1959.

6 Juli 1959
fotokopi
1 sampul

2483 Berkas mengenai batas-batas hak dan wewenang DPR dalam rangka UUD 1945 dan pertanyaan DPR kepada kabinet karya dahulu.

24 Agustus 1959 - 08 September 1959
salinan
1 sampul

Organisasi Sosial dan Politik

Daftar Indeks Wilayah

A

Abubu - Titawaai : 496
Aceh : 35, 102, 373, 441, 468, 476, 493, 495, 506, 513, 522, 560, 605, 648, 701, 896, 903, 909, 927, 929, 940, 976, 985, 990, 991, 997, 1555, 1813, 1847, 1984, 2121, 2245, 2299
Aceh Barat : 671
Aceh Besar : 1830
Aceh Selatan : 913
Aceh Tengah : 503
Aceh Timur : 515
Aceh Utara : 954
Adonara : 268, 465
Afganistan : 1994, 2463
Aljazair : 1239
Ambon : 290, 319, 1048, 1073, 1227, 1510, 1707, 2208
Amerika : 267, 745, 1092, 1178, 1194, 1263, 1576, 1746, 1870
Amerika Serikat : 1273, 1582, 1569, 1595
Ancol : 689
Asia Tenggara : 2401
Australia : 241, 1147, 1188, 1228, 1289, 1666, 1756, 2388

B

Bali : 52, 894, 998, 1509, 2090,
Balongan : 485
Bandung : 181, 290, 396, 474, 603, 700, 1728, 2333, 2479
Bangka : 1788
Bangkinang : 2348
Bangkok : 1216, 1233, 1571
Banjar : 488
Banjar : 957
Banjarmasin : 290, 314, 1399, 1720
Banten : 77, 99, 528, 564, 705
Banyumas : 1812, 2342
Basuki, Karesidenan : 326
Batahan : 1945

Batak : 495
Batang Hari : 1933
Bawean, Pulau : 514, 1681
Bekasi : 721
Belanda : 30, 118, 200, 206, 265, 269, 501, 526, 535, 570, 602, 675, 989, 1069, 1077, 1141, 1142, 1146, 1148, 1152, 1154, 1158, 1164, 1171, 1172, 1209, 1227, 1251, 1254, 1256, 1257, 1258, 1276, 1279, 1293, 1294, 1295, 1317, 1329, 1439, 1446, 1447, 1562, 1567, 1621, 1665, 1729, 1850, 1929, 2065, 2069, 2137
Belitung : 2408, 2163
Bengkalis : 918, 1500
Bengkulu : 59, 73, 290, 990
Besuki : 504, 611, 1724, 2266
Besuli : 1840
Binjai : 1041
Birma : 621, 1321
Blangkedjeren : 1654
Blitar : 696, 746, 905, 959, 1779
Boano : 2122
Bogor : 260, 444, 1043, 1466, 1523, 1739, 1867, 2362
Bojonegoro : 290, 819, 1038, 1510, 2344
Bolaang Mongondow : 2200
Bondongan : 1867
Bondowoso : 290, 558
Brasilia : 1666
Brebes : 619
Bukit Duri : 2370
Bukit Tinggi : 222, 290, 1901, 2318
Buleleng : 894, 1707
Bulgaria : 1589
Bulongan : 1678

C

Cekoslowakia : 1994
Cepu : 1499

Ceylon : 1232
Ci Sereh : 1962
Ciamis : 1395, 1620
Cianjur : 1425
Cikampek : 2412
Cilacap : 488, 921, 952, 1684
Cina : 1606
Cirebon : 279, 330, 433, 550, 670, 908, 1047, 1125, 1425, 1722
Colombo : 1506, 1198, 1212, 1232

D

Daerah Istimewa Aceh : 880
Deli Serdang : 2402
Den Haag : 1145
Desa Baru : 1945
Desa Lodjedjer : 1532
DI Yogyakarta : 2071, 2129
Djatipetamburan : 2398
Donggala : 1393

E

Ende : 1710
Eropa : 86, 745, 1132, 1291, 1601, 2047
Eropa Barat : 1259

F

Filipina : 1017, 1211, 1215, 1222
Finlandia : 1574
Flores : 268, 465, 2246

G

Gadingredjo : 1941
Garut : 290, 2299
Geneva : 1588
Geser : 246

Gianyar : 577, 2306
Gorontalo : 1961

H

Haruku : 2122
Havana : 1728
Hedjaz : 1815
Hongaria : 1666, 2351
Hongkong : 1312, 1321

I

Inderagiri : 2338, 2354
India : 241, 598, 1203, 1270, 1896, 1994, 2392, 2403, 2463
Indonesia Timur : 359, 647, 1414, 2372
Indramayu : 448, 2258
Inggris : 241, 574, 1204, 1251, 1576,
Iran : 1576, 1994
Irian Barat : 23, 694, 799, 853, 869, 1069, 1138, 1140, 1144, 1145, 1146, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168 1200, 1754,
Italia : 591, 1561

J

Jakarta : 126, 132, 135, 163, 290, 297, 308, 314, 451, 602, 666, 744, 1375, 1450, 1465, 1539, 1638, 1767, 1804, 1817, 1831, 2237, 2353, 2359, 2367, 2370, 2389, 2398, 2092

Jakarta Raya : 397, 405, 449, 759, 993, 1309, 1677, 2099, 2391
Jambi : 290, 692, 1708, 1734, 1984
Jatinegara : 194
Jawa : 163, 459, 758, 891, 1803, 1939
Jawa Barat : 6, 98, 131, 297, 447, 456, 457, 460, 462, 534, 606, 607, 638, 640, 644, 896, 955, 1107, 1627, 1688, 1722, 1899, 1926,
Jawa Tengah : 56, 301, 477, 481, 502, 525, 579, 613, 623, 628, 633, 653, 658, 667, 719, 896, 904, 916, 1094, 1191, 1262, 1400, 1512, 2108. 2325. 2343
Jawa Timur : 53, 137, 291, 398, 485, 499, 517, 610, 643, 699, 792, 1000, 1017, 1372, 1810, 1958, 2325

Jemasih : 1962
Jember : 507, 568
Jenewa : 1696, 1728, 2009
Jepang : 642, 1167, 1176, 1242, 1255, 1270, 1316, 1493, 1575, 1592, 1593, 1650, 1676, 1711, 1799, 2298
Jerman : 241, 280, 1207, 1244
Jerman Barat : 136
Jerman Timur : 1589, 1666
Jogjakarta : 56, 85, 100, 342, 628, 744, 757, 824, 895, 964, 1113,
Jordan : 1206

K

Kadipolo : 1898
Kadungora : 460
Kai : 2122
Kalimantan : 47, 123, 445, 449, 452, 655, 727, 762, 896, 910, 942, 946, 963, 1052, 1469, 1945, 2355
Kalimantan Barat : 55, 306, 527, 759, 897, 1071, 1178, 1933, 1984

Kalimantan Selatan : 640, 709, 1984
Kalimantan Tengah : 987
Kalimantan Timur : 909, 973, 1055, 1434, 1984
Kampung Aree : 2299
Kampung Pulo : 2412
Kangean : 1644
Kapuas : 946, 981
Karachi : 1189
Karanganom : 188
Karangasem : 894
Karangnunggal : 1392
Karawang : 474
Karo : 377, 1923
Kebayoran : 558, 993, 1309,1744, 1946, 2367
Kebayoran Baru : 731
Kebumen : 1523
Kediri : 290, 701, 1249,1502, 1722, 1779, 2268,
Kedu : 719,1262
Kelang : 2122
Kepulauan Anambas : 657
Kepulauan Aru : 2122
Kepulauan Riau : 657, 802, 989
Ketapang : 2304
Korea : 1194, 1195, 1746
Kota Baru : 1707, 1744
Kuala Lumpur : 1571
Kudus : 619
Kuningan Selatan : 593
Kupang : 899, 1707, 1756
Kutai : 1945

L

Labuhan Meringgai : 1712
Lampung : 922, 1835, 1936, 1941, 1947
Lampung Barat 919
Lampung Selatan : 922, 2438
Lampung Utara 922, 935
Langkat : 375, 750, 1397
Langsa : 1707,1763, 1764
Lapangan Banteng : 1831
Lebanon : 1206
Lembang : 1482, 1635
Libya : 1180

Loakulu : 1434
Lombok : 759, 2265, 2315, 2366
Lombok Selatan : 2366
Lombok Tengah : 998
London : 1296, 1566
Luwu : 2336

M

Madiun : 75, 290, 819, 1019, 1030, 1120, 1249, 1984, 2291
Madjalengka : 1828
Madura : 6, 141, 448, 758, 898, 988, 1644, 2266
Magelang : 290
Majang : 1793
Makassar : 290, 314, 519, 526, 675, 1067, 1079, 1154, 1334, 1687, 1868, 1891, 2108, 2275, 2441
Malang : 109, 290, 920, 951, 1095, 1774, 1937
Malaya : 512, 1325, 1854
Malino : 519
Maluku : 263, 421, 496, 694, 892, 936, 963, 1004, 1156, 1887, 1984, 2225
Maluku Tengah : 1117
Maluku Tenggara : 1672
Maluku Utara : 205, 902, 947, 1091, 1686
Manado : 665, 1945, 2198
Mangkunegaran Surakarta 967
Manila : 1205, 1583, 2376
Manipa : 2122
Maryland : 483
Masamba : 2336
Medan 144, 308, 490, 806, 1394, 1436, 1526, 1932, 1934
Mesir : 1183, 1584, 1994, 2463
Meulaboh : 1707
Mexico : 1243
Minahasa : 500, 596, 1335, 1928, 2138, 2256
Moskow : 1245, 1311, 1577, 1916
Muara Bungo 692
Muara Tebo : 1003
Munchen 1221

N

Natuna : 657
Nederland : 241, 275, 277, 550, 1199, 1298, 1716, 2028
New Caledonia : 1755
New Delhi : 1203, 1212
New York : 608, 1174, 1326
Nganjuk : 448, 1331
Ngawi : 294, 1511, 1522
Ngemplak : 1902
NTB : 2090
NTT : 2090
Nusa Laut : 2122
Nusa Tenggara : 924, 969, 978, 2004, 2225
Nusakambangan : 552, 572, 1818

O

Oman : 2458

P

P. Brandan : 1761
Padang : 32, 290, 552, 572, 1046, 1343, 1554, 1740
Padangsidempuan : 558, 1027, 1507, 1959
Pagujaman : 1961
Pakan Baru : 290, 491, 1759
Pakistan : 1189, 1201, 1236, 1270, 1571, 1606, 1896, 2392
Pakong : 1652
Palembang : 290, 297, 318, 637, 1046, 1053, 1308, 2077
Palembang Tengah : 1503
Palopo : 250, 1520
Panarukan : 1644
Pangkal Pinang : 1771, 1550
Pangkalan Brandan : 212, 489
Paris : 1174
Pasaman : 962, 1945
Pasar Lawang : 1772
Pasifik : 2314, 1753
Pasijan : 1652

Pasuruhan : 1773, 1799
Pati : 290, 525, 912, 1902
Pejompongan : 2328
Pekalongan : 101, 547, 904, 909, 931, 1024
Perancis : 565, 1184
Philipina : 1213, 1362
Pinangsore : 1701
Pleret : 1773
Polandia : 1666
Pontianak : 290, 306
Poso : 1707
Praha : 1666
Probolinggo : 556
Pulau Bawean : 1681
Pulau Ceram : 634
Pulau Gebe : 1146
Pulau Tanimbar : 1284
Pulau Tujuh : 518
Purwokerto : 290, 1812

R

Rembang : 953
Republik Ceko Slovakia : 1589, 1994
Republik Uni Soviet Sosialis : 1246, 1594, 1994
Riau : 319, 950, 969, 980, 1984
RRT : 489, 511, 1232, 1242, 1272, 1312, 1348, 1579, 2103, 2403
Rusia : 511, 1311, 1666, 1705

S

Sagu : 1903
Saigon : 1478
Salatiga : 999, 2006
Salem : 656
Samarinda : 290, 1054
Sambas : 1974
Sampit : 2385, 1286
Samudra : 645
Saparua, Pulau : 496, 2122
Saudi Arabia : 241, 1481
Selat Bali : 1509
Semarang : 224, 290, 400, 548, 658, 911, 1081, 1293, 1348, 1388, 1396, 1733, 1736, 1777, 2006, 2108, 2341

Serang : 290, 720
Siak : 933
Siak Sri Indrapura. : 365
Sibolga : 200, 290, 334, 927, 1701, 1707

Sidoarjo : 1087, 1111, 1812,
Simalungun : 1494
Simbuang : 1332
Simitau : 335
Simpang Ampat : 1945
Singapore : 559
Singapura : 1315, 1854
Singaraja : 1784
Slawi : 475
Stockholm : 1915
Subang : 523, 593
Sukabumi : 895, 990, 1479, 1804, 1984
Sukoharjo : 916, 1062, 1521
Sulawesi : 47, 154, 164, 399, 417, 449, 454, 459, 519, 599, 659, 748, 896, 926, 939, 977, 1079, 1891, 1955, 2225
Sulawesi Selatan : 250, 520, 604, 1663, 1689, 1698, 1905, 1935, 2205, 2336
Sulawesi Tengah : 693, 974
Sulawesi Tenggara : 239, 956, 965, 969
Sulawesi Timur : 983
Sulawesi Utara : 524, 693, 995, 1135, 1945, 1949, 1961, 1984, 2205, 2444
Sulu : 509
Sumatera Selatan : 318, 521, 635, 803, 896, 1553, 1688, 1810, 1938, 2117, 2277

Sumatera Tengah : 32, 497, 573, 590, 686, 701, 930, 933, 1945, 1984, 2026
Sumatera Timur : 440, 605, 691, 761, 1495, 1793, 2444
Sumatera Utara : 243, 308, 522, 566, 599, 609, 750, 901, 1416, 1419, 1472, 1494, 1781, 1932, 2121, 2286
Sumatra : 445, 820, 915, 1414
Sumatra Barat : 2389
Sumbawa : 2248, 2315
Sumbawa : 1488
Sunda Kecil : 47, 52, 449, 925, 937, 1501, 1784, 1903, 2004
Sungai Gerong : 1722

Sungailiat : 1788
Surabaya : 290, 294, 297, 514, 562, 602, 632, 713, 1044, 1111, 1302, 1318, 1372, 1722, 1776
Surakarta : 64, 66, 290, 314, 342, 368, 538, 906, 911, 916, 938, 967, 1011, 1014, 1512
Suriname : 1240
Swedia : 1573
Swiss : 1580
Syiria : 1206

T

Taipeh : 1578
Takengon : 503, 1654
Tanah Datar : 941
Tangerang : 731, 1882, 2283
Tanjung Enim : 1788
Tanjung Morawa : 1059
Tanjung Pinang : 290, 312, 319
Tanjung Priuk : 689, 747, 1649
Tapanuli : 235, 351, 605
Tapanuli Selatan : 165, 314, 1959
Tapanuli Tengah : 1797
Tapanuli Utara : 823
Tarakan : 1678
Tarutung : 960
Tasikmalaya : 290, 534, 626, 912
Tegal : 547, 625, 743, 1341
Telukbetung : 290
Temberu : 1652
Tepa : 246
Ternate : 1707
Thailand : 1208, 1218, 1896, 1752
Thailand Selatan : 1214
Timor : 642, 701, 899, 932, 966, 2280
Timor Tengah Selatan : 1049
Tionghoa : 510, 642, 866, 1015, 1132, 11217, 1251, 1253, 1261, 1264, 1272, 1302, 1314, 1315, 1321, 1323, 1324, 1325, 1330, 1854, 1855, 1882, 2391

Tjekoslowakia : 1666
Tjibliung : 1651
Tjiguha : 707

Tjitjurug : 446
Tokyo : 1556, 1917
Tomohon : 290, 314
Tugu : 739
Tunisia : 1180, 1200

U

Una-una : 1651
Uni Sovyet : 1585
USA : 733, 1606

V

Vietminh : 1597
Vietnam : 1589

W

Waru : 1652
Washington : 136, 1193, 1224, 2038
Watubela : 2122
Watugede : 658
Way Tenong : 1944
Wellington : 1849

Y

Yogyakarta : 290, 301, 314, 637, 800, 1795, 1817, 1892, 2071, 2129, 2365, 2415